PEMERINTAH KABUPATEN PASER

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN 2021

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022

BAPPEDALITBANG 2021



PERATURAN BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2022

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2022, dipandang perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang didalamnya terdapat Tujuan, Sasaran dan Fungsi RKPD, Landasan Hukum, Visi dan Misi, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, serta Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah, mempunyai arti yang khusus dan strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam satu tahun kedepan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappedalitbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
7. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

8. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II
POKOK-POKOK PENYUSUNAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Paser dalam periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
BAB VII : Penutup.

(3) Uraian Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
a. acuan penyusunan Renja-PD, berupa program/kegiatan PD dan/atau lintas PD;
b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai penyusunan rancangan APBD Tahun 2022.

Pasal 4

(1) Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan tahun berjalan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila belum tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

(1) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja-PD.

(2) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi bahan bagi penyusunan Renja-PD untuk tahun berikutnya.

(3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Bappedalitbang setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

(1) Kepala Bappedalitbang melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.

(2) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.

(3) Kepala Bappedalitbang melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati untuk disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

ANDI AZIS
NIP 19680816 1998031007

DAFTAR ISI

Hal

Daftar Isi ..... **i**

Daftar Tabel ..... **vii**

Daftar Gambar ..... **xv**

Daftar Diagram ..... **xvi**

Daftar Grafik ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 8

1.3 Hubungan Antar Dokumen 12

1.4 Maksud dan Tujuan 13

1.5 Sistematika Dokumen RKPD 13

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 1

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 1

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi 1

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis 4

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah 14

2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana 15

2.1.1.4 Demografi 15

2.1.1.4.1 Jumlah Penduduk 15

2.1.1.4.2 Struktur Penduduk 16

2.1.1.4.3 Distribusi Penduduk 17

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 19

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 19

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB 20

2.1.2.1.2 Inflasi 22

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita 22

2.1.2.1.4 Angka Kemiskinan 24

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka 27

2.1.2.1.6 Indeks Gini 28

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia 28
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 30
2.1.2.2.1 Pendidikan 30
2.1.2.2.2 Kesehatan 36
2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan 41
2.1.2.2.4 Pertanahan 42
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga 42
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 44
2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44
2.1.3.1.1 Pendidikan 44
2.1.3.1.2 Kesehatan 46
2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum 51
2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 63
2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 74
2.1.3.1.6 Sosial 76
2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 77
2.1.3.2.1 Tenaga Kerja 77
2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 79
2.1.3.2.3 Pangan 80
2.1.3.2.4 Pertanahan 82
2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup 84
2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 90
2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa 92
2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 92
2.1.3.2.9 Perhubungan 93
2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informasi 102
2.1.3.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 103
2.1.3.2.12 Penanaman Modal 103
2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga 105
2.1.3.2.14 Statistik 105

2.1.3.2.15 Kebudayaan 105
2.1.3.2.16 Perpustakaan 105
2.1.3.3 Urusan Pilihan 106
2.1.3.3.1 Pariwisata 106
2.1.3.3.2 Pertanian 107
2.1.3.3.3 Kehutanan 114
2.1.3.3.4 Perdagangan 115
2.1.3.3.5 Perindustrian 116
2.1.3.4 Penunjang Urusan 117
2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan 117
2.1.3.4.2 Keuangan 117
2.1.3.4.3 Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia ... 119
2.1.3.4.4 Pengawasan 122
2.1.3.4.5 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat 123
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 123
2.1.4.1 Aspek Daya Saing 123
2.1.4.2 Fokus Iklim Investasi 125
2.1.4.3 Angka Kriminalitas 126
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia 126
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 127
2.2.1 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Tahun 2022 127
2.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 142
2.2.1.1.1 Urusan Pendidikan 142
2.2.1.1.2 Urusan Kesehatan 143
2.2.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 144
2.2.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 145
2.2.1.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 146
2.2.1.1.6 Urusan Sosial 147
2.2.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 147
2.2.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja 147

2.2.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 148
2.2.1.2.3 Urusan Pangan 148
2.2.1.2.4 Urusan Pertanahan 149
2.2.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup 149
2.2.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 149
2.2.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa ... 150
2.2.1.2.8 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 150
2.2.1.2.19 Urusan Perhubungan 151
2.2.1.2.10 Urusan Komunikasi dan Informatika 151
2.2.1.2.11 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 151
2.2.1.2.12 Urusan Penanaman Modal 152
2.2.1.2.13 Urusan Kepemudaan dan Olah Raga 152
2.2.1.2.14 Urusan Statistik 153
2.2.1.2.15 Urusan Kebudayaan 153
2.2.1.2.16 Urusan Perpustakaan 153
2.2.1.2.17 Urusan Kearsipan 154
2.2.1.3 Urusan Pilihan 154
2.2.1.3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan 154
2.2.1.3.2 Urusan Pariwisata 155
2.2.1.3.3 Urusan Pertanian 155
2.2.1.3.4 Urusan Kehutanan 155
2.2.1.3.5 Urusan Perdagangan 156
2.2.1.3.6 Urusan Perindustrian 156
2.2.1.3.7 Urusan Transmigrasi 156
2.2.1.3.8 Urusan Penelitian dan Pengembangan 157
2.2.1.4 Urusan Penunjang 157
2.2.1.4.1 Urusan Administrasi Pemerintahan 157
2.2.1.4.2 Urusan Pengawasan 158
2.2.1.4.3 Urusan Perencanaan 159
2.2.1.4.4 Urusan Keuangan 159

2.2.1.4.5 Urusan Kepegawaian 160
2.2.1.4.6 Urusan Penelitian dan Pengembangan 160
2.2.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 160
2.2.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 160
2.2.4 Tindak Lanjut 165
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 166
2.3.1 Pendidikan 185
2.3.2 Kesehatan 185
2.3.3 Infrastruktur Perhubungan 186
2.3.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman 186
2.3.5 Lingkungan Hidup 186
2.3.6 Kependudukan dan Catatn Sipil 188
2.3.7 Tenaga Kerja 188
2.3.8 Koperasi dan UKM 188
2.3.9 Kebudayaan 189
2.3.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 189
2.3.11 Komunikasi dan Informasi 189
2.3.12 Ketahanan Pangan 190
2.3.13 Energi dan Sumber Daya Mineral 190
2.3.14 Pariwisata 191
2.3.15 Perdagangan 191
2.3.16 Industri 192
2.3.17 Transmigrasi 192
2.3.18 Pertanian 192
2.3.19 Kehutanan 193
2.3.20 Kelautan dan Perikanan 193

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 1
3.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 3
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 4
3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 4
3.1.1.3 Besaran Nilai PDRB 8

3.1.1.4 PDRB Per Kapita 12
3.1.1.5 Inflasi 13
3.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 13
3.1.1.7 Pertumbuhan Penduduk 14
3.1.1.8 Kemiskinan 15
3.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2022 16
3.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto 17
3.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 20
3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 20
3.2.2.1 Pendapatan Daerah Tahun 2016-2022 21
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 23
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah 28
3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 36
3.2.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 36
3.2.4.2 Kebutuhan Investasi 38
3.2.4.3 Pendanaan Pembangunan Melalui CSR/TSP Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun 2021 39
3.2.5 Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 Di Daerah 43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 1
4.1.1.1 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan 2
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 4
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022 11
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah 31

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 38

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1

BAB VII PENUTUP

7.1 Penutup 1

Daftar Tabel

		Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser	2
Tabel 2.2	Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser	4
Tabel 2.3	Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser	6
Tabel 2.4	Jumlah sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser	7
Tabel 2.5	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija di Kabupaten Paser 2018-2020	10
Tabel 2.6	Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2016 – 2020	11
Tabel 2.7	Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2016 - 2020	11
Tabel 2.8	Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kab. Paser Tahun 2019 - 2020	12
Tabel 2.9	Produksi Perkebunan Rakyat 2019 - 2020	12
Tabel 2.10	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi	13
Tabel 2.11	Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser	15
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020	16
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2015 - 2020	17
Tabel 2.14	Kepadatan Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020	18
Tabel 2.15	PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2019 (Jutaan Rupiah)	20
Tabel 2.16	Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB	21
Tabel 2.17	Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2019	22
Tabel 2.18	PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)	23
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 2015-2020	24
Tabel 2.20	Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser Tahun 2015-2020	27

Tabel 2.21 Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser 28
Tabel 2.22 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020 30
Tabel 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2018 34
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 35
Tabel 2.25 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2020 36
Tabel 2.26 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 36
Tabel 2.27 Jumlah Angka Kematian Bayi 37
Tabel 2.28 Jumlah Angka Kematian Balita 38
Tabel 2.29 Jumlah Angka Kematian Ibu 39
Tabel 2.30 Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 . 40
Tabel 2.31 Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018 40
Tabel 2.32 Tingkat partisipasi angkatan kerja Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 41
Tabel 2.33 Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan di Kabupaten Paser Tahun 2018-2020 42
Tabel 2.34 Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2015-2020 43
Tabel 2.35 Jumlah Perkumpulan Kesenian, Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Jumlah Sarana Olahraga Di Kabupaten Paser Tahun 2020 43
Tabel 2.36 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 45
Tabel 2.37 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020 46
Tabel 2.38 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 47
Tabel 2.39 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk Tahun 2016–2020 48

Tabel 2.40 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016–2020 49

Tabel 2.41 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 49

Tabel 2.42 Kategori Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2019 50

Tabel 2.43 Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 – 2020 51

Tabel 2.44 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tahun 2016 - 2020 52

Tabel 2.45 Persentase Kondisi Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Menurut Kabupaten/Kota 52

Tabel 2.46 Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Paser 53

Tabel 2.47 Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019 - 2020 54

Tabel 2.48 Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser 55

Tabel 2.49 Tabel Usulan Sumber Air Baku Terpilih 55

Tabel 2.50 Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser 57

Tabel 2.51 Persentase Akses Air Bersih Kabupaten Paser Tahun 2017-2019 59

Tabel 2.52 Presentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Kabupaten Paser Tahun 2020 60

Tabel 2.53 Jumlah Sambungan Rumah 61

Tabel 2.54 Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Minum di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 62

Tabel 2.55 Presentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020 ... 63

Tabel 2.56 Presentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS Kabupaten Paser Tahun 2020 64

Tabel 2.57 Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 65

Tabel 2.58 Data Infrastruktur Persampahan Terbangun 67

Tabel 2.59 Data Rencana Pembangunan Infrastruktur Persampahan 67

Tabel 2.60 Data armada angkutan sampah 68

Tabel 2.61 Data rencana kebutuhan armada angkutan sampah 67

Tabel 2.62 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2015-2018 69

Tabel 2.63 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan berpotensi kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2017-2020 70

Tabel 2.64 Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser 70

Tabel 2.65 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 71

Tabel 2.66 Capaian Penanganan rumah tidak layak huni Tana Paser Tahun 2016-2020 73

Tabel 2.67 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Kepemilikan Tempat tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2015-2019 73

Tabel 2.68 Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2019 74

Tabel 2.69 Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2018 75

Tabel 2.70 Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2020 75

Tabel 2.71 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersedia 76

Tabel 2.72 Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2018 - 2020 77

Tabel 2.73 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser 78

Tabel 2.74 Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2019 80

Tabel 2.75 Luas Panen, Produksi Padi dan Ladang Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2020 80

Tabel 2.76 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2015-2019 81

Tabel 2.77 Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2016 – 2020 83

Tabel 2.78 Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang Kabupaten Paser s.d Tahun 2020 84

Tabel 2.79 Indeks Kualitas Air Di Kabupaten Paser 86
Tabel 2.80 Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Paser 87
Tabel 2.81 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km2) Di Kabupaten Paser 87
Tabel 2.82 Data Emisi Rumah Kaca 88
Tabel 2.83 Rekapitulasi Bencana Di Kabupaten Paser Tahun 2019 89
Tabel 2.84 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2018-2020 90
Tabel 2.85 Jumlah, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, Tahun 2020 90
Tabel 2.86 Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas Menurut Status Perkawinan di Kab Paser Tahun 2015 – 2020 93
Tabel 2.87 Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2020 94
Tabel 2.88 Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum dan Pribadi) 95
Tabel 2.89 Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2020 96
Tabel 2.90 Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi 97
Tabel 2.91 Jumlah Kejadian Kecelakaan 98
Tabel 2.92 Jumlah Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka dan kondisinya 98
Tabel 2.93 Banyaknya Barang Bongkar dan Muat di Pelabuhan Kabupaten Paser (Ton/M3) 100
Tabel 2.94 Jenis Surat Kabar Yang Beredar Di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2018 102
Tabel 2.95 Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM di Kabupaten Paser 2016 – 2020 103
Tabel 2.96 Jumlah Investor 2016 – 2020 104
Tabel 2.97 Jumlah Nilai Investasi 2016 – 2020 104
Tabel 2.98 Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2016 -2020 106

Tabel 2.99 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2015 – 2020 107

Tabel 2.100 Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser, Tahun 2016 – 2020 108

Tabel 2.101 Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status, Tahun 2016-2020 (Ha) 109

Tabel 2.102 Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Kondisi, Tahun 2016 - 2020 (Ha)..... 110

Tabel 2.103 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 (Ton) 111

Tabel 2.104 Populasi Ternak Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020..... 112

Tabel 2.105 Produksi Telur Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 (butir)..... 113

Tabel 2.106 Produksi Ternak Yang Dipotong Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 .. 113

Tabel 2.107 Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi Tahun 2016-2020 (Ton) 114

Tabel 2.108 Luas Budidaya Tambak, Kolam, Keramba, Rumput Laut Kabupaten Paser Tahun 2016-2020..... 114

Tabel 2.109 Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha) di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020..... 115

Tabel 2.110 Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang di Kabupaten Paser Pada Tahun 2016-2020..... 115

Tabel 2.111 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018 116

Tabel 2.112 Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser..... 118

Tabel 2.113 Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020..... 119

Tabel 2.114 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020 120

Tabel 2.115 Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020 122

Tabel 2.116 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2016 – 2020 124

Tabel 2.117 Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2016 – 2020..... 125

Tabel 2.118 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020 125
Tabel 2.119 Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2020 126
Tabel 2.120 Penjabaran Program RKPD 2022 sesuai dengan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser 128
Tabel 2.121 Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Paser Tahun 2020 (Menurut Urusan) 135
Tabel 2.122 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 (Semester II) 140
Tabel 2.123 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2020 167
Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022 2
Tabel 3.2 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 5
Tabel 3.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2015-2019 6
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020 (Persen) 7
Tabel 3.5 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2015-2019 8
Tabel 3.6 PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah) 9
Tabel 3.7 PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah) 10
Tabel 3.8 Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 14
Tabel 3.9 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Paser (%) 2016-2020 18
Tabel 3.10 Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 22
Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2022 27
Tabel 3.12 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2019 32
Tabel 3.13 Rencana Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 33

Tabel 3.14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser 34

Tabel 3.15 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dan Kabupaten Paser 35

Tabel 3.16 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Paser Tahun 2022 37

Tabel 3.17 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020 37

Tabel 3.18 Rencana Kerja Corporate Social Responsibility (CSR/TSP) Kabupaten Paser Tahun 2021 40

Tabel 3.19 Realisasi Corporate Social Responsibility (CSR/TSP) Kabupaten Paser Tahun 2020 41

Tabel 4.1 Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022 1

Tabel 4.2 Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen) 4

Tabel 4.3 Tujuan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 7

Tabel 4.4 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. 8

Tabel 4.5 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022 12

Tabel 5.1 Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rahun 2022 1

Tabel 5.2 Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan RPJMD Tahun Pelaksanan 5

Tabel 5.3 Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 40

Tabel 6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser 1

Tabel 6.2 Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 2

Daftar Gambar

Hal

Gambar I.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD. 7

Gambar I.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD 8

Gambar I.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah dan PD 12

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser 3

Gambar 2.2 Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm) 8

Gambar 2.4 Penilaian Penyelenggaraan SPIP 122

Gambar 4.1 Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022 2

Gambar 4.2 Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 6

Daftar Diagram

Hal

Diagram 2.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Paser Tahun 2020 93

Diagram 2.2 Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020 121

Diagram 4.1 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program RKPD Tahun 2022 34

Diagram 4.2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program RKPD Tahun 2022 37

Diagram 4.3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program RKPD 2022 40

Diagram 4.4 Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional Tahun 2022 42

Diagram 4.5 Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 43

Daftar Grafik

Hal

Grafik 2.1 Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan tahun 2020 18

Grafik 2.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional 25

Grafik 2.3 Analisis Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Paser Tahun 2015-2020 26

Grafik 2.4 Analisis Relevansi Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser Tahun 2015-2020 27

Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 29

Grafik 2.6 Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser Tahun 2020 31

Grafik 2.7 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018 32

Grafik 2.8 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 33

Grafik 2.9 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 34

Grafik 2.10 Jumlah Angka Kematian Bayi 37

Grafik 2.12 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020 45

Grafik 2.13 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 72

Grafik 2.14 Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2018 74

Grafik 2.15 Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar di Kabupaten Paser 2015-2020 82
Grafik 2.16 Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2014 – 2018 83
Grafik 2.17 Jumlah Investor 2014 – 2020 104
Grafik 2.18 Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2014 – 2020 107
Grafik 2.19 Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2019 108
Grafik 2.20 Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 116
Grafik 2.21 Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020 119
Grafik 2.22 Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020 121
Grafik 3.1 PDRB Perkapita Kabupaten Paser 12
Grafik 3.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2020 14
Grafik 3.3 Penduduk Miskin Di Kabupaten Paser (%) 15
Grafik 3.4 Garis Kemiskinan Kabupaten Paser 16
Grafik 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2016-2020 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Kabupaten Paser, selain itu juga berdasarkan RPJMD 2021-2025. Memasuki RPJMD tahun ke-5 dari RPJPD 2005-2025, masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan akibat pandemic Covid - 19. Salah satunya terkait Pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal dan memadai. Selain itu juga masih besarnya ketergantungan masyarakat terhadap eksplorasi Sumber Daya Alam khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk meningkatkan aktivitas perekonomian daerah seperti pertanian, peternakan,perkebunan, industri pengolahan dan lain-lain yang sebenarnya berpotensi besar untuk menambah Pendapatan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang Kabupaten Paser dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Paser. Pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian

operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Praktek umum perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini : 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) Menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan pada tahap diatasnya; dan 4) Menyusun konsep strategi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Lebih lanjut RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemerintah Kabupaten Paser memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Sementara itu RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPD

   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

   a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RKPD;
   b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD;
   c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
   d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

2. Penyusunan rancangan awal RKPD

   Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD.

   a. Perumusan rancangan awal RKPD.

      Dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

      a) Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
      b) Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
      c) Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
      d) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
      e) Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
      f) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
      g) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
      h) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;

i) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
j) Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
k) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Penyajian rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a) Pendahuluan;
b) Gambaran umum kondisi daerah;
c) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e) Rencana kerja dan pendanaan daerah
f) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
g) Penutup.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Verifikasi Renja SKPD sebagaimana dimaksud adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja, dan dana indikatif pada setiap rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah di Kabupaten Paser sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Kabupaten Paser.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membahas rancangan RKPD. Musrenbang RKPD dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD terdiri atas Musrenbang RKPD Kabupaten Paser dan Musrenbang RKPD di kecamatan. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Paser dirumuskandalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Paser. Pembahasan Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka:

a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Paser, dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPDKabupaten Paser merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD Kabupaten Paser menjadi rancangan akhir RKPD Kabupaten Paser berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Paser.

6. Penetapan RKPD

RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKP dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah.

Secara umum, tata urutan dalam penyusunan RKPD disajikan dalam diagram alir di gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah pada Tahap Penyusunan RKPD

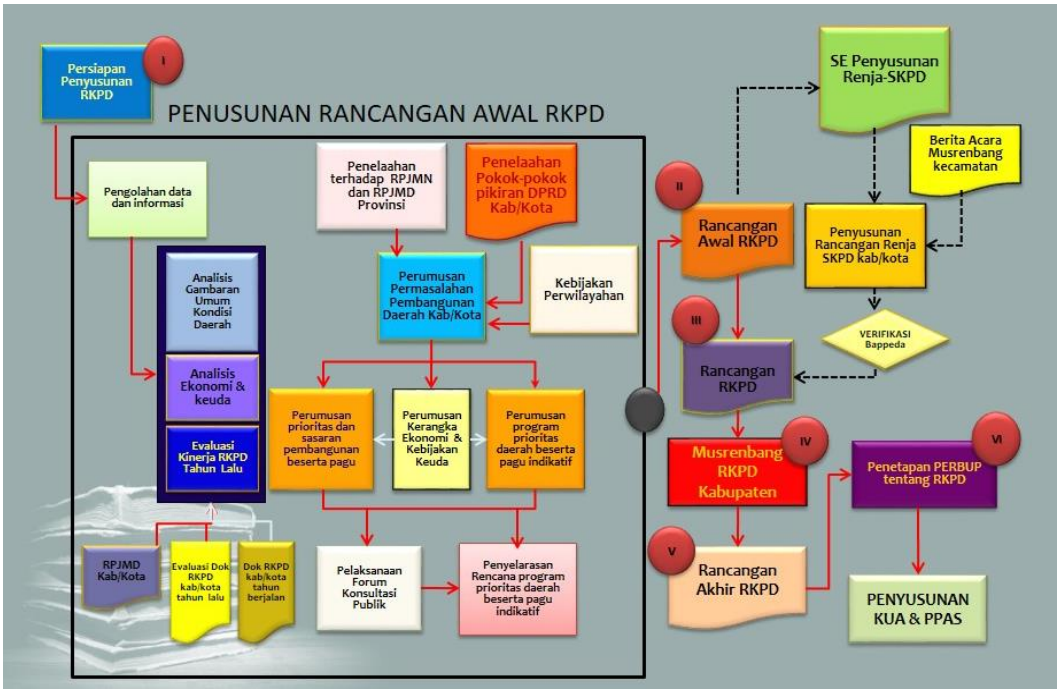

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengaju pada RPJMN Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan :

1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah Kabupaten Paser dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Paser dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Paser.

Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah ditingkat kabupaten dengan prioritas pembangunan daerah ditingkat provinsi dan prioritas pembangunan daerah ditingkat nasional dilakukan dengan pengacuan RKP pada RPJMN sesuai dengan tahapan yang terkait. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam gambar 1.2 berikut ini :

Gambar 1.2

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten Paser sampai dengan Penyusunan APBD

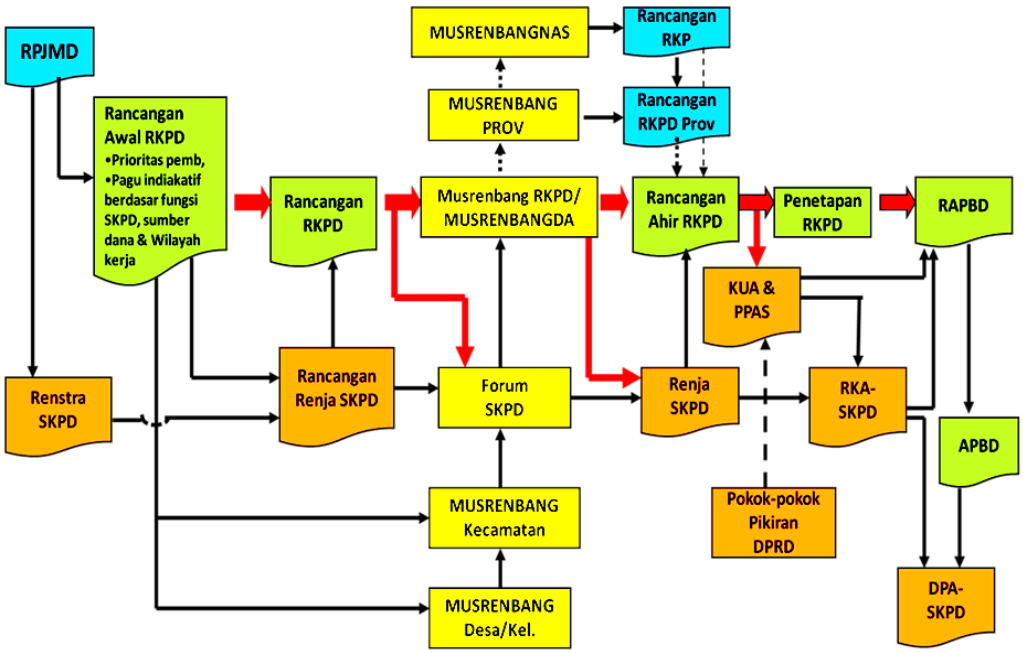

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 17 Th. 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
22. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
26. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023;

34. Peraturan Daerah Kab. Paser No. 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020, Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021; dan
36. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada gambar 1.3 berikut ini

Gambar 1.3
Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional. Daerah dan PD

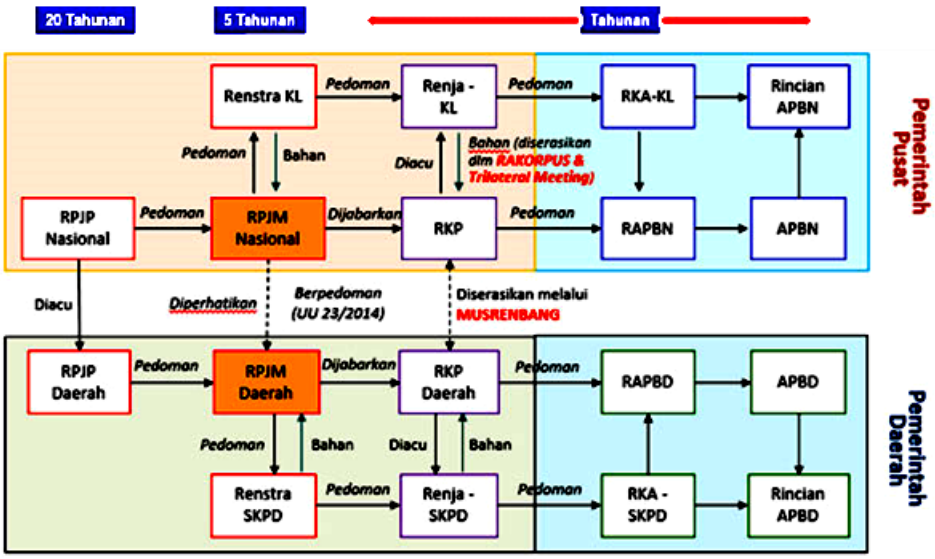

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan

masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Adapun tujuannya penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah Sebagai Berikut :

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Paser dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan;
2. Memberikan gambaran terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Paser;
3. Sebagai Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2022;
4. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Tahun 2022.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. **Bab I. Pendahuluan**

   Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. **Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

   Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

3. **Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. **Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

   Memuat Tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2022.

5. **Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah**

   Memuat rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah (PD), indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

6. **Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan**

   Memuat realisasi penyerapan anggaran dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun anggaran 2020.

7. **Bab VII. Penutup**

   Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2022.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran daerah yang mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah Kabupaten Paser.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Paser secara geografis terletak pada $0^0$48’29,44’’—$2^0$37’24,21’’ Lintang Selatan dan $115^0$37’0,77’’-$118^0$1’19,82’’ Bujur Timur. Kabupaten Paser terletak di ujung paling selatan dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten yang terletak di ujung timur Pulau Kalimantan ini memiliki luas wilayah ± 11.603, 94 Km2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara
2. Sebelah Timur Laut : Berbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat)
4. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Kotabaru (Prov. Kalimantan Selatan)
5. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan)
6. Sebelah Barat Daya : Berbatasan dengan Kabupaten Balangan (Provinsi Kalimantan Selatan)
7. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)
8. Sebelah Barat Laut : Berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah)

Selat Makassar yang berada di bagian timur Kabupaten Paser memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser).

Secara Administratif Kabupaten Paser terdiri dari 10 Kecamatan yang dibagi menjadi 139 Desa dan 5 Kelurahan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan Gambar 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Paser

No.	Kecamatan	Daratan (Km^2)	Perairan (Km^2)	Jumlah (Km^2)	Persentase (%)
1	Pasir Belengkong	836,62	153,49	990,11	8,53
2	Tanah Grogot	326,95	8,63	335,58	2,89
3	Batu Engau	1.501,61	5,65	1.507,26	12,99
4	Tanjung Harapan	480,40	233,65	714,05	6,15
5	Muara Samu	855,25	0,00	855,25	7,37
6	Kuaro	596,76	150,54	747,30	6,44
7	Batu Sopang	1.111,38	0,00	1.111,38	9,58
8	Muara Komam	1.753,40	0,00	1.753,40	15,11
9	Long Ikis	1.138,37	65,85	1.204,22	10,38
10	Long Kali	2.250,44	134,95	2.385,39	20,56
Jumlah		**10.851,18**	**752,76**	**11.603,94**	**100,00**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

Berdasarkan data di atas kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah kecamatan Long Kali, yakni sekitar 2.385,39 Km^2 atau 20,56% dari luas Kabupaten Paser, sedangkan kecamatan yang luas wilayahnya terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot, yaitu sekitar 335,58 Km^2 atau 2,89% dari luas total Kabupaten Paser. Hampir sepertiga lebih lautan berada di Tanjung Harapan, kecamatan yang terletak paling selatan Kabupaten Paser. Secara geografis, Kabupaten Paser sangat diuntungkan karena memiliki

karakteristik wilayah daratan dan lautan. Luas wilayah laut sekitar 6,5% dari daratan, tetapi terhubung langsung dengan selat makassar yang strategis untuk perhubungan kawasan timur Indonesia.

Gambar 2.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Paser

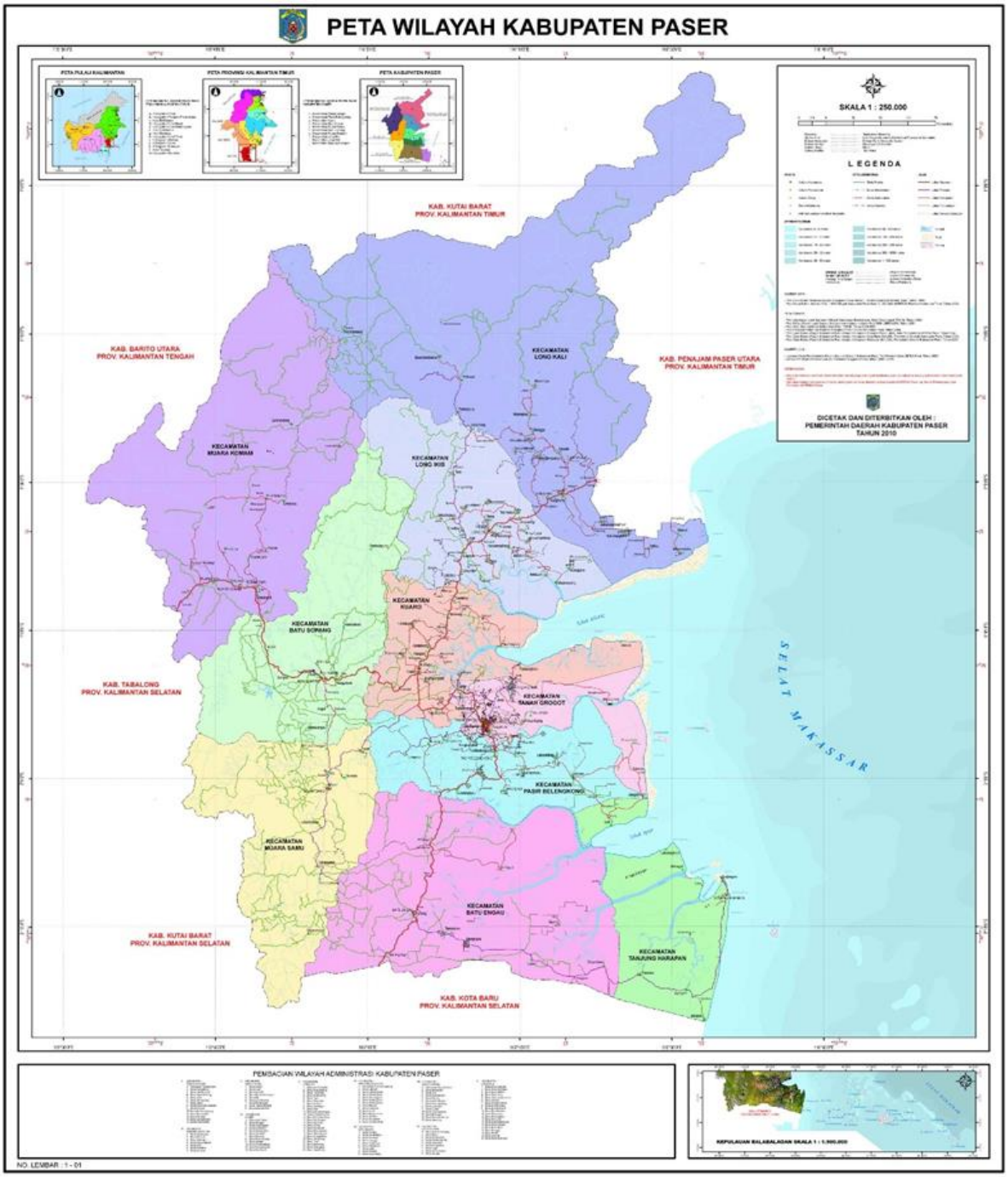

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

A. Posisi Astronomis

Posisi astronomis Kabupaten Paser adalah 0o45'18,37''2o27'20,82'' Lintang Selatan (LS) dan 115o36'14,5''-166o57'35,03'' Bujur Timur (BT).

B. Posisi Geostrategi

Kabupaten Paser secara geostrategic dilintasi oleh jalan arteri primer (jalan negara/nasional) yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Jarak terjauh antar ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten yakni sejauh 86 km yang kurang lebih dapat memakan waktu empat atau lima jam dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan Kabupaten Paser

No	Ibu Kota Kabupaten ke Kota Kecamatan	Jarak (km)	Sarana yang dilalui
1	Tanah Grogot - Tanah Grogot	0	-
2	Tanah Grogot - Muser (Kec. Muara Samu)	60	Darat
3	Tanah Grogot - Batu Engau	55	Darat
4	Tanah Grogot - Tanjung Aru (Kec. Tanjung Harapan)	66/57	Laut/Darat
5	Tanah Grogot - Pasir Belengkong	5	Darat
6	Tanah Grogot – Kuaro	28	Darat
7	Tanah Grogot - Batu Sopang	58	Darat
8	Tanah Grogot - Long Ikis	60	Darat
9	Tanah Grogot - Muara Komam	86	Darat
10	Tanah Grogot - Long Kali	77	Darat

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

Dari sisi jalur laut, Selat Makassar di bagian timur kawasan memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran nasional maupun internasional. Pelabuhan laut utama di Kabupaten Paser dipusatkan di Pelabuhan Teluk Adang terletak 12 Km ke arah utara ibukota Kabupaten (Kota Tana Paser), sedangkan Kota

Tana Paser berjarak lebih kurang 145 Km dari Kota Balikpapan, atau 260 Km dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur (Kota Samarinda).

C. Kondisi Kawasan

Kondisi umum daerah Paser adalah dataran rendah berbukit dan kawasan pesisir di beberapa kecamatan. Lebih detail, kawasan Kabupaten Paser akan digambarkan dalam sub bab berikut yang meliputi kondisi topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi.

D. Topografi

Dengan kontur wilayah pantai dan pegunungan, secara garis besar topografi Kabupaten Paser dibagi dalam dua wilayah :

a. Wilayah **Timur** merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang dengan ketinggian berkisar 0-1.000 m diatas permukaan laut yang membentang dari utara sampai selatan yang terdiri dari rawa-rawa dan daerah aliran sungai dengan luas 967.100 Ha (69,52% dari Luas daratan). Dengan jalan negara Penajam-Kuaro dan Kerang Dayu sebagian batas topografi;
b. Wilayah **Barat** merupakan daerah dataran tinggi dan bergelombang, berbukit dan bergunung berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan luas 424.100 Ha (30,48% dari luas daratan). Di wilayah ini terdapat beberapa puncak pegunungan seperti Gunung Serumpaka dengan ketinggian 1.380 m, Gunung Lumut 1.233 m, Gunung Narujan atau Gunung Rambutan dan Gunung Halat.

Kondisi wilayah Kabupaten Paser memiliki variasi topografis. Wilayah dataran rendah berada di sebelah timur, berlokasi di wilayah pesisir. Terdapat beberapa lokasi yang memiliki dataran tinggi walaupun dari segi luasan kurang signifikan, yaitu di kawasan Muara Samu dan Batu Sopang. Pada bagian barat wilayah kabupaten, terdapat deretan pebukitan, dengan ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, yang menjadi bagian dari Pegunungan Meratus, salah satu dari empat pegunungan utama di Kalimantan.

Keberagaman tersebut terefleksikan pada keragaman kelas kemiringan lereng. Pada wilayah pantai (Kecamatan Tanjung Harapan, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro) dan pada sebagian dataran tinggi di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang, dominasi kelas kemiringan lereng datar sangat jelas. Cakupan wilayah seperti ini memungkinkan dikembangkan pertanian pangan (semusim) tanpa pengeluaran

modal yang signifikan. Kecamatan Muara Komam, Batu Sopang dan Muara Samu merupakan wilayah yang memiliki dominasi kemiringan lereng terjal sehingga membatasi kegiatan perekonomian berbasis pertanian semusim, Dataran rendah pada kawasan timur Kabupaten Paser memiliki bentang lahan yang relatif berbeda. Dengan demikian, klasifikasi lereng di Kabupaten Paser dibagi menjadi 4 (empat) kategori kemiringan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Daerah Berdasarkan Kondisi Kemiringan Kabupaten Paser

No.	Kemiringan lereng (%)	Kawasan
1	Lereng 0-2 %	Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Kuaro yang terletak pada bagian pantai menghadap Selat Makasar
2	Lereng 2-15 %	Kecamatan Kuaro, Kecamatan Pasir Belengkong dan Kecamatan Tanah Grogot
3	Lereng < 40 %	Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Long Ikis
4	Lereng > 40 %	Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Long Kali dan Kecamatan Muara Komam

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2019

Wilayah Kecamatan Batu Engau juga didominasi oleh dataran aluvial, diikuti oleh dataran bergelombang dan hogback. Dataran aluvial juga ditemukan di Kecamatan Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis dan Long Kali, walaupun dalam luasan yang terbatas. Bentang lahan lain yang penting diperhatikan adalah dataran banjir. Kalimantan, termasuk di dalamnya Kabupaten Paser, memiliki curah hujan yang tinggi. Kombinasi tersebut penting diperhatikan dalam perencanaan wilayah, terutama pemanfaatan lahan untuk permukiman. Mengingat Long Kali merupakan salah satu sistem sungai yang terbesar di Kabupaten Paser, dataran banjir dijumpai mendominasi lingkungan sekitar Sungai Long Kali. Dataran banjir juga dijumpai di perbatasan Kecamatan Tanah Grogot dan Pasir Belengkong. Bagian barat Kabupaten Paser didominasi oleh sistem pegunungan atau pebukitan struktural terutama di Kecamatan Muara Samu dan Batu Sopang.

E. Geologi

Secara eksploratif Kabupaten Paser terdiri dari beberapa jenis tanah:

a. Tanah Aluvial/Gambut, Jenis tanah ini ditemukan di bagian timur, menyebar di daerah dataran rendah, landai dan bergelombang pada lembah-lembah aliran sungai dan pantai dengan luas ± 182.250 Ha;
b. Tanah Podzolik Merah Kuning, jenis tanah ini terdapat dibagian barat, pada daerah-daerah bergelombang dan berbukit pada kiri dan kanan jalan poros Long Kali, Kuaro, menyebar ke Selatan di bagian Barat Kecamatan Pasir Belengkong dan Selatan Kecamatan Tanjung Harapan dengan Luas ± 517.850 ha;
c. Tanah Campuran/Kompleks, yaitu Jenis tanah yang terdiri dari tanah Podzolik Coklat/Andosol ± 32.750ha, Podzolik/Litosol ± 74.000ha dan Organosol/Gambut ± 56.000 ha, Podsolik ± 422.000 ha dan Regosol/Gleysol/Mediteran 108.400 Ha yang menyebar di bagian barat dan Utara Kabupaten Paser.

F. Hidrologi

Kawasan rawa banyak dijumpai pada Kecamatan Tanah Grogot, Kuaro, Long Ikis, Long Kali dan Pasir Belengkong. Hampir keseluruhan wilayah Kecamatan Tanjung Harapan didominasi oleh dataran aluvial yang dipengaruhi sedimen jaringan sungai.

G. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Paser memiliki banyak sungai yang tersebar di seluruh kawasan. Berdasarkan data yang dihimpun, kondisi hidrologi di Kabupaten Paser dipengaruhi oleh keberadaan beberapa sungai besar yaitu dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini:

Tabel. 2.4
Jumlah sungai berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Paser

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
1	Batu Sopang	6
2	Muara Samu	8
3	Batu Engau	35
4	Tanjung Harapan	15
5	Pasir Belengkong	14
6	Tanah Grogot	12

No	Kecamatan	Jumlah Sungai
7	Kuaro	41
8	Long Ikis	19
9	Muara Komam	17
10	Long Kali	17
Jumlah		**184**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2021

Adapun beberapa sungai yang cukup besar dan panjang tersebut antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai tempat menangkap ikan dan sumber pengairan juga berfungsi sebagai sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

H. Sungai, Danau dan Rawa

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Paser memiliki beberapa sungai yang cukup besar dan panjang, antara lain Sungai Telake (430 Km) dan Sungai Kandilo (615 Km), Sungai Apar Besar (95 Km) dan Sungai Kerang (190 Km), yang semuanya bermuara ke Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut selain berfungsi sebagai sumber irigasi juga digunakan oleh masyarakat untuk tempat menangkap ikan, dan sarana perhubungan dari dan menuju daerah pedalaman.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kondisi sungai, danau dan rawa data ini penting untuk diketahui sebagai bahan untuk mempertimbangkan potensi pengembangan pertanian dan perkebunan.

I. Debit Air

Data debit air sungai berguna untuk mengetahui potensi sekaligus kemungkinan adanya ancaman dari sungai. Potensi itu antara lain, penggunaan debit air sungai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Sekaligus di sisi lain, kemungkinan adanya ancaman antara lain berupa bencana banjir jika terdapat debit air sungai yang berlebihan dan tidak terkelola dengan baik.

J. Klimatologi

Kabupaten Paser beriklim tropis basah dengan suhu rataan sepanjang tahun adalah sekitar 26°C, sedangkan rata-rata curah hujan mencapai 206,82 mm per

tahun. Didukung kondisi topografi yang beragam kondisi curah hujan berbeda disetiap daerah. Pada Tahun 2020, rata-rata curah hujan adalah 206,82 mm, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan rata-rata curah hujan pada tahun 2019 yakni 173,96 mm. Adapun pola curah hujan dalam lima tahun terakhir, rata-rata curah hujan cenderung berfluktuasi.

Gambar 2.2
Rata-rata Curah Hujan per Tahun (mm)

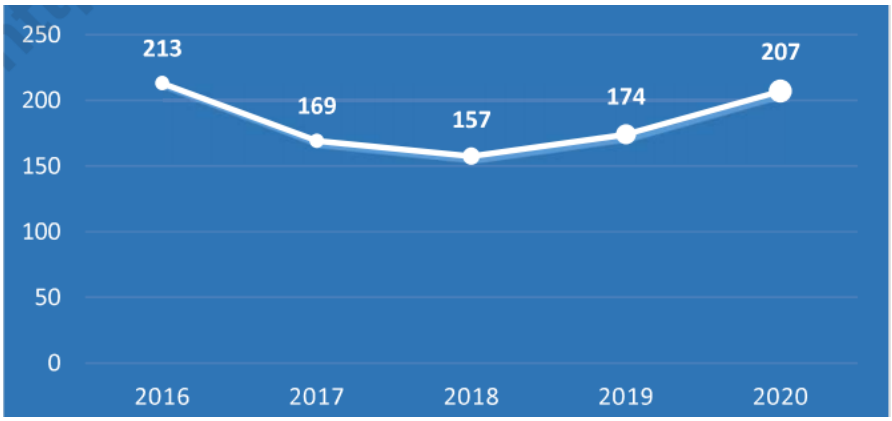

Sumber : Data sektoral Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser, 2020

Selain dapat menggambarkan karakter cuaca, curah hujan menentukan kekuatan sumber daya air daerah terutama kemampuan untuk mengelola sektor pertanian. Di kecamatan yang memiliki rata-rata curah hujan yang kurang, misalnya di Kecamatan Pasir Belengkong dapat dicarikan alternatif saluran irigasi yang mampu menyuplai kebutuhan air bagi lahan pertanian.

K. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Paser terbagi menjadi 2 (dua) kawasan, yaitu kawasan non budidaya dan kawasan budidaya. Untuk kawasan non budidaya meliputi:

a. **Kawasan Lindung**, kawasan ini seluas 116.952 ha terdapat di Kecamatan Muara Komam bagian Barat, Timur dan Selatan, Long Kali bagian Timur, Batu Sopang bagian Barat dan Selatan, dan Long Ikis bagian Barat ;
b. **Kawasan Sempadan Pantai**, kawasan ini sepanjang ± 191,93 km, ditetapkan di sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Batas Sempadan dihitung ± 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah daratan;
c. **Kawasan Sempadan Sungai**, kawasan ini ditetapkan di sepanjang sungai ± 100 meter di kiri kanan sungai besar dan ± 50 meter dari kiri kanan anak sungai.

Sedangkan kawasan budidaya adalah areal penggunaan lahan yang dimanfaat secara produktif misalnya kawasan produksi hutan, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Adapun Penggunaan lahan untuk budidaya sesuai potensi daerah adalah sebagai berikut:

a. **Kawasan Pertanian Tanaman Pangan**

Kawasan ini utamanya ditanami dengan padi sawah, padi ladang dan palawija. Keberadaan sawah irigasi tersebar di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong dan Tanah Grogot. Sedangkan tanaman padi ladang banyak ditemukan di Kecamatan Batu Engau, Muara Komam, Muara Samu, Long kali dan Batu Sopang. Tanaman pangan di Kabupaten Paser lebih didominasi komoditi padi, baik padi sawah maupun padi ladang dengan areal pengembangan mencapai kurang lebih 7.916 hektar. Disamping itu beberapa kecamatan juga mengembangkan tanaman palawija lainnya seperti, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel 2.5
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija
di Kabupaten Paser 2018-2020

No.	Jenis Tanaman	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Padi Sawah	5.478,7	23.394	4,27	6.706	30.432,17	4,53	9.233	-	-
2	Padi Ladang	2.438,0	7.148	2,93	2.943	9.005,58	3,06	2.971	-	-
3	Jagung	3.066,5	15.306	4,99	1.138	6.461	5,67	1.063	6.569	61,92
4	Ubi Kayu	85	1.738	20,45	77	1.159	15,05	105	3.706	352,92
5	Ubi Jalar	25	343	13,72	25	352	14,08	22	383	173,94
6	Kacang Tanah	30	40	1,33	42	56	1,33	59	83	14,12
7	Kacang Kedele	0	0	0		1	1	13	20	15,4
8	Kacang Hijau	3	3	1	7	7	1	16	14	8,5

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2021

Secara umum, luas panen padi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 luas panen padi sawah seluas 9.649 Ha menjadi 12.826 Ha di tahun 2020. Berbanding lurus dengan hasil produksi dimana pada tahun 2019 sebesar 39.438 ton meningkat menjadi 52.366 ton di tahun 2020.

Tabel 2.6
Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Paser 2016 – 2020

Tahun	Padi	
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
2020	12.826	52.366
2019	9.649	39.438
2018	7.917	30.542
2017	9.883	41.726
2016	10.276	40.786

Sumber : Statistik Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser 2021

b. **Kawasan Perikanan**

Kawasan perikanan tambak tersebar di sekitar kawasan sempadan pantai, tepatnya di Kecamatan Long Kali, Long Ikis, Tanah Grogot, Pasir Belengkong dan Tanjung Harapan. Kaitanya dengan penggunaan lahan perikanan adalah budidaya tambak dan kolam air.

Tabel 2.7
Luas Budidaya dan Produksi Tambak dan Kolam 2016 - 2020

Tahun	Tambak		Kolam	
	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Budidaya (Ha)	Produksi (Ton)
2020	31.750	16.730,36	706,00	204,83
2019	15.724	15.724,56	120,00	239,73
2018	15.766	12.689,90	120,0	210,60
2017	15.555	11.912,50	120,0	157,20
2016	15.325	12.357,00	98,5	67,10

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser 2021

Berdasarkan data diatas terdapat fluktuasi luas budidaya tambak dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 luas budidaya tambak sebesar 31.750 Ha, angka ini lebih besar dibanding dengan tahun 2019 sebesar 15.724 Ha. Penambahan luas lahan budidaya tambak tersebut juga berdampak terhadap peningkatan produksi tambak tahun 2020, dengan angka produksi sebesar 16.730,36 Ton, angka

produksi pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan produksi tahun 2019, yaitu dengan angka produksi sebesar 15.724,56 Ton. Sedangkan luas kolam, secara umum terjadi fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi mencapai 204,83 ton dibanding dengan tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 239,73 ton. Penurunan produksi budidaya kolam disebabkan minim nya fasilitas sarana dan prasarana.

c. Kawasan Perkebunan

Seluas ± 193.495,97 ha tersebar di Kecamatan Long Ikis, Long Kali, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Batu Sopang , Muara Komam, Muara Samu, Batu Engau dan Kuaro.

Tabel 2.8
Luas Areal Perkebunan Menurut Jenis Tanaman Kab. Paser
Tahun 2019 - 2020

Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	
	2019	2020
Kelapa sawit	182.723,72	183.575,12
Karet	13.749,50	13.843,00
Kelapa dalam	2.442,50	2.442,50
Kopi	876,30	876,30
Lada	92,00	97,00
Kakao	125,00	125,00
Lainnya	210,50	209,50

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser, 2020

Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi Komoditi perkebunan favorit di Kabupaten Paser bahkan mencapai 91 persen dari total areal perkebunan. Kawasan perkebunan ini sebagian peruntukan dan pengelolaannya telah dilimpahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan.

Tabel 2.9
Produksi Perkebunan Rakyat 2019 - 2020

Jenis Tanaman	Luas Areal (ton)	
	Tahun 2019	Tahun 2020
Kelapa sawit	1.987.340,35	1.802.818,02
Karet	8.213,08	8.854,08

Jenis Tanaman	Luas Areal (ton)	
	Tahun 2019	Tahun 2020
Kelapa dalam	3.683,95	4.060,28
Kopi	122,41	100,48
Lada	12,39	12,84
Kakao	3,57	2,59
Lainnya	152,32	195,15

Sumber : Statistik Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser 2020

Sedangkan produksi perkebunan tahun 2019/2020 masih didominasi oleh kelapa sawit. Karena perawatan yang relatif mudah dan nilai ekonomi yang tinggi, kelapa sawit marak dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat.

d. **Penggunaan Lahan Sektor Kehutanan**

Hutan sebagai paru-paru lingkungan menjadi wilayah suaka yang dilindungi sekaligus juga sebagian dimanfaatkan sebagai sumber produksi. Kawasan hutan lindung tersebar di daerah Gunung Beratus, Gunung Lumut, Sungai kendilo-Ketam, Hilir Sungai Rawang dan Sungai Samu.

Tabel 2.10
Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi

Fungsi Hutan	Luas Kawasan (Ha)	
	2017	2018
Hutan Konservasi		
i. Cagar Alam	102.361	102.361
ii. Taman Hutan Raya	3.995	3.445,37
Kawasan Budidaya Kehutanan		
i. Hutan Lindung	118.957	118.957
ii. Hutan Produksi Tetap	240.256	240.256
iii. Hutan Produksi Terbatas	180.036	180.036
iv. Hutan Produksi Yang dapat dikonversi (HPK)	9.698	9.698
Kawasan Budidaya Non Kehutanan		
i. Areal Penggunaan Lain	481.175	481.175

Sumber : Perda Kab. Paser No.9 Tahun 2015 tentang RTRW Kab. Paser tahun 2015-2035

a) **Kawasan Hutan Produksi Tetap**, tersebar di Kecamatan Batu Sopang bagian Tengah, Muara Komam bagian Utara, Long Ikis bagian Utara dengan luas 240.256 ha;

b) **Kawasan Hutan Produksi Terbatas**, yaitu kawasan hutan yang ditetapkan sebagai daerah penyangga. Alokasi pemanfaatannya dipertahankan sesuai dengan fungsinya dimana eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam, kawasan memiliki luas 180.036 ha;

c) **Kawasan Areal Penggunaan Lain**, yaitu kawasan yang mempunyai potensi untuk dimanfaatkan bagi pengembangan budidaya pertanian pada umumnya. Kawasan ini tersebar di 8 (delapan) kecamatan dengan luas 481.175 ha.

e. **Penggunaan Lahan Sektor Pertambangan**

Kawasan pertambangan di Kabupaten Paser seluas 71.000,00 Ha, tersebar di Kecamatan Batu Sopang, Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Kuaro, Long Ikis dan Batu Engau. Selain untuk kawasan pertambangan batu bara juga telah ditetapkan wilayah pertambangan rakyat untuk bahan galian emas dengan luas sekitar 4.958,57 ha, tersebar di Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Sopang. Dari total luas kawasan pertambangan tersebut, sebagian yakni 50,399 ha merupakan kawasan pertambangan milik PT. Kideco Jaya Agung.

f. **Penggunaan Lahan Sektor Pariwisata**

Kawasan ini merupakan kawasan yang dianggap mempunyai daya tarik tinggi untuk dijadikan objek wisata. Kawasan ini bersifat fleksibel, maksudnya tidak terkait pada batas-batas administrasi ataupun batas lainnya, sehingga kawasan pengembangannya tidak harus didelineasi secara jelas seperti kawasan-kawasan tersebut di atas.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah ditujukan untuk memacu perkembangan sosial ekonomi serta mengurangi kesenjangan wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Setidaknya pengembangan wilayah di Kabupaten Paser dapat mengakomodasi tiga komponen yakni terkait dengan aktivitas manusia, ruang beradaptasi serta sarana komunikasi dan transportasi.

Aktivitas manusia dikaitkan dengan kondisi demografis, barang material, energi. Dari segi konstelasi regional, Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan

Selatan. Kota Tanah Grogot berjarak lebih kurang dari 145 km dari Balikpapan atau 260 km dari Ibukota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Sarana penghubung dua provinsi tersebut adalah jalan nasional yang selalu dilewati sarana transportasi darat yang menghubungkan antara wilayah di Kalimantan.

Pada bagian timur Kabupaten Paser berhadapan langsung dengan selat Makasar, yang akan datang memiliki prospek dan fungsi penting sebagai jalur alternatif pelayaran internasional apalagi dukungan prioritas kebijakan nasional terkait dengan peningkatan fungsi laut sebagai perwujudan semangat maritim.

2.1.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Perlidungan terhadap resiko bencana ditujukan untuk melindungi warga dan lingkungannya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia. Di wilayah Kabupaten Paser, terdapat beberapa identifikasi terkait dengan rawan bencana yakni bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, angin topan, kebakaran, gempa dan kekeringan.

Tabel 2.11
Jenis dan daerah Rawan Bencana di Kabupaten Paser

No.	Rawan Bencana	Kecamatan Rawan Bencana
1	Banjir	Batu Sopang, Muara Samu, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, Long Ikis dan long Kali
2	Tanah Longsor (gerakan tanah kerentanan tinggi)	Batu Sopang, Long Ikis dan Long Kali
3	Gelombang Pasang	Kawasan yang berhadapan dengan laut
4	Kebakaran	Long Kali, Long Ikis, Kuaro, Tanah Grogot, Batu Sopang, Pasir Belengkong dan Batu Engau

Sumber : RTRW Kabupaten Paser 2012

2.1.1.4 Demografi

Selain sebagai subjek dalam proses pembangunan, penduduk merupakan tujuan bagi pembangunan itu sendiri. Itu sebabnya analisis kependudukan menentukan berbagai keputusan selama perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2.1.1.4.1 Jumlah Penduduk

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, juga terjadi di Kabupaten Paser yang tampak dalam berbagai fenomena kependudukan termasuk meningkatnya jumlah penduduk, laju pertumbuhan, kepadatan penduduk yang

terkonsentrasi di beberapa titik strategis di Kabupaten Paser. Secara gradual, jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 1,8 persen. Hal tersebut memberi dasar dan gambaran yang semakin jelas, tentang meningkatnya kepadatan penduduk tiap tahunnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup berarti. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 285.894 jiwa dan berkurang menjadi 275.452 jiwa pada tahun 2020. Selama lima tahun terakhir dijelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2020 adalah 108,98 artinya bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 109 orang penduduk laki-laki. Lebih lanjutnya dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laju Pertumbuhan (%)	RJK (%)
2016	129.457	118.580	248.037	0,80	109,17
2017	132.538	121.965	254.503	2,61	108,67
2018	133.995	124.027	258.022	1,38	108,04
2019	151.533	134.361	285.894	2,11	112,78
2020	143.647	131.805	275.452	1,75	108,98

Sumber : Data Hasil Sensus Penduduk 2020

Penduduk Kabupaten Paser masih mengelompok pada wilayah-wilayah yang jaraknya cukup dekat dengan ibu kota kabupaten. Lebih dari 25 persen penduduk Kabupaten Paser bertempat tinggal di kecamatan yang terletak di ibu kota kabupaten, yaitu Kecamatan Tanah Grogot. Sedang sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan.

2.1.1.4.2 Struktur Penduduk

Sampai saat ini Kabupaten Paser memiliki karakteristik piramida penduduk melebar (Piramida muda) yang berarti kelompok balita dan remaja masih sangat besar. Gambaran dari karakteristik penduduk ini satu sisi menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, disisi lain menanggung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) usia tidak produktif yang tinggi pula.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
dan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

Tahun	Umur (Tahun)			Jumlah	RBK
	0 - 14	15 - 64	65+		
2016	62.654	178.137	7.246	248.037	39,24
2017	64.717	180.786	9.000	254.503	40,78
2018	65.793	182.958	9.571	258.022	41.19
2019	85.555	192.188	7.436	285.894	0
2020	70.304	193.314	11.834	275.452	0

Sumber : Data BPS, Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020

Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan untuk menentukan prioritas program dalam memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Paser memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian, terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja di semua sektor.

Dari sisi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) pada tahun 2017, 100 kelompok umur produktif (15-64 tahun) Kabupaten Paser menanggung kurang lebih 40,78 penduduk tidak produktif (0-14 dan 65+ Tahun). Sedangkan pada tahun 2018 terlihat bahwa angka ketergantungan penduduk mengalami peningkatan menjadi 41,19. Namun keseluruhan angka ketergantungan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir tersebut tetap wajib diperhatikan untuk memproyeksikan kemampuan penduduk produktif. Kabupaten Paser sebagai salah satu daerah dengan percepatan jumlah penduduk yang tinggi harus diimbangi persiapan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan kemudian diikuti penyiapan lapangan kerja yang memadai.

2.1.1.4.3 Distribusi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat ini, distribusi penduduk di Kabupaten Paser masih belum merata. Hal tersebut dibuktikan dengan konsentrasi penduduk yang terpusat di Kecamatan Tanah Grogot sebanyak 28,14 Persen dari total jumlah penduduk. Padahal dilihat dari luas wilayah, Tanah Grogot merupakan

daerah dengan luas daerah terkecil, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.1 dibawah ini:

Grafik 2.1
Distribusi Penduduk di Kabupaten Paser Menurut Kecamatan tahun 2020

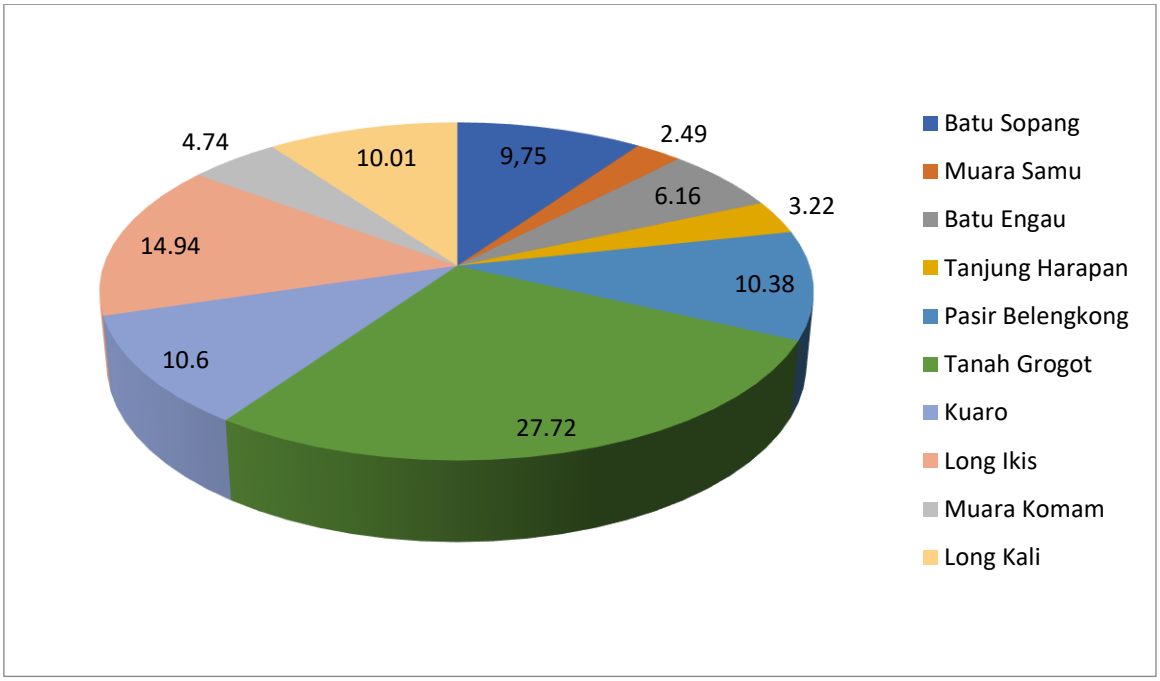

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser 2021

Seperti halnya pola pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, secara otomatis berpengaruh pada naiknya kepadatan penduduk di Kabupaten Paser secara umum. Pada tahun 2020, kepadatan secara gradual sebesar 23,74 penduduk tiap Km2. Paradoks ekstrim pada distribusi penduduk tersebut terlihat dengan padatnya penduduk di kawasan Ibu Kota Kabupaten Paser, yaitu Kecamatan Tanah Grogot yang mencapai 222,50 penduduk/Km2 dibandingkan dengan Kecamatan Tanjung Harapan yang hanya memiliki kepadatan 12,40 penduduk/Km2.

Tabel 2.14
Kepadatan Penduduk Kabupaten Berdasarkan Kecamatan Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2
1	Batu Sopang	1.111,38	26.87	24,17
2	Muara Samu	855,25	6.86	8,02
3	Batu Engau	714,05	16.97	11,26
4	Tanjung Harapan	1.507,26	8.86	12,40

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Banyaknya Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2
5	Pasir Belengkong	990,11	28.60	28,88
6	Tanah Grogot	335,58	76.34	227,50
7	Kuaro	747,30	29.19	39,06
8	Long Ikis	1.204,22	41.15	34,17
9	Muara Komam	1.753,39	13.06	7,45
10	Longkali	2.385,39	27.58	11,56
Jumlah		**11.603,94**	**275.452**	**23,74**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

Persebaran penduduk yang tidak merata disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah ketersediaan fasilitas publik, atau potensi wilayah yang dimiliki. Kondisi penyebaran ini tidak menguntungkan bagi pemerataan pembangunan daerah. Dengan adanya perbedaan kepadatan, maka pola penyebaran penduduk yang terjadi juga mengikuti pola penduduk yang mengelompok pada tempat-tempat tertentu. Penduduk banyak dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya kepadatan penduduk yang rendah pada umumnya terdapat daerah-daerah yang mempunyai aktifitas ekonomi yang relatif masih rendah dan keadaan sarana transportasi yang masih terbatas.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu pendekatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendapatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah.

2.1.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Secara sederhana, PDRB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Penghitungannya berasal dari jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Oleh karena itu, PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto Daerah. PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir suatu daerah yang dihasilkan dalam periode tertentu. Sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan pertumbuhan dari nilai produksi barang–barang dan jasa yang dihasilkan dari satu tahun ketahun berikutnya, yang mengindikasikan kinerja perekonomian daerah dalam menciptakan output atau nilai tambah suatu barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan memperhitungkan pertumbuhan PDRB. Untuk mengukur pertumbuhan output riil, maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk menyesuaikan efek perubahan harga (inflasi). Secara umum Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) masyarakat di Kabupaten Paser mengalami peningkatan. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 menjadi 43,34 trilyun, turunsekitar 4,68 trilyun dibanding tahun sebelumnya. Lebih lanjut dijelaskan pada tabel 2.15 dibawah ini.

Tabel 2.15
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015-2020 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Total PDRB ADHB	Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian	Total PDRB ADHK	Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian
2016	37.289.694,49	10.820.845,87	32.755.516,30	8.598.556,24
2017	43.954.254,84	11.831.022,31	33.137.650,69	8.876.525,62
2018	48.054.117,69	12.300.092,00	34.362.054,56	9.183.582,43
2019*	48.017.349,06	13.025.846,65	35.727.316,63	9.557.871,18
2020**	43.337.235,37	13.880.582,26	34.736.709,21	9.489.480,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2021

Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat pertambangan non migas (batubara) yang memiliki konstribusi sangat besar dalam

pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa subsektor pertambangan batubara. Pada tahun 2020 angka PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 13,88 triliyun rupiah, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal lebih kecil 9,49 triliyun rupiah.

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser tahun 2020, peranan tertinggi masih dipegang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, namun peranannya menurun dari 72,87 persen tahun 2019 menjadi 67,97 persen tahun 2020. Selanjutnya sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada pada urutan kedua dalam memberikan andil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser tahun 2020, yakni sebesar 12,48 persen. Industri Pengolahan menempati peringkat ketiga dengan kontribusi sebesar 5,54 persen di tahun 2020. Secara lebih detail, tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.16 dibawah ini :

Tabel 2.16
Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap PDRB

Lapangan Usaha / Industry		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,29	12,61	11,29	10,20	10,43	12,48
B	Pertambangan dan Penggalian	73,63	70,98	73,08	74,40	72,87	67,97
C	Industri Pengolahan	4,28	4,82	4,92	4,49	4,68	5,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,4	2,36	2,2	2,38	2,79	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,34	3,75	3,54	3,56	3,86	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,46	0,48	0,44	0,44	0,47	0,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	0,3	0,28	0,28	0,30	0,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,67	0,62	0,61	0,66	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,38	0,41	0,36	0,36	0,39	0,44
L	Real Estate	0,32	0,34	0,30	0,29	0,30	0,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,23	1,27	1,07	1,06	1,13	1,19

Lapangan Usaha / Industry		2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
P	Jasa Pendidikan	1,13	1,25	1,18	1,21	1,34	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,44	0,41	0,42	0,46	0,63
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,19	0,23	0,22	0,22	0,24	0,26
Produk Domestik Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2021

2.1.2.1.2 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat selama beberapa tahun ini Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan dokumen ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Tahun 2018, tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 3,13% dan untuk Tahun 2019 angka inflasi per bulan Maret adalah 1,42%.

Tabel 2.17
Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser
Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Inflasi (Menggunakan data Inflasi Kota Balikpapan)	6.26	4.13	2.45	3.13	1,42 (per bulan Maret)

Sumber : BPS Provinsi Kaltim, 2020

2.1.2.1.3 PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atau pendapatan perkapita menggambarkan besaran nilai PDRB per jiwa atau per satu orang di suatu wilayah. Namun demikian, nilai PDRB tersebut tidak serta merta mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Hal ini disebabkan karena nilai PDRB tersebut hanyalah merupakan nilai bagi bruto antara total perhitungan PDRB dibagi

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun suatu wilayah dengan tanpa memperhatian faktor-faktor lain yang ada dalam proses pembentuknya.

Tahun 2019, nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser diperkirakan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018. Tahun 2018, nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser sebesar 160,02 juta rupiah, sedangkan tahun 2019 sebesar 168,51 juta rupiah.

Perkembangan nilai PDRB perkapita Kabupaten Paser secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.18 di bawah ini :

Tabel 2.18

PDRB Perkapita Kabupaten Paser Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.488,77	17.574,87	17.923,46	16.985,88	17.039,84
B	Pertambangan dan Penggalian	107.537,19	98.705,55	117.234,09	129.222,34	123.704,94
C	Industri Pengolahan	6.249,18	6.636,07	7.866,60	7.595,39	7.749,34
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29,52	32,59	36,02	36,11	36,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,55	28,45	29,42	32,36	34,87
F	Konstruksi	3.503,30	3.273,66	3.519,83	4.050,89	4.628,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.875,59	5.210,28	5.571,03	6.114,53	6.487,79
H	Transportasi dan Pergudangan	674,92	667,41	699,00	749,40	770,71
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	391,53	412,39	434,62	469,23	489,61
J	Informasi dan Komunikasi	891,00	929,96	974,03	1.042,27	1.100,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	552,45	567,90	582,30	625,57	647,75
L	Real Estate	469,00	467,31	476,99	494,49	494,74
M,N	Jasa Perusahaan	84,22	83,64	86,55	90,64	91,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.791,56	1.744,43	1.696,49	1.810,82	1.897,06
P	Jasa Pendidikan	1.649,62	1.733,97	1.881,05	2.028,46	2.162,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	559,92	606,16	659,26	715,03	761,99
R,S,T,U	Jasa lainnya	276,53	316,71	353,25	380,95	410,59
PDRB Per Kapita		**153.219,09**	**146.050,83**	**138.991,37**	**160.024,00**	**168.510,00**

Sumber: Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2020

2.1.2.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam SDGs dinyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Kabupaten Paser.

Tabel 2.19
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Paser Tahun 201-2020

Tahun	Kondisi Kemiskinan				
	Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)
2016	23.170	8,68	395.803	1,48	0,43
2017	25.300	9,28	433.823	1,32	0,27
2018	25.140	9,03	455.635	1,22	0,31
2019	25.445	8,95	477.440	1,57	0,40
2020	26,77	9,23	515.414	1.04	0,21

Sumber: BPS Kabupaten Paser

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser 2015 - 2020 cukup fluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 8,76 menurun menjadi 8,68 pada tahun 2016 lalu meningkat menjadi 9,28 pada tahun 2017 , menurun hingga menjadi 8,95 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 9,23 pada tahun 2020.

Jika dibandingkan dengan proporsi penduduk miskin di regional Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser masih lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk miskin Kabupaten Kalimantan Timur dan lebih rendah dibandingkan dengan Nasional. Namun demikian perkembangan penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser cenderung melambat dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Grafik 2.2
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

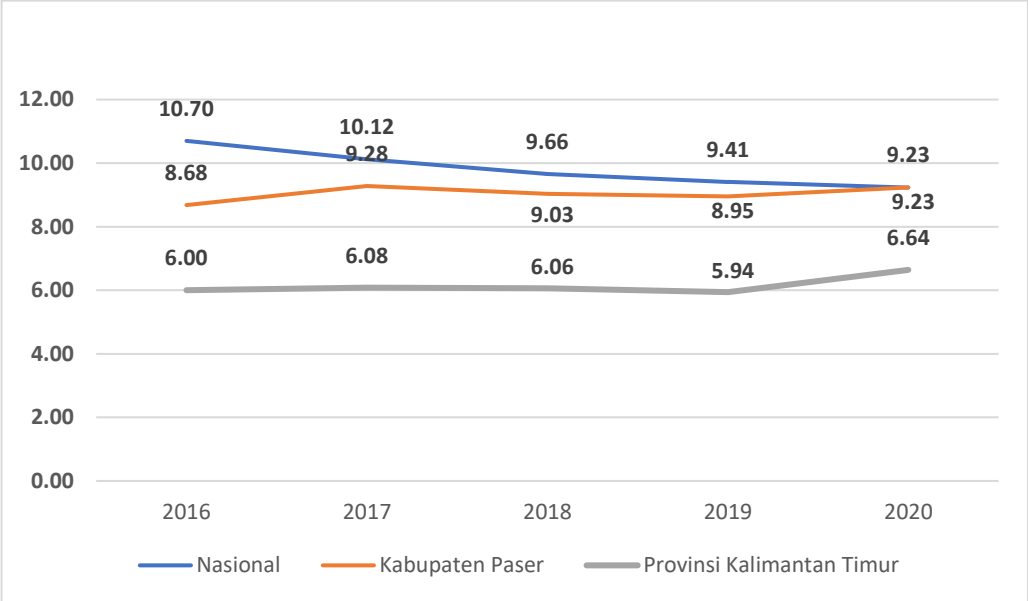

Sumber: BPS Kabupaten Paser

Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1). Indek P1 Kabupaten Paser pada tahun 2020 sebesar 1,04 dan tingkat keparahan kemiskinan (P2), sebesar 0,21. Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

Grafik 2.3
Analisis Relevansi Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

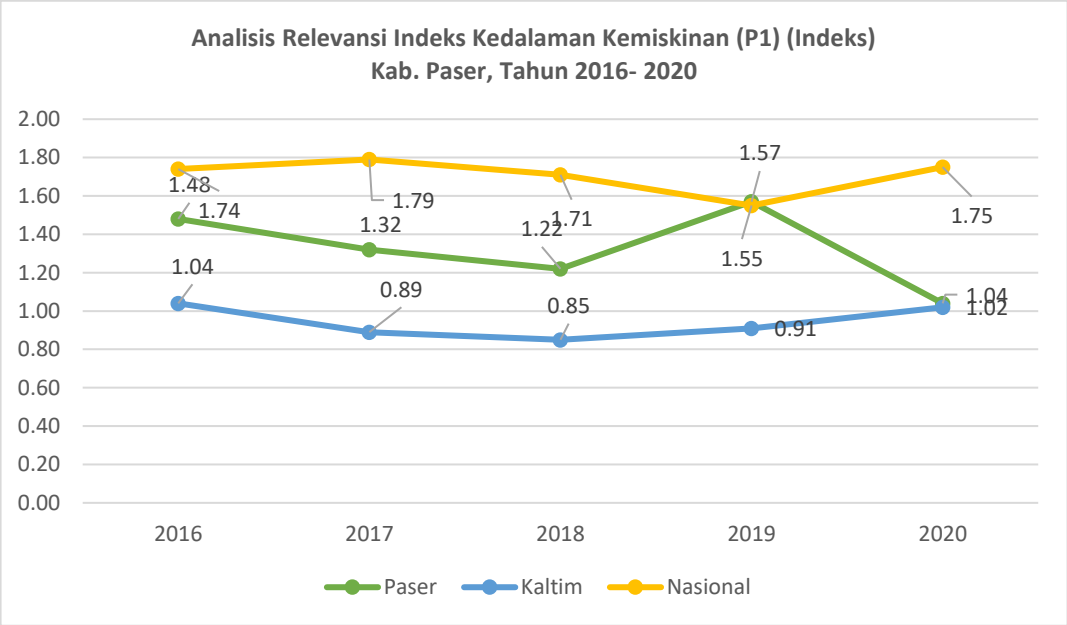

Sumber : TNP2K

Pada grafik 2.3 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang berada di bawah rata – rata Nasional dan di atas Provinsi Kalimantan Timur. Jika dilihat percepatan penurunan P1 Kabupaten Paser selama periode tahun 2016 – 2020 nampak lebih lambat dibandingkan nasional

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Grafik 2.4
Analisis Relevansi Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

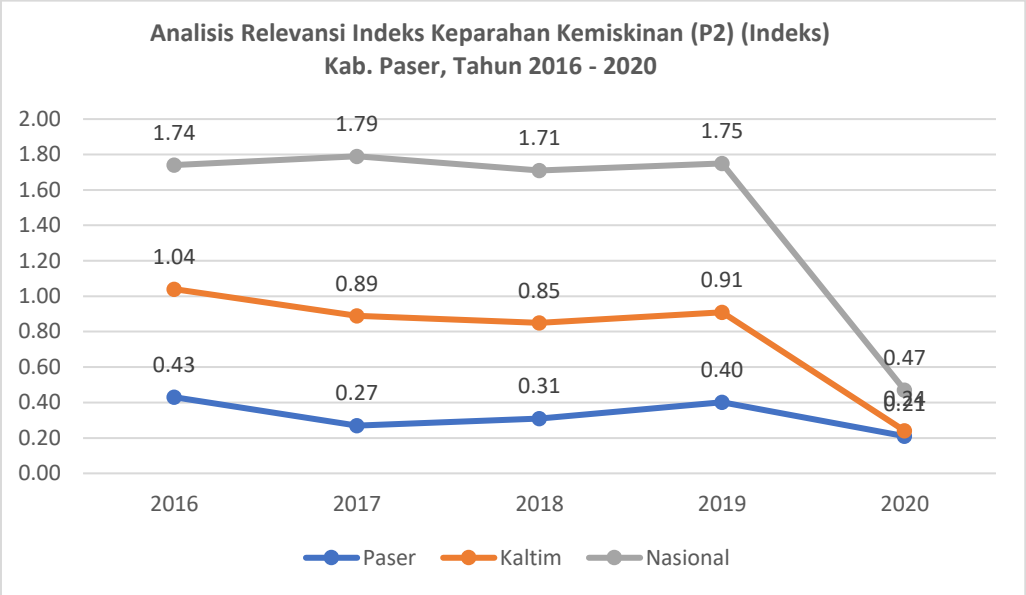

Sumber : TNP2K

Pada grafik 2.4 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Paser berada di atas rata-rata provinsi dan di bawah rata-rata nasional. Namun kondisi perkembangan penurunan tingkat keparahan kemiskinan juga cenderung mengalami perlambatan sehingga hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Paser.

2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. di Kabupaten Paser tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,52%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat pengengguran terbuka pada tahun 2019, yaitu sebesar 4,55%. Jumlah tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel. 2.20 berikut ini.

Tabel 2.20
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser
Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Angkatan Kerja (Jiwa)	121.524	122.162	124.222	131.471	136.131
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	65,17	62,15	62,11	66,43	67,88

Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	9,06	5,54	4,84	4,38	4,52
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	90,94	94,46	93,13	95,45	

Sumber : Data Sektoral Disnakertrans Kabupaten Paser 2021

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik.

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah "indeks gini" dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Secara umum Indeks Gini Kabupaten Paser memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin "tidak merata" dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap "wajar" pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.21
Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Gini	0,315	0,330		0,327	0,328

2.1.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Isu pembangunan manusia merupakan isu sentral yang memiliki dimensi yang luas sehingga berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat untuk melihat pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah secara umum. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen untuk mengetahui pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah karena dalam batas-batas tertentu IPM mewakili tujuan dari pembangunan manusia.

IPM yang memiliki komposit bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dianggap mampu menggambarkan kualitas manusia atau tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Sehingga semakin tinggi nilai IPM maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.

Grafik 2.5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

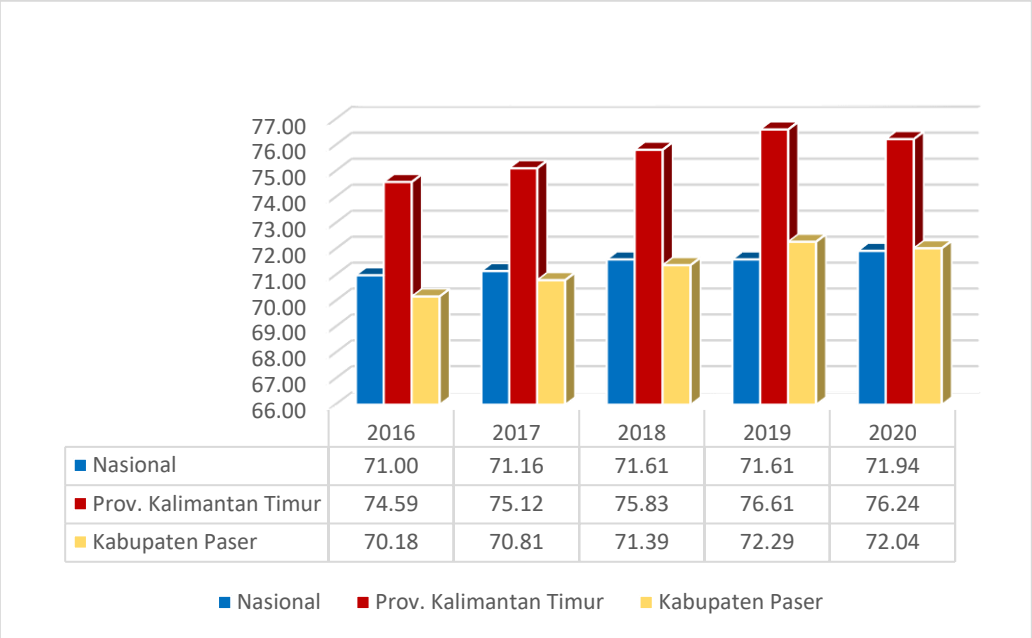

	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	71.00	71.16	71.61	71.61	71.94
Prov. Kalimantan Timur	74.59	75.12	75.83	76.61	76.24
Kabupaten Paser	70.18	70.81	71.39	72.29	72.04

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2020

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser mengalami trend perlambatan selama periode 2016-2020 yakni berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Timur dan berada di atas IPM Nasional. pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2016.

Grafik 2.5 di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Paser 2016 - 2019 mengalami pertumbuhan, namu menurun di tahun 2020 sebear 25 poin menjadi 72,04. Senada dengan Provinsi yang juga mengalami penurunan, sementara nasional tumbuh menjadi 72,94. Kondisi ini menggambarkan bahwa perkembangan IPM Kabupaten Paser lebih lambat dibandingkan dengan nasional.

Oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimalisasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.22
Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2016-2020

Komponen	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	72.02	72.05	72.28	72.52	72.62
Rata-Rata Lama Sekolah	8.19	8.20	8.22	8.54	8.55
Angka Harapan Lama Sekolah	12.96	12.98	12.99	13.00	13.10
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	10.171	10.280	10.605	10.767	10.344
IPM	**71.00**	**71.16**	**71.61**	**72.29**	**72.04**

Sumber, BPS Kabupaten Paser, 2020

Tabel 2.22 menunjukkan bahwa komponen indikator pembentukan IPM selama periode 2016 - 2020, dimana pertumbuhan hanya terjadi pada 3 komponen yakni rata rata lama sekolah hanya meningkat 1 poin di tahun 2020, angka harapan lama sekolah sebesar 10 poin, serta angka harapan hidup tumbuh sebesar 10 poin. sedangkan pengeluaran per kapita mengalami penurunan sebesar 423 poin di tahun 2020. Sehingga secara keseluruhan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,43% pertahun.

Dari tabel di atas juga didapatkan informasi bahwa di antara empat indikator pembentukan IPM, indikator yang paling berpengaruh adalah pengeluaran per kapita rill sementara yang pengaruhnya paling rendah adalah rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Pendidikan

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, pendidikan merupakan elemen penting perencanaan agar individu atau masyarakat mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasannya. Dengan dasar pendidikan yang kuat, individu atau masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan mampu memberdayakan diri dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat hidup sejahtera.

Pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Paser terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan kesejateraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja.

Kemajuan dunia pendidikan pada suatu wilayah tidak lepas dari campur tangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu wujud peran serta pemerintah dalam kemajuan dunia pendidikan adalah peningkatan jumlah sekolah dari tahun ke tahun. Sampai dengan tahun 2018, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Paser berdasarkan tingkat pendidikan adalah sekolah dasar 233 unit, SLTP 84 unit, SLTA 40 unit, dan Perguruan Tinggi 4 unit.

Grafik 2.6
Keberadaan Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Paser Tahun 2020

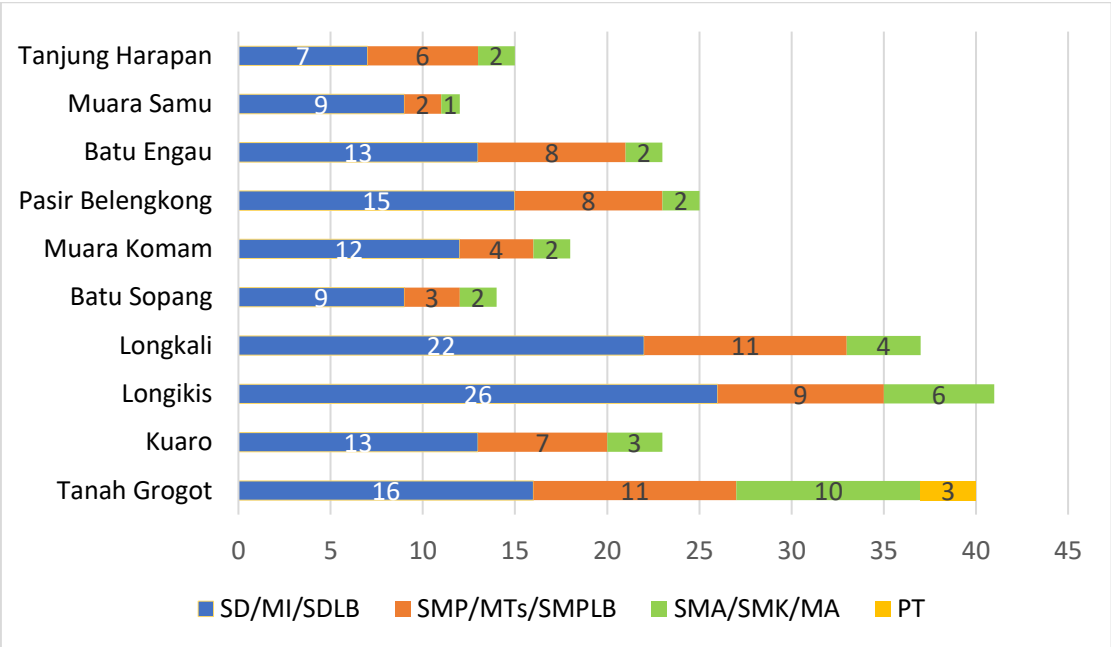

Sumber, BPS Kabupaten Paser, 2020

A. Angka Melek Huruf

Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi.

Angka melek huruf di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2014–2018 menunjukkan angka yang cenderung meningkat. Tahun 2014 capaian angka melek huruf Kabupaten Paser tercatat sebesar 98,23% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 98.70% ditahun 2015, 98,41% di tahun 2016, 98,49% di tahun 2017 dan turun menjadi 99,13% di tahun 2018. Berikut adalah perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018 :

Grafik 2.7
Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas
di Kabupaten Paser Tahun 2014-2018

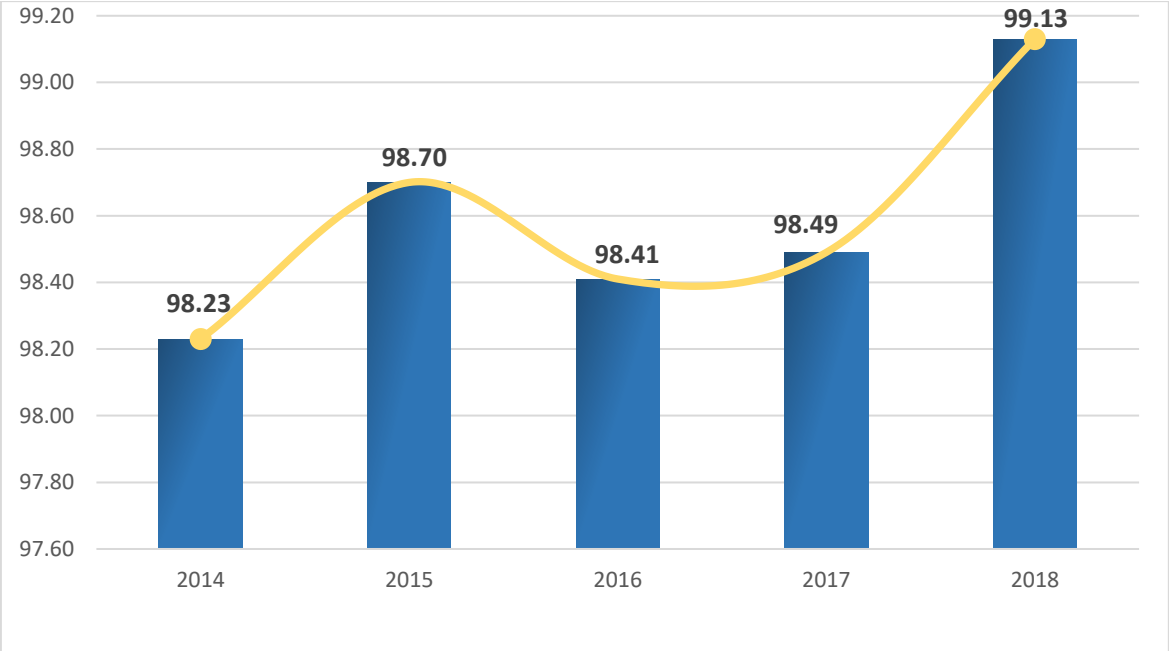

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2018

B. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak diukur melalui Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).

Grafik 2.8
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

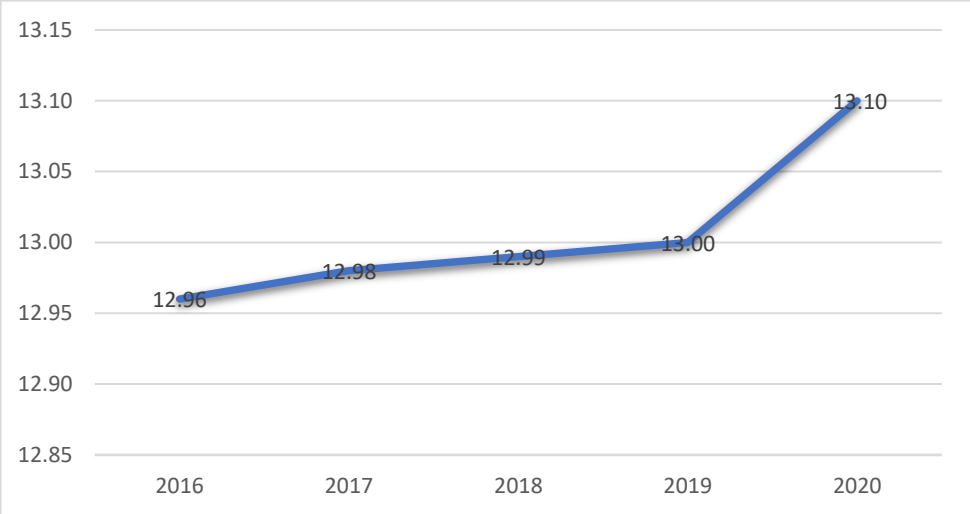

Sumber, BPS Kabupaten Paser, 2020

Grafik 2.8 tersebut menunjukkan bahwa angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Paser sebesar 13,10 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Paser rata-rata memiliki harapan untuk bersekolah selama 13,10 tahun semenjak dilahirkan. Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2020 sudah di atas wajib belajar 9 tahun.

C. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Paser ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kabupaten Paser semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut adalah perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser Tahun 2015-2020.

Grafik 2.9
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

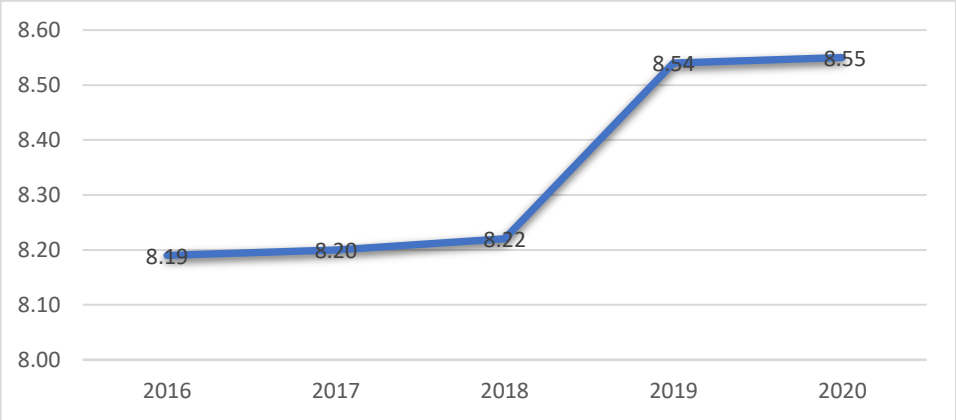

Sumber, BPS Kabupaten Paser, 2019

Grafik 2.9 tersebut menunjukkan bahwa perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2016 - 2020 Kabupaten Paser memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,06% per tahun. Pencapaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser hingga tahun 2018 yaitu 8,22 tahun masih dibawah wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.23
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Paser
Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas	8.19	8.20	8.22	8.54	8.55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2020

Namun demikian, pencapaian angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Paser masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yakni 9,63 tahun dan lebih baik dibandingkan Nasional 8,58 tahun. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun harus terus menjadi prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Kabupaten Paser ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar 9 tahun.

D. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18

untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Paser tahun 2015-2019 dapat dilihat dari tabel 2.24 dibawah ini :

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

No.	Angka Partisipasi Kasar	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	111,01	111,26	105,23	110,33	110,33
2.	SMP/MTSn	99,25	89,42	93,04	96,52	96,52

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka Tahun 2020

Dari tabel di atas, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI pada tahun tahun 20 yakni 110,33% tetap 110,33% pada tahun 2020, Nilai APK masih lebih dari 100% hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. APK tingkat SMP/MTSn pada tahun 2019 adalah 96,52% sedangkan pada tahun 2020 adalah 96,52%, hal ini menunjukkan tidak ada nya kenaikan.

E. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Paser berikut disajikan dalam tabel 2.25.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

No.	Angka Partisipasi Murni	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	97,30	99,93	97,96	97,74	97,74
2.	SMP/MTSn	81,91	78,48	78,53	81,66	81,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI pada tahun 2020 sebesar 97,74%, tidak ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 97,74%. Sedangkan angka APM tingkat SMP/MTs pada tahun 2020 sebesar 81,66%, tidak ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 81,66%.

F. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.26
Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Sekolah
di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0.010	0.1	0,20	0,92	0,94
2	SMP/MTs	0.072	0.2	1,50	1,18	2,28
3	SMA/SMK/MA	0.072	1.0	-	-	-
	Rata-rata	**0,051**	**0.43**	**0,85**	**1,51**	**2,08**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, 2021

Ditinjau dari keberlanjutan sekolah, rata-rata angka putus sekolah dalam lima tahun terakhir (dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020) menunjukkan peningkatan, yaitu dari 0,051 menjadi 2,08.

2.1.2.2.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2016-2020), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian bayi pada tahun 2016 sebesar 66 bayi, pada tahun 2017 terjadi penururnan kasus kematian bayi menjadi sebesar 40 bayi sedangkan pada tahun

2018 mengalami kenaikan menjadi 62 bayi, pada tahun 2017 angka kematian bayi menurun lagi menjadi 40 bayi dan pada tahun 2018 angka kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 62 bayi, pada tahun 2019 angka kematian bayi mengalami kenaikan menjadi 65 bayi dan tahun 2020 kasus kemataian bayi menurun menjadi 49. Adapun penyebab kematian bayi yang terjadi di Kabupaten Paser rata-rata disebabkan oleh gangguan pranatal, saluran napas, diare, gangguan sistem syaraf, tetanus dan infeksi lainnya.

Tabel 2.27
Jumlah Angka Kematian Bayi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Bayi	66	40	62	65	49

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Grafik 2.10
Jumlah Angka Kematian Bayi

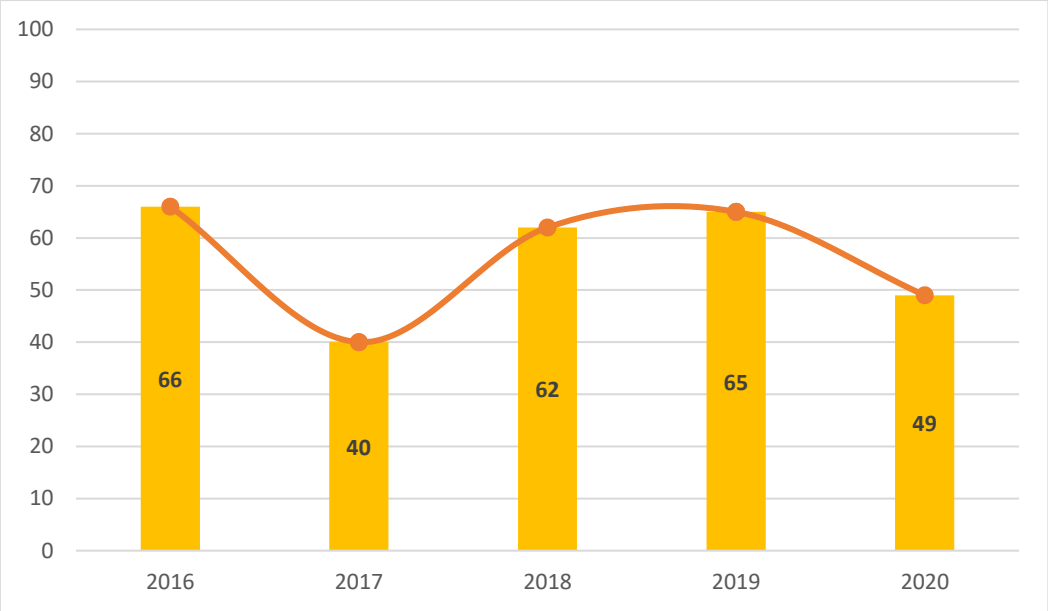

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

B. Angka Kematian Balita

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2014-2019), capaian Angka Kematian Balita (AKB) Kabupaten Paser memperlihatkan keadaan yang fluktuatif. Angka kematian balita pada tahun 2016 sebanyak 11 balita, pada tahun 2017 terjadi peningkatan kasus kematian balita menjadi 51 balita, pada tahun 2018 kasus kematian balita sebanyak 66 balita, pada tahun 2019 angka kematian balita kembali

meningkat yaitu sebanyak 70 balita, sedangkan pada tahun 2020 kasus kematian balita menurun menjadi sebesar 55 balita. Adapun penyebab utama kematian balita yang terjadi di Kabupaten Paser adalah ISPA dan Diare.

Tabel 2.28
Jumlah Angka Kematian Balita

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Balita	11	51	66	70	55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Diagram 2.1
Jumlah Angka Kematian Balita

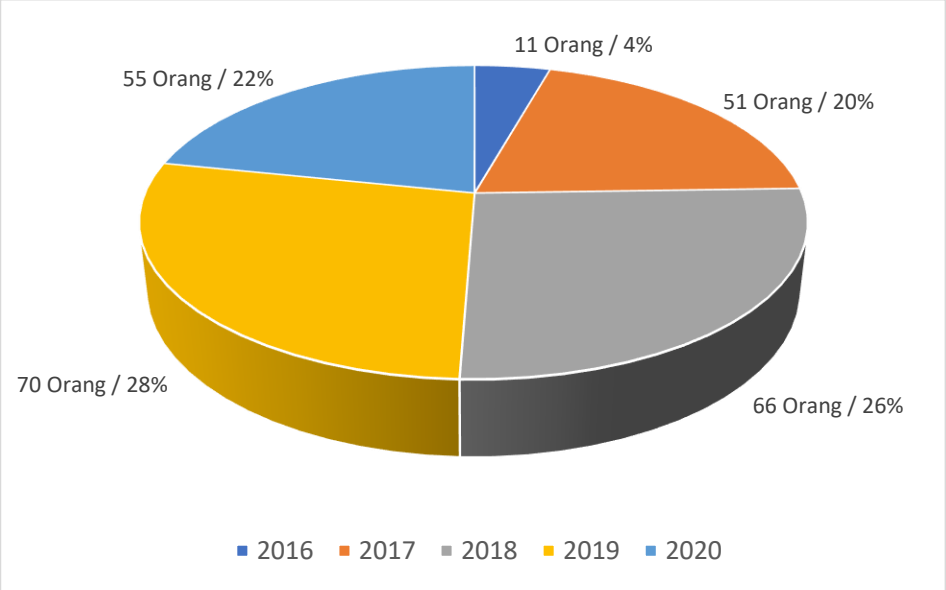

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Paser dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami fluktuasi dari 2 orang pada tahun 2015, kemudian naik menjadi 9 orang pada tahun 2016, pada tahun 2017 naik lagi menjadi 12 orang, pada tahun 2018 turun menjadi 7 orang, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 5 orang. Namun demikian angka ini dibawah standar yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebanyak 150 orang per 100.000 kelahiran hidup sehingga dapat dikatakan bahwa program Pemerintah Kabupaten Paser dalam menurunkan angka kematian Ibu sudah cukup berhasil.

Tabel 2.29
Jumlah Angka Kematian Ibu

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kasus Kematian Ibu	9	12	7	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Persoalan kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Paser selama kurun waktu 2016-2020 umumnya disebabkan oleh karena tingkat pengetahuan dari masyarakat yang masih rendah mengenai masalah kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan semasa kehamilan, pendarahan, ekslapsi, lambat dirujuk, dan persalinan belum sepenuhnya ditangani oleh bidan atau tenaga kesehatan. Selain itu kondisi geografis yang sangat luas dan sulit serta topografi pegunungan menyebabkan kurang atau sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan.

D. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di sektor kesehatan. Angka harapan hidup (AHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. AHH bisa diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Perkembangan AHH tahun 2014 - 2020 di Kabupaten Paser ditunjukkan pada Tabel SDM 5. Selama periode ini, AHH penduduk Kabupaten Paser terus meningkat dari 71,88 tahun pada tahun 2014 menjadi 72,28 tahun pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,10% per tahun.

Meskipun pencapaian AHH (72,28 tahun) di Kabupaten Paser pada tahun 2018 berada di atas Nasional (71,20 tahun) namun masih lebih rendah dibandingkan AHH Provinsi Kalimantan Timur (73,96 tahun) dan berada di posisi keenam dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan angka harapan hidup perlu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Paser ke depan.

Tabel 2.30
Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Indikator Derajat Kesehatan	Presentase Angka Harapan Hidup tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	72,02	72,05	72,28	72,52	72,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

E. Status Gizi Balita

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami fluktuasi.

Tabel 2.31
Perkembangan Status Gizi Balita di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase balita dengan gizi buruk	4,1%	12,1%	0,08%	0,11%	0,053%
2	Persentase balita dengan gizi kurang	17,5%	18,4%	12,40%	7,86%	7,85%
3	Persentase Balita Stunting	24,6%	31,8%	27,54%	21,8%	14,18%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021

Status gizi di Kabupaten Paser sudah berada di bawah angka yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI sebesar 1,5%, dimana pada tahun 2020 balita dengan gizi buruk hanya sebesar 0,053%, sedangkan Persentase balita dengan gizi kurang pada tahun 2020 sebesar 7,85%.

Penanganan stunting perlu dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini beresiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa, lebih rentan terhadap penyakit.

Strategi penirunan stunting adalah pendekatan multisektor dan intervensi terintegrasi. Upaya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat upaya menirunkan angka prebalensi stunting pada anak. Oleh karena itu diperlukan upaya penanganan pencegahan stunting secara intervensi spesifik dan sensitif. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan dengan pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita kurang gizi, pemberian tablet tambah darah bagi remaja dan ibu hamil, promosi pemberian makanan bayi dan anak (PMBA), pemantauan pertumbuhan, pemeriksaan kehamilan pencegahan infeksi, kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada diluar persoalan lesehatan. Antara lain penyediaan air minum, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi. Kegaitan pencegahan stunting secara spesifik dan sensitif belum dapat berjalan secara maksimal dan terkoordinasi dengan baik dan berkesinambungan.

2.1.2.2.3 Ketenagakerjaan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode tertentu, di Kabupaten Paser. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32
Tingkat partisipasi angkatan kerja Di Kabupaten Paser
Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	65,17	62,15	62,11	66,43	67,68

2.1.2.2.4 Pertanahan

Bidang pertanahan merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah dan secara khusus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena pertanahan terkait dengan aset masyarakat maupun pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk berbagai hal dalam memenuhi kebutuhan hidup, yaitu antara lain sebagai tempat pemukiman, sebagai sarana produktivitas masyarakat, hingga sarana bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pembangunan dan melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Pada bagian ini menyajikan data mengenai berbagai hal terkait pertanahan, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel 2.33 berikut ini :

Tabel 2.33
Banyaknya Permohonan dan Penyelesaian Tentang Pertanahan
di Kabupaten Paser Tahun 2018-2020

Uraian	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
	Permohonan	Diselesaikan	Sisa	Permohonan	Diselesaikan	Sisa	Permohonan	Diselesaikan	Sisa
Peta bidang	127	84	43	2.960	-	2.960	928	794	134
Kutipan	0	0	0	2.960	-	2.960	-	-	-
SKPT	67	57	10	99	92	7	81	81	-
Sertifikat pemberian hak atas tanah	5.127	5.083	44	5.508	5.451	57	276	249	27
Sertifikat peralihan hak atas tanah	467	449	18	681	611	70	581	581	-
Sertifikat tanggungan kredit verban dan hipotik	827	740	87	802	724	78	588	588	-

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2020

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisis kinerja terhadap perkembangan obyek wisata di Kabupaten Paser. Potensi pariwisata di Kabupaten Paser cukup layak untuk

dikembangkan sebagai penopang perekonomian daerah, baik objek wisata alam maupun wisata sejarahnya.

Dari tabel di bawah terlihat bahwa jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Paser mengalami penurunan tahun 2020 sebanyak 907.

Tabel 2.34
Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Paser Tahun 2015-2020

Nama Tempat Rekreasi	Jumlah Pengunjung				
	2016	2017	2018	2019	2020
Museum Sadurengas	4.540	3 984	2 400	1 750	190
Tahura Lati Petangis	3.300	3 900	2 900	1 193	-
Doyam Turu/Liang Batulis	600	700	200	0	-
Kemilau Laut Pondong	5.500	3 800	900	511	381
Danum Layong	1.700	1 700	400	366	34
Goa Layong/Goa Tengkorak	2.700	2.000	900	476	234
Goa Losan	600	400	200	0	50
Liang Mangku Langit	1.092	600	100	100	-
Doyam Seriam	540	750	56	0	-
Kapal Susur Kandilo	0	0	0	0	0
Jumlah Pengunjung	**19.512**	**20.572**	**24.562**	**27.070**	**907**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka, 2021

Tabel 2.35
Jumlah Perkumpulan Kesenian, Jumlah Perkumpulan Olahraga dan Jumlah Sarana Olahraga Di Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Jumlah Perkumpulan Kesenian	70	Kelompok Seni
2	Jumlah Klub Olahraga	135	Termasuk Cabang Olahraga
3	Jumlah Sarana Olahraga	294	Termasuk Gedung Olahraga

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Jumlah dan laju penduduk yang besar merupakan aset bagi pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik. Penduduk yang besar dengan tingkat SDM yangrendah hanya akan menjadi beban bagi pembangunan di suatu wilayah. Oleh sebab itu, penanganan masalah penduduk sebaiknya tidakhanya diarahkan pada upaya penekanan laju pertambahannya akan tetapi lebih dititikberatkan pada peningkatan sumber daya manusianya. Usaha peningkatan sumber daya manusia secara sistemik dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan.

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah.Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah.

Pada tahun 2017, APS penduduk usia 7-12 tahun sebesar 99,93%, sedangkan pada tahun 2018 APS usia 7 -12 sebesar 99,22%, terjadi penurunan sebesar 0,71%. Sementara itu pada tahun 2017 APS penduduk usia 13-15 tahun sebesar 97,69% mengalami kenaikan menjadi 99,06% pada tahun 2018 atau terjadi kenaikan sebesar 1,37%, sedangkan untuk APS penduduk usia 16-18 tahun di tahun 2017 sebesar 75,43 menjadi 77,97 pada tahun 2018 atau terjadi kenaikan sebesar 2,54%. Sedangkan APS untuk tahun 2019 masih angka sangat sementara yang bisa berubah.

Grafik 2.12
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah
di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

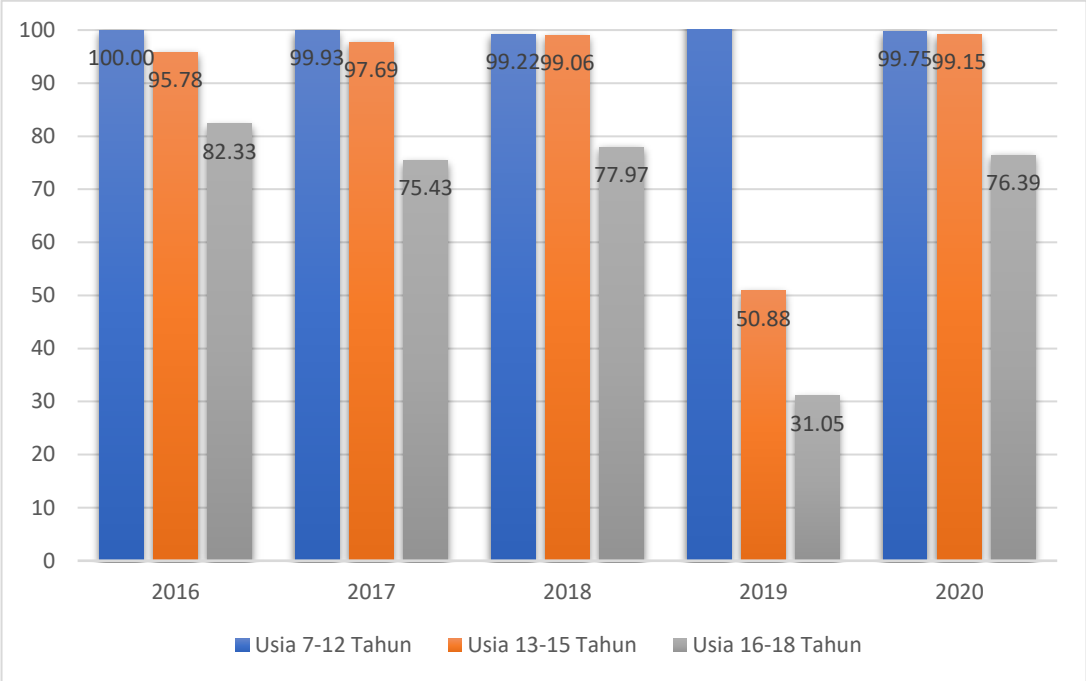

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2021

Tabel 2.36
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Usia Sekolah
di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Usia Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	7-12 Tahun	100,00	99,93	99,22	121,45	99,75
2	13-15 Tahun	95,78	97,69	99,06	50,88	99,15
3	16-18 Tahun	82,33	75,43	77,97	31,05	76,39

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2021

B. Rasio Jumlah Sekolah, Murid dan Guru

Dalam upaya peningkatan tingkat pendidikan penduduk, ketersediaan sarana dan tenaga pengajar yang memadai sesuai dengan potensi jumlah penduduk usia sekolah yang ada merupakan hal pokok yang harus menjadi perhatian. Selanjutnya data Jumlah sekolah, murid dan guru dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.37
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Paser
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI/SDLB**						
1.1	Jumlah SD	232	233	237	237	237	234
1.2	Murid	34.738	34.810	35.349	35.104	35.297	35.810
1.3	Guru	2.976	2.394	2.252	2.307	2.513	2.577
1.4	Rasio Murid Guru	11,67	14,54	15,70	15,21	14,30	13,90
1.5	Rasio Murid Sekolah	149,73	149,40	149,15	148,11	150,32	153,03
2	**SLTP/MTS/SMPLB**						
2.1	Jumlah SLTP	85	84	93	94	94	93
2.2	Murid	13.199	14.252	14.385	14.301	14.161	14.335
2.3	Guru	1.285	1.073	1.067	1.078	1.191	1.234
2.4	Rasio Murid Guru	10,27	13,28	13,48	13,26	11,89	11,62
2.5	Rasio Murid Sekolah	255,282	169,67	154,68	152,13	150,64	154,14
3	**SLTA/SMK/MA**						
3.1	Jumlah SLTA	42	40	42	43	44	42
3.2	Murid	9.137	10.502	11.211	11.501	11.973	12.130
3.3	Guru	964	886	872	863	943	936
3.4	Rasio Murid Guru	9,47	11,85	12,86	13,32	12,69	12,96
3.5	Rasio Murid Sekolah	217,55	262,55	266,93	267,46	272,11	288,81

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Paser 2021

Pada semua jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA jumlah murid mengalami kenaikan yang signifikan terutama sejak diprioritaskan program wajib belajar 9 tahun, yaitu dari tahun 2019 masing-masing sebanyak 35.297, 14.161 dan 11.973 murid menjadi 35.810, 14.335 dan 12.130 murid pada tahun 2020.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

A. Rasio Posyandu Persatuan Balita

Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khususnya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi.

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2208, jumlah posyandu di Kabupaten Paser menunjukkan tren yang agak stagnan. Pada tahun 2018, jumlah posyandu di Kabupaten Paser tercatat sebanyak 356 posyandu. Dari 356 posyandu tersebut melayani 34,874 balita dengan rasio posyandu per satuan balita adalah 10.21. dan ditahun 2020 jumlah posyandu sebanyak 370.

Tabel 2.38
Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita
Di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Posyandu	356	356	371	372	370
Jumlah Balita	34.874	34.874	34.874		
Rasio Posyandu per satuan balita	10,21	10,21	10,21		

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2020

B. Rasio Puskemas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Paser dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020 jumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 99 unit dengan jumlah penduduk 275.452 jiwa.

Tabel 2.39
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk
Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk *)	248.037	254.503	258.022	285.890	275.452
Jumlah Puskesmas	17	18	19	19	19
Jumlah Puskesmas Pembantu	108	109	109	115	99
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	125	127	128	134	118
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk	0,0005	0,0004	0,0005	0,0005	0,0004

Sumber : Statistik Kabupaten Paser 2021

C. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainnya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2020, jumlah dokter umum yang ada di Kabupaten Paser sebanyak47 orang atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebanyak 60 dokter. Rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2020 sebesar 17,06. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di Kabupaten Paser melayani 5.860 penduduk.

Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di Kabupaten Paser tahun 2020 adalah sebanyak 30. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten Paser tahun 2020 adalah sebesar 11. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di Kabupaten Paser melayani 9.181 penduduk.

Jumlah dokter gigi di Kabupaten Paser tahun 2020 sebanyak 18 orang, menurun dari tahun sebelumnya yang sebanyak 20 orang. Rasio dokter gigi di Kabupaten Paser per 100.000 penduduk sebesar 6,53.

Tabel 2.40
Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	248.037	254.503	258.022	285.890	275.452
Dokter Umum	49	55	41	60	47
Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	20	22	16	21	17,06
Dokter Spesialis	16	25	28	28	30
Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	6	10	11	10	11
Dokter Gigi	19	19	16	20	18
Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	8	7	6,20	3,49	6,53

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2021

D. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi.

Jumlah puskesmas di Kabupaten Paser pada tahun 2020 sebanyak 19 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas pada tahun 2020 tidak tersedia data. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di Kabupaten Paser sebanyak 99 puskesmas pembantu yang tersebar di 144 desa/kelurahan.

Tabel 2.41
Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Puskesmas	17	18	19	19	19
Jumlah Kecamatan	10	10	10	10	10
Jumlah Kunjungan Puskesmas	367.712	413.906	-	-	-
Jumlah Puskesmas Pembantu	108	109	103	115	99
Jumlah Desa/ Kelurahan	144	144	144	144	144

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2021

Tabel 2.42
Kategori Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2019

No	Nama Puskesmas	2016	2017	2018	2019
1	Long Ikis	Dasar			Madya
2	Kuaro	Madya			Utama
3	Tanah Grogot		Madya		
4	LongKali		Madya		
5	Mendik		Madya		
6	Pasir Belengkong		Madya		
7	Padang Pengrapat		Madya		
8	Suliliran baru		Madya		
9	Muser		Madya		
10	Batu Kajang			Madya	
11	Muara Komam			Madya	
12	Kerang			Madya	
13	Suatang Baru			Madya	
14	Tanjung Aru			Madya	
15	Krayan			Dasar	
16	Long Gelang			Madya	
17	Lolo			Madya	
18	Sebakung Taka				Madya
19	Senaken				Madya

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Paser 2021

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Akreditasi Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungan, Puskesmas sebagai institusi perlu meningkatkan kinerja dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakan. Saat ini dikabupaten Paser dari 19 Puskesmas semua sudah terakreditasi, kedepan Dinas Kesehatan menargetkan status Akreditasi Puskesmas menjadi Utama dan Paripurna.

E. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Paser tahun 2020 mencapai 92,9%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Kabupaten Paser ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Tabel 2.43
Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Ibu yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	5.365	5.159	4.725	5.203	5.554
Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	6.197	5.915	5.978	5.978	5.978
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,7	87,2	79,12	87,1	92,9

Sumber : Dinas kesehatan Kabupaten Paser 2021

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan sarana dan prasarana wilayah atau infrastruktur direncanakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan di Kabupaten Paser. Indikator bidang pekerjaan umum di Kabupaten Paser dapat dilihat dari beberapa aspek.

A. Jalan dan Jembatan

Indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) di Kabupaten Paser yang berubah pada tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Pada tahun 2019 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah 23,48%. dan pada tahun 2020 mencapai angka 39,87%. Terdapat kenaikan kondisi jalan mantap karena telah dilakukan banyak perbaikan namun masih jauh dibawah rata-rata kondisi jalan mantap provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 58,68%. Penanganan yang seriu dan berkesinambungan sangan diperlukan, mengingat perputaran roda perekonomian sangat bergantung pada akses jalan.

Tabel 2.44
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Tahun 2016 - 2020

KONDISI JALAN	2016	2017	2018	2019	2020
PANJANG JALAN (KM)	**1005,19**	**1005,19**	**1005.19**	**1005.19**	**1005.19**
BAIK	26.24%	24.97%	15.90%	20.61%	13.29%
SEDANG	34.96%	19.25%	2.21%	2.87%	26.58%
RUSAK RINGAN	23.69%	29.19%	30.77%	37.69%	56.7%
RUSAK BERAT	15.11%	26.59%	51.12%	38.83%	3.43%
JUMLAH	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**	**100.00%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

Tabel 2.45
Persentase Kondisi Jalan Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Menurut Kabupaten/Kota

No.	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
1	Paser	16,65%	2,3%	30,44%	31,36%	100.00%
2	Kutai Barat	15.27%	9.28%	28.07%	47.38%	100.00%
3	Kutai Kartanegara	48.79%	20.94%	16.59%	13.67%	100.00%
4	Kutai Timur	14.27%	43.72%	22.97%	19.04%	100.00%
5	Berau	32.46%	32.92%	24.65%	9.98%	100.00%
6	Penajam Paser Utara	34.97%	42.05%	11.05%	11.93%	100.00%
7	Mahakam Ulu	0.00%	6.86%	24.29%	68.84%	100.00%
8	Balikpapan	66.16%	30.15%	1.63%	2.06%	100.00%
9	Samarinda	50.73%	24.35%	5.76%	19.16%	100.00%
10	Bontang	55.13%	40.61%	2.89%	1.36%	100.00%
Kalimantan Timur		**33.37%**	**25.31%**	**16.87%**	**24.45%**	**100.00%**

Sumber : Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka 2020

Kondisi sarana Jembatan sangat penting dalam meningkatkan aksesibilitas yang menentukan tingkat pembangunan infrastruktur wilayah dan meningkatkan perekonomian masyarakat wilayah tersebut.

Tabel 2.46
Kondisi Jembatan Tiap Kecamatan Tahun 2020 di Kabupaten Paser

No.	Kecamatan	Jumlah (Buah)	Kondisi					
			(%)	Baik	(%)	Rusak Ringan	(%)	Rusak Berat
1	Tanah Grogot	180	83.88	151	3.33	6	12.77	23
2	Paser Belengkong	161	77.63	125	8.07	13	14.28	23
3	Kuaro	109	75.22	82	19.26	21	5.50	6
4	Longikis	122	88.52	108	3.27	4	8.19	10
5	Longkali	162	67.28	109	16.04	26	16.66	27
6	Batu Sopang	24	66.66	16	-	-	33.33	8
7	Muara Komam	144	68.05	98	6.25	9	25.69	37
8	Muara Samu	19	73.68	14	5.26	1	21.05	4
9	Batu Engau	95	89.47	85	1.05	1	9.47	9
10	Tanjung Harapan	19	42.10	8	21.05	4	36.84	7
JUMLAH		**1035**		**62**		**85**		**154**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

B. Jaringan Irigasi

Indikator rasio jaringan irigasi. Angka rasio jaringan irigasi pada tahun 2018 menunjukan jumlah angka 1:21,91 pada tahun 2019 menjadi 1:16,74 meningkat karena adanya normalisasi, rehabilitasi, dan pembangunan saluran irigasi yang sebagian besar bersumber dari anggaran bantuan keuangan provinsi dan penurunan jumlah lahan persawahan. Rasio tersebut didapat dari hasil perhitungan panjang saluran irigasi (km) dibagi dengan luas lahan sawah (Ha). Sampai dengan tahun 2020 panjang saluran irigasi 758,746 km yang terdiri atas saluran irigasi primer sepanjang 164,864 km, irigasi skunder 516,382 km, dan tersier sepanjang 77,050 km, dengan kondisi baik pada jaringan irigasi primer 88,73% kondisi sedang/rusak ringan sebesar 11,27% di tahun 2020.

Tabel 2.47
Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Non Teknis Tahun 2019 - 2020 Kabupaten Paser

No.	Jaringan Irigasi	Panjang (M)	2019				2020			
			Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah (%)	Baik	Sedang / Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah (%)
1	Primer	164,864.00	54.05	45.95	0.00	100.00	88.73	11.27	0.00	100.00
2	Sekunder	516,832.00	68.15	21.35	10.50	100.00	74.82	18.02	7.17	100.00
3	Tertier	77,050.00	0.00	62.62	37.38	100.00	44.00	40,62	15.38	100.00
	JUMLAH	**758,746.00**	**60.87**	**26.41**	**12.72**	**100.00**				**100.00**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2021

C. Potensi Air Baku

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Kabupaten Paser memiliki 4 (empat) Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Adang–Kuaro, DAS Kandilo, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang

a. DAS bagian hulu Kabupaten Paser yaitu DAS Kandilo seluas 3.416,1 Km^2 yang tersebar di Kacamatan Muara Komam, Kecamatan Batu Sopang, dan Muara Samu.
b. DAS bagian tengah Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian tengah Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Batu Engau, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.
c. DAS bagian hilir Kabupaten Paser yaitu di sebagian DAS Adang–Kuaro, DAS Telake dan DAS Kerang–Sagendang. DAS bagian hilir Kabupaten Paser tersebar di Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Tanah Grogot, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis dan Kecamatan Long Kali.

Tabel 2.48
Data Debit Sungai Utama di Kabupaten Paser

No.	Wilayah Pelayanan	Koordinat	Dalam (m)		Lebar (m)		Debit (m^3/det)		
			Aktual	Fluktuasi	Aktual	Fluktuasi	Max	Min	Rata-Rata
1	**Sungai Kandilo Hilir**	S: 01° 56' 33,7 " E:116° 10' 52,2"	3,00	6,85	102,00	102,00	**22,45**	**16,9**	**19,685**
2	**Sungai Kandilo Hulu (Batu Sopang)**	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6"					**5.5**	**1,6**	**3,575**
3	**Sungai Telake**	S: 01° 31' 13,5" E: 116° 19' 16,8"							**2,183**
4	**Sungai Lombok**	S: 01° 37' 08,13" E: 116° 09' 08,03"							**0,30**
5	**Sungai Muru**	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"	0,75	3,50	17,50	24,00			**0,997**
6	**Sungai Komam**	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"	0,45	3,25	17,00	22,00			**0,727**
7	**Sungai Setiu**	S: 01 49' 45,7" E: 115 57' 19,6	0,50	3,50	12,00	20,00			**0,588**
8	**Sungai Kerang**	S: 02° 14' 50,36" E: 116° 03' 54,84"							**1,834**

Sumber data : Kompilasi data Studi Evaliasi Lingkungan DAS Kandilo & Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Paser 2017

Tabel 2.49
Tabel Usulan Sumber Air Baku Terpilih

No.	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku		Keterangan Korrdinat
		Eksisting	Pengembangan	
1	Tanah Grogot	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 33,7 " E:116° 10' 52,2"
2	Pasir Belengkong	Sungai Kandilo	Sungai Kandilo	S: 01° 56' 26,8" E: 116° 10' 52,0"
3	Longkali	Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 1°31'8.96" E :116°19'16.44"
4	Longikis	Sungai Lombok Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 37' 10,5" E: 116° 09' 08,8"
5	Kuaro	Sungai Muru Sungai Telake	Sungai Telake (Bendungan Lambakan)	S: 01° 49' 53,1" E: 116° 04' 55,1"
6	Muara Komam	Sungai Komam	Sungai Komam	S: 01° 40' 34,35" E: 115° 48' 00,23"
7	Batu Kajang	Sungai Kandilo	Sungai Setiu	S: 01° 49' 45,7" E: 115° 57' 19,6"

No.	Wilayah Pelayanan	Sumber Air Baku		Keterangan Korrdinat
		Eksisting	Pengembangan	
8	Batu Engau	Sungai Kerang	Sungai Kerang	S: 02° 14' 50,00" E: 116° 03' 55,00"
9	Muara Samu	-	Sungai Muser/Samu	S: 02° 01' 12,30" E: 115° 56' 04,60"
10	Tanjung harapan	-	Air Tanah (Sumur Bor)	S: 02° 15' 43,60" E: 116° 31' 49,65"

Sumber data: PDAM Tirto Kandilo & Analisis Konsultan

Pembagian wilayah zonasi pelayanan Sistem Distribusi Air Minum PDAM Kabupaten Paser didasarkan pada :

- Zona yang selama ini sudah terbentuk;
- Jarak terhadap sumber air dan kondisi topografi;
- Daerah yang potensial dan merupakan prioritas pengembangan sesuai pemanfaatan ruang dalam rencana ruang kota sesuai dengan rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Paser ;
- Rencana pengendalian dan pemerataan tekanan hidrolis pada zona pelayanan yang dibentuk, dengan dibuat sistem distribusi tertutup/loop tiap zona. Dalam operasionalnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga sistem distribusi antar zonasi ini, satu sama lain harus bisa saling mensuply kebutuhan air, apabila ada gangguan distribusi pada salah satu zona dengan cara membuka dan menutup sistem isolasi valve induk nya yang juga akan dilengkapi dengan meter induk sebagai kontrol pemakaian air;
- Rencana Pengendalian NRW;
- Jarak terhadap sumber air dan kondisi topografi;
- Rencana pengembangan sumber air, khususnya rencana pembangunan Bendungan Lambakan (Sungai Telake).

Kondisi eksisting pelayanan PDAM terdiri dari 8 zona pelayanan yaitu Pelayanan Perkotaan Kecamatan Tanah Grogot, IKK Longkali, IKK Long Ikis, IKK Long Kuaro, IKK Pasir Balengkong, IKK Batu Sopang, IKK Muara Komam, IKK Muara Komam. Sedangkan IKK Muara Samu dan IKK Tanjung Harapan belum terlayanai Sistem PDAM. Dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Bendungan Lambakan serta kondisi kualitas dan kualitas air baku di Wilayah IKK Long Kali, Long Ikis dan Kuaro, dimasa mendatang direncanakan ke 3 buah IKK tersebut dijadikan menjadi satu sistem perkotaan dengan sumber air baku dari Bendungan Lambakan.

IKK Muara Samu dan IKK yang saat ini belum dilayani PDAM , direncanakan dimasa mendatang telah dilayani SPAM PDAM.

Daerah yang sudah terlayani air minum PDAM. Pengembangan SPAM pada daerah ini diarahkan pada peningkatan cakupan pelayanan dengan; pemanfaatan kapasitas produksi tidak terpakai (idle capacity), optimalisasi, pengurangan kebocoran, peningkatan kapasitas dan pembangunan baru.

Pengembangan SPAM pada daerah ini diarahkan pada:

1. Pemanfaatan Kapsitas Produksi tidak terpakai (idle capacity),meliputi:
   - Menambah cakupan pelayanan
   - Meningkatkan optimalisasi PDAM
2. Pengembangan SPAM,meliputi:
   - Pembangunan Baru
   - Peningkatan dan
   - Perluasan
3. Program Penurunan Kebocoran (NRW)

Pembagian Zonasi Pelayanan PDAM Eksisting dan Zonasi Pengembangan Pelayanan PDAM , dapat dilihat pada Tabel 2.48

Tabel 2.50
Pembagian Zonasi Pelayanan SPAM Kabupaten Paser

EKSITING			RENCANA PENGEMBANGAN		
Zona	**Perkotaan & IKK**	**Cakupan Wilayah**	**Zona**	**Perkotaan & IKK**	**Penambahan Cakupan Wilayah**
I	Perkotaan Tanah Grogot	Kecamatan Tanah Grogot: Kel tanah Grogot, Ds Tepian Batang, Ds Janju, Ds Sempulang, Ds Tapis, Ds Padang Pangrapat, Ds Jone, Ds Senaken, Ds Tanah Priuk, Rantau Panjang	I	Perkotaan Tanah Grogot	Ds Sungai Tuak, Ds Pondong Baru
II	IKK Long Kali	Kelurahan Long Kali, Ds Putang	II	Perkotaan Long Ikis, Long Kali dan Kuaro	Ds Mendik, Ds Mendik Makmur, Ds Mendik Bakti, Ds Mendik Karya, Ds Bente Tualan.
III	IKK Longikis	Kelurahan Longikis, Ds Semuntai, Ds Lombok, Ds pait, Ds Tajur, Ds Krayan bahagia, Ds Jemparing, Ds Atang Pait.			Ds Sawit Jaya , Ds Krayan Makmur.

EKSITING			RENCANA PENGEMBANGAN		
Zona	**Perkotaan & IKK**	**Cakupan Wilayah**	**Zona**	**Perkotaan & IKK**	**Penambahan Cakupan Wilayah**
IV	IKK Kuaro	Kelurahan Kuaro, Ds Klempangsari, Ds Modang, Ds sandelei			Ds rangan, Ds Lolo
V	IKK Pasir Balengkong	Ds.Sangkuriman, Ds Damit, Ds Olongpinang, Ds Bekoso, Ds pasir balengkong, Desa Suatang kateban , Ds Suliran Baru,	III	IKK Pasir Balengkong	Ds Suatang, Ds Suliliran Ds Suliliran Baru, Ds Suatang Baru, Ds Lempesu, Ds Pulau Rantau (T Grogot), Ds Pepara (T Grogot), Ds Sungai Tuak (T Grogot)
V	IKK Pasir Balengkong	Ds.Sangkuriman, Ds Damit, Ds Olongpinang, Ds Bekoso, Ds pasir balengkong, Desa Suatang kateban , Ds Suliran Baru,	III	IKK Pasir Balengkong	Ds Suatang, Ds Suliliran Ds Suliliran Baru, Ds Suatang Baru, Ds Lempesu, Ds Pulau Rantau (T Grogot), Ds Pepara (T Grogot), Ds Sungai Tuak (T Grogot)
VI	IKK Batu Sopang	Ds Batu Sopang,	IV	IKK Batu Sopang	Ds Songka (Batukajang), Ds Sungai Terik, Ds Kasungai,
VII	IKK Muara Komam	Kel Muara Koman, Ds batubutok, Ds Selerong	V	IKK Muara Komam	IKK Muara Komam
VIII	IKK Batu Engau	Ds Kerang	VI	IKK Batu Engau	Ds Tampakan, Ds Mengkudu, Ds Kerangdayo
			VII	Muara Samu	Ds Muser , Ds Biu . Ds Libur Dinding
			VIII	Tanjung Harapan	Ds Tanjung Aru

Sumber data : Dokumen Rispam Kabupaten Paser (Bappeda)

D. Air Minum

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, masyarakat di Kabupaten Paser memperoleh air dari berbagai sumber baik dengan menggunakan sistem perpipaan maupun sistem non perpipaan. Sarana air bersih perpipaan diperoleh dari PDAM dan non PDAM yang dikelola oleh masyarakat (program Pamsimas). Sementara sistem air minum non perpipaan diperoleh dengan menggunakan air sungai, sumur gali dan mobil tangki yang dikelola oleh masyarakat. Penggunaan penangkap air hujan sebagai sumber air bersih dilakukan oleh hampir semua masyarakat Kabupaten Paser khususnya yang belum teraliri dari jaringan SPAM perpipaan, termasuk masyarakat yang tinggal didaerah dekat dengan sungai, kondisi air sungai yang keruh pada musim hujan menjadikan warga masih menangkap air hujan.

Akses air minum Kabupaten Paser selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana Tahun 2019 mencapai 62,91% dan pada Tahun 2020 meningkat hingga 66,88%, dengan rincian di kawasan perkotaan terlayani 80,78% dan di kawasan perdesaan

terlayani 58,70%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum terlayani akses air minum khususnya diwilayah pedesaan. Perkembangan persentase akses air minum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Air Minum Perkotaan	71,10	73,60	77,93	80,78
2	Akses Air Minum Pedesaan	49,59	52,21	54,06	58,70
Akses Air Bersih Kabupaten Paser		**57,57**	**60,14**	**62,91**	**66,88**

Sumber : Hasil Analisa Pokja AMPL Kabupaten Paser, 2021

Saat ini akses air minum Kabupaten Paser telah mencapai 66,88% dengan rincian akses air minum jaringan perpipaan sebesar 47,88% sedangkan akses air minum bukan jaringan perpipaan baru mencapai 19,00%. Dari 10 (sepuluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Paser hanya 1 (satu) kecamatan yang belum dilayani oleh jaringan perpipaan yaitu kecamatan Tanjung Harapan. Adapun untuk wilayah yang sudah dilayani dengan jaringan PDAM juga masih belum sepenuhnya dapat terlayani 100% pelayanan dikarenakan karena secara jarak ataupun geografis belum terjangkau dengan jaringan perpipaan PDAM. Untuk saat ini pelayanan sarana air minum di layani oleh SPAM-SPAM pedesaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Pamsimas ataupun dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada seperti memanfaatkan sumur-sumur gali dan mata air yang untuk kebutuhan perorangan ataupun dikelola bersama untuk satu desa.

Selain itu ada beberapa wilayah seperti di kecamatan Muara Samu dan beberapa wilayah di kecamatan Batu Sopang dan Muara Komam disediakan dengan pembuatan sistem pengolahan skala pedesaan dan juga sumur-sumur bor yang diusahakan oleh PT. Kideco, yang pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Capaian persentase akses air minum jarigan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Persentase Akses Air Minum Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan
Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan PDAM (JP PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Jaringan Perpipaan Non PDAM (JP Non PDAM)	Jumlah Jiwa Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)	Total Jumlah Jiwa Terlayani Air Minum (JP dan BJP)	Persentase Akses Air Minum Layak	Persentase Akses Air Minum Perpipaan	Persentase Akses Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan
1	Kabupaten Paser	111.418	21.403	52.710	185.531	66,88%	47,88%	19,00%

Sumber : Hasil Analisa Pokja AMPL Kabupaten Paser, 2021

Kebutuhan pelayanan air minum diwilayah perkotaan dilayani oleh jaringan perpipaan dari PDAM Tirta Kandilo Kabupaten Paser, dimana PDAM ini mempunyai pelayanan perkotaan dan beberapa unit pelayanan. Unit adalah satuan Kerja PDAM yang terdapat di Kecamatan dimana didalamya terdapat manajemen dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) sendiri, seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) unit yang terletak di ibukota kecamatan, antara lain :

a) PDAM Perkotaan Tanah Grogot : Kap. IPA 200 Lt/dt
b) PDAM Unit Pelayanan Pasir Belengkong : Kap. IPA 70 Lt/dt
c) PDAM Unit Pelayanan Batu Sopang : Kap. IPA 15 Lt/dt
d) PDAM Unit Pelayanan Long Kali : Kap. IPA 10 Lt/dt
e) PDAM Unit Pelayanan Long Ikis : Kap. IPA 45 Lt/dt
f) PDAM Unit Pelayanan Kuaro : Kap. IPA 40 Lt/dt
g) PDAM Unit Pelayanan Muara Komam : Kap. IPA 10 Lt/dt
h) PDAM Unit Pelayanan Batu Engau : Kap. IPA 10 Lt/dt
i) PDAM Unit Pelayanan Muara Samu : Kap. IPA 10 Lt/dt

Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2019 jumlah penduduk Kabupaten Paser sebanyak 265.148 Jiwa dan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 87.050. Jumlah Sambungan Rumah terlayani PDAM 24.127 dan Sambungan Rumah terlayani Non PDAM 5.387, Total Sambungan Rumah yang terlayani di Kabupaten Paser sebanyak 29.514.

Tabel 2.53
Jumlah Sambungan Rumah

No	Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Sambungan Rumah (SR)	Kapasitas IPA Terpasang (L/dt)
	TANAH GROGOT		200,00
1	Kelurahan Tanah Grogot	8067	
2	Tapis	1197	
3	Janju	375	
4	Tepian Batang	1037	
5	Sempulang	463	
7	Padang Pengrapat	782	
7	Jone	1573	
8	Senaken	1125	
9	Tanah Periuk	828	
10	Sungai Tuak	92	
		15.539	
	UP. PASIR BELENGKONG		70,00
1	Sangkuriman	685	
2	Pasir Belengkong	416	
3	Damit	780	
4	Olong Pinang	195	
5	Bekoso	313	
	Suatang Keteban	89	
		2.478	
	UP. BATU ENGAU		10,00
1	Kerang	**444**	
	UP. BATU SOPANG		5,00
1	Batu Kajang	**236**	
	UP. MUARA KOMAM		10,00
1	Muara Komam	1041	
2	Batu Butok	174	
3	Selerong	39	
		1.254	
	UP. LONG KALI		10,00
1	Long Kali	995	
2	Putang	161	
		1.156	
	UP. KUARO		40,00
1	Kuaro	1096	
2	Klempang Sari	265	
3	Rangan Luar	98	
4	Lolo	96	
5	Pondong	63	
6	Sandeley/Modang		

No	Wilayah Pelayanan (Desa/Kelurahan)	Sambungan Rumah (SR)	Kapasitas IPA Terpasang (L/dt)
7	KPJ	427	
		2.045	
	UP. LONG IKIS		40,00
1	Long Ikis	291	
2	Lombok	431	
3	Pait	893	
4	atang pait	224	
5	Krayan Bahagia	317	
6	Samuntai	520	
7	Sawit Jaya	200	
8	Jemparing	146	
9	Sandeley	233	
10	Modang	36	
		3.291	
	UP. MUARA SAMU		10,00
	Muara Samu	85	
		26.528	

Kebutuhan pelayanan air bersih di wilayah pedesaan sebagian besar belum dilayani oleh PDAM, untuk pemenuhan air bersih telah dibangun sarana dan prasarana air bersih perdesaan di beberapa desa yang dikelola oleh desa dan warga baik berupa sumur bor, bangunan penangkap mata air dan hidran umum.

Tabel 2.54
Persentase Rumah Tangga menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No.	Sumber Air Minum	2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Kemasan/ Isi Ulang	44,46	46,5	48,51	-	-
2	Leding	21,41	18,84	17,82	45,73	34,29
3	Sumur Bor/Pompa	0,66	0,19	3,67	1,37	5,58
4	Sumur/Mata Air Terlindung	9,00	9,00	10,00	16,26	12,43
5	Sumur/Mata Air Tak Terlindung	15,24	8,30	5,56	13,36	26,97
6	Lainnya	9,23	17,17	14,44	23,28	20,73
Jumlah		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam memenuhi kebutuhan air minum, sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan air kemasan/isi ulang dan ledeng

(PDAM), dimana Tahun 2020 mencapai 34,29%, sedangkan lainnya memakai sumur bor, sumur/mata air terlindungi dan tak terlindungi

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan kawasan perumahan dan permukiman semakin meluas. Hal tersebut membutuhkan penataan kawasan perumahan dan permukiman yang baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan kawasan yang tidak layak huni atau kawasan kumuh. Peningkatan kualitas bangunan rumah yang layak huni, pembangunan jalan perumahan dan drainase yang memadai, serta pembangunan sanitasi (IPAL Komunal, MCK, dan sampah) yang layak, merupakan program yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga kualitas lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan.

A. Sanitasi

Rumah tangga dengan sanitasi layak adalah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (*septic tank*) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain. Akses sanitasi layak di Kabupaten Paser saat ini masih tergolong rendah, dimana Tahun 2019 mencapai 69,78% dan Tahun 2020 menurun menjadi 67,13%. Penurunan akses tersebut terjadi karena laju pertumbuhan penduduk lebih besar dibanding dengan laju pembangunan sanitasi. Rendahnya akses sanitasi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki sarana jamban yang layak, terutama untuk daerah - daerah pedesaan yang masih sangat bergantung pada keberadaan sungai, sebagian besar belum memiliki fasilitas tempat buang air besar sehingga masyarakat melakukan kebiasaan BAB (Buang Air Besar) langsung ke sungai/danau, kolam/sawah, dan kebun. Hal tersebut tentu dapat mencemari tanah dan mencemari sumber air minum warga.

Tabel 2.55
Persentase Akses Sanitasi Layak Kabupaten Paser Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat)	41,7%	53,8%	61,78%	67,13%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021
Website Monev STBM,2021

Pada Tahun 2020 akses sanitasi layak Kabupaten Paser sebesar 67,13% yang dapat dilihat dari jumlah akses jamban sehat permanen, jumlah akses jamban sehat semi permanan, jumlah akses jamban sharing, dan jumlah akses IPAL/IPLT/Septictank Komunal. Sedangkan untuk akses aman baru mencapai 0,71% dan yang masih BABS (tanpa akses) mencapai 6,92%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kemampuan untuk membuat tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan. Kondisi perumahan yang tidak memiliki fasilitas buang air besar perlu mendapat perhatian pemerintah agar perumahan warga memenuhi standar kesehatan dasar.

Tabel 2.56
Persentase Akses Sanitasi Layak, Sanitasi Aman dan BABS Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jumlah KK dengan Akses Jamban Sharing (JSH)	Jumlah KK dengan Akses Aman Air Limbah (IPAL/IPLT/Septictank Komunal)	Jumlah KK dengan Akses Tangki Septik Layak	Jumlah KK yang BABS	Persentase Akses Jamban (Sanitasi Layak)	Persentase Akses Sanitasi Aman	Persentase BABS (Tanpa Akses)	Persentase Akses Sanitasi Dasar
1	Kabupaten Paser	43.391	13.486	3.668	646	61.191	6.309	67,13%	0,71%	6,92%	25,94%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, 2021
Website Monev STBM,2021

Permasalahan sanitasi lainnya saat ini di Kabupaten Paser belum tersedia fasilitas sanitasi terpusat berupa IPAL sehingga secara umum belum dapat melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan pengelolaan limbah cair. Tetapi untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga berupa buangan manusia (black water) telah ada mobil Penyedot Tinja yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan cakupan pelayanan yang masih terbatas yaitu untuk wilayah perkotaan saja dan hanya dilayani dengan 1 buah mobil penyedotan tinja. Untuk pengolahan limbah tinja Kabupaten Paser telah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berada di Desa Janju, sehingga limbah yang dibuang telah dilakukan pengolahan dan tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan pada lokasi tersebut.

B. Persampahan

Sampah merupakan limbah padat yang timbul dari aktivitas manusia baik di rumah, kantor, pasar, tempat umum, dan sebagainya. Besarnya timbulan sampah dipengaruhi oleh tingkat sosial ekonomi suatu masyarakat. Semakin tinggi kemampuan ekonomi masyarakat akan membuat semakin tinggi tingkat konsumsi dan berdampak pada semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan. Pertumbuhan penduduk dan aktifitas kabupaten yangsemakin meningkat juga akan meningkatkan jumlah timbulan sampah.

Timbulan sampah yang ada di Kabupaten Paser merupakan sampah yang berasal dari kegiatan pemukiman (rumah tangga), kegiatan pasar dan daerah komersial (pertokoan), kegiatan perkantoran, kegiatandari fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Sumber sampah tersebut didominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dengan mayoritas merupakan sampah basah atau sampah organik.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkunngan Hidup persentase sampah terkelola pada Tahun 2019 baru mencapai 39,37 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebesar 110.618 jiwa. Hal ini me nunjukkan bahwa cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Paser masih rendah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Data Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk terlayani (jiwa)	99,159	101,399	105,101	165.884	167.385
2	Sampah yang dihasilkan (ton/hari)	131,15	134,13	137,10	114,61	108,57
3	Sampah yang dapat dikelola (ton/hari)	49,58	50,70	52,55	66,35	66,95
4	Sampah yang tidak dapat dikelola (ton/hari)	81,57	83,43	84,55	48,25	41,62
5	Persentase sampah terkelola	37,80	37,80	38,33	57,90	61,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pengelolaan persampahan Kabupaten Paser saat ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Cakupan pelayanan pengelolaan persampahan baru dapat melayani kawasan ibukota Kabupaten dan 6 (enam) kawasan ibukota kecamatan yang meliputi Kecamatan Batu Sopang, Kecamatan Pasir Belengkong, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Muara Komam dan kecamatan Long Kali. Untuk Ibu Kota Kecamatan yang dilayani hanya pada kawasan komersil dan fasilitas umum. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang mamadi baik untuk pewadahan, pengumpulan, TPS, Armada Angkutan sampai pada kemampuan dan ketersediaan TPA serta kondisi geografis Kabupaten Paser.

Sampah yang berasal dari sumber dikumpulkan di setiap rumah tangga dengan wadah tertentu, baik dengan plastik maupun pewadahan yang lain. Selanjutnya sampah dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yang dilakukan baik oleh masyarakat langsung maupun oleh petugas pengumpul dari Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya sampah dari TPS diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), di TPA sampah tidak semuanya dibuang/ditimbun, untuk jenis sampah organik sampah diolah menjadi bahan berguna melalui kegiatan pengomposan.

Untuk daerah perkotaan Tanah Grogot pengelolaan persampahan dikelola bersama oleh masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup, dimana setiap hari telah ada pelayanan pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA yang berlokasi di Desa Janju. Sedangkan untuk kecamatan-kecamatan yang jauh dari lokasi TPA pengelolaannya dilakukan dengan mengumpulkan sampah pada kontainer yang ditempatkannya pada lokasi tertentu dan selanjutnya diangkut ke TPA Desa Janju setiap 2x seminggu. Pengelolaan sampah di Kabupaten Paser tidak semua dilakukan dengan cara pembuangan sampah ke TPS dan diangkut ke TPA. Di beberapa kecamatan masih ada rumah tangga yang melakukan pengelolaan sampah dengan cara ditimbun, dibakar dan dibuang ke kali/sungai terutama untuk Kecamatan Muara Samu, Batu Engau dan Tanjung Harapan. Hal ini dikarenakan tidak sampainya jangkauan pelayanan pengangkutan sampah ke kecamatan tersebut, mengingat lokasi TPA yang sangat jauh yaitu berada di Kecamatan Tanah Grogot dan Kecamatan Batu Sopang. Dan berikut kami sampaikan data infrastruktur persampahan terbangun beserta system pengelolaanya dan jumlah armada pengangkutan sampah.

Tabel 2.58
Data Infrastrutur Persampahan Terbangun

No	Nama Infrastruktur	Sistem Pengelolaan
1	TPA Sampah KM 7 Janju	Controll Landfill
2	TPA Sampah Kecamatan Batu Sopang	Controll Landfill
3	TPS 3R Pasar Senaken	Pengomposan Sampah Pasar
4	TPS 3R Desa Tapis	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
5	TPS 3R Semumun	Pemilahan Sampah Non Organik

Tabel 2.59
Data Rencana Pembangunan Infrastruktur Persampahan

No	Nama Infrastruktur	Sistem Pengelolaan
1	Zona II Sell TPA Sampah KM 7 Janju	Controll Landfill
2	Peningkatan Jalan Operasional dan Sarana TPA Sampah KM 7 Janju	Controll Landfill
3	Peningkatan TPA Sampah Kecamatan Batu Sopang	Controll Landfill
4	TPS 3R Kompleks Batuah	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
5	TPS 3R Jl. A. Yani	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
6	TPS 3R Desa Senaken	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
7	TPS 3 R Jl. Hasanuddin	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
8	TPST Kec. Long Ikis	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik
9	TPST Kec. Muara Samu	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik

No	Nama Infrastruktur	Sistem Pengelolaan
10	TPST Kec. Muara Komam	Pengomposan Sampah Organik dan Pemilahan Sampah Non Organik

Tabel 2.60
Data Armada Angkutan Sampah

No	Jenis Armada	Volume	Satuan	Keterangan
1	Dump Truck	11	Unit	
2	Truck Armroll	4	Unit	

Tabel 2.61
Data Rencana Kebutuhan Armada Angkutan Sampah

No	Jenis Armada	Volume	Satuan	Keterangan
1	Dump Truck	8	Unit	Kec. Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Longkali, Long Ikis
2	Truck Armroll	4	Unit	Kec. Tanah Grogot, Kuaro, Muara Samu, Komam,

C. Drainase

Pada saat ini sistem drainase di Kabupaten Paser masih kurang baik, pada musim hujan sering terjadi genangan pada sebagian wilayah kabupaten terutama pada daerah yang mempunyai topografi relatif rendah. Genangan yang terjadi, baik di jalan maupun di lingkungan permukiman, disebabkan oleh hujan bersifat sementara dengan durasi yang bervariasi. Genangan yang ada memang belum menimbulkan dampak kerugian materiil yang signifikan, namun dirasakan cukup mengganggu aktifitas masyarakat di sekitarnya.

Penyebab dari genangan tersebut antara lain luapan dari saluran yang sudah penuh dan tidak mampu menampung debit air yang lewat, kondisi saluran yang tersumbat akibat banyaknya sedimen dan sampah dalam saluran dan lubang drainase tersumbat. Untuk itu penanganan genangan yang akan dilakukan adalah membangun saluran baru atau melakukan rehabilitasi saluran yang ada agar kapasitasnya dapat menampung air hujan yang ada, melakukan pemeliharaan rutin pada semua saluran dan bangunan drainase yang ada.

D. Kawasan Kumuh Perkotaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.

Pemerintah Kabupaten Paser telah melaksanakan pendataan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di wilayah perkotaan Tana Paser dan telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Paser Nomor 653/KEP-392/2015 Tahun 2015 dengan luasan kawasan kumuh di wilayah perkotaan Tana Paser adalah 10,68 Ha. Pada umumnya permasalahan kawasan kumuh perkotaan Tana Paser adalah kurang tersedianya drainase dan jalan yang memadai serta jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 telah dilaksanakan penanganan terhadap lokasi kumuh yang telah ditetapkan tersebut, sehingga luasan kumuh perkotaan Tana Paser menjadi 0 hektar di tahun 2018

Capaian penanganan kawasan permukiman kumuh Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Tana Paser
Tahun 2015-2018

DESA/ KELURAHAN	RT/RW SK KUMUH	LUASAN KUMUH (Ha)			
		2015	2016	2017	2018
TANAH GROGOT	RT 07/RW 06	2	0,5	0	0
	RT 15/ RW 06	1,7	0,7	0	0
	RT 14/RW 06	1,8	0,5	0,5	0
	RT 07/RW 03	0,58	0,58	0,58	0
	RT 15/RW 02	1,2	1,2	1,2	0
SENAKEN	RT 02	2,8	2,8	0	0
TANAH PERIUK	RT 07	0,6	0,6	0	0

TOTAL	**10,68**	**6,88**	**2,28**	**0**

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Paser, 2019

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Paser melaksanakan verifikasi dan delineasi pada kawasan kumuh perkotaan Tana Paser, berdasarkan hasil verifikasi tersebut terdapat penambahan luasan kawasan kumuh perkotaan dimana berdasarkan SK Bupati tahun 2015 seluas 10,68 Ha dan berdasarkan hasil verifikasi luasan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh yang harus ditangani seluas 493 Ha. Untuk mengurangi kawasan kumuh tersebut Pemerintah Kabupaten Paser telah melakukan upaya penanganan hingga Tahun 2020 luasan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh telah berkurang menjadi 62,53 Ha. Capaian penanganan kawasan kumuh dan berpotensi kumuh yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dan berpotensi kumuh Perkotaan Tana Paser Tahun 2017-2020

Indikator	Kondisi Awal	2017	2018	2019	2020
Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh	493 Ha	453,65 Ha	211,64 Ha	87,63 Ha	62,53 Ha

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP kabupaten Paser. 2021

Permasalahan kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Paser belum sepenuhnya tuntas karena masih terdapat kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan lainnya yang belum tertangani, oleh karena itu pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Paser melakukan identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser dengan ruang lingkup wilayah kawasan perkotaan yang berada di 10 (sepuluh) Ibu Kota Kecamatan (IKK) Kabupaten Paser.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan permukiman kumuh perkotaaan di Kabupaten Paser yang dilaksanakan Tahun 2020 diperoleh luasan kawasan permukiman kumuh sebesar 224,52 Ha yang tersebar pada 10 (sepuluh) wilayah perkotaan, dengan luasan tertinggi berada pada kelurahan Tanah Grogot dengan luas 92,15 Ha atau sebesar 42,37% dari total luasan kumuh. Hal ini disebabkan karena Kelurahan Tanah Grogot merupakan Ibukota Kabupaten Paser dengan permukiman padat penduduk. Lokasi permukiman kumuh perkotaan tersebut telah ditetapkan

dengan SK Bupati Paser nomor 653/KEP-116/2021 tentang Penetapan lokasi perumahan kumuh dan Permukiman kumuh kawasan Perkotaan Kabupaten Paser.

Tabel 2.64
Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan Kabupaten Paser

No.	Nama Kelurahan/Desa	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Persentase (%)
1	Batu Kajang	20,46	9,11
2	Muara Komam	11,91	5,30
3	Kuaro	7,72	3,43
4	Long Ikis	12,50	5,56
5	Long Kali	21,60	9,62
6	Tanah Grogot	92,15	42,37
7	Pasir Belengkong	1,00	0,44
8	Batu Engau	24,48	10,90
9	Muara Samu	10,65	4,74
10	Tanjung Aru	19,05	8,48
	Total Luas	**224,52**	**100,00**

Sumber : Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kabupaten Paser, 2021

E. Backlog dan Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang tidak layak untuk tempat tinggal disebabkan oleh kondisi rumahnya yang tidak sehat atau berada di kawasan permukiman kumuh maupun rumah yang bisa membahayakan kehidupan penghuninya karena tidak memenuhi standar konstruksi. Konsep rumah layak huni adalah rumah yang mempunyai sirkulasi udara yang baik, kualitas air yang memadai, pencahayaan atau penerangan yang cukup, dapur bersih dan pembuangan asap lancar, konstruksi bangunan yang memenuhi standard, dan mempunyai sanitasi yang baik.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan jumlah backlog dan rumah tidak layak huni Kabupaten Paser masih tinggi, dimana angka backlog kepemilikan pada Tahun 2019 masih mencapai 9.562 unit sedangkan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 9.676 unit.

Tabel 2.65

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan
di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Backlog Kepemilikan	10.165	9.879	9.687	9.562	13.057
2	Backlog Penghunian	6.524	6.135	5.762	6.446	4.691
3	Rumah Tidak Layak Huni	13.332	12.709	10.943	9.676	8.470

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Grafik 2.13
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dan Backlog Perumahan
di Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

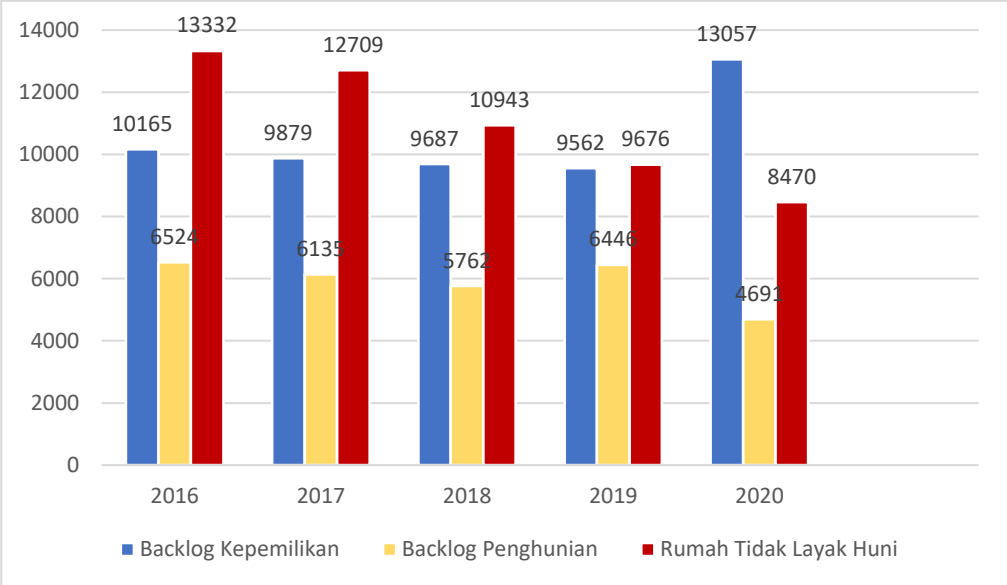

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser (Form 1 B)

Berdasarkan data jumlah rumah tidak layak huni periode Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa selama kurum waktu 5 tahun telah ada penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Hal ini dikarenakan adanya beberapa program yang telah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pembangunan rumah layak huni. Bantuan stimulan perumahan swadaya ini merupakan bentuk fasilitasi pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah (pra sejahtera). Tujuan bantuan stimulan ini adalah supaya rumah warga yang tidak layak

huni bisa dibangun menjadi rumah yang layak huni dengan lingkungan yang sehat serta aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penanganan rumah tidak layak huni Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Capaian Penanganan rumah tidak layak huni Tana Paser
Tahun 2016-2020

No	KEGIATAN	2016 (Unit)	2017 (Unit)	2018 (Unit)	2019 (Unit)	2020 (Unit)	SUMBER PENDANAAN
1	Pembangunan Rumah Layak Huni	31	54	140	161	108	APBD, APBN, DAK
2	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni/ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	612	569	1626	1107	1098	APBD, APBN, DAK
	Total	**643**	**623**	**1.766**	**1.268**	**1.206**	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

Selama lima tahun terakhir, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah sendiri terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2020 mencapai 81,26% sedangkan 18,74% dengan status sewa/kontrak, bebas sewa dan lainnya. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan semakin tingginya kepemilikan status tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya perkembangan persentase status kepemilikan tempat tinggal dapat dilihat pada table 2.67 berikut.

Tabel 2.67
Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status
Kepemilikan Tempat tinggal di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Milik sendiri	85,11	81,52	79,18	81,96	81,26
2	Kontrak /Sewa	9,13	9,86	10,75	-	-
3	Bebas sewa	2,6	6,11	7,48	-	-
4	Lainnya	3,16	2,51	2,58	18,04	18,74
	Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber : Satistik Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020
**) Tahun 2019 dan 2020 yang termasuk lainnya adalah kontrak/sewa, bebas sewa dan lainnya*

F. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% dari luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10%terdiri dari ruang terbuka hijau privat. luasan RTH Kabupaten Paser baru mencapai 638.171 m2 dengan rincian RTH Publik baru mencapai 335.206 m2. luas RTH tersebut tentunya masih belum dapat memenuhi proporsi RTH Publik minimal sebesar 20% dari luas kawasan perkotaan. Untuk lebih jelasnya luasan RTH dapat dilihat pada table 2.56 berikut.

Tabel 2.68
Luasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Kabupaten Paser Tahun 2019

No.	Jenis RTH	Luas (m2)
1	RTH Publik	335.206
2	Taman Median dan Daerah Milik Jalan	10.465
3	RTH Private	171.900
4	RTH Tempat Pemakaman Umum (TPU)	120.600
Total Luas		**638.171**

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Paser

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum, selama kurun waktu tahun 2018 jumlah gangguan Kamtibmas di wilayah Kabupaten Paser mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017. Tahun 2017 jumlah pelanggaran kamtibmas yang terjadi di wilayah Kabupaten Paser ada sebanyak 310 kejadian dan tahun 2018 turun menjadi 246 kejadian.

Grafik 2.14
Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2018

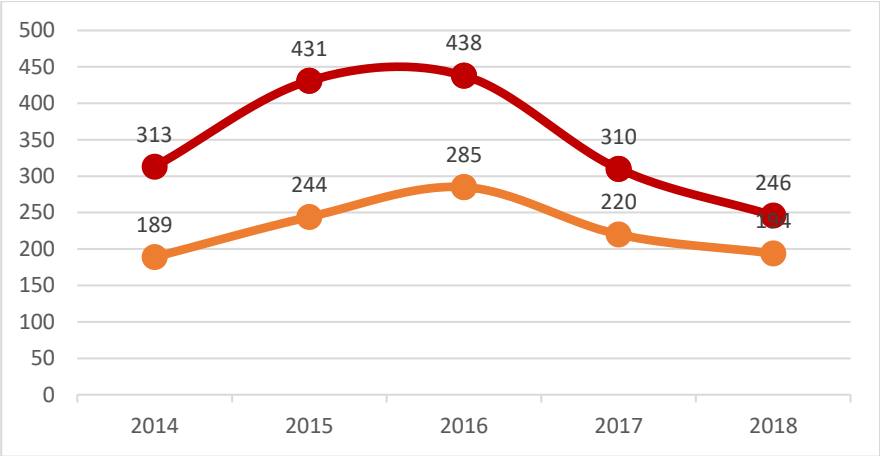

Sumber : Data Polres Paser 2019

Tabel 2.69
Banyaknya Gangguan Kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Paser 2018

Tahun	Kejadian	Diselesaikan
2018	246	194
2017	310	220
2016	438	285
2015	431	244
2014	313	189

Sumber : Data Polres Paser 2019

Pelanggaran Kamtibmas yang banyak terjadi adalah kasus pencurian. Sementara untuk angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Paser masih cukup tinggi.

Jumlah anggota Linmas terlatih di Kabupaten Paser pada tahun 2016 s/d 2020 adalah sebanyak 2.888 orang, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penambahan dan jumlahnya menjadi sebanyak 2.472 orang dan di tahun 2019 menjadi 2.476 orang.

Tabel 2.70
Jumlah Anggota Linmas Terlatih di Kabupaten Paser 2020

No.	Kecamatan	Jumlah
1	Batu Sopang	209
2	Muara Samu	137
3	Tanjung Harapan	231
4	Batu Engau	131

No.	Kecamatan	Jumlah
5	Pasir Belengkong	293
6	Tanah Grogot	499
7	Kuaro	273
8	Long Ikis	473
9	Muara Komam	205
10	Long Kali	387
11	Cadangan Kabupaten	50
2020		**2.888**
2019		**2.476**
2018		**2.472**
2017		**2.038**
2016		**2.038**

Sumber : Kabupaten Paser Dalam Angka 2020

2.1.3.1.6 Sosial

Layanan urusan wajib sosial terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Sehingga, sebagai tolak ukur untuk menentukan strategi dalam hal memenuhi kewajiban tersebut, seharusnya diketahui data mengenai jumlah sarana sosial seperti panti asuan, panti jompo dan panti rehabilitasi, serta jumlah PMKS yang menerima bantuan sosial. Kategori PMKS di Kabupaten Paser terdiri dari Balita terlantar, anak terlantar, Lansia terlantar, penyandang cacat, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Korban bencana alam.

Tabel 2.71
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tersedia

Kategori PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Anak balita terlantar	Jiwa	92	62	35	NA	27
2. Anak terlantar	Jiwa	470	420	458	NA	339
3. Lansia terlantar	Jiwa	1.124	1.176	1.059	NA	921
4. Penyandang cacat (disabilitas)	Jiwa	530	518	548	NA	801
5. Gelandangan dan Pengemis	Jiwa	NA	NA	NA	NA	9

Kategori PMKS	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
6. Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	485	485	485	118	118
7. Korban Bencana Alam	Jiwa	259	312	925	100	1412
8. Korban Bencana Sosial	Jiwa	0	0	0	364	5506

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Paser 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.69 di atas, kategori PMKS yang paling meningkat adalah Korban Bencana Alam, yaitu meningkat dari 100 pada tahun 2019 menjadi 1.412 pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan banyaknya bencana alam yang terjadi di Kabupaten Paser. Hal senada juga terjadi pada Korban Bencana Sosial yang meninggkat sebesar 5.506 di tahun 2020.

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Dalam perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, perlu mempertemukan beberapa bidang perencanaan pembangunan yang saling beririsan selain bidang ketenagakerjaan yaitu demografi, ekonomi dan pendidikan. Ketiga bidang tersebut menjadi pilar dalam program pembangunan yang berkaitan dengan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, produktivitas dan distribusi tenaga kerja serta peningkatan kualitas sumber daya manusia angkatan kerja. Tantangan kajian ketenagakerjaan bagi pembangunan adalah mempertemukan ketersediaan angkatan kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dan produktif secara ekonomi sehingga mampu menciptakan kemandirian warga.

Dilihat dari struktur penduduk produktif, komposisi penduduk angkatan kerja pada tahun 2018 sebanyak 124.222 orang (62,11 persen) dan bukan angkatan kerja sebanyak 75.768 orang (37,89 persen). Sebagian besar penduduk 93,13 persen dari penduduk angkatan kerja kegiatan utamanya adalah bekerja, tetapi masih ada 6,87 persen yang mencari pekerjaan.

Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Paser mencapai 62,11% pada tahun 2018, sedangkan tingkat pengangguran penduduk usia kerja mencapai 6,87%, hal ini dapat dilihat dari TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) pada tahun 2018.

Tabel 2.72
Penduduk Berumur 15 tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan, 2018-2020

	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Kegiatan Utama	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**	**Jumlah**	**%**
Angkatan Kerja	**124.222**	**62,11**	**137.737**	**68,75**	**142.568**	**67,88%**
• Bekerja	115.694	93,13	131.471	95,45	136.131	95,48%
• Pengangguran	8.528	6,87	6.266	4,54	6.437	4,51%
Bukan Angkatan Kerja	**75.768**	**37,89**	**69.611**	**34,74**	**67.452**	**32,11%**
• Sekolah	21.385	28,22	19.092	27,42	16.515	24,48%
• Mengurus Rumah Tangga	48.376	63,85	44.269	63,59	44.926	66,60%
• Lainnya	6.007	7,93	6.250	8,97	6.011	8,91%
Jumlah	**199.990**	**100,00**	**207.348**	**100,00**	**210.020**	**100,00**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser 2021

Walaupun sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser, bukan berarti sektor tersebut juga berkontribusi secara dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tabel di bawah ini, sektor pertanian masih menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha pertanian menyerap tenaga kerja sebanyak 37,26% pada tahun 2019. Pada sisi yang lain, persentase sektor pertambangan dan penggalian hanya menunjukkan angka 7,83% pada tahun 2019, dimana sektor pertambangan dan penggalian ini penyerapan tenaga kerjanya masih di bawah sektor Jasa Kemasyarakatan dan perdagangan, yaitu masing-masing sebesar 23,30% dan 16,03%.

Tabel 2.73
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin (orang)		Total	%
	Lk	Pr		
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	38.574	10.408	48.982	37,26
Pertambangan dan penggalian	10.071	220	10.291	7,83
Industri Pengolahan	2.803	1.430	4.233	3,22
Listrik, gas dan air	1.000	164	1.164	0,89
Bangunan	6.470	-	6.470	4,92

Lapangan Usaha	Jenis Kelamin (orang)		Total	%
	Lk	Pr		
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	13.873	16.764	30.637	23,30
Angkutan, pergudangan dan komunikasi	5.665	119	5.784	4,40
Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan	1.987	842	2.829	2,15
Jasa kemasyarakatan	11.085	9.996	21.081	16,03
JUMLAH	**91.528**	**39.943**	**131.471**	**100,00**

Sumber : Data Sektoral Disnakertrans Kabupaten Paser 2020

Dengan demikian, pertanian masih menjadi sektor terbesar yang mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Paser walaupun sumbangannya terhadap PDRB masih rendah. Di samping pertanian, sektor jasa dan perdagangan juga cendrung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Menurunnya daya serap sektor pertambangan dan penggalian dan meningkatnya daya serap sektor lainnya mengindikasikan bahwa sektor lain diluar pertambangan dan penggalian secara perlahan-lahan mengalami penguatan daya serap tenaga kerja.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk menunjukkan aspek pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari kualifikasi sumberdaya manusianya atau dari tingkat pendidikan. APM pada tingkat SD, di tahun 2020 sejumlah 97,74%. APM pada tingkat SMP 2020 sejumlah 81,66%. Untuk tingkat SMP, jumlah partisipasi sekolahnya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tingkat SD. APM pada tingkat SMA di tahun 2020 sejumlah 62,80.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang pemberdayaan perempuan adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser pada Tahun 2020 bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah 4.520 orang, selisihnya sedikit dengan PNS laki-laki yang berjumlah 2.514 orang. Jika dilihat dari seluruh Lapangan Pekerjaan, perempuan usia 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 39.943 orang atau 30,38%.

Angka partisipasi perempuan dalam kategori pendidikan sekolah SD-SMA ternyata tidak diikuti dengan jumlah partisipasi perempuan sebagai angkatan kerja. Padahal ukuran kesetaraan sebetulnya tidak hanya selesai dilihat dari angka partisipasi sekolahnya namun juga kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan yang salah satunya direpresentasikan dalam partisipasi pada angkatan kerja. Sedangkan angka

partisipasi perempuan di ranah politik (Anggota DPRD) justru sangat rendah. Di periode tahun 2010 hingga 2013 perbandingan perempuan dan laki-laki hanya 12%. Angka ini tidak mengalami lonjakan yang cukup berarti sebab pada pemilu legislatif yang terahir yakni tahun 2014 hingga 2018 perbandingannya hanya 17%.

Sedangkan upaya untuk perlindungan anak masih sangat perlu perhatian lebih intensif. Hingga saat ini masih terdapat balita dan anak terlantar yang membutuhkan pertolongan, untuk balita terlantar pada tahun 2018 sebanyak 35 balita, sedangkan anak terlantar pada tahun 2018 sebanyak 458 anak yang perlu ditangani. Sampai saat ini, Kabupaten Paser belum menyediakan Panti Asuhan anak yang dapat merehabilitasi kasus-kasus anak dan balita terlantar.

2.1.3.2.3 Pangan

Ketahanan pengan merupakan salah satu bagian dari cita-cita nasional yang harus terdukung juga dengan cita-cita daerah. Produksi tanaman pangan setempat diharapkan mampu menyuplai kebutuhan pangan masyarakat. Sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan dominan dapat dimaksimalkan produksinya agar memenuhi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Paser secara mandiri.

Tabel 2.74
Produksi Padi dan Palawija (Ton) di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

Jenis Produksi	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Padi Sawah	31.566	36.023	23.394	30.432,17	52.366
Padi Ladang	9.230	5.445	7.148	9.005,58	
Jagung	1.170	3.523	15.306	6.461	6.569
Ubi Kayu	855	3.478	1.738	1.159	3.706
Ubi Jalar	212	300	343	352	383
Kacang Tanah	75	86	40	56	83
Kacang Kedelai	252	61	-	1	20
Kacang Hijau	18	5	3	7	14

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kab. Paser 2021

Dilihat dari distribusi hasil panen, kecamatan yang memberikan kontribusi terbesar untuk produksi padi (sawah maupun ladang) adalah Kecamatan Long Kali dengan jumlah

produksi 14.321 ton kemudian Kecamatan Pasir Belengkong dengan jumlah 9.123 ton, disusul Kecamatan Tanah Grogot dengan jumlah produksi padi 4.954 ton. Khusus untuk padi ladang yang biasa tersebar di daerah lahan kering, kecamatan yang memberikan kontribusi produksi padi ladang terbesar adalah Kecamatan Muara Komam dengan jumlah 2.046 ton, Kecamatan Batu Engau dengan jumlah 1.621 ton dan disusul Kecamatan Muara Samu dengan jumlah 1.394 ton. Sehingga sampai saat ini Kecamatan Longkali merupakan wilayah pertanian hasil pangan yang menyumbang produksi padi paling besar untuk di Kabupaten Paser.

Tabel 2.75
Luas Panen, Produksi Padi dan Ladang Menurut Kecamatan
di Kabupaten Paser Tahun 2020

No.	Kecamatan	Padi Sawah		Padi Ladang	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Batu Sopang	0.00	0.00	514	1.649,34
2	Muara Samu	8	63.60	704	2.108,34
3	Tanjung Harapan	5	0.00	18	104,04
4	Batu Engau	0.00	0.00	307.00	939,42
5	Pasir Belengkong	1,276.10	5.593,36	18.00	55,08
6	Tanah Grogot	1,245.30	5.479,51	0.00	0.00
7	Kuaro	101,60	472,98	161.00	492,66
8	Long Ikis	820,50	3,477,38	82.00	250,92
9	Muara Komam	0.00	0.00	670.00	2.050,20
10	Longkali	3.265,30	15.345,34	443.00	1.355,58
	Jumlah	**6,720.80**	**30.432,17**	**2.943.00**	**9.005,58**

Sumber : Statistik Dinas Pertanian Kab. Paser, 2020

Tabel 2.76
Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar
di Kabupaten Paser 2015-2019

Tahun	Produktivitas Padi Sawah Per Hektar	Produktivitas Padi Ladang Per Hektar
2015	4,34	3,00
2016	4,65	2,64

2017	4,62	2,59
2018	4,27	2,93
2019	4.36	3,06

Sumber : BPS Kabupaten Paser Tahun 2020

Grafik 2.15
Produktivitas Padi Sawah dan Padi Ladang Per Hektar
di Kabupaten Paser 2015-2019

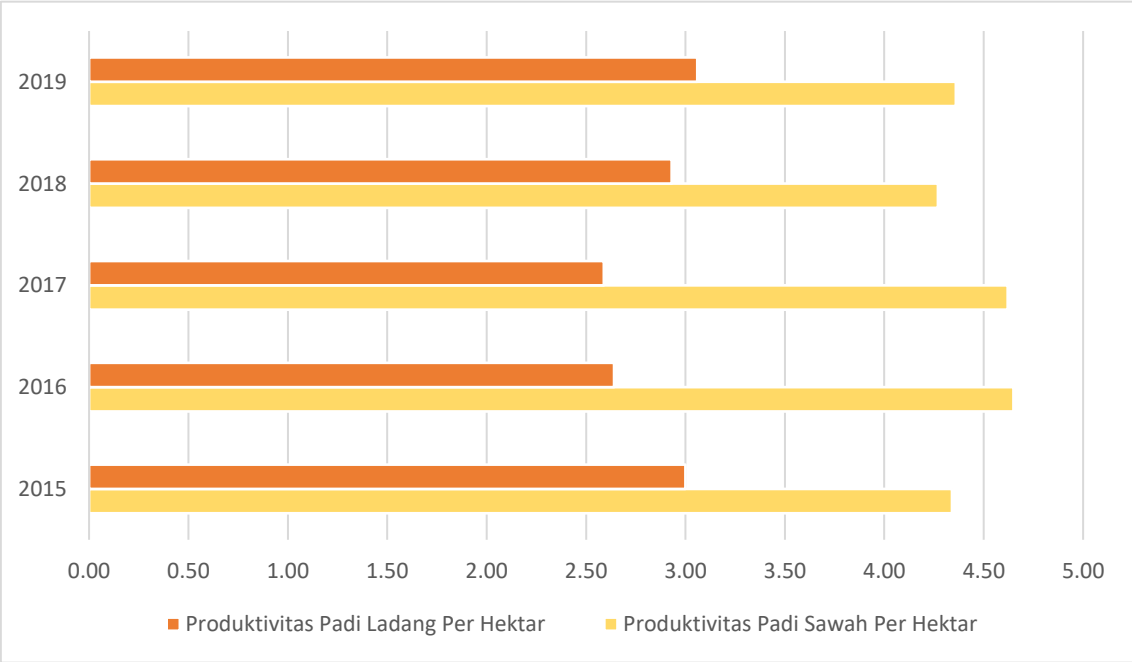

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Pertanian, Kabupaten Paser Tahun 2020

Produktivitas padi sawah per hektar menunjukkan kondisi fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4,62 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali menjadi sebesar 4,27 ton per hektar. Sedangkan pada produktivitas padi ladang menunjukkan juga kondisi yang fluktuatif dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,59 ton per hektar, sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,93

ton per hektar. Tabel di atas menunjukkan bahwa produktivitas padi cendrung berfluktuasi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan agar sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Aglomerasi penduduk dan peningkatan insfrastruktur jasa membutuhkan pengelolaan lahan yang semakin rapi. Salah satu wujud unsaha untuk mengendalikan dan mengatur pengelolaan bangunan adalah adanya IMB. IMB merupakan perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Dengan adanya penetapan IMB di Kabupaten Paser, diusahakan akan terwujudnya ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Individu atau persekutuan (badan) yang akan mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan sesuai Pasal 5 ayat 1 Perda Nomor 7 Tahun 2009.

Tabel 2.77
Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Bangunan ber-IMB
2016	271
2017	170
2018	247
2019	320
2020	229

Sumber : Data DPMPTSP Kabupaten Paser 2021

Grafik 2.16
Jumlah Bangunan ber-IMB Tahun 2016 – 2020

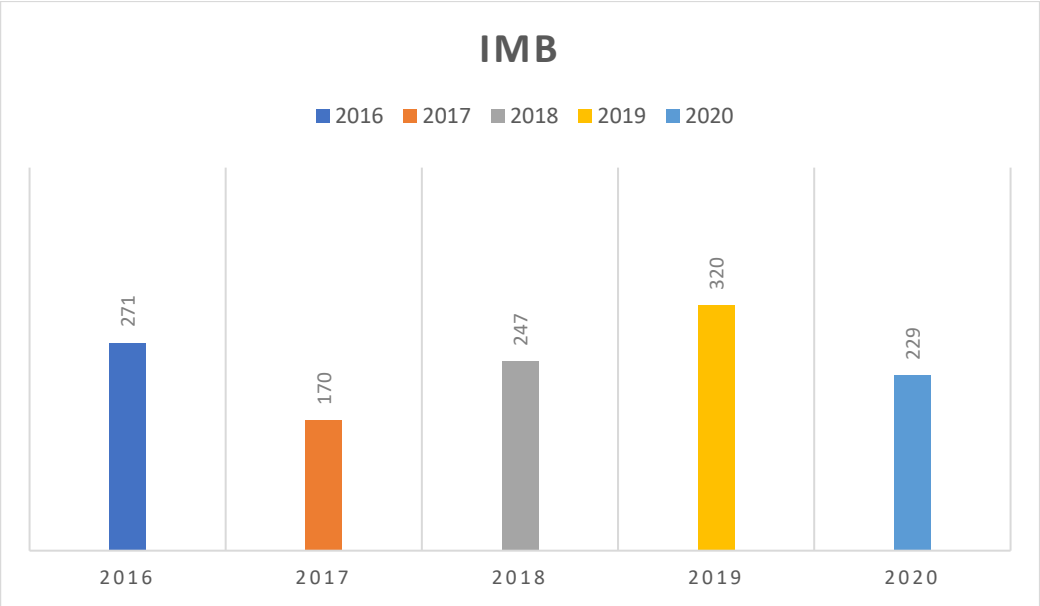

Sumber : Data DPMPTSP Kabupaten Paser 2021

Walaupun pengurusan IMB oleh warga belum maksimal, terjadi peningkatan IMB dari tahun 2019 menjadi 320 yang sebelumnya 247 pada tahun 2018 dan kemudian turun pada tahun 2020 menjadi 229, penurunan terjadi akibat adanya pandemic covid-19 sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB juga menurun. Dengan adanya pengaturan dalam pendirian bangunan diharapkan rencana konstruksi bangunan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan bersama.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

A. Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, memberikan kewenangan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, daerah diamanatkan untuk melaksanakan seluruh proses penataan ruang di daerah sebagaimana merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pada Proses Perencanaan Tata Ruang, hasil pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan produk rencana tata ruang yang ada hingga tahun 2019 sebagaimana tergambar dalam tabel 2.76 berikut :

Tabel 2.78
Kondisi Penyelesaian Produk Rencana Tata Ruang
Kabupaten Paser s.d Tahun 2020

No.	Jenis Produk Rencana Tata Ruang Daerah	Jumlah Produk RTR	Materi Teknis	Produk Hukum Daerah (Perda)
1	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Perda Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 29 Oktober 2015	1	1	1
2	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	11	6	0
3	Rencana Kawasan Strategis	5	0	0

Sumber : Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2021

Sedangkan pada kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan telah dilakukan koordinasi meski hingga saat ini masih berada pada tahapan materi teknis dan pendukungnya, kondisi tersebut diantaranya pada penyusunan :

a. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanah Grogot (Review Tahun 2017) dan proses KLHS Tahun 2018;
b. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kuaro (Penyusunan Tahun 2018);
c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Batu Sopang (Review Tahun 2018);
d. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pasir Belengkong (Penyusunan Tahun 2012);
e. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Ikis (Penyusunan Tahun 2012); dan
f. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Long Kali (Penyusunan Tahun 2013).

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan indikator dari kualitas lingkungan suatu daerah, hal ini dapat dilihat dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Untuk mendukung pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup yang ideal diperlukan pengendalian pencemaran lingkungan baik air, udara dan tanah. Akibat dari penurunan kualitas lingkungan juga menjadi salah satu penyebab dari bencana alam yang terjadi.

C. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan

kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. Oleh karena itu, untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

D. Indeks Kualitas Udara

Udara merupakan sumber daya alam yang paling berpengaruh bagi kehidupan mahluk hidup di bumi, sehingga harus dijaga dan dipelihara kelestarian karena tanpa udara, makhluk hidup bisa kehilangan kehidupannya. Dengan semakin meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi manusia, semisal bidang industri dan transportasi, maka secara logis semakin meningkat pula zat-zat polutan yang dikeluarkan kegiatan industri maupun transportasi tersebut. Keberadaan zat-zat polutan di udara ini tentu akan berpengaruh terhadap proses-proses fisik dan kimia yang terjadi di udara.

E. Indeks Tutupan Lahan

Perubahan lahan sebagai konsekuensi dari peningkatan kebutuhan akan ruang, memiliki berbagai bentuk. Namun umumnya yang menjadi sorotan adalah perubahan dari bentukan alami menjadi buatan. Hal ini dikarenakan terdapat dampak lingkungan yang menyertainya. Contohnya adalah deforestasi, yang mengubah bentukan hutan menjadi area pertanian atau perkotaan.

Luas lahan kritis terbesar pada tahun 2018 adalah sebesar 22.129,4 Ha, terletak di Kecamatan Batu Sopang, sedangkan untuk lahan sangat kritis terbesar ada di Kecamatan Muara Samu sebesar 4.267,9 Ha terletak di Kecamatan Muara Samu. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingakan dari tahun sebelumnya.

Adapun beberapa sumber penyebab lahan kritis adalah sebagai berikut :

a. Perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka bekas tambang batubara;
b. Perkebunan, pertanian, pemukiman, kebakaran lahan dan lahan terbuka bekas PETI;

c. Perkebunan, pertanian, pemukiman dan kebakaran lahan;
d. Perkebunan dan Hutan Tanaman Industri;
e. Eks penebangan hutan pada era kayu;
f. Pembukaan lahan untuk pertambangan; dan
g. Kawasan dengan kondisi alamiah tanah berupa pegunungan kapur atau dengan solum rendah.

Tabel 2.79
Indeks Kualitas Air Di Kabupaten Paser

Status Kualitas Air	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	8	25	70	17,5
Ringan	18	56,25	50	28,125
Sedang	2	5,25	30	1,875
Berat	4	12,5	10	1,25
Total	32			48,75
			INDEKS KUALITAS AIR	**48,75**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2021

Tabel 2.80
Indeks Kualitas Udara Di Kabupaten Paser

Titik	SO_2	NO_2	IKU SO_2	IKU NO_2
Depan Kantor Kec. Kuaro	8,843	4,455	99,687	99,842
Depan Kantor DLH Paser	7,588	12,977	99,731	99,541
Depan Kantor Kec. Batu Sopang	14,013	10,781	99,504	99,618
Depan Kantor Kec. Belengkong	12,846	9,513	99,545	99,663
			99,617	99,666
			INDEKS KUALITAS UDARA	**99,642**

Tabel 2.81
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Km^2) Di Kabupaten Paser

Luas Wilayah	Hutan	Belukar	Tutupan Hutan	ITH
1.113.606,07	525.077,46	136.375,15	0,54	72,558797

IKTL	72,558797

F. Emisi Gas Rumah Kaca

Efek rumah kaca merupakan kondisi yang terjadi seperti pada rumah kaca, dimana panas matahari terjebak di atmosfer bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi hangat. Gas-gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari disebut gas rumah kaca. Yang termasuk gas rumah kaca yang ada di atmosfer antara lain adalah karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (N2O), metana (CH4), dan freon (SF6, HFC dan PFC). Berdasarkan potensi emisinya maka di Kalimantan Timur ditetapkan tiga sumber emisi yaitu: sektor pengelolaan limbah, sektor pemanfaatan lahan (pertanian, kehutanan dan sektor berbasis pemanfaatan lahan lainnya) dan sektor energi, transportasi, industri. Adapun baseline disusun berdasarkan data dan informasi teknis dari bidang-bidang sesuai dengan ketetapan pembagian, Gas-gas yang dihitung dari berbagai aktivitas yang menimbulkan emisi umumnya adalah CO2 (Carbon dioksida), CH4 (Methane) dan N2O (Nitrogen dioksida) dengan satuan Gg/tahun CO2 equivalen. Berdasarkan perhitungan pada Tabel….. maka pada tahun 2018 total emisi dari sektor energi sebesar 148,3 Gg/tahun CO2 equivalen, pada sektor pemanfaatan lahan pertanian sebesar 166,09 Gg/tahun CO2 equivalen dan sektor pemanfaatan lahan kehutanan sebesar -260, 03 Gg/tahun CO2 equivalen.

Tabel 2.82
Data Emisi Rumah Kaca

No.	Bidang	2018				2019				2020			
		Co2 (Gg)	CH4 (Gg)	N2O (Gg)	CO2 Eq (Gg)	Co2 (Gg)	CH4 (Gg)	N2O (Gg)	CO2 Eq (Gg)	Co2 (Gg)	CH4 (Gg)	N2O (Gg)	CO2 Eq (Gg)
1	Energi	0	7,06	0	148,3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pertanian	28,82	1,6	0,33	166,1	27,84	1.71	0,31	159,6	0	0	0	0
3	Kehutanan	-260,03	0	0	-260,03	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Limbah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser, 2021

G. Kebencanaan

Kabupaten Paser memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis bencana seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi iklim yang menyebabkan panjangnya musim kemarau atau musim penghujan. Untuk bencana alam banjir seringkali terjadi pada wilayah-wilayah dataran rendah dan sekitar sungai, hal ini juga dipicu karena adanya pendangkalan sungai sehingga kemampuan menampung air hujan semakin berkurang.

Tabel 2.83
Rekapitulasi Bencana Di Kabupaten Paser Tahun 2019

No.	Jenis Bencana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des
1.	Kebakaran Hutan dan Lahan	2	2					2	32	75	11	8	
2.	Pohon Tumbang	3		2								2	1
3.	Kebakaran Rumah			1					4				
4.	Orang Tenggelam		2			2		1					1
5.	Kebakaran Rumah & Bangunan		2			2		4		5	1		2
6.	Banjir		3				3						
7.	Tanah Longsor		1	1									
8.	Gelombag Pasang		1										
9.	Gagal Teknologi				1								
10.	Gempa Bumi					1							
11.	Orang Hilang					1							
12.	Evakuasi Mayat								1		1		1
13.	Kekeringan									1			
14.	Evakuasi Kecelakaan Kerja										1		
	Jumlah	**5**	**11**	**4**	**1**	**6**	**3**	**7**	**37**	**81**	**14**	**10**	**5**

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser, 2020

Tabel 2.84

Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2018-2020

Kecamatan	2018	2019	2020
Batu Sopang	2	5	4
Muara Samu	1	8	7
Batu engau	-	-	-
Tanjung Harapan	-	-	-
Pasir Belengkong	8	6	6
Tanah Grogot	5	6	8
Kuaro	-	-	-
Long Ikis	3	8	6
Muara Komam	-	-	4
Long Kali	14	14	9
Paser	**33**	**47**	**44**

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembangunan manusia adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Karakteristik penduduk sangat memiliki pengaruh terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial-ekonomi penduduk yang biasanya dilihat dari struktur umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.85

Jumlah, Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Distribusi Penduduk	Kepadatan Penduduk per km^2
Batu Sopang	26.87	1,71	9,75	24,17
Muara Samu	6.86	4,80	2,49	8,02
Batu Engau	16.97	3,70	6,16	11,26
Tanjung Harapan	8.86	1,34	3,22	12,40
Pasir Belengkong	28.60	1,90	10,38	28,88
Tanah Grogot	76.34	1,83	27,72	227,50
Kuaro	29.19	1,94	10,60	39,06
Long Ikis	41.15	1,11	14,94	34,17
Muara Komam	13.06	0,45	4,74	7,45

Long Kali	27.58	1,26	10,01	11,56
Paser	275,45	1,75	100,00	23,74

Sumber: BPS Kabupaten Paser, 2021

Kecamatan Tanah Grogot merupakan ibukota Kabupaten Paser yang mempunyai penduduk paling banyak di Kabupaten Paser, sebaliknya Kecamatan Muara Samu merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Muara Samu sebesar 4,80%, Kecamatan Batu Engau sebesar 3,70%. Tingginya pertumbuhan penduduk pada wilayah ini tidak terlepas dari tersedianya potensi pengembangan wilayah, kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tingginya pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser mengindikasikan bahwa kontribusi tertinggi dalam pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser tahun 2018 dikarenakan tingginya migrasi dari luar provinsi yang datang mengingat Kecamatan Muara Komam dan Kecamatan Batu Engau berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

Migrasi ini terjadi dengan berbagai alasan antara lain untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, upaya pengendalian jumlah penduduk migrasi perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ke depan. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumberdaya yang ada didaerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, meningkatnya jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Paser tahun 2020 mencapai 23,74 jiwa per km^2. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Paser temasuk kategori penduduk sangat jarang. Namun demikian kepadatan penduduk di Kabupaten Paser tiap tahunnya semakin bertambah, peningkatan kepadatan penduduk tersebut seiring dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal dan regional yang terjadi di daerah ini.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling padat adalah Kecamatan Tanah Grogot yaitu sebanyak 227,50 jiwa/km^2, dengan jumlah penduduk sebanyak 76.34 jiwa atau sebesar 27,72% dari total penduduk Kabupaten Paser tahun 2020. Sedangkan kepadatan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Muara Komam yaitu sebanyak 7,45 jiwa/ km^2.

Layanan dasar kependudukan dan catatan sipil meliputi jumlah penduduk ber-KTP, jumlah penduduk ber-akte kelahiran serta jumlah pasangan berakte nikah. Selain

merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, ketersediaan dokumen-dokumen tersebut juga sangat mempengaruhi kualitas pendataan daerah terkait jumlah penduduk. Ataupun juga untuk menentukan target group dari program tertentu seperti program keluarga bencana dengan targetnya adalah pasangan sudah menikah yang akan diketahui jumlahnya jika terdaftar/pernah memiliki akte nikah.

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Untuk konteks Kabupaten Paser, bagian ini memaparkan data mengenai jumlah program pemberdayaan masyarakat. Data tersebut berdampak pada penentuan prioritas program pemberdayaan masyarakat di tahun berikutnya.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gerakan Keluarga Berencana Nasional sebagai salah satu kegiatan pokok dalam upaya mencapai keluarga sejahtera diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga diupayakan agar makin membudaya dan makin mandiri melalui penyelenggaraan penyuluhan Keluarga Berencana (KB), disertai dengan peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan dengan tetap memperhatikan kesehatan peserta KB dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral, etika dan sosial budaya masyarakat, sehingga norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera dihayati dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Lahirnya program keluarga berencana antara lain bertujuan untuk menekan tingginya angka kelahiran. Program seperti ini masih sangat diperlukan karena jika jumlah penduduk tidak dapat dikendalikan, maka upaya yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bisa menjadi tidak bermakna, karena setiap peningkatan hasil pembangunan akan terserap oleh pertumbuhan penduduk. Usia antara 15-49 tahun merupakan usia subur bagi perempuan karena pada selang usia tersebut kemungkinan perempuan melahirkan anak cukup besar. Perempuan yang usianya berada pada periode ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin. Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangga. Dengan demikian pembatasan jumlah anak perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Tabel 2.86
Persentase Penduduk Perempuan Umur 10 Tahun Ke atas
Menurut Status Perkawinan di Kab Paser Tahun 2016 - 2020

Status Perkawinan	2016	2017	2018	2019	2020
Belum Kawin	29,02	29,10	27,06	27,75	27,45
Kawin	63,52	63,47	65,31	64,26	64,68
Cerai *)	7,47	7,44	7,64	7,99	7,87
Jumlah	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

**) Termasuk cerai hidup dan cerai mati*
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser Tahun 2021

Pada tahun 2020, persentase penduduk perempuan 10 tahun ke atas berstatus kawin mengalami kenaikan dari 64,26 persen pada tahun 2019 menjadi 64,68 persen. Namun demikian status cerai mengalami sedikit penurunan menjadi 7,87 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,99 persen. Seiring dengan itu, status belum kawin juga mengalami penurunan menjadi 27,45 persen, jika di bandingkan tahun 2019 sebesar 27,75 persen.

Diagram 2.1
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Penggunaan Alat/Cara KB di Kabupaten Paser Tahun 2020

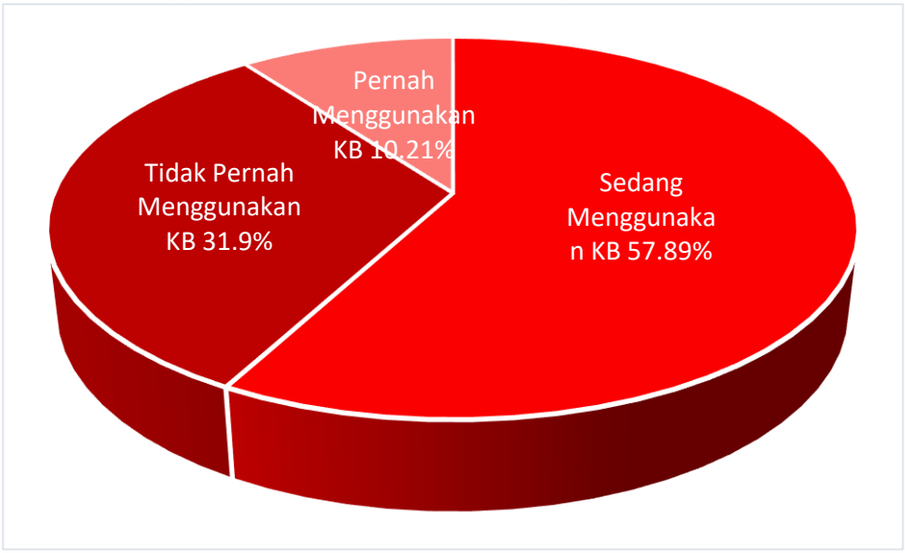

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Paser, 2021

2.1.3.2.9 Perhubungan

Perhubungan atau transportasi merupakan salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang yang berkembang sangat dinamis, disamping berperan dalam mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.Pembangunan transportasi pada hakekatnya untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional menuju terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan bidang transportasi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

diberbagai sektor di daerah, daya saing, serta meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah.

Mencermati dinamika perkembangan yang terjadi, maka perencanaan pembangunan infrastruktur transportasi ke depan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang terjadi, baik pada skala lokal, nasional maupun global. Tantangan pembangunan infrastruktur transportasi dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah bagaimana mewujudkan konektivitas wilayah dalam upaya peningkatan kelancaran akses kepada masyarakat pengguna jasa transportasi termasuk pendistribusian barang sampai ke pelosok, sebagai upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi yang merata serta mewujudkan pembangunan sektor unggulan.

Kabupaten Paser yang memiliki keunggulan dan karakteristik baik dari segi wilayah maupun jumlah penduduk. Luasnya wilayah kabupaten Paser yang mencapai 11.603,94 km2 yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan jumlah penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti dimana diperkirakan sesuai data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk pada tahun 2017 mencapai 274.206 jiwa, dan bertambah 279.975 jiwa pada tahun 2018. Lebih dari 25,83% tinggal di kecamatan Tanah Grogot yang merupakan ibukota kabupaten Paser, sedangkan sisanya tidak merata tersebar di 9 kecamatan. Upaya untuk mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar dalam kerangka pemerataan pembangunan harus didorong melalui dukungan pembangunan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi yang merata, proses perencanaan pembangunan transportasi untuk lima tahun ke depan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, kondisi sekarang, sasaran maupun target yang belum tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian target RPJMD dan Renstra sampai dengan tahun 2021, perlu digaris bawahi bahwa secara umum target output bisa tercapai, namun secara outcome masih perlu mendapat perhatian apakah dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat maupun terhadap aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu perlu terlebih dahulu memahami kondisi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pelayanan transportasi terhadap perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur transportasi kabupaten paser yang meliputi :

A. Transportasi Darat

Transportasi darat memiliki potensi yang besar dalam mempersatukan seluruh sistem transportasi. Untuk angkutan barang peranpokok transportasi darat adalah sebagai pengumpan *(feeder)* terhadap sistem transportasi di Kabupaten Paser. Arah pengembangan transportasi darat harus selaras dan terintegrasi dengan

arahpengembangan moda transportasi lainnya. Berikut data Prasarana dan sarana transportasi darat di Kabupaten Paser.

Tabel 2.87

Panjang Jalan dengan Tingkat Kewenangan Pemerintah Kabupaten Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Paser (km), 2020

No.	Kecamatan	Jenis Permukaan Jalan			
		Aspal	Tidak Aspal	Lainnya	Jumlah
1	Batu Sopang	23,60	12.02	36,13	71,75
2	Muara Samu	8,30	2,22	14,47	24,99
3	Batu Engau	4,60	49,90	48,54	103,04
4	Tanjung Harapan	-	7,76	26,62	34,38
5	Pasir Balengkong	51,50	4,96	70,46	126,92
6	Tanah Grogot	132,30	5,73	44,17	182,20
7	Kuaro	30,50	4,34	32,35	67,19
8	Long Ikis	47,60	20,70	37,85	106,15
9	Muara Komam	8,90	13,60	89,37	111,87
10	Long Kali	26,40	30,70	119,60	176,70
Paser		**333,70**	**151,93**	**519,56**	**1.005,19**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser, 2021

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Berikut jumlah kendaraan bermotor :

Tabel 2.88

Jumlah Kendaraan Bermotor (Umum dan Pribadi)

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sepeda Motor				8.347	5.683
2	Mobil Penumpang					
	Umum	238	239	239	61	7
	Tidak Umum	-	-	-	761	301
	Dinas	-	-	-	17	4
3	Mobil Barang					
	Umum	346	346	346	122	20
	Tidak Umum	7927	8415	9302	465	376
	Dinas	157	157	157	17	2

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah (Unit)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Bus Besar					
	Umum	-	-	-	-	-
	Tidak Umum	10	28	28	-	-
	Dinas	1	1	1	-	-
5	Bus Sedang					
	Umum	28	28	28	-	2
	Tidak Umum	123	112	110	-	-
	Dinas	6	6	6	-	-
6	Bus Kecil					
	Umum	2	2	2	-	6
	Tidak Umum	38	49	51	-	-
	Dinas	5	5	5	-	-
7	Kendaraan Roda Tiga					
	Umum	-	-	-	-	-
	Tidak Umum	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Paser, 2021

Data di atas terhadap tingkat pelayanan angkutan lebih cenderung tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Saat ini pelayanan angkutan keprintisan untuk mendukung konektivitas wilayah, khususnya wilayah pedalaman masih belum optimal, antara lain belum seluruh kecamatan dilayani angkutan umum. Berikut jumlah armada dan panjang trayek.

Tabel 2.89
Jumlah Armada dan Panjang Trayek Tahun 2020

Kode Trayek	Panjang Trayek (km)	Jumlah Armada (Unit)					Tarif /km (Rp)
		Bus Besar	Bus Sedang	Bus Kecil	Mobil Penumpang Umum	Tarif (Rp)	
Angkutan Perkotaan		-	-	-	18	6.000,-	
Angkutan Perdesaan							
Tanah Grogot – Kerang		-	-	-	19	35.000,-	
Tanah Grogot – Payo Klato		-	-	-	18	10.000,-	
Tanah Grogot – Bekoso		-	-	-	7	10.000,-	
Tanah Grogot – Pondong		-	-	-	8	11.000,-	
Tanah Grogot – Muara Komam		-	-	-	11	50.000,-	
Tanah Grogot - Lori		-	-	-	13	40.000,-	

Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKAP) Tanah Grogot - Penajam							
Tanah Grogot - - Penajam (MPU)	147	-	-	-	114	60.000,-	
Tanah Grogot - - Penajam (Bus)	147	9	-	1		50.000,-	
Jumlah	147	9		1	208		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Paser 2021

Standar keselamatan dan keamanan transportasi darat meliputi kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana keselamatan. Berikut jumlah kendaraan bermotor wajib uji.

Tabel 2.90
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dan Realisasi

No.	Jenis Kendaraan	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi	Wajib Uji	Realisasi
1	Bus Umum								
	• Ukuran Besar	0	0	0	0	0	0	0	0
	• Ukuran Sedang	1	28	1	1	1	0	1	0
	• Ukuran Kecil	2	2	2	2	2	0	2	0
2	Bus Bukan Umum								
	• Ukuran besar	2	11	2	6	6	2	10	10
	• Ukuran sedang	248	118	223	245	245	283	231	220
	• Ukuran kecil	2	54	2	2	2	0	10	10
3	Mobil Penumpang Umum	187	239	164	239	239	162	239	127
4	Taksi	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pick up	4.412	5.187	5.555	5.387	5.387	3.379	5.606	3.585
6	Truk berat	13	13	13	13	13	13	14	14
7	Truk sedang	4.499	3.684	4.302	4.405	4.405	2.819	4.427	2.898
8	Kereta gandengan	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kereta tempelan	2	2	2	2	2	2	2	0
10	Penarik (tracktor head)	1	1	1	1	1	1	2	0
	Jumlah	9.370	9.339	10.267	8.629	10.303	6.661	10.144	6.864

Sumber : UPTD PKB Kabupaten Paser 2021

Selain itu rendahnya pengetahuan dan kesadaran untuk tertib berlalu lintas juga perlu menjadi perhatian bersama terhadap tingkat resiko kecelakaan. Berikut jumlah kejadian kecelakaan.

Tabel 2.91
Jumlah Kejadian Kecelakaan

No.	Tahun	Jumlah Lokasi	Jumlah Kejadian Kecelakaan	Jumlah Korban				Faktor Penyebab utama kecelakaan
				Meninggal dunia	Luka berat	Luka ringan	Total	
1	2016	85	85	56	9	86	151	Manusia (84,65%) Alam (1,48%) Kendaraan (4,88%) Prasarana Jalan (8,99%)
2	2017	103	103	52	4	95	151	Manusia (84,65%) Alam (1,48%) Kendaraan (4,88%) Prasarana Jalan (8,99%)
3	2018	68	68	34	6	97	137	Manusia (68,10%) Alam (1,33%) Kendaraan (12,04%) Prasarana Jalan (1,86%)
4	2019	71	71	29	8	73	110	Manusia (85%) Alam (9%) Kendaraan (4,32%) Prasarana Jalan (1,68%)
5	2020	41	41	32	3	33	68	Manusia (70%) Alam (10%) Kendaraan (7,32%) Prasarana Jalan (12,68%)

Sumber : Satlantas. Pores Paser

Faktor penyebab utama kecelakaan sebagian besar oleh faktor manusia, namun faktor prasarana jalan juga berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan di kabupaten Paser. Berikut rambu lalu lintas dan panjang marka jalan.

Tabel 2.92
Jumlah Rambu Lalu lintas, Eksisting, Panjang Marka dan kondisinya

No.	Status	Perkiraan Jumlah Rambu yang Dibutuhkan	Rambu Eksisting			Perkiraan Panjang Jalan yang membutuhkan Marka (m)	Panjang Jalan yang sudah dilengkapi marka	
			Jumlah	Baik	Rusak		Marka Tepi	Marka Tengah
1	Jalan Nasional	68	208	168	40	294.034,65	7.681,45	12.877,9
2	Jalan Provinsi	12	78	72	6	25.200	0,00	0,00
3	Jalan Kab/Kota	470	432	400	32	141.271.550	7.636,300	3.818.150
Jumlah		**430**	**455**	**77**	**1**	**141.590.784,65**	**7.643.981,45**	**3.831.027,9**

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Paser 2021

B. Transportasi Laut

Transportasi laut atau sungai memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian daerah kabupaten Paser, dimana pengangkutan barang merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan kapasitas distribusi barang dan komoditas antar wilayah. Keefektifan terhadap operasional pelayaran akan menurunkan biaya operasional yang memberikan dampak yang besar bagi konsumen maupun penyedia layanan transportasi itu sendiri. Beberapa wilayah kecamatan dan pesisir yang belum semua terjangkau oleh angkutan darat bagi angkutan penunpang dan barang menjadi alternatif terhadap distribusi perekonomian masyarakat kabupaten paser. Berikut jumlah bongkar muat barang di pelabuhan Kabupaten Paser.

Tabel 2.93
Banyaknya Barang Bongkar dan Muat di Pelabuhan Kabupaten Paser (Ton/M3)

No.	Barang	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	Solar	340.663	0	402.993	0	374.008		401.873	0
2	Pupuk	36.709	0	62.804	0	26.453		22.911	0
3	Alat Berat	9.265	8.398	9.835	6.434	4.972	7.244	5.790	4.561
4	Semen	9.120	1 396	8.067	2 000	1.580		0	0
5	AN	19.809	0	29.774	0	33.970		28.092	
6	Sirtu	30.302	17.816	37.005	10.675	20.847		10.428	
7	Container	0	0	0	0			0	
8	Aspal	0	0	0	0			0	
9	GC	0	0	0	0			0	
10	Karnel								
	Eksport	0	0	0	0		0		
	Domestik	1 841	24.002	0	123.301		55.236		15.840
11	CPO								
	Eksport	0	0	0	0		0		402.158
	Domestik	0	326.293	6.400	389.798		438.360		
12	Batu Bara								
	Eksport	0	21.040.635	0	24.099.461		23.490.020		22.413.176
	Domestik	0	10.661.828	0	11.518.769		12.200.188		11.768.493
13	Penumpang	0	0	402.993	0				

14	Import Aspal	1.935	0	0	0			
15	Cangkang	0	9.745	0	7.270		18.212	30.943
16	Kayu							
	Bulat	0	192 565	0	25.581		5.579	
	Olahan	0	3 470	0	18.353			
17	Nikel							
	Eksport	0	0	0	0			
	Domestik	0	0	0	0			
18	Konstruksi	0	0	1.258	0			
19	Batu Split	0	0	21.943	46.851	16.311	48.275	18.081	13.019
20	Pasir	0	0	11.855	0	3.102		4.487	
21	GN	0	0	240	0			
22	Bibit Karet	0	0		30.600			
23	Lowbad				5			
24	CPKO				4.551			
25	Rotan				94			

Sumber : BPS Kabupaten Paser 2021

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa melalui sarana tranportasi laut atau sungai, bahan baku maupun barang hasil produksi dari satu wilayah dapat dipasarkan ke wilayah lain dalam rangka meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan perekonomian .

C. Transportasi Udara

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik yang dapat melayani angkutan penumpang dan barang relatif terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat, dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruh wilayah yang tidak bias dijangkau oleh moda transportasi lain. Jaringan prasarana transportasi udara yang bersifat nasional terdiri dari simpul yang berwujud Bandar Udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. Bandar udara dibedakan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status dan penyelenggaraannya dan kegiatannya.

Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Perhubungan telah berupaya untuk mengembangkan moda transportasi udara, namun hingga saat ini masih dalam proses tindaklanjut pembangunan Bandara yang sempat tertunda dalam beberapa tahun belakangan.

2.1.3.2.10 Komunikasi dan Informasi

Implikasi bagi terbukanya teknologi informasi, juga berpengaruh terhadap meningkatnya media publik termasuk surat kabar, TV lokal dan radio di Kabupaten Paser. Media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus media politik yang menyuarakan aspirasi warga masyarakat. Meningkatnya media publik dapat dilihat dari semakin meningkatnya jenis surat kabar lokal dalam lima tahun terakhir.

Tabel 2.94
Jenis Surat Kabar Yang Beredar Di Kabupaten Paser
Tahun 2016 – 2020

Jenis Surat Kabar	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	3	4	4	2	2
Lokal	6	6	6	4	4

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Paser 2021

Pada tahun 2020, surat kabar regional sejumlah 4 buah yaitu Kaltim Pst, Tribun Kaltim, Koran Kaltim dan Balikpapan Pos. Selain surat kabar, muncul juga televisi lokal dan radio lokal yang mengudara di kawasan Kabupaten Paser misalnya Paser TV.

Tidak hanya media cetak dan elektronik, sumber infromasi juga berasal dari media internet. Salah satu akses warga terhadap internet dapat melalui warnet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat. Pada tahun 2018, rasio jumlah warnet terhadap 1000

penduduk sebanyak 0,21 atau total jumlah absolutnya, 55 unit. Dari total jumlah tersebut, 10 warnet merupakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) program MENKOMINFO yang menetapkan satu kecamatan memiliki 1 Pusat Layanan Internet Kecamatan.

2.1.3.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bagian dari wujud ekonomi riil masyarakat Paser. Oleh sebab itu, guna menentukan strategi pengembangan yang tepat, perlu diketahui mengenai jumlah Koperasi dan UKM di Kabupaten Paser. Kinerja bidang koperasi dapat dilihat dari pertambahan jumlah koperasi dan jumlah anggotanya. Dalam kurun waktu 2016-2020 presentase koperasi aktif di kabupaten Paser terus menagalami peningkatan, namun pada tahun 2020 presentase koperasi aktif menurun menjadi 56,33 persen. Menurunnya presentase koperasi aktif ini akibat dari banyaknya program yang tidak berlanjut, mitra kerja yang tidak lagi beroperasi karena pandemic covid-19 dan pengurus koperasi tidak lagi aktif. Berbeda halnya dengan keberadaan UMKM dimana tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yakni sebanyak 40.534 jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7.882, drastisnya peningkatan UMKM ini akibat dari adanya program Bantuan Produktif Usaha Mikro.

Selain itu, sebagai bagian dari pemberdayaan, perlu juga dilihat sejauh mana Koperasi dan UKM mendapat kemudahan modal. Iklim usaha yang semakin membaik tampak dengan semakin banyaknya jumlah UKM.

Tabel 2.95
Persentase Koperasi Aktif dan Jumlah UMKM
di Kabupaten Paser 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Koperasi Aktif	72,0	78,44	78,52	79,32	56,33
2	Jumlah UMKM	13.736	14.398	14.638	7.882	40.534

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop, 2021

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Potensi perekonomian di Kabupaten Paser tidak hanya terfokus pada pertambangan (batu bara) tetapi juga perkebunan sawit. Kedua sektor usaha tersebut padat modal dan menarik banyak investor baik yang berskala nasional maupun asing. Oleh sebab itu, tolok kukur dalam pengembangan investasi daerah dapat dilihat melalui jumlah investor berskala nasional PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) serta jumlah investasi di Kabupaten Paser.

Tabel 2.96
Jumlah Investor 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Investor
2016	16
2017	53
2018	62
2019	41
2020	56

Sumber : Data Sektoral DPMPTSP, 2021

Grafik 2.17
Jumlah Investor 2016 – 2020

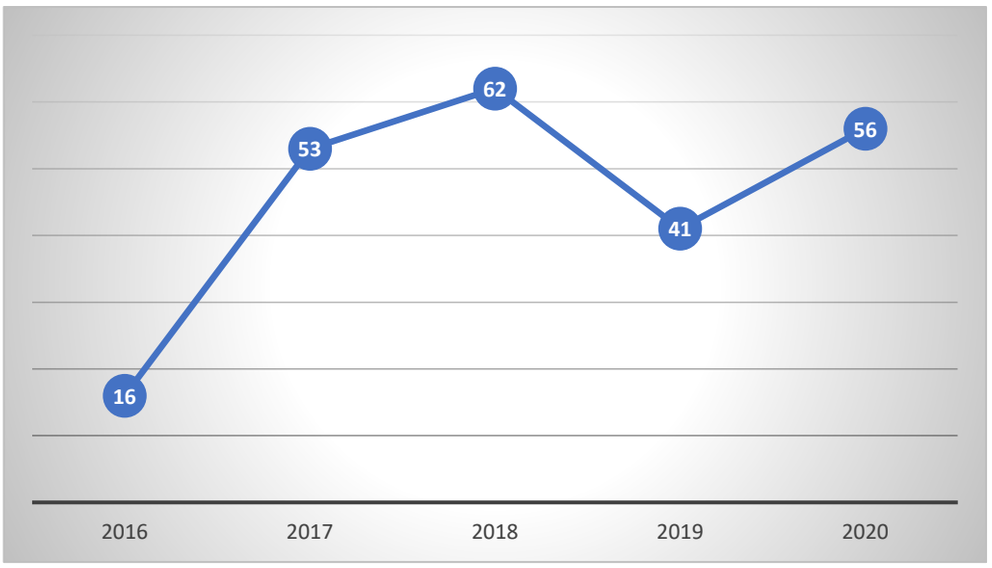

Sumber : DPMPTSP, 2021

Iklim investasi yang membaik menyebabkan jumlah investor yang semakin banyak. Industri galian tambang non migas menyerap banyak investor baik dalam negeri maupun luar negeri, apalagi dengan dukungan kemudahan investasi yang diterapkan di Kabupaten Paser.

Tabel 2.97
Jumlah Nilai Investasi 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional Dan Asing (PMDN/PMA)
2016	528.512.696.470
2017	776.968.138.458
2018	7.935.089.676.690
2019	1.910.175.000.000

2020	657.970.000.000

Sumber : Data Sektoral DPMPTSP, 2021

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Sebagai ujung tombak pembangunan sekaligus masa depan daerah, pemuda memerlukan berbagai dukungan layanan dasar. Sampai tahun 2018, jumlah organisasi kepemudaan sebanyak 32 organisasi yang banyak melakukan aktivitas olahraga.

Selain bidang kepemudaan, dukungan terhadap organisasi olahraga yang berjumlah 350 unit juga ditingkatkan tiap tahunnya. Olahraga merupakan sarana pemersatu masyarakat karena sifatnya yang mampu menggugah kebersamaan. Wujud dukungan pemerintah terhadap layanan dasar kepemudaan dan olahraga salah satunya dengan program mercusuar pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang dibangun tidak jauh dari komplek kantor pemerintahan. Sampai tahun 2018, jumlah total lapangan olahraga yang dikelola oleh Disparpora Kabupaten Paser sebanyak 49 unit tersebar di beberapa desa di pelosok kabupaten.

2.1.3.2.14 Statistik

Ketersediaan data merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan dalam merencanakan pembangunan. Analisis Kinerja untuk urusan wajib statistik didasarkan pada ketersediaan data mengenai PDRB Kabupaten dan Kabupaten Dalam Angka yang sampai saat ini terlaporkan terbit tahun 2018 namun data masih berisi tahun 2017. Ketersediaan data merupakan langkah maju bagi perencanaan tetapi masih perlu dilengkapi dan diperbaharui datanya.

2.1.3.2.15 Kebudayaan

Untuk dukungan terhadap layanan dasar kebudayaan, pemerintah daerah Kabupaten Paser menyelenggarakan festival seni dan keolahragaan. Pemerintah mengadakan festival kebudayaan minimal setahun dua kali pada momentum peringatan 17 Agustus dan hari jadi Kabupaten Paser. Festival tersebut menampilkan atraksi kebudayaan lokal Kabupaten Paser dan menggelar pasar rakyat.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Data yang dibutuhkan pada bagian ini adalah mengenai jumlah perpustakaan, jumlah koleksi buku di perpustakaan serta jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Data-data tersebut penting untuk diketahui karena jumlah pengunjung perpustakaan menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan pendidikan di masyarakat. Saat ini, jumlah perpustakaan sejumlah 296 unit termasuk perpustakaan desa yang dikelola daerah.

Tabel 2.98
Jumlah Perpustakaan, Jumlah Pengunjung dan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perpustakaan	296	306	306	306	306
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	11.869	9.035	14.863	13.900	2.682
3	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	1.485	129	335	2.171	372

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser 2021

Terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020, dari 13.900 pengunjung pada tahun 2019 menjadi 2.682 pengunjung pada tahun 2020. penurunan tersebut bukan hanya disebabkan kurangnya minat dari masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa untuk membaca buku di perpustakaan, namun juga akibat dari pandemic covid-19 dimana perpustakaan hanya dibuka setengah hari saja. Terdapat pengurangan jumlah koleksi buku yang tersedia pada tahun 2020 menjadi 372 buah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya stock opname sehingga dilakukan pemilahan kembali terhadap koleksi buku yang dapat dibaca oleh pengunjung perpustakaan. Kedepan perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Paser untuk menumbuhkan motivasi siswa agar gemar untuk membaca. Hal lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak adanya pustakawan yang dapat mengelola katalog buku maupun kualitas variasi koleksinya.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Dalam RPJMD, pembahasan tentang urusan pemerintahan pilihan ini berguna untuk menggambarkan pencapaian pembangunan yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Gambaran pencapaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.3.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang sedang dikembangkan oleh Kabupaten Paser. Menurut data sektor ini selalu menunjukan tren perkembangan yang baik dalam empat tahun terakhir. Guna mengidentifikasi tren perkembangan, potensi dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Paser ke depan, berikut adalah data tentang jumlah kunjungan wisatawan dan kontribusinya terhadap PDRB :

Grafik 2.18
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 – 2020

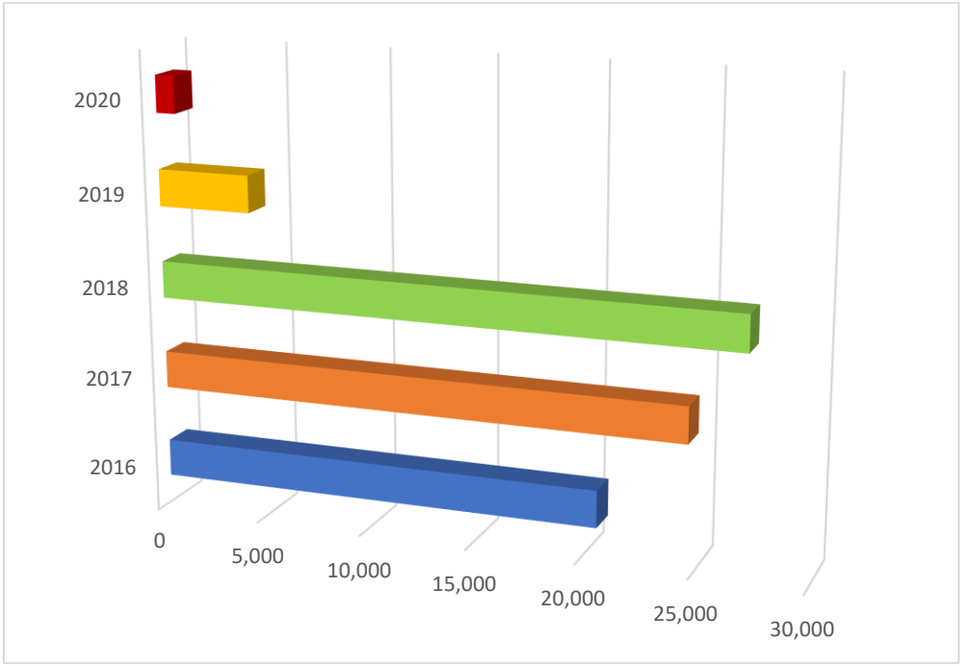

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

Tabel 2.99
Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisatawan
2016	20.572
2017	24.562
2018	27.070
2019	4.376
2020	907

Sumber : Data Sektoral Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Paser, 2021

Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Paser mengalami penurunan drastis menjadi sebesar 907 wisatawan, dimana kunjungan wisatawan pada tahun 2019 sebesar 4.376 wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan ini masih potensial untuk ditingkatkan, tetapi permasalahan utama dalam sektor pariwisata adalah kurang memadainya infrastruktur, salah satunya adalah akses jalan menuju lokasi.

2.1.3.3.2 Pertanian

Pertanian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kabupaten Paser. Sektor ini dikembangkan untuk mendukung perekonomian masyarakat dari sektor non-tambang. Guna mendukung hal itu maka diperlukan data yang berguna untuk menentukan target dan indikator keberhasilan pengembangan pertanian pada masa

mendatang, berikut adalah data tentang produktivitas padi (padi sawah dan padi ladang) di Kabupaten Paser :

Grafik 2.19
Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2019

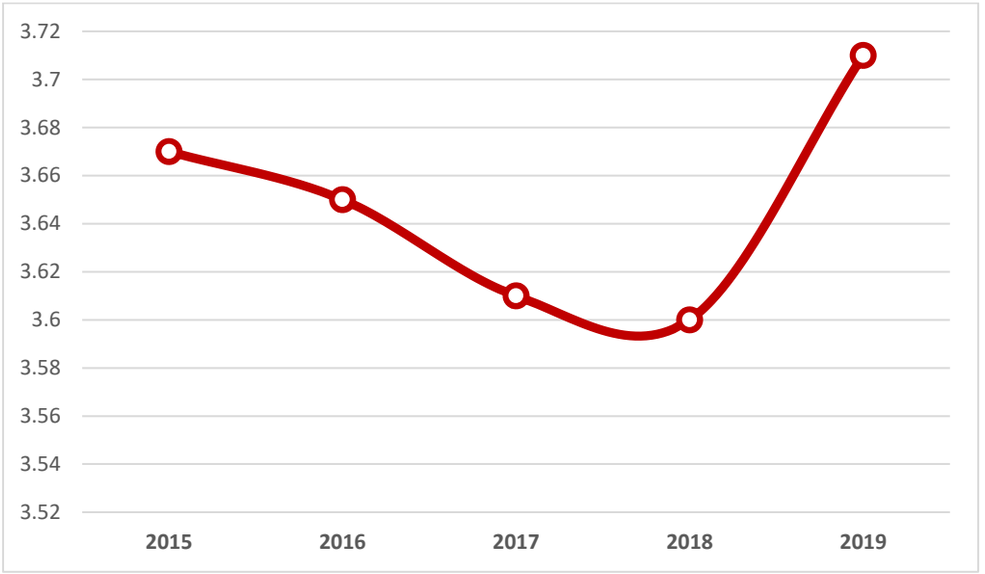

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Pertanian, Kabupaten Paser Tahun 2020

Tabel 2.100
Produktivitas Padi Per Hektar di Kabupaten Paser, Tahun 2016 – 2020

Tahun	Produktivitas Padi (Ton/Ha)
2016	3,65
2017	3,61
2018	3,60
2019	3,71
2020	40,83

Sumber : Statistik Sektoral Dinas Pertanian, Kabupaten Paser Tahun 2020

Produktivitas padi per hektar di Kabupaten Paser mengalami kenaikan kembali dari 3,71 Ton per hektar pada tahun 2019 menjadi 40,83 Ton per hektar pada tahun 2020, hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang cukup mendukung. Kenaikan produktivitas padi per hektar masih bersifat dinamis, hal ini mengindikasikan bahwa potensi produktivitas padi masih bisa ditingkatkan sesuai standar produktivitas lahan di wilayah Kabupaten Paser.

Dalam melaksanakan pembangunan sub sektor perkebunan yang merupakan bagian integral dari sektor pertanian dan lanjutan dari pembangunan sebelumnya mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani perkebunan dengan cara meningkatkan produksi komoditas perkebunan sehingga secara tidak langsung berdampak pada terbukanya kesempatan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui usaha peremajaan

(*replanting*), intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi dengan pola pengembangan seperti pola swadaya/parsial, perkebunan inti rakyat dan perkebuan besar swasta atau milik negara.

Kebun kelapa sawit masih mendominasi perkebunan di Kabupaten Paser. Meskipun pada tahun 2020 luas kebun kelapa sawit di Kabupaten Paser mengalami penurunan menjadi 175.042,72 Ha. Disamping kelapa sawit masih banyak lagi jenis perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, kakao, lada dan lain-lain. Adapun luas masing-masing perkebunan di Kabupaten Paser pada tahun 2020 adalah karet seeluas 14.321,75 Ha, kakao 76,50 Ha, kelapa 2.698 Ha, kopi 654,75 Ha, lada 87 Ha, dan tanaman lainnya 260,25 Ha.

Tabel 2.101
Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Status, Tahun 2016-2020 (Ha)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kelapa Sawit	**180,328.72**	**182,585.72**	**183.574,72**	**183.574,72**	**175.042,72**
Perkebunan Rakyat	79,213.00	81,470.00	82.459,00	82.459,00	73,927.00
Perkebunan Besar Negara	14,401.72	14,401.72	14,401.72	14,401.72	14,401.72
Perkebunan Besar swasta	86,714.00	86,714.00	86,714.00	86,714.00	86,714.00
Karet	**14,583.00**	**13,749.50**	**13.843,00**	**13.843,00**	**14.321,75**
Perkebunan Rakyat	14,124.00	13,290.50	13.384,00	13.384,00	14.222,75
Perkebunan Besar Negara	399.00	399.00	399.00	399.00	399.00
Perkebunan Besar Swasta	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
Kakao	**145.00**	**125.00**	**125.00**	**125.00**	**76.50**
Perkebunan Rakyat	145.00	125.00	125.00	125.00	76.50
Perkebunan Besar Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Perkebunan Besar Swasta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kelapa	**2,639.50**	**2,639.50**	**2.442,50**	**2.442,50**	**2.698,00**
Kopi	**982.30**	**876.30**	**876.30**	**876.30**	**654.75**
Lada	**88.75**	**92,50**	**97,00**	**97,00**	**87,00**
Lainnya	**230.00**	**203.25**	**209,50**	**209,50**	**260,25**

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2021

Pengembangan komiditi sawit terbesar pada tahun 2020 dikembangkan oleh perkebunan perkebunan rakyat. Sedangkan luas perkebunan Negara dan perkebunan

swasta tidak mengalami perubahan luas areal. Meskipun dilihat dari luas areal yang ada cukup luas, tidak semua perkebunan yang ada di Kabupaten Paser berada dalam kondisi produktif. Dari luas 182.585,72 Ha kebun kelapa sawit yang ada, seluas 22.791,00 Ha belum menghasilkan, dan 21.917,00 Ha sudah rusak/tua, sedangkan sisanya seluas 137.877,72 Ha merupakan tanaman menghasilkan (produktif).

Tabel 2.102
Luas Areal Perkebunan Kabupaten Paser Menurut Kondisi,
Tahun 2016 - 2020 (Ha)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kelapa Sawit					
Tanaman Belum Menghasilkan	33,786.00	22,791.00	15.701,00	24.986,40	27.512,00
Tanaman Menghasilkan	145,928.72	137,877.72	43.990,00	142.871,72	144.017,72
Tanaman Rusak	614.00	21,917.00	21.917,00	15.717,00	3.513,00
Karet					
Tanaman Belum Menghasilkan	7,462.00	7,152.00	6.954,00	7.154,00	8.489,50
Tanaman Menghasilkan	6,126.00	6,468.00	5.347,00	5.790,50	5.807,75
Tanaman Rusak	536.00	129.50	989,50	979,50	394,50
Kakao					
Tanaman Belum Menghasilkan	5.50	5.50	5,50	0,00	0,00
Tanaman Menghasilkan	138.00	115.00	115,00	13,50	11,50
Tanaman Rusak	1.50	4.50	4,5	111,50	65,00
Kelapa					
Tanaman Belum Menghasilkan	99.00	99.00	99,00	99,00	135,00
Tanaman Menghasilkan	2,312.50	2,095.50	2.031,50	2.031,50	2.256,50
Tanaman Rusak	228.00	447.00	312,00	312,00	306,00
Kopi					
Tanaman Belum Menghasilkan	60.30	50.30	50,30	50,30	48,00
Tanaman Menghasilkan	850.00	676.50	676,50	540,00	358,75
Tanaman Rusak	72.00	149.50	149,50	286,00	248,00
Lada					
Tanaman Belum Menghasilkan	21,75	18.75	16.25	20.00	23,00

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Tanaman Menghasilkan	81,00	77.00	69.00	62.50	54,25
Tanaman Rusak	5,50	2.50	3.50	10.50	9,75

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2021

Sampai dengan tahun 2020, produk unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Paser masih dikuasai oleh tanaman kelapa sawit. Produksi kelapa sawit Kabupaten Paser tahun 2020 mencapai 1.802.818,02 Ton. Jumlah produksi ini jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2017, jumlah produksi kelapa sawit 2,029,319.17 Ton. Tanaman perkebunan lain yang juga merupakan tanaman unggulan di Kabupaten Paser adalah tanaman karet, produksi tanaman perkebunan karet di Kabupaten Paser tahun 2020 mengalami Kenaikan. Produksi karet tahun 2017 mencapai 10,640.48 Ton namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 produksinya menurun.

Tabel 2.103
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 (Ton)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Kelapa Sawit	2,127,990.34	2,029,319.17	1.979.831,30	1.987.340,35	1.802.818,00
Karet	10,082.77	10,640.48	8.703,85	8.213,08	8.854,08
Kelapa	4,567.85	4,037.95	3.826,90	3.683,95	4.060,28
Kopi	228.11	210.80	203,54	122,41	100,48
Kakao	38.57	28.36	27,41	3,57	2,56
Lada	17.67	15.655	15,06	12,39	12,84
Lainnya	239.47	215.67	168,85	152,32	195,15

Sumber : Data Statistik Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2021

Pembangunan sub sektor peternakan tidak hanya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan peternak. Usaha peternakan di Kabupaten Paser pada umumnya merupakan usaha rakyat bersifat sambilan dan berskala kecil (sapi, kerbau, kambing dan unggas), namun cukup memberikan harapan dalam hal pengembangannya. Meskipun demikian ada juga usaha peternakan dalam skala besar, khususnya bagi petani yang mempunyai modal besar. Adapun permasalahan dalam hal pembangunan sub sektor peternakan adalah relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia, belum berkembangnya pembibitan hewan ternak, usaha peternakan rakyat masih belum

dikelola secara profesional dan minimnya sarana dan prasarana penunjang usaha peternakan rakyat.

Pada umumnya peternakan di Kabupaten Paser masih bersifat tradisional, meskipun dibeberapa daerah telah mendapatkan penyuluhan dari Petugas Lapangan yang didatangkan dari Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Kelautan, Perikanan dan Perternakan Kabupaten Paser dalam upaya peningkatan produksi ternak serta imunisasi ternak terhadap berbagai kemungkinan terserang penyakit.

Secara umum, jumlah ternak di Kabupaten Paser tahun 2020 tidak terlalu banyak perubahan dibandingkan tahun 2019. Dari berbagai jenis populasi hewan ternak besar yang ada di Kabupaten Paser, ternak sapi mempunyai jumlah populasi yang paling banyak, yaitu 18.977 ekor, diikuti populasi kambing sebanyak 7.983 ekor, dan kerbau sebanyak 673 ekor. Selain ternak besar, di Kabupaten Paser juga terdapat beberapa jenis ternak kecil seperti ayam ras, ayam buras, itik, angsa, dan ayam petelur. Dari beberapa jenis ternak kecil tersebut, ayam buras memiliki populasi terbanyak dibanding jenis ternak yang lain, yaitu sebanyak 593.000 ekor.

Tabel 2.104
Populasi Ternak Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ternak Besar					
Sapi	21.154	21.790	21.541	18.676	18.977
Kerbau	756	834	485	562	673
Kambing	7.724	9.067	7.347	7.970	7.983
Domba	74	109	-	-	
Ternak Kecil/ Unggas					
Ayam Ras	3,641	2,623,507	191.600	135.109	139.648
Ayam Buras	1.353.061	1.673.062	137.222	383.723	593.000
Itik	37.282	42.737	9.359	11.651	10.842
Ayam Petelur	0	2,632	649	688	23.756

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser, 2021

Berbicara masalah populasi ternak kecil terutama unggas tidak terlepas dari jumlah produksi yang dihasilkan, karena kebanyakan peternak menjual telur ternaknya untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari. Jumlah produksi telur tergantung kepada kondisi ternak itu sendiri. Ternak yang berkembang dengan baik atau dalam keadaan sehat akan besar jumlah produksinya, namun sebaliknya apabila perkembangan ternak tidak normal atau sakit akan mengurangi jumlah daging ternak itu sendiri. Untuk itu

suplai makanan kepada ternak menjadi modal utama bagi perkembangan ternak itu sendiri. Pada tahun 2020, produksi telur ayam buras mencapai 25.933.692 butir, itik 2.635.000 butir, sedangkan produksi ayam petelur 1.575.000

Tabel 2.105
Produksi Telur Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020 (butir)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Ayam Petelur	-	-	31.158.000	15.579.000	1.575.000
Ayam Buras	6.423.521	10.905.300	6.977.023	7.127.023	25.933.969
Itik	270.088	6.837.023	644.011	693.011	2.635.000

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2021

Untuk memenuhi kebutuhan akan daging di Kabupaten Paser, pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengembangan dan peningkatan produksi ternak .Selain upaya tersebut, pada titik waktu tertentu pemerintah bahkan mendatangkan ternak-ternak tersebut dari luar wilayah Kabupaten Paser.

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Paser, selama tahun 2020, frekuensi pemotongan ternak mengalami kenaikan dibanding tahun 2019. Jumlah pemotongan sapi selama tahun 2020 adalah 2.524 ekor. Sedangkan untuk pemotongan ayam ras, pada tahun 2020 jumlah yang dipotong adalah 2.944.562 ekor.

Tabel 2.106
Produksi Ternak Yang Dipotong Kabupaten Paser, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Ternak Besar					
Sapi	2,531	2,552	2.541	2.124	2.524
Kerbau	9	6	1	-	66
Kambing	134	691	238	-	1.908
Domba	9	-	-	-	14
Ternak Kecil/Unggas					
Ayam Ras	1,911,694	1,999,589	2.649.742	383.723	2.944.562
Ayam Buras	1,227,201	460,622	809.212	-	117.250
Itik	11.577	20.576	23.500	-	14.148

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Paser 2021

Dari tahun ke tahun produksi perikanan Kabupaten Paser menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama produksi perikanan laut. Sedangkan untuk produksi perikanan umum cenderung sangat fluktuatif. Hal ini disebabkan karena produksi perikanan laut sangat dipengaruhi oleh musim tangkap ikan. Sedangkan untuk perikanan

tambak tidak dipengaruhi oleh musim tangkap ikan dan lebih cenderung dipengaruhi oleh system pengelolaan budidaya tambak tersebut.

Tahun 2020 produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Paser menurun dari 2019 dari 10.884,30 menjadi 10.524,00 bisa diliat dari table di bawah ini.

Tabel 2.107
Produksi Perikanan Kabupaten Paser Menurut Jenis Produksi,
Tahun 2016-2020 (Ton)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut	10.684,9	10.825,4	11.207,80	10.884,30	10.524,00
Perikanan Umum	112,3	112,3	111,4	69,20	70,00
Tambak	12.357	11.912,5	12.689,9	15.724,56	16.730,36
Kolam	67,1	157,2	210,6	239,73	204,83
Keramba	6,6	6,7	9,7	4,40	-
Rumput Laut	1.096,2	400	183,4	-	-

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Paser, 2021

Tabel 2.108
Luas Budidaya Tambak, Kolam, Keramba, Rumput Laut
Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tambak					
Potensi	32,750	32,750	32,750	32.749,59	32.750,00
Manfaat	15,555	15,766	15,766	15.765,99	15.940,00
Kolam					
Potensi	706.00	706.00	706.10	706.10	706,00
Manfaat	120.00	98,50	120.00	120.00	120,34
Keramba	42.00	23.00	23.00	23.00	-
Rumput Laut	46.00	6,60	46.80	46.80	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Paser, 2021

2.1.3.3.3 Kehutanan

Kerusakan hutan merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh Kabupaten Paser. Dalam rangka menentukan strategi serta prioritas program rehabilitasi hutan pada masa mendatang, diperlukanlah data tentang kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser. Berikut merupakan sajian datanya:

Tabel 2.109
Luas Kebakaran Hutan, Rehabilitasi Lahan dan Kebun bibit (Ha)
di Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Kebakaran Hutan (CA)	-	20,6	149,1	-	-
Rehabilitasi Lahan Luar Kawasan	-	-	-	-	17
Rehabilitasi Lahan Dalam Kawasan	-	-	-	-	168
Reklamasi Kawasan Hutan	-	40	-	-	-
Kebun Bibit	-	0,5	-	-	-

Sumber : Data Sektoral DLH Kabupaten Paser, 2021

Isu kerusakan hutan di Kabupaten Paser selalu dihubungkan dengan perluasan area perkebunan sawit sebagai salah satu penyumbang PDRB terbesar. Apabila dibandingkan dengan wilayah perkebunan sawit di Indonesia, kerusakan kawasan hutan di Kabupaten Paser tergolong kecil. Namun sekecil apapun kerusakan hutan adalah sebuah permasalahan yang besar bagi lingkungan.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Bagian ini menggambarkan kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Paser. Sehingga, jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang merupakan hal dasar yang harus diketahui. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas program pengembangan di sektor perdagangan, berikut adalah data tentang jumlah pedagang di Kabupaten Paser:

Tabel 2.110
Jumlah Pedagang dan Kelompok Pedagang
di Kabupaten Paser Pada Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pedagang	Jumlah Kelompok Pedagang
2016	9.013	2
2017	9.825	2
2018	7.231	2
2019	7.997	2
2020	8.453	2

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop, 2021

Jumlah pedagang di Kabupaten Paser dalam 5 tahun terakhir menunjukan adanya penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Paser mengalami penurunan, sehingga pedagang di

dalamnya mengalami penurunan, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi nasional yang cenderung belum membaik dalam satu tahun terakhir sebagai dampak kondisi perekonomian global, serta terjadinya kebakaran Pasar Induk Penyembolum di Desa Senaken.

Dibandingkan dengan jumlah pedagang yang cenderung menurun, jumlah kelompok pedagang di Kabupaten Paser menunjukan tren yang stabil. Dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2016 hingga 2018 tidak ada penambahan jumlah kelompok pedagang. Pada tahun 2016 dan 2018 kelompok pedagang hanya ada 2 kelompok, yaitu kelompok pedagang pasar tradisional dan kelompok pedagang pasar modern.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Perindustrian merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi. Data mendasar yang diperlukan untuk menentukan strategi pengembangan industri di Kabupaten Paser adalah data mengenai pertumbuhan industri. Berikut adalah data uraian data tentang pertumbuhan industri di Kabupaten Paser selama 2014-2020:

Tabel 2.111
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan Industri
2016	4,28%
2017	1,62%
2018	3,70%
2019	11%
2020	13%

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop, 2021

Grafik 2.20
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

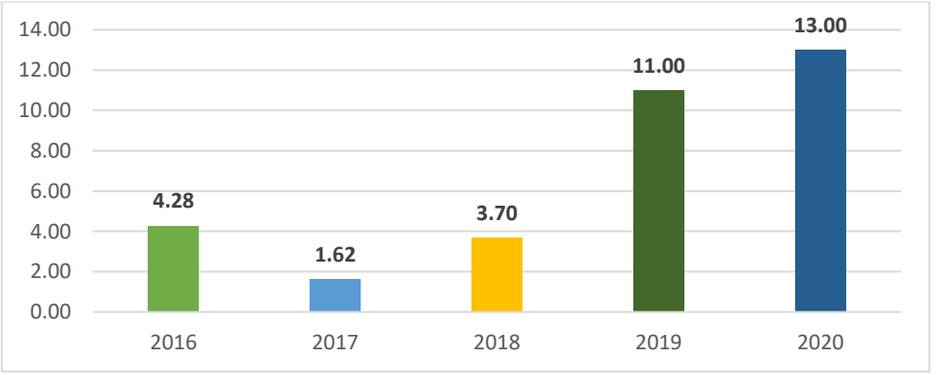

Sumber : Data Sektoral Dinas Perindagkop 2021

Industri rumah tangga di Kabupaten Paser terus menunjukan tren kenaikan. Walaupun jumlahnya tidak begitu besar jika dibandingkan dengan industri pertambangan. Hasil temuan lapangan mengindikasikan bahwa turunnya daya beli

masyarakat turut serta berpengaruh terhadap lambatnya pertumbuhan industri di Kabupaten Paser.

2.1.3.4 Penunjang Urusan

2.1.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Daearah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan pendekatan teknokratik, partisipatif,politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Dokumen Perencanaan Pembanguan Daerah Kabupaten Paser yang merupakan pedoman perencanaan tahunan adalah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Paser Tahun 2006-2025 2. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Perencanaan pembangunan harus konsisten antar perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan. Hal ini dibuktikan dengan terakomodasinya 100% program yang ada di RPJMD dalam RKPD maupun APBD.

2.1.3.4.2 Keuangan

A. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Daerah

Tata kelola keuangan daerah Paser masih menyisakan kendala. Walaupun opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Paser yang selalu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan dikuti oleh capaian predikat nilai LPPD yang berada pada kriteria “Tinggi” hingga “Sangat Tinggi” namun tidak berbanding lurus dengan capaian AKIP Kabupaten Paser yang belum dapat memperoleh predikat “Baik”. Salah satu kendala terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ialah terkait pengelolaan asset dan pengelolaan pendapatan yang dinilai masih belum optimal menunjang belanja pada APBD. Untuk itu ke depan diperlukan suatu organisasi yang dapat mengelola aset dan pendapatan secara optimal.

Tabel 2.112
Perolehan Opini BPK, LPPD dan AKIP Kabupaten Paser

Hasil Penilaian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai EKPPD	2,9	2,86	2,8	-
Nilai Evaluasi AKIP	56,21	57,76	57,76	58,41

Sumber : LKjIP Kabupaten Paser, 2021

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Paser meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Paser masih belum optimal. Alokasi belanja pegawai yang masih cukup tinggi, mengakibatkan manfaat untuk belanja langsung bagi masyarakat masih terbatas.

Selain itu, kendala yang sangat penting untuk segera diatasi adalah meningkatkan kapasitas dan integritas aparatur sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, bersih dan bebas KKN, serta mencapai pelayanan prima pada masyarakat. Adanya beberapa kasus korupsi yang melibatkan oknum PNS masih mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah belum sepenuhnya bebas dari KKN. Pelaksanaan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) masih harus terus ditambah guna menjamin aparatur bebas dari praktek-praktek KKN.

Dalam menjalankan perannya melayani masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten harus membuka akses informasi pelayanan, misalnya informasi pada anggaran, pengadaan barang dan jasa, bantuan sosial, layanan perizinan, RTRW dan RTRK, layanan KTP, KK dan surat-surat keterangan lainnya. Potensi penguat dalam proses pembangunan Kabupaten Paser harus juga Nampak pada peran masyarakat, maka masyarakat secara terstruktur dan terencana harus dilibatkan dalam proses dan pengawasan pembangunan Paser, termasuk dalam upaya tindak pencegahan korupsi. Salah satu media komunikasi partisipasi masyarakat adalah layanan interaksi on-line. Masukan dan partisipasi masyarakat harus dipastikan masuk dan ditanggapi, serta aduan permasalahan harus sampai dan dicarikan solusinya.

Pemerintah Kabupaten Paser telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 4 tahun berturut-turut. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan dan cerminan dari profesionalitas aparatur sipil negara yang dimiliki. Sampai dengan tahun 2019, dana SILPA tercatat sekitar 15,4% atau 13,73% terhadap realisasi APBD, dengan seluruh program terlaksana. Sedangkan pada tahun 2018 tercatat sebesar 16,78% atau 14,71% terhadap realisasi APBD. Seluruh program di

tahun 2018 telah dilaksanakan sementara pada tahun sebelumnya terdapat 8 program dan 29 kegiatan yang tidak dilaksanakan.

Pada tahun 2019, dana APBD yang digunakan untuk kegiatan pendidikan tercatat sebesar 28,75%, lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 32,33%, walaupun masih lebih tinggi dari target nasional sebesar 20%. Sementara belanja kesehatan, tahun 2019 tercatat sebesar 13,38% dengan persentase belanja langsung sebesar 49,76% dan belanja tidak langsung sebesar 50,24%. Adapun besaran bagi hasil kabupaten dan desa pada tahun 2019 adalah 2,13%, APBD Kabupaten Paser tahun 2020 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2018 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2.1.3.4.3 Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Paser dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2016 - 2020 berdasarkan jenis kelamin). Jumlah PNS & CPNS di tahun 2020 berjumlah 4.520 orang.

Tabel 2.113
Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015 – 2020

Tahun	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
2016	2.956	2.399	5.355
2017	2.668	2.183	4.851
2018	2.560	2.125	4.685
2019	2.514	2.194	4.708
2020	2,396	2,124	4.520

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser 2020

Pada tahun 2020 jumlah Aparatur Negara Pemerintah Kabupaten Paser berjumlah 4.520 orang, yang terdiri dari 2.514 atau 53% Aparatur Negara berjenis kelamin laki-laki dan 2.194 atau 47% Aparatur Negara berjenis kelamin perempuan.

Grafik 2.21
Jumlah Pegawai Daerah Kabupaten Paser Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 – 2020

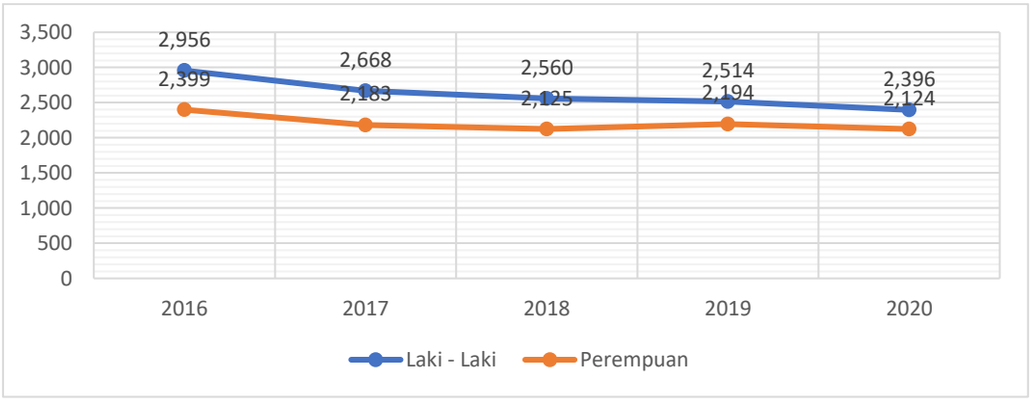

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser 2020

Tabel 2.114
Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon
Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020

Eselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II			
Eselon II A	1	0	**1**
Eselon II B	24	5	**29**
Eselon III			
Eselon III A	40	12	**52**
Eselon III B	82	27	**109**
Eselon IV			
Eselon IV A	302	161	**463**
Eselon IV B	50	23	**73**
Non Eselon			
Non Eselon	1.897	1.896	**3.793**
Total	**2.396**	**2.124**	**4.520**

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser, 2020

Berdasarkan data pada tabel 2.100 terdapat 29 Aparatur untuk Eselon II yang meliputi Eselon II.A dan Eselon II.B, 161 Aparatur untuk Eselon III yang meliputi Eselon III.A dan Eselon III.B, 536 Aparatur untuk Eselon IV yang meliputi Eselon IV.A dan Eselon IV.B serta 3.793 Aparatur untuk Non Eselon. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari total jumlah pegawai baik PNS maupun CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yakni 4.520 Aparatur. Adapun komposisi rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon di Kabupaten Paser tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Eselon II berjumlah 30 orang atau 0,7% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 25 orang berjenis kelamin laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.
b. Eselon III berjumlah 161 orang atau 3,6% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 122 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang yang berjenis kelamin perempuan..
c. Eselon IV berjumlah 536 orang atau 11,9% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 352 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 184 orang yang berjenis kelamin perempuan.
d. Non Eselon berjumlah 3.793 orang atau 83,9% dari total keseluruhan jumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Paser. Terdiri dari 1.897 orang berjenis yang kelamin laki-laki dan 1.896 orang yang berjenis kelamin perempuan.

Diagram 2.2
Rekapitulasi Aparatur Eselon dan Non Eselon
Pemerintah Kabupaten Paser di Tahun 2020

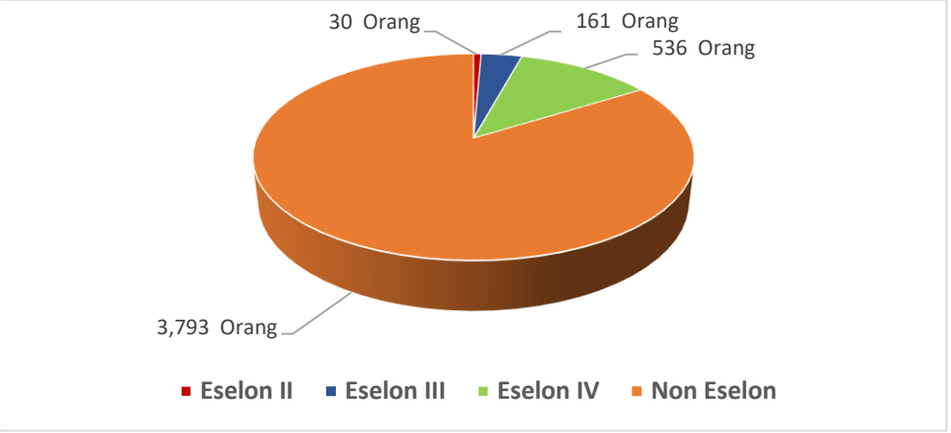

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser, 2020

Selain itu dari sekian jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, Pegawai (PNS dan CPNS) untuk tingkatan pendidikan S-1 (Sarjana) mendominasi tingkat pendidikan Aparatur Negara di Kabupaten Paser, yakni di angka 2.152 atau sekitar 47,61% dari total 4.520 Aparatur Negara yang terdiri dari 2.396 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2.124 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk tingkatan pendidikan paling sedikit berada di tingkat pendidikan S-3 yang terdiri dari 2 orang atau sekitar 0,04%, dari total 4.520 Aparatur Negara, yakni 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis kelamin perempuan.

Adapun komposisi perbandingan jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan di tahun 2019 tersebut dapat dilihat pada tabel 2.101 dan grafik 2.26 berikut ini.

Grafik 2.22
Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020

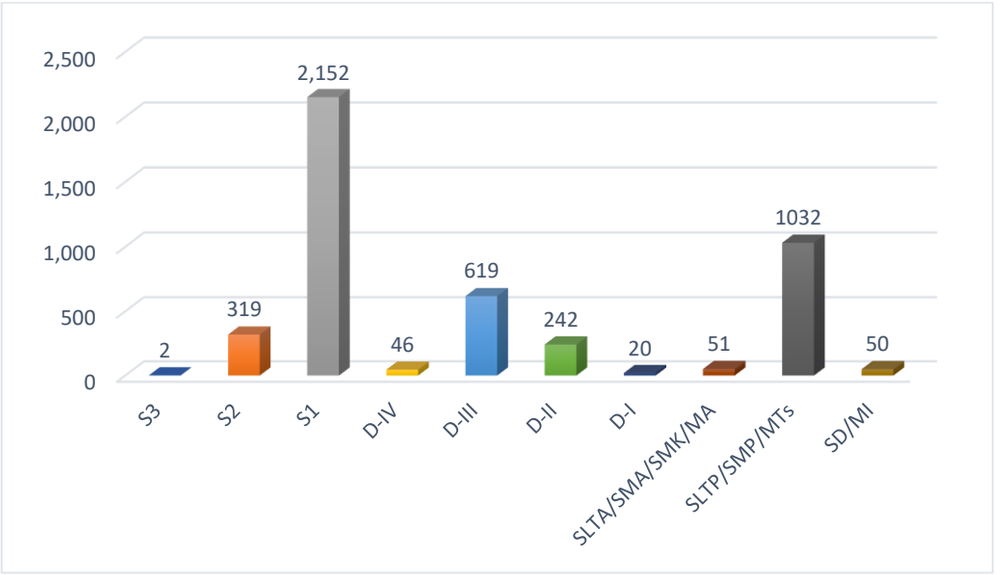

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser, 2021

Tabel 2.115
Jumlah Sumber Daya Aparatur (PNS dan CPNS)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan per Jenis Kelamin di Tahun 2020

Jenis Golongan Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
S3	1	1	**2**
S2	218	101	**319**
S1	1.051	1.101	**2.152**
D-IV	26	20	**46**
D-III	187	432	**619**
D-II	122	120	**242**
D-I	7	13	**20**
SLTA/SMA/SMK/MA	51	0	**51**
SLTP/SMP/MTs	696	336	**1.032**
SD/MI	37	0	**37**
Total	**2.396**	**2.124**	**4.520**

Sumber : Data Sektoral BKPP Kabupaten Paser, 2021

Dari tabel dan grafik tingkat pendidikan diatas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

a. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan S3 sebanyak 2 orang atau 0,04%, Tingkat Pendidikan S2 sebanyak 319 orang atau 7,06% dan Tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2.152 orang atau 47,61% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
b. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan D-IV sebanyak 46 orang atau 1,02%, Tingkat Pendidikan D-III sebanyak 619 orang atau 13,69%, Tingkat Pendidikan D-II sebanyak 242 orang atau 5,35% dan Tingkat Pendidikan D-I sebanyak 20 orang atau 0,44% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTA/SMA/SMK/MA sebanyak 51 orang atau 1,13% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
d. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SLTP/SMP/MTs sebanyak 1.032 orang atau 22,83% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
e. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tingkat Pendidikan SD/MI sebanyak 37 orang atau 0,82% di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

2.1.3.4.4 Pengawasan

Peningkatan sistem pengawasan internal menjadi hal pokok sebagai tindakan pertama dalam upaya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Jika dilihat dari table di bawah ini menunjukkan tingkat maturitas SPIP Kabupaten sudah cukup baik berada pada level 3 (Terdefinisi). Dengan kata lain Pemerintah Daerah telah melaksanakan

praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.), Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh apakah tingkat maturitas sistem pengendalian intern sudah berjalan efektif ataukah masih sebatas penyediaan dokumen pengendalian saja.

Gambar 2.4
Penilaian Penyelenggaraan SPIP

No	Unsur-unsur SPIP	Bobot	Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP				
			Hasil SA		Hasil QA		Perubahan Nilai
			Skor	Nilai	Skor	Nilai	
1	Lingkungan Pengendalian	30,00%	3,5000	1,0500	3,1250	0,9375	(0,1125)
2	Penilaian Risiko	20,00%	3,0000	0,6000	3,0000	0,6000	-
3	Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,4545	0,8636	3,0000	0,7500	(0,1136)
4	Informasi dan Komunikasi	10,00%	3,0000	0,3000	3,0000	0,3000	-
5	Pemantauan	15,00%	3,0000	0,4500	3,0000	0,4500	-
	Jumlah	100,00%	-	3,2636		3,0375	(0,2261)
	Keterangan		Level 3 (Terdefinisi)				

Sumber : Inspektorat Kabupaten Paser, 2019

2.1.3.4.5 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat

Sebagai Perangkat Daerah penyelenggara administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD, Sekretariat Dewan telah menyusun rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD. Program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran juga telah tersusun dan terintegrasi dalam Dokumen RPJM dan RKPD. Selain itu, program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut, optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur, fokus iklim berinvestasi dan fokus sumber daya manusia (SDM).

2.1.4.1 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Pada level tersebut,

optimalisasi potensi daerah secara optimal merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017, maka kondisi daerah Kabupaten Paser terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari beberapa variabel berikut:

Beberapa indikator yang digunakan dalam kerangka analisis kinerja atas kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita. Dalam skema daya saing daerah, kedua indikator tersebut digunakan untuk mengetahui bagaimana potensi maupun hambatan bagi daerah dari segi ekonomi untuk mencapai visi pembangunan. Berikut adalah tabel yang memuat data tentang konsumsi rumah tangga per kapita dan konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita di Kabupaten Paser :

Tabel 2.116
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (%) Tahun 2016 – 2020

Tahun	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Pangan Per Kapita	Konsumsi Rumah Tangga Sub Sektor Non-Pangan Per Kapita
2016	51,82	48,18
2017	55,22	44,78
2018	51,83	48,17
2019	51,95	48,05
2020	52,09	47,91

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser, 2021

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator tersebut masuk ke dalam fokus kemampuan ekonomi daerah yang menentukan daya saing Kabupaten Paser. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita sebesar 0,14%. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Paser di bidang ekonomi cukup meningkat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor pangan per kapita ini masih fluktuatif dan belum stabil, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja perekonomian di Paser masih perlu ditingkatkan.

Berbeda halnya dengan konsumsi rumah tangga sub-sektor pangan per kapita, konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita justru mengalami penurunan sebesar -0,14% dari tahun sebelumnya. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sub sektor non-pangan per kapita ini juga masih fluktuatif dan belum stabil.

2.1.4.2 Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan, karena investasi berpengaruh pada kuantitas permodalan di suatu daerah, pembukaan lapangan kerja, permintaan dan penawaran, serta pengaruh lain yang berhubungan dengan kegiatan sosio-ekonomi masyarakat. Dalam rangka mengetahui potensi dan hambatan yang dalam berinvestasi di Kabupaten Paser, maka dilakukanlah analisis terhadap beberapa indikator dalam tabel berikut:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Daerah, DPMPTSP, Kabupaten Paser, pada tahun 2013 rata-rata Kabupaten Paser memiliki lama waktu perijinan selama 5 jam. Hal ini berlaku untuk 6 jenis perijinan, seperti SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB dan HO. Lima jam adalah waktu tergolong cepat jika berpijak kepada Standar Operasional Prosedur DPMPTSP. Cepatnya proses perijinan ini mengindikasikan bahwa proses perijinan semakin baik dan mampu mendukung peningkatan jumlah investasi di Kabuppaten Paser.

Tabel 2.117
Jumlah dan Macam Retribusi Daerah Tahun 2016 - 2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Retribusi Jasa Umum	6	6	8	6	9
Retribusi Jasa Usaha	11	11	11	10	11
Retribusi Perijinan Tertentu	5	4	4	3	3
Jumlah Retribusi	**22**	**21**	**23**	**19**	**23**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser, 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2016 Kabupaten Paser memiliki 22 jenis retribusi. Retribusi tersebut berhubungan dengan iklim investasi. Kedua puluh dua retribusi tersebut terdiri dari 6 retribusi jasa umum, 11 retribusi jasa usaha dan 5 retribusi perijinan tertentu yang ditangai oleh DPMPTSP, Kabupaten Paser. Pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 23 macam retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya. Belum ada indikasi bahwa jenis-jenis retribusi tersebut berpengaruh kurang baik terhadap iklim investasi di Kabupaten Paser selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.118
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha
Di Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

Jenis Perda	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perda yang terkait perijinan	12	12	12	12	12

Sumber : Data Sektoral DPMPTSP, 2021

Dari tahun 2014 hingga 2018, jumlah perda yang terkait perijinan di Kabupaten Paser berjumlah tetap. Tidak ada kenaikan atau penurunan sama sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penyesuaian jumlah Perda tentang perijinan dengan isu-isu strategis di bidang perijinan, sehingga Perda mampu mendukung aspek daya saing Kabupaten Paser dengan baik.

2.1.4.3 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kabupaten Paser meningkat pada tahun 2016 sebanyak 438 kasus, dan menurun di tahun 2017 sebanyak 310 kasus. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti kasus pelecehan seksual anak, kasus pengeroyokan, kasus pembunuhan dan kasus pencurian. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif.

Tabel 2.119
Angka Kriminalitas di Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2020

Tahun	Angka Kriminalitas
2016	438 Kasus
2017	310 Kasus
2018	246 Kasus
2019	163 Kasus
2020	172 Kasus

Sumber : Data Polres Paser, 2021

Angka kriminal umum dan criminal khusus di Kabupaten Paser mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 172 kasus, sedangkan tahun sebelumnya sebanyak 163 kasus. Beberapa kasus kriminalitas yang terjadi seperti kasus pelecehan seksual anak, kasus KDRT, kasus pengeroyokan, kasus curanmor, kasus sajam, kasus pencurian, kasus korupsi dan kasus illegal logging. Hal ini mengindikasikan masih perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya masing-masing, serta perlunya tindak pencegahan yang lebih intensif.

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

SDM merupakan faktor terpenting dalam rangka mewujudkan visi pembangunan, karena SDM secara teknis menentukan kualitas kerja pemerintah mulai dari aspek perencanaan hingga implementasi. Selain itu, kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap perwujudan visi pemerintah daerah karena bersentuhan langsung dengan aspek strategis maupun teknis. Sehingga, analisis kinerja pada fokus SDM dimaksudkan untuk mengetahui potensi serta kelemahan yang dialami.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/urusan pilihan pemerintahan daerah. Ini menyangkut realisasi capaian target kinerja tahun lalu terhadap RPJMD. Hasil evaluasi, dalam perumusannya masih mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2016-2021. Hasil evaluasi mengarah pada upaya pemecahan masalah-masalah yang komprehensif, dalam menjawab persoalan isu-isu strategis yang dirumuskan dan dikembangkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Paser. Evaluasi ini mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD).

Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun Keempat yaitu tahun 2020. Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Kabupaten Paser hingga tahun 2020 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah.

2.2.1 Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD Tahun 2022

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser 2005-2025 untuk tahapan pembangunan lima tahunan. Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatakan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Pada RKPD tahun 2022 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya, maka dijabarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

Tabel 2.120

Penjabaran Program RKPD 2022 sesuai dengan
RPJMD 2021-2026 Kabupaten Paser

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	**Pendidikan**	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD
			APK SMP
			APM SD
			APM SMP
			Angka Melek Huruf
			Angka Putus Sekolah SD
			Angka Putus Sekolah SMP
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan
		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan
2	**Kesehatan**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman
		Pengembangan Lingkungan Sehat	Rumah Tangga ber-PHBS
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap
			Persentase Jembatan dalam kondisi Baik
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik
		. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang
			Persentase Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang
			Persentase Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang
4	**Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan (18 kasus)
		.Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (15 lokasi)
		Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemetaan zona nilai tanah
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan
			Persentase kasus gangguan trantib yang diselesaikan
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan kebakaran kabupaten
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Demo
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan
6	**Sosial**	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial (%)
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial (%)
		Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana (%)
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	**Tenaga Kerja**	Program Pengembangan dan Penempatan tenaga kerja	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja
		Program hubungan industrial	persentase perselisihan ketenaga kerjaan yang diselesaikan
		Program Pembangunan dan pengembangan Kawasan transmigrasi	Kesejahteraan transmigran yang ditempatkan
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera (%)
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan (%)
			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)
		Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan (%)
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio KDRT (%)
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)
		Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)
3	**Lingkungan Hidup**	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup serta evaluasi Lingkungan Hidup tersedia
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
			Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
		Program Pengendalian B3 dan Limbah B3	Persentase jumlah perusahaan/ pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3
		Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan
		Program Pengelolaan Keanekaragman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan RTH dan Taman kehati
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan predikat pengelolaan kualitas lingkungan hidup
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
		Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dengan baik.
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA
			Persentase pengelolaan sampah disumber
4	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK
		Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan
5	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
			Lembaga Adat Desa yang aktif
			Masyarakat Hukum Adat yang aktif
		Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti
6	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB
7	**Perhubungan**	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang LLAJ
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang Pelayaran
		Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.
8	**Komunikasi dan Informasi**	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani
		Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
9	**Koperasi dan UKM**	Pengembangan agroindustri	Perumbuhan produksi industri berbasis pertanian non sawit
		Hilirisasi pengolahan CPO	Pertumbuhan produk olahan CPO
		Program Peningkatan Distribusi Perdagangan	stabilitas harga kebutuhan pokok (angka inflasi)
		program Pengembangan dan Fasilitasi UMKM	Jumlah UMKM yang naik kelas
		program Pengembangan Manajemen koperasi	Omset per koperasi
10	**Penanaman Modal**	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi non tambang dan non sawit
11	**Pemuda olahraga**	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)
			Persentase wirausaha muda (%)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga (%)
			Jumlah atlet berprestasi
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Pramuka Aktif (%)
12	**Statistik**	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi
13	**Kebudayaan**	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan budaya (%)
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pembinaan kesenian tradisional (%)
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah lokal yang dibina dengan baik
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum dikelola dengan baik
14	**Kearsipan**	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan
		Program Pengelolaan Arsip	Rasio perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rasio arsip/dokumen daerah yang dilestarikan
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip
URUSAN PILIHAN			
15	**Kelautan dan Perikanan**	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan
			Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan (segar

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
16	**Pariwisata**	program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan jumlah wisatawan
		Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya
18	**Pertanian, Perkebunan dan Peternakan**	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks sarana dan prasarana
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman Pangan
			Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman hortikultura
		Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase hewan ternak yang sehat
		Program Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Peternakan	Pertumbuhan produksi ternak yang asuh
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Indeks sarana dan prasarana perkebunan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Pertumbuhan produktivitas perkebunan non sawit
19	**Perikanan**	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan
			Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan (segar)
20	**Ketahanan Pangan**	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan
			Tingkat konsumsi pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa rawan pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji
URUSAN PENUNJANG			
1	**Penunjang Lainnya**	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
			Persentase PD dengan Nilai IRB Baik
2	**Perencanaan**	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
			Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah

No.	Urusan	Program	Indikator Kinerja
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
3	**Keuangan**	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan aset daerah
4	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik
			Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan
			Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi
5	**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu
		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Sistem informasi pelayanan pengaduan masyarakat
6	**Sekretariat Daerah**	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti
			Nilai EKPPD
7	**Inspektorat**	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan BPK yang selesai
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB
			Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B
8	**Kecamatan**	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan

Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan seutuhnya. Berikut hasil evaluasi Program dan Kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Paser tahun 2020.

Tabel 2.121

Konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dan APBD Kabupaten Paser Tahun 2020 (Menurut Urusan)

KODE. REK	URUSAN	JUMLAH PROGRAM					PAGU PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN					
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		RKPD	APBD	Selisih = (9 - 8)	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		Cek B/S
					RKPD	APBD							RKPD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**	49	55	46	3	9	549.363.420.358,44	1.366.667.911.900,00	817.304.491.541,56	255	237	234	21	3	237
1.01	**Pendidikan**	5	6	5	0	1	128.210.624.489,58	167.604.362.335,49	39.393.737.845,91	76	70	70	6	0	70
1.02	**Kesehatan**	14	13	13	1	0	153.723.531.411,86	187.872.441.893,51	34.148.910.481,65	43	44	43	0	1	44
1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	16	14	14	2	0	81.795.675.000,00	913.779.609.995,00	831.983.934.995,00	45	43	42	3	1	43
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	4	8	4	0	4	170.647.577.056,00	80.427.155.018,00	(90.220.422.038,00)	25	22	22	3	0	22
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	4	5	4	0	1	10.802.338.780,00	12.865.434.137,00	2.063.095.357,00	36	33	32	4	1	33
1.06	**Sosial**	6	9	6	0	3	4.183.673.621,00	4.118.908.521,00	(64.765.100,00)	30	25	25	5	0	25
2	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**	65	59	57	8	2	132.664.376.779,48	93.583.087.609,00	(39.081.289.170,48)	313	274	269	45	5	274
2.01	**Tenaga Kerja**	3	3	3	0	0	2.209.231.264,00	2.494.375.110,00	285.143.846,00	13	14	13	0	1	14
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	5	4	4	1	0	2.044.456.600,00	1.864.116.598,00	(180.340.002,00)	17	13	13	4	0	13
2.03	**Pangan**	3	3	3	0	0	8.130.392.462,70	3.901.038.970,00	(4.229.353.492,70)	12	12	12	0	0	12
2.04	**Pertanahan**	2	1	1	1	0	116.299.200,00	343.038.000,00	226.738.800,00	2	1	1	1	0	1
2.05	**Lingkungan Hidup**	4	5	4	0	1	16.420.070.587,00	18.422.790.660,00	2.002.720.073,00	47	39	38	9	1	39
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	1	1	1	0	0	10.488.976.800,00	7.238.778.443,00	(3.250.198.357,00)	29	28	28	1	0	28
2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	4	4	4	0	0	8.291.972.160,88	6.874.688.230,00	(1.417.283.930,88)	50	51	50	0	1	51

KODE. REK	URUSAN	JUMLAH PROGRAM					PAGU PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN					
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		RKPD	APBD	Selisih = (9 - 8)	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		Cek B/S
					RKPD	APBD							RKPD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	4	4	1	0	17.820.829.000,00	4.592.046.800,00	(13.228.782.200,00)	21	19	19	3	0	19
2.09	Perhubungan	4	5	4	0	1	21.483.717.075,00	16.586.471.000,00	(4.897.246.075,00)	15	16	15	0	1	16
2.10	Komunikasi dan Informatika	6	6	6	0	0	33.362.435.671,90	13.467.043.100,00	(19.895.392.571,90)	29	27	27	2	0	27
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	4	4	2	0	775.410.000,00	591.448.000,00	(183.962.000,00)	5	5	5	0	0	5
2.12	Penanaman Modal	3	3	3	0	0	3.012.945.400,00	3.020.515.615,00	7.570.215,00	15	16	15	0	1	16
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	8	7	7	1	0	4.539.080.800,00	6.651.519.857,00	2.112.439.057,00	14	12	12	2	0	12
2.14	Statistik	3	2	2	1	0	642.637.458,00	1.374.719.200,00	732.081.742,00	26	5	5	21	0	5
2.16	Kebudayaan	2	2	2	0	0	2.141.152.400,00	2.438.158.376,00	297.005.976,00	8	7	7	1	0	7
2.17	Perpustakaan	1	1	1	0	0	550.065.250,00	2.905.525.550,00	2.355.460.300,00	5	5	5	0	0	5
2.18	Kearsipan	5	4	4	1	0	634.704.650,00	816.814.100,00	182.109.450,00	5	4	4	1	0	4
3	**URUSAN PILIHAN**	27	23	23	4	0	245.355.503.731,73	150.842.702.407,00	(94.512.801.324,73)	167	149	124	19	1	125
3.01	Kelautan dan Perikanan	6	5	5	1	0	15.739.061.370,00	8.157.177.477,00	(7.581.883.893,00)	29	24	24	5	0	24
3.02	Pariwisata	3	2	2	1	0	1.377.962.000,00	768.615.600,00	(609.346.400,00)	7	3	3	4	0	3
3.03	Pertanian	10	9	9	1	0	27.827.706.111,00	20.288.557.373,00	(7.539.148.738,00)	78	70	70	8	0	70
3.04	Kehutanan	1	1	1	0	0	186.791.436.037,68	107.937.866.053,00	(78.853.569.984,68)	24	24	0	0	0	0
3.06	Perdagangan	4	3	3	1	0	10.048.177.800,00	10.897.338.400,00	849.160.600,00	19	17	17	2	0	17
3.07	Perindustrian	2	2	2	0	0	2.417.336.213,05	1.943.064.104,00	(474.272.109,05)	5	6	5	0	1	6

KODE. REK	URUSAN	JUMLAH PROGRAM					PAGU PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN					
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		RKPD	APBD	Selisih = (9 - 8)	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak Sesuai di		Cek B/S
					RKPD	APBD							RKPD	APBD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3.08	**Transmigrasi**	1	1	1	0	0	1.153.824.200,00	850.083.400,00	(303.740.800,00)	5	5	5	0	0	5
4	**URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG**	31	26	25	6	1	156.625.222.595,10	152.189.849.834,00	(4.435.372.761,10)	366	302	299	67	3	302
4.01	**Administrasi Pemerintahan**	6	5	5	1	0	111.217.406.763,23	84.388.080.273,00	(26.829.326.490,23)	181	177	175	6	2	177
4.02	**Pengawasan**	5	4	4	1	0	2.246.806.650,00	5.542.528.080,00	3.295.721.430,00	55	22	22	33	0	22
4.03	**Perencanaan**	11	10	10	1	0	15.399.075.820,00	15.178.744.146,00	(220.331.674,00)	44	43	43	1	0	43
4.04	**Keuangan**	5	4	3	2	1	12.109.403.861,87	31.800.995.835,00	19.691.591.973,13	75	52	51	24	1	52
4.05	**Kepegawaian**	3	2	2	1	0	15.635.941.500,00	15.275.171.500,00	(360.770.000,00)	10	7	7	3	0	7
4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	1	1	1	0	0	16.588.000,00	4.330.000,00	(12.258.000,00)	1	1	1	0	0	1
		172	163	151	21	12	1.084.008.523.464,75	1.763.283.551.750,00	679.275.028.285,25	1101	962	926	152	12	1639

Keterangan :

1. *Kolom 1 adalah nomor urut SKPD.*
2. *Kolom 2 adalah nama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser*
3. *Kolom 3 memuat jumlah program pada RKPD bagi setiap SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Paser Tahun 2019*
4. *Kolom 4 memuat jumlah program pada APBD bagi setiap SKPD dilingkungan Pemda Kabupaten Paser Tahun 2015*
5. *Kolom 5 memuat hasil identifikasi terhadap jumlah program yang sama antara RKPD dan APBD Kabupaten Paser Tahun 2019 untuk setiap SKPD*
6. *Kolom 6 memuat jumlah program yang tidak konsisten antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah program pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah program dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD*
7. *Kolom 7 memuat jumlah pagu dari seluruh program pada SKPD yang bersangkutan dalam RKPD.*
8. *Kolom 8 memuat jumlah pagu dari seluruh program pada SKPD yang bersangkutan dalam APBD (setelah perubahan).*

9. *Kolom 9 memuat selisih antara pagu APBD dikurangi dengan pagu RKPD.*
10. *Kolom 10 memuat jumlah kegiatan dari seluruh program dalam RKPD.*
11. *Kolom 11 memuat jumlah kegitan dari seluruh program dalam APBD*
12. *Kolom 12 memuat jumlah kegiatan yang sama antara RKPD dan APBD.*
13. *Kolom 13 memuat jumlah kegiatan yang tidak konsisten antara RKPD dan APBD. Penghitungan dilakukan dengan menambahkan jumlah kegiatan pada RKPD yang tidak ada dalam APBD dengan jumlah kegiatan dalam APBD yang tidak ada dalam RKPD*
14. *Kolom 14 memuat jumlah kegiatan dalam Renja SKPD Tahun 2019 yang tidak ada dalam Renstra SKPD Tahun 2016-2021.*

Evaluasi sasaran pembangunan tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi tahun 2019 (atau data terakhir) dengan target kinerja 2019 dalam dokumen perencanaan pembangunan. Evaluasi ini dilakukan dengan harapan dapat menghasilkan data dan informasi yang valid dan update sebagai bagian dari optimalisasi evaluasi pembangunan daerah.

Hasil kajian dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2019, indikator kinerja sasaran pembangunan yang memuaskan dimana capaian target cukup memberikan hasil positif. Oleh karena itu, secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai arah kebijakan serta program dan kegiatan yang dirumuskan dan diimplementasikan memiliki capaian yang cukup sesuai dengan target sasaran sebesar 90,49%.

Capaian pembangunan jangka menengah pada periode ini memiliki beberapa kendala yang dirasa cukup berdampak signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Permasalahan yang cukup rumit dan kompleks dalam pembangunan Kabupaten Paser adalah terkait kondisi perekonomian daerah yang bergejolak dikarenakan imbas dari isu global perekonomian internasional. Selain itu, permasalahan wabah covid-19 yang mengakibatkan beberapa sektor penting mengalami bebrapa dampak sosial kehidupan masyarakat serta permasalahan ketimpangan struktur perekonomian wilayah yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian.

Pengendalian dan Evaluasi dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan meliputi :

a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD).
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikatorindikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup Kabupaten Paser. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Paser dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Kinerja RKPD Semester II Tahun 2020 atau Realisasi Kinerja Triwulan IV yang dilaksanakan hingga sampai dengan periode 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.122

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2020 (Semester II)

KODE URUSAN	URUSAN	PAGU APBD 2020 (Rp)	REALISASI (Rp)	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
				KINERJA (%)	Realisasi Anggaran (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.155.780.857.504,26	1.071.718.806.470,00	87,5	88,8	Tinggi	Tinggi
1.01	Pendidikan	137.786.984.432,00	86.908.702.500,00	65,8	63,07	Rendah	Rendah
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	692.312.156.264,41	679.418.233.771,00	89,7	98,14	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	218.224.324.587,85	200.688.931.346,00	85,7	91,96	Tinggi	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	89.602.102.310,00	88.256.080.563,00	90,0	98,50	Tinggi	Sangat Tinggi
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	13.993.310.905,00	13.049.302.506,00	98,4	93,25	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	3.861.979.005,00	3.397.555.784,00	95,1	87,97	Sangat Tinggi	Tinggi
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	70.162.084.513,75	59.813.818.056,00	83,5	82,4	Sangat Tinggi	Tinggi
2.01	Tenaga Kerja	1.836.567.680,00	1.395.870.329,00	71,9	76,00	Sedang	Tinggi
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.170.102.200,00	780.603.164,00	71,6	35,97	Sedang	Sangat Rendah
2.03	Pangan	6.551.247.833,00	6.278.995.275,00	94,4	95,84	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KODE URUSAN	URUSAN	PAGU APBD 2020 (Rp)	REALISASI (Rp)	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
				KINERJA (%)	Realisasi Anggaran (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
2.04	Pertanahan	522.280.680,00	490.804.180,00	100,0	93,97	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.05	Lingkungan Hidup	12.241.179.380,00	11.404.561.854,00	93,3	93,17	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.617.597.935,00	4.151.844.123,00	72,22	89,91	Tinggi	Tinggi
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.007.926.294,00	4.880.363.342,00	87,5	97,45	Tinggi	Sangat Tinggi
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.618.406.400,00	1.187.289.720,00	28,4	45,34	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2.09	Perhubungan	9.057.289.200,00	8.873.203.696,00	73,9	97,97	Sedang	Sangat Tinggi
2.10	Komunikasi dan Informatika	15.340.547.056,00	11.751.929.325,00	95,1	76,61	Sangat Tinggi	Tinggi
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	617.643.750,00	598.559.722,00	109,7	96,91	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.12	Penanaman Modal	1.911.582.973,75	1.655.752.567,00	92,7	86,62	Sangat Tinggi	Tinggi
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	3.757.507.510,00	3.604.654.513,00	67,9	95,93	Sedang	Sangat Tinggi
2.14	Statistik	681.024.950,00	604.715.921,00	87,5	88,79	Tinggi	Tinggi
2.16	Kebudayaan	1.780.434.000,00	882.486.213,00	99,4	49,57	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
2.17	Perpustakaan	1.071.678.472,00	908.419.062,00	88,3	84,77	Tinggi	Tinggi
2.18	Kearsipan	379.068.200,00	363.765.050,00	84,9	95,96	Tinggi	Sangat Tinggi
3	URUSAN PILIHAN	120.794.270.826,24	42.251.288.793,00	80,5	83,4	Sangat Tinggi	Tinggi
3.01	Kelautan dan Perikanan	4.955.449.433,00	4.294.244.780,00	92,0	86,66	Sangat Tinggi	Tinggi
3.02	Pariwisata	291.362.250,00	278.415.080,00	88,5	95,56	Tinggi	Sangat Tinggi
3.03	Pertanian	12.792.601.944,00	12.246.799.161,00	81,7	95,73	Tinggi	Sangat Tinggi
3.04	Kehutanan	94.179.466.105,24	17.173.534.177,00	75,2	18,23	Sedang	Sangat Rendah
3.06	Perdagangan	6.934.479.706,00	6.712.823.698,00	87,9	96,80	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3.07	Perindustrian	1.301.766.850,00	1.213.425.462,00	86,2	93,21	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

KODE URUSAN	URUSAN	PAGU APBD 2020 (Rp)	REALISASI (Rp)	RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN RKPD		PREDIKAT TINGKAT CAPAIAN RKPD	
				KINERJA (%)	Realisasi Anggaran (%)	KINERJA	REALISASI ANGGARAN
3.08	Transmigrasi	339.144.538,00	332.046.435,00	52,1	97,91	Rendah	Sangat Tinggi
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	108.361.690.964,75	73.091.776.649,00	87,9	79,0	Sangat Tinggi	Tinggi
4.01	Administrasi Pemerintahan	60.989.292.143,25	39.087.299.051,00	90,5	64,09	Tinggi	Rendah
4.02	Pengawasan	5.908.314.050,00	4.621.096.826,00	84,0	78,21	Tinggi	Tinggi
4.03	Perencanaan	9.101.037.628,50	8.628.570.308,00	96,1	94,81	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
4.04	Keuangan	26.260.940.703,00	16.140.213.256,00	68,1	61,46	Sangat Tinggi	Rendah
4.05	Kepegawaian	6.091.947.440,00	4.604.438.208,00	88,6	75,58	Tinggi	Sedang
4.07	Penelitian dan Pengembangan	10.159.000,00	10.159.000,00	100,0	100,00	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	JUMLAH	1.455.098.903.809,00	1.246.875.689.968,00	84,83	83,42	Sangat Tinggi	Tinggi

2.2.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.2.1.1.1 Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2020 yaitu meningkatnya angka partisipasi siswa sekolah, meningkatnya angka partisipasi anak usia dini, meningkatnya angka Melek Huruf, Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dan Berkembangnya pelayanan pendidikan yang berdaya saing.

Urusan Pendidikan Kabupaten Paser pada tahun 2020 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 137.786.984.432,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.908.702.500,00 atau 63,07%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Long Kali, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam dan Kantor Camat Muara Samu. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pendidikan Anak Usia Dini*
2. *Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun*
3. *Program Pendidikan Non Formal*
4. *Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*
5. *Program Manajemen Pelayanan Pendidikan*

2.2.1.1.2 Urusan Kesehatan

Peningkatan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan, karena faktor kesehatan menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu pembangunan kesehatan sangat terkait dan dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti demografi dan kependudukan, keadaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat termasuk tingkat pendidikan, keadaan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan biologi. Urusan WajibKesehatan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu meningkatnya pelayanan kesehatan primer, meningkatnya cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan Berkembangnya pelayanan kesehatan yang berdayasaing.

Secara keseluruhan Urusan Kesehatan pada tahun 2020mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.224.324.587,85 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.688.931.346,00 atau 91,96%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Kantor Camat Tanah Grogot, Kantor Camat Long Ikis, KantorCamat Long Kali, Kantor Camat Batu Sopang dan Kantor Camat Muara Komam. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Obat dan Perbekalan Kesehatan*
2. *Program Upaya Kesehatan Masyarakat*
3. *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*
4. *Program Pengembangan Lingkungan Sehat*
5. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular*
6. *Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan*
7. *Program pengadaan,peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya*

8. *Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita*
9. *Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak*
10. *Program Pemerataan Tenaga Kesehatan*
11. *Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD*
12. *Program Perbaikan Gizi Masyarakat*
13. *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Kb*
14. *Program Pengawasan Obat dan Makanan*
15. *Program kemitraan peningkatan pelayanan Kesehatan*
16. *Program Upaya Kesehatan Sekolah*

2.2.1.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan keperluan mendasar untuk peningkatan ekonomi di suatu daerah, oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus terus dilaksanakan untuk mendukung perekonomian di daerah. Urusan Wajib Pekerjaan Umum untuk tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2020 yaitu meningkatnya akses Air Bersih dan Terpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infrastruktur Daerah pada sasaran Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan. Akses untuk menuju tempat pelayanan publik dari desa ke kota di Kabupaten Paser telah terhubung dengan jalan yang dibangun oleh pemerintah daerah, baik berupa jalan raya maupun jembatan. Hal ini untuk menunjang akses pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Paser. Namun demikian, kondisinya masih kurang memadai pada sisi jalan raya.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 692.312.156.264,41 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 679.418.233.771,00 atau 98,14%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang, Kantor Camat Tanah Grogot,Kantor Camat Pasir Belengkong, Kantor Camat Kuaro, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam, Kantor Camat Muara Samu dan Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program pembangunan jalan dan jembatan*
2. *Program pembangunan turap/talud/bronjong*
3. *Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan*
4. *Program tanggap darurat jalan dan jembatan*
5. *Program pembangunan system informasi/data base jalan danjembatan*
6. *Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan lainnya*
7. *Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya*
8. *Program Pengendalian Banjir*
9. *Program Perencanaan Teknis Ke-PU- an*
10. *Program Perencanaan Tata Ruang*
11. *Program Pemanfaatan Ruang*
12. *Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang*
13. *Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan*
14. *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan AirLimbah*
15. *Program pembangunan infrastruktur perdesaan*

2.2.1.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib Perumahan untuk tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan Tahun 2020 yaituTerpenuhinya sarana dan prasarana umum penunjang pembangunan secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pembangunan Infstruktur Daerah pada sasaran Penataan dan Rehabilitasi Kawasan Pemukiman.

Analisa kinerja atas layanan urusan perumahan untuk Kabupaten Paser mengacu pada tingkat ketersediaan pasokan listrikpada rumah tangga. Hal tersebut digunakan sebagai indikator besarnya kebutuhan pasokan listrik yang akan ditargetkan pemenuhannya dalam jangka lima tahun RPJMD ini.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.89.602.102.310,00 sampai dengan

31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.256.080.563,00 atau 98,50%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Muara Komam, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Sosial. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pengembangan Perumahan*
2. *Program Lingkungan Sehat Perumahan*
3. *Program pengelolaan areal pemakaman*
4. *Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik*
5. *Program Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Lingkunganserta Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara*
6. *Program Pengawasan dan Pengendalian serta Pengelolaan Bangunan dan Lingkungan Permukiman*
7. *Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman*
8. *Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran*
9. *Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan*

2.2.1.1.5 Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.993.310.905,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.049.302.506,00 atau 93,25%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020.

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Camat Tanah Grogot,Kantor Camat Pasir Belengkong, Kantor Camat Kuaro, Kantor Camat Long Ikis, Kantor Camat Batu Sopang, Kantor Camat Muara Komam, Kantor Camat Batu Engau, Kantor Camat Tanjung Harapan dan Kantor Camat Muara Samu. Adapun ProgramProgram yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan*
2. *Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal*
3. *Program pengembangan wawasan kebangsaan*
4. *Program pendidikan politik masyarakat*
5. *Program Peningkatan Kesiagaan dan Tanggap Darurat Bencana*
6. *Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana*
7. *Program Pencegahan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana*
8. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum*

2.2.1.1.6 Urusan Sosial

Urusan Sosial pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.861.979.005,00 sampai dengan 31 Desember 2020dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.397.555.784,00 atau 87,97%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan Sosial tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya*
2. *Program pembinaan anak terlantar*
3. *Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma*
4. *Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)*
5. *Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial*
6. *Program Penanggulangan Korban Bencana Sosial*
7. *Program pembinaan panti asuhan /panti jompo*

2.2.1.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.2.1.2.1 Urusan Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.836.567.680,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.395.870.329,00 atau 76,00%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Energi Sumber

Daya Mineral Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Kesempatan Kerja*
2. *Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Lembaga ketenagakerjaan*
3. *Program Penempatan Tenaga Kerja*
4. *Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*

2.2.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.170.102.200,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesarRp. 780.603.164,00 atau 35,97%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh BadanPemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan.Adapun Program Program yangdilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan*
2. *Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender danAnak*
3. *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan*
4. *Peningkatan peran perempuan di pedesaan*

2.2.1.2.3 Urusan Pangan

Urusan Pangan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.551.247.833,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.278.995.275,00 atau 95,84%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)*
2. *Program pengembangan budidaya perikanan*
3. *Program peningkatan produksi hasil peternakan*

2.2.1.2.4 Urusan Pertanahan

Urusan pertanahan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 522.280.680,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 490.804.180,00 atau 93,97%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020.Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan padaAPBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan*

2.2.1.2.5 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.241.179.380,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.404.561.854,00 atau 93,17%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusantersebut dilaksanakan bersama oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kantor Camat Long Kali, Kantor Camat Muara Komam dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)*
2. *Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*
3. *Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*
4. *Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam*

2.2.1.2.6 Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.617.597.935,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.151.844.123,00 atau 89,91%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Camat di Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Penataan Administrasi Kependudukan*

2. *Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan*

2.2.1.2.7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser padatahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.5.007.926.294,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.880.363.342,00 atau 97,45%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebutdilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta seluruh Kantor Camat di Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan*
2. *Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan*
3. *Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa*
4. *Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa*
5. *Penataan Lembaga Kemasyarakatan*
6. *Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*
7. *Program Pengelolaan Sumber Daya Desa dan Pengembangan TTG*
8. *Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemdes*
9. *Program Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat*
10. *Program peningkatan peran perempuan di perdesaan*

2.2.1.2.8 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahterapada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.618.406.400,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.187.289.720,00 atau 45,34%. Untuk melaksanakan program dankegiatan tahun 2020, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Keluarga Berencana*
2. *Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konselingKRR*

3. *Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU*
4. *Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS*

2.2.1.2.9. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.057.289.200,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.873.203.696,00 atau 97,97%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusanPerhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan*
2. *Pogram peningkatan pelayanan angkutan*
3. *Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan*
4. *Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas*
5. *Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor*

2.2.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 mendapatkanalokasi anggaran sebesar Rp. 15.340.547.056,00 sampai dengan 30 Juni 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.751.929.325,00 atau 76,61%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusantersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Badan Pendapatan Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa*
2. *Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi*
3. *Program kerjasama informasi dengan mas media*
4. *Program Pengembangan Data/Informasi*

2.2.1.2.11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan UKM pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.643.750,00 sampai dengan 31 Desember2020 dengan realisasi

keuangan sebesar Rp. 598.559.722,00 atau 96,91%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusantersebut dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi,Usaha Kecildan Menengah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif*
2. *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
3. *Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*
4. *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.*

2.2.1.2.12.Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.911.582.973,75 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.655.752.567,00 atau 86,62%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusantersebut diselenggarakan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan PerijinanTerpadu dan Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*
2. *Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah*
3. *Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi*

2.2.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.757.507.510,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.604.654.513,00 atau 95,93%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Kantor Camat Batu Engaudan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga*

2. *Program peningkatan peran serta kepemudaan*
3. *Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*
4. *Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga*
5. *Program Pengembangan Kemitraan*
6. *Program Pengembangan Destinasi Pariwisata*
7. *Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata*

2.2.1.2.14. Urusan Statistik

Urusan Statistik pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 681.024.950,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 604.715.921,00 atau 88,79%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebutdilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian, Badan Penanggulangan Bencana daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan data/informasi/statistik daerah*
2. *Program Pengembangan Data/Informasi*

2.2.1.2.15.Urusan Kebudayaan

Urusan Kebudayaan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.780.434.000,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 882.486.213,00 atau 49,57%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun Program Program pada APBD 2020 adalah :

1. *Program Pengembangan Nilai Budaya*
2. *Program Pengelolaan Keragaman Budaya*

2.2.1.2.16.Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.071.678.472,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 908.419.062,00 atau 84,77%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan*

2.2.1.2.17.Urusan Kearsipan

Urusan Kearsipan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 379.068.200,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 363.765.050,00 atau 95,96%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebutdilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program perbaikan sistem administrasi kearsipan*
2. *Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan*
3. *Program peningkatan kualitas pelayanan informasi*

2.2.1.3 Urusan Pilihan

2.2.1.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.955.449.433,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.294.244.780,00 atau 86,66%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan perikanan tangkap*
2. *Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan*
3. *Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar*
4. *Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi Kelautan, Perikanan dan Peternakan*
5. *Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan/Perikanan/Peternakan dan Wawasan Lingkungan Kepada Masyarakat*

2.2.1.3.2. Urusan Pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 291.362.250,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.415.080,00 atau 95,56%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Program pengembangan pemasaran pariwisata*
2. *Program Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata*

2.2.1.3.3. Urusan Pertanian

Urusan Pilihan Pertanian pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.792.601.944,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.246.799.161,00 atau 95,73%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan*
2. *Program Peningkatan Kesejahteraan Petani*
3. *Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan*
4. *Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan*
5. *Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan*
6. *Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan*
7. *Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak*
8. *Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner*
9. *Program Pengembangan Perencanaan, Data dan Informasi*

1.2.1.3.4 Urusan Kehutanan

Urusan Kehutanan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaransebesar Rp. 94.179.466.105,24 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.173.534.177,00 atau 18,23%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebutdiselenggarakan oleh dinas

Lingkungan Hidup. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA*
2. *Program Pengelolaan Tahura*

2.2.1.3.5. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.934.479.706,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.712.823.698,00 atau 96,80%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusantersebut diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri*
2. *Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan*
3. *Program Penyediaan Fasilitas Pasar*

2.2.1.3.6. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.301.766.850,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.213.425.462,00 atau 93,21%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebutdiselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi*
2. *Program pengembangan industri kecil dan menengah*
3. *Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelistrikan*

2.2.1.3.7. Urusan Transmigrasi

Urusan Transmigrasi pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 339.144.538,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 332.046.435,00 atau 97,91%. Untuk melaksanakan program dan

kegiatan tahun 2020, urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi*

2.2.1.3.8. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.159.000,00 sampai dengan 31 Desember2020 dengan belum adanya realisasi keuangan Rp. 10.159.000,00 atau 100%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro. Adapun Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*

2.2.1.4 Urusan Penunjang

2.2.1.4.1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.989.292.143,25 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.087.299.051,00 atau 64,09%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh hampir semua SKPD di Kabupaten Paser yaitu Inspektorat Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, seluruh Kantor Camat, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayaanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Perikanan, dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah serta Sekretariat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah :

1. *Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*
2. *Program Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum dan Pemerintah*
3. *Program Penataan Daerah Otonomi Baru*
4. *Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*
5. *Program Pelayanan Administrasi Bidang Kesejahteraan Rakyat*
6. *Program Koordinasi Bidang Perekonomian*
7. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
8. *Pengawasan Jasa Konstruksi*
9. *Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik*
10. *Program PenataanBatas Daerah*
11. *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah*
12. *Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI*
13. *Program Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan*
14. *Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan*
15. *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*
16. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Daerah Lainnya*
17. *Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*
18. *Program Pelayanan Administrasi Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan*
19. *Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah*
20. *Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*
21. *Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*
22. *Program Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada*
23. *Program Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*
24. *Program Penanggulangan Masalah Sosial Ekonomi*

2.2.1.4.2. Urusan Pengawasan

Urusan Pengawasan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.908.314.050,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.621.096.826,00 atau 78,21%. Untuk melaksanakan

program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*
2. *Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)*
3. *Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN*

2.2.1.4.3. Urusan Perencanaan

Urusan Perencanaan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.101.037.628,50 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.628.570.308,00 atau 94,81%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program pengembangan data/informasi*
2. *Program perencanaan pembangunan daerah*
3. *Program perencanaan pembangunan ekonomi*
4. *Program perencanaan sosial dan budaya*
5. *Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam*
6. *Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan*
7. *Program Penelitian dan Pengembangan (Litbang)*

2.2.1.4.4. Urusan Keuangan

Urusan Keuangan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.260.940.703,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.140.213.256,00 atau 61,46%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2019 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah*
2. *Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota*
3. *Program Pengelolaan Aset Daerah*

2.2.1.4.5. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.091.947.440,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.604.438.208,00 atau 75,58%. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Kapasitas dan Integritas Sumberdaya Aparatur*
2. *Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur*

2.2.1.4.6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Kepegawaian pada tahun 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.091.947.440,00 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.604.438.208,00 atau 75,58%.. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020, urusan tersebut diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Kuaro. Adapun Program Program yang dilaksanakan pada APBD 2020 adalah sebagai berikut:

1. *Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*

2.2.2 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2020

Beberapa faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan RKPD diantaranya komitmen yang kuat dari para stakeholder dalam melaksanakan RKPD walaupun disadari bahwa pelaksanaan RKPD tahun 2020 dalam situasi pandemic covid-19 menjadi tantangan dalam merealisasikan RKPD 2020.

2.2.3 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2020

Faktor penghambat pelaksanaan RKPD tahun 2020 adalah Penanggulangan pandemi Covid 19 tidak dianggarkan sebelumnya sehingga dilakukan refocusing anggaran yang mempengaruhi pencapaian beberapa kegiatan dalam RKPD.

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya : tidak dilaksanakan beberapa kegiatan karena adanya pandemi covid sehingga tidak dilaksanakan secara publik.
- Pengadaan mebeleur sekolah : karena adanya refocusing anggaran untuk pandemi covid-19, akan dianggarkan kembali.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah : karena kesalahan nomenklatur harusnya penyempurnaan bukan rehabilitasi, akan dianggarkan kembali.
- Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah : karena kesalahan nomenklatur harusnya penyempurnaan bukan rehabilitasi.
- Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah : sekolah belum ada bangunan perpustakaan jadi tidak bisa direhabilitasi, akan dianggarkan kembali.
- Olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) SD/MI : karena adanya refocusing anggaran untuk pandemi covid-19, akan dianggarkan kembali.
- Pengadaan media pendidikan (bankeu provinsi) : karena adanya refocusing anggaran untuk pandemi covid-19, akan dianggarkan kembali
- Pembinaan kegiatan PLS (Operasional penilik PLS) : karna keterbatasan penilik dan pandemi covid-19 sehingga tidak ada penyelenggaraan belajar mengajar, dkegiatan ini dilaksanakan secara daring.
- Penyelenggaraan pendidikan paket A, B dan C : Belum ada dikeluarkan kebijakan tatap muka, masih dilaksanakan secara daring.
- Fasilitasi lomba pendidikan non formal dan informal : Belum ada dikeluarkan kebijakan tatap muka, masih dilaksanakan secara daring.
- Peningkatan kompetensi kepala sekolah : sebagian anggaran diarahkan pada penanggulangan covid-19, kegiatan ini dilaksanakan secara daring.
- Inventarisasi pemeriksaan barang/aset : karena kurangnya tenaga pengelola aset.
- Rakerda UKS : Belum diberlakukannya kegiatan tatap muka, akan diusulkan kembali jika sudah dikeluarkan aturan belajar secara tatap muka.
- Penyelenggaraan sepak bola pelajar : terjadiinya refocusing anggaran, akan dianggarkan kembali.

Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh **Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya dan Kecamatan Tanah Grogot**

- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya : realisasi belanja untuk kegiatan yang bersumber dana Non kapitasi puskesmas, menyesuaikan transfer dari BPJS (hasil verifikasi pihak BPJS tidak sesuai dengan nilai pengajuan klain dari puskesmas).
- Penanganan dan pembinaan kesehatan haji : keputusan ditiadakannya ibadah haji tahun 2020, sehingga hanya terlaksana skrinning tahap 1 dari 2 tahap, akan dilakukan penyesuaian kebijakan pemerintah tentang jamaah haji.
- Biaya operasional kesehatan (DAK) : Penundaan kegiatan akibat pandemi, akan diusulkan kembali.
- Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya : penundaan kegiatan ini akibat pandemi covid 19, akan diusulkan kembali.
- Pembinaan dan pengembangan desa siaga : penundaan sebagian kegiatan akibat pandemi covid-19, akan diusulkan kembali.
- Pengembangan peran serta masyarakat dan institusi : penundaan sebagian kegiatan akibat pandemi covid-19, akan diusulkan kembali.
- Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat : penundaan sebagian kegiatan akibat pandemi covid-19, akan diusulkan kembali.
- Penyemprotan/fogging sarang nyamuk : penundaan sebagian kegiatan akibat pandemi covid-19, akan diusulkan kembali.
- Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah : refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 tidak terserap semua karena memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga penanganan covid, akan diusulkan kembali.
- Evaluasi dan pengembangan standarisasi pelayanan kesehatan (DAK NON FISIK) : Kegiatan survey akreditasi puskesmas selama mas pandemi ditiadakan/ditunda, akan diusulkan kembali.
- Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu : beberapa jenis alat kesehatan yang sudah direncanakan untuk pusban tidak masuk dalam kriteria alat yang ada di pusban, akan diusulkan kembali.

- Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit (DAK) : Disebabkan 1 unit alat fisioterapi di RS Pratama Kerang pengadaannya dibatalkan karena pertimbangan teknis, akan diusulkan kembali.
- Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat : karena refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19, akan diusulkan kembali.
- Lomba balita tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi : penundaan kegiatan akibat pandemic covid-19, akan diusulkan kembali.
- Melakukan deteksi dan interview dini tumbuh kembang : penundaan kegiatan akibat pandemic covid-19, akan diusulkan kembali.
- Stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak (SDIDTKA) penundaan kegiatan akibat pandemic covid-19, akan diusulkan kembali.
- Manajemen terpadu balita sakit : Refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19, akan diusulkan kembali.
- Pertemuan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) : Penundaan kegiatan akibat pandemi covid-19, akan diusulkan kembali.
- Koordinasi pembinaan usaha kesehatan (Kec. Tanah Grogot) : Tidak terlaksana dikarenakan kegiatan terkendala covid-19, akan dianggarkan selanjutnya

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dilaksanakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Sekretariat DPRD**

- Pembangunan jembatan (Bankeu-Prov): Karena refocusing anggaran, akan diusulkan untuk dianggarkan kembali tahun 2022
- Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder (Bankeu Prov) : Tidak jadi dianggarkan karena adanya refocusing, diusulkan untuk dianggarkan kembali ditahun anggaran 2022
- Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan : Adanya refocusing anggaran, 2 BWP akan diusulkan tahun 2022
- Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang : Adanya pandemi covid-19, pembatasan kegiatan pertemuan dan refocusing anggaran, dilakukan virtual
- Penyusunan naskah akademik rencana tata ruang : Tidak jadi dianggarkan karena adanya refocusing, diusulkan untuk dianggarkan kembali ditahun anggaran 2022

- Penyusunan KLHS rencana tata ruang : Keterbatasan anggaran fokus untuk 1 dokumen revisi RTRW, diusulkan kembali pada tahun 2021
- Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang : Kegiatan tetap dilakukan offline hanya saja dilakukan pembatasan jumlah peserta mengingat pandemic covid-19, Diupayakan dilakukan online dengan ditunjang sarana fasilitas jaringan yang baik di lokasi kegiatan.
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas ; tidak ada dianggarkan di tahun 2020.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini dilaksanakan oleh **Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kantor Camat Long Ikis**

- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK PENUGASAN SANITASI BIDANG AIR MINUM) : Karena adanya refocusing sehingga anggaran dialihkan untuk pandemic covid-19

Urusan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ini dilaksanakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Paraja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas pemadam Kebakaran dan 10 Kecamatan di Kabupaten Paser.**

- Pengawalan kunjungan bupati/wakil dan pejabat daerah : Karena pandemi covid-19 sehingga kegiatan pengawalan kunjungan bupati menjadi berkurang dari biasanya, agar kedepannya pandemi covid dapat berakhir sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengawalan kunjungan bupati
- Peningkatan sinergis penyidik pegawai negeri sipil (PNS): Realisasi sampai akhir desember 2020 fisik hanya mencapai 41% dan realisasi keuangan 99,82% yaitu sebesar Rp. 28.097.000 karena adanya pandemi covid-19 sehingga anggaran pada kegiatan ini dilakukan pengurangan, Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dan semoga pandemi covid dapat berkurang agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik
- Penyidikan dan pemberkasan tindak pidana pelanggaran perda : Karena target kegiatan fisik terlalu tinggi sehingga realisasi fisik tidak mencapai keberhasilan atau di bawah 70%, Perlu diperhatikan kembali untuk penetapan target pada tahun berikutnya agar hasil akhir dapat terukur dan mencapai keberhasilan

Urusan Sosial ini dilaksanakan oleh **Dinas Sosial**

- Jaminan kesejahteraan sosial bagi warga yang mengalami bencana kekeringan : Tidak dianggarkan di tahun 2020, akan diusulkan kembali

2.2.4 Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PDberikutnya adalah meningkatkan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan Renja PD, memperhatikan dan mengevaluasi pencapain kinerja program dan kegiatan Renja PD.

Berikut Kebijakan Pelaksanaan RKPD Masa Yang Akan Datang :

a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terhadap rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai.
c. Adanya sinergitas antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
d. Pelaksanaan RKPD harus sesuai dan konsisten dengan RPJMD dan Berpedoman pada RPJPD;
e. Menjamin dan Memastikan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan Dokumen RKPD;
f. Melakukan Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paser telah membawa kemajuan yang signifikan bagi pencapaian pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD 2016-2021. Permasalahan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius dengan mengidentifikasi substansi masalahnya kemudian memberikan solusi yang cerdas sehingga pencapaian target indikator kinerja dapat terealisasi keseluruhan di tahun berikutnya.

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Paser juga memperhatikan permasalahan yang muncul dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh berlansaskan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Selain itu, permasalahan pembangunan diperoleh dari proses musrenbang. Identifikasi permasalahan pembangunan yang diperoleh melalui proses musrenbang menandakan bahwa proses perencanaan pembangunan disusun dengan pendekatan bawah-atas, yang berarti juga mengakomodir dan menyelaraskan aspirasi masyarakat.

Adanya perkembangan kabupaten yang cukup berhasil serta pengakuan dari berbagai pihak bukan berarti bahwa Kabupaten Paser dalam pembangunannya tidak mengalami permasalahan. Dari hasil evaluasi dan monitoring pembangunan yang dilakukan, pemerintah Kabupaten Paser mengalami permasalahan diberbagai bidang, berikut kami sampaikan indicator kinerja dan capaian kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan:

Tabel 2.123

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2015 – 2020

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Fokus Kesejahteraan dan PemerataanEkonomi								
1	**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1	Jumlah Penduduk	Jiwa	246.068	248.037	254.503	279.975	285,894	275.452
1.2	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,89	-4,96	1,13	3,68	3,88	-
1.3	Laju Inflasi di Kab. Paser	%	6,26	4,13	2,45	2,5*		-
	Pertumbuhan PDRB							-
1.4	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)/ tahun	146,05	138,99	160,02	162,30*	168,51	-
1.5	Indeks Gini		0,316	0,315	0,330	0,325*	0,32	0,328
1.6	Pemerataan Pendapatan Versi World Bank							
	- 40% Rendah	%	20,45	20,45	20,45	20,45		-
	- 40% Sedang	%	36,59	36,59	36,59	36,59		-
	- 20% Tinggi	%	39,60	39,60	39,60	39,60		-
1.7	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	21.556	21.530	23.618	23.299	477,440	515.414
1.8	Persentase penduduk di atas garis miskin	%	8,76	8,68	9,28	9,03	8,95	9,23
1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan		1,07	1,48	1,32	1,22	1,57	1,04

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.0	Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan	Kasus	244	285	220	194	142	-
Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	**Pendidikan**							
1.1	Angka melek Huruf	%	98,70	98,41	98,49	99,13	-	-
1.2	Angka Rata – Rata lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,12	8,19	8,20	8,30	8,54	8,55
1.3	Angka Harapan lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,65	12,96	12,98	12,98	13,00	13,10
1.4	APK SD	%	116,90	111,01	111,26	105,23	110,33	110,33
1.5	APK SMP	%	83,82	99,25	89,42	93,04	96,52	96,52
1.6	APK SMA	%	102,91	92,56	92,33	99,25	97,55	-
1.7	APM SD/MI	%	96,70	97,30	99,93	97,96	97,74	97,74
1.8	APM SMP/MTs	%	67,19	81,91	78,48	78,53	81,66	81,66
1.9	APM SMA/SMK/MA	%	65,20	67,97	65,16	62,24	62,80	-
2.0	Angka Partisipasi kasar	%	-	-	-	-	-	-
2								
2.1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,98	72,02	72,05	72,05		
2.2	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	8	9	12	7	5	-
2.3	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Kasus	80	66	40	63	18	-

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.4	Persentase Balita Gizi Buruk	%	5,6	4.1	12,1	0,08	0,11	0,053
3	**Pertanahan**							
1.1	Persentase Penduduk yang memiliki lahan	%	-	-	-	-	-	-
1.2	Jumlah penduduk yang bekerja		-	-	-	-	-	-
Fokus Budaya dan Olahraga								
1	**Kebudayaan**							
1.1	Jumlah Grup Kesenian	Unit	14	14	70	78	-	70
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	Unit	-	-	-	1	-	-
2								
2.1	Jumlah Klub Olahraga	Unit	52	52	56	58	-	153
2.2	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	8	8	8	8	8	8
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	**Pendidikan**							
1.1	Pendidikan Dasar							
1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun	%	98,98	100,00	99,93	99,22	121,45	-
1.1.2	Rasio Murid terhadap Sekolah							

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- SD Negeri	%	145,80	143.23	143,10	137,42	141,61	-
	- SD Swasta	%	183,88	89.23	217,13	227,00	221,84	-
	- MI	%	203,18	201.92	217,69	217,69*	221,38	-
1.1.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SD Negeri& SD Swasta /MI Negeri dan Swasta	%	11,67	14,54	15,70	15,70*	13,8	-
1.1.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah		56,84	56.92	132,45	132,45*	-	-
1.2	Pendidikan Menengah							
1.2.1	Angka Partisipasi Sekolah							
	- 13 – 15 Tahun	%	96,53	95,78	97,69	99,06	50,88	-
	- 16 – 18 tahun	%	82,23	82,33	75,43	77,97	31,05	-
1.2.2	Rasio Murid Terhadap Sekolah							
	- SMP Negeri	%	177,86	181.90	162,97	159,09	155,40	-
	- SMP Swasta	%	82,78	87.78	85,00	77,82	82,27	-
	- MTs	%	16,94	171.29	173,18	173,18*	176,41	-
	- SMA Negeri	%	269,00	350.69	350,92	350,92*	406,38	-
	- SMA Swasta	%	76,00	78.00	70,80	70,80*	71,5	-

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- MA	%	110,00	113.92	115,83	115,85	132,25	-
	- SMK	%	43,70	387.64	344,08	344,10	359,53	-
1.2.3	Rasio Murid terhadap guru							
	- SMP Negeri	%	13,59	14.31	13,96	12,80*	12,83	-
	- SMP Swasta	%	7,37	10.53	10,49	8,92*	10,52	-
	- MTs	%	10,83	14.49	14,36	14,36*	9,8	-
	- SMA Negeri	%	13,12	14.11	13,87	13,87*	14,55	-
	- SMA Swasta	%	8,12	11.14	10,41	10,41*	11,59	-
	- MA	%	8,11	9.24	10,15	10,15*	7,45	-
	- SMK	%	15,65	13.32	13,64	13,64*	14,16	-
1.2.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah							
	- Menengah Pertama	%	46,17	39.12	45,78	45,78*	-	-
	- Menengah Atas	%	25,00	9.41	20,39	20,39*	-	-
1.3	Angka Putus Sekolah							
	- SD/MI	%	0,2	0.010	0,1	0,20	-	-
	- SMP/MTs	%	0,07	0.072	0,2	1,50	-	-
	- SMA/SMK/MA	%	1,42	0.072	1,0	1,0*	-	-
1.4	Angka kelulusan							
	- SD/MI	%	99,26	99.26	98,25	98,25*	-	-

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- SMP/MTs	%	97,18	97.18	98,30	98,30*	-	-
	- SMA/SMK/MA	%	98,62	99.20	90,83	90,83*	-	-
1.5	Guru yang memenuhi Kualifikasi min. S1/D-IV	Orang	3.139	3,375	3.493	3.515	-	-
1.6	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah		-	-	-	-	-	-
1.7	Rasio guru terhadap murid		-	-	-	-	-	-
1.8	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata		-	-	-	-	-	-
1.9	Pendidikan anak Usia Dini (PAUD)		-	-	-	-	-	-
2	**Kesehatan**							
2.1	Rasio dokter	Orang	19	20	22	16	21	17,06
2.2	Rasio puskesmas poliklinik per satuan penduduk	Orang	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0005	0,0004
2.3	Rasio Posyandu persatuan balita	Balita	15	10,21	10,21	10,21	-	-
2.4	Rasio tenaga medis persatuan penduduk	Penduduk	0,2	2,95	0,39	0,30	-	-
2.5	Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih	Kelahiran	77,6	90,7	87,2	79,12	87,1	92,9

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.6	Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan	%	20,91	22,41	14,35	14,35*	-	-
2.7	Morbilitas (Angka Kesakitan)	%	8,46	9,65	8,36	8,36*	-	-
2.8	Cakupan Puskesmas	%	170	170	170	170	170	170
2.9	Cakupan Desa/Keluhrahan Universal Child Immunization (UCI)							
3.0	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		-	-	-	-	-	-
3.1	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC BTA		-	-	-	-	-	-
3.2	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD		-	-	-	-	-	-
3.3	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		-	-	-	-	-	-
3.4	Cakupan Kunjungan Bayi		-	-	-	-	-	-
3.5	Jumlah Puskesmas	Unit	17	17	18	19	19	19
3	**Pekerjaan Umum**							
3.1	Proporsi Pajang jaringan Jalan dalam kondisi baik	Km	1.472,34	1.472,34	1.472,34	1.472,34	20.61%	13.29%

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.2	Kondisi jalan baik	%	26.24%	26.24%	24.97%	15.90%	20.61%	13,29%
3.3	Luas Irigasi Kabupaten kondisi baik	M	114,50	57.000	236.740	236.740		
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	-	91,32	90,70	93,36		
3.5	Lingkungan Pemukiman (Kumuh)	%	176,11	170,98	170,98	170,98		
3.6	Rasio Jaringan Irigasi							
3.7	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk							
3.8	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Persatuan penduduk							
3.9	Rasio Rumah Layak huni (Pertumbuhan 3%)							
4.0	Rasio pemukiman layak huni							
4.1	Panjang jalan dilalui roda 4							
4.2	Jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)							

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.3	Panjang jalan dalem kondisi baik							
4.4	Panjang jalan yang memiliki drainase							
4.5	Sempadan jalan yang di pakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar							
4.6	Sempadan sungai yang di pakai bangunan liar							
4.7	Drainase dalem kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat							
4.8	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota							
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**							
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	67,83	73,96	57,57	60,14	62,91	
4.2	Persentase rumah tangga dengan air minum layak	%	69,22	80,84	81,13	81,13*		
4.3	Persentase rumah tangga dengan sanitasi layak	%	50,11	83,92	85,91	88,50		
4.4	Persentase rumah tangga dengan penerangan listrik	%	98,70	96,79	98,50	98,54		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.5	Persentase rumah layak huni	Unit	-	15.258	4.476	3.485	2.915	
4.6	Lingkungan pemukiman kumuh						175,87	
5								
5.1	Banyaknya Gangguan Kamtibmas	Kejadian	431	438	310	246		
5.2	Jumlah Anggota Linmas	Orang	2.038	2.038	2.038	2.472		
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar								
6	**Tenaga Kerja**							
6.1	Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke atas) Menurut Jenis kelamin	Orang	L :98.811 P: 84.945	L:102.591 P : 88.305	L : 81.907 P : 33.491	L: 82.176 P: 33.518		
6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang bekerja Menurut Lapangan Usaha							
	- Pertanian	%	44,63	44,63	35,68	35,59		
	- Pertambangan dan Penggalian	%	9,66	9,66	11,07	11,30		
	- Industri	%	2,14	2,14	3,46	3,45		
	- Kontruksi	%	3,61	3,61	2,26	2,26		
	- Listrik, Gas &Air	%	0,47	0,47	0,47	0,47		
	- Perdagangan	%	19,55	19,55	19,58	19,53		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Transportasi dan Komunikasi	%	2,47	2,47	0,48	4,54		
	- Jasa	%	16,11	1,83	4,55	21,63		
	- Lainnya	%	1,83	16,11	1,23	1,23		
6.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9,06	-	5,54	5,54*		
6.4	Pertumbuhan Jumlah Penganggur	%			8,18	7,85		
6.5	Jumlah perselisihan hubungan industrian							
6.6	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%						
6.7	Tingkat pengagguran terbuka		9,06	9,06	5,54	6,87		
7	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana**							
7.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	40,39	40,55	40,85	46,81		
7.2	Jumlah Tenaga kerja perempuan	Orang	-	2.396	2.186	2.130		
7.3	Banyaknya anak terlantar (0-21 tahun)	Anak	618	-	203	197		
7.4	Partisipasi Perempuan di lembaga swasta							
7.5	Rasio KDRT							
8.	**Pangan**							

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
8.1	Produksi Padi dan Palawija	Ton	39.599	34.008	49.179	49.350*		
9	**Pertanahan**							
9.1	Jumlah Bangunan Ber IMB	Unit	4.930	5.201	5.371	5.618		
10	**Lingkungan Hidup**							
10.1	Persentase Penduduk berakses air minum	%	6.22/25	6.52/25	6.52/25	6.52/25		
10.2	Indeks kualitas air sungai	Titik Kualitas/Parameter	32 Titik Buruk	32 Titik Buruk	32 Titik Buruk	31 Titik Buruk *)		
10.3	Penegakan hukum lingkungan	Kasus	5 Kasus 4 Surat Tindak Lanjut 1 Uji Lab	4 Kasus 1 Surat Tindak Lanjut 3 Uji Lab	5 Kasus 4 Surat Tindak Lanjut 1 Uji Lab	4 Kasus 4 Surat Tindak Lanjut 1 Uji Lab		
10.4	Persentase sampah terangkut per hari	%	3	3	3	4 *		
11	**Kependudukan dan Catatan Sipil**							
11.1	Kepemilikan KTP	Orang	161.382	162.288	171.654	186.047		
11.2	Kepemilikan Akta Kelahiran	Orang	92.253	102.368	122.145	127.282		
12	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**							
12.1	Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang Aktif	Unit	139	139	139	139		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.2	Jumlah LSM dan Ormas	Unit	225	246	252	254		
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
13.1	Persentase akseptor KB terhadap PUS	%	73,72	78	78,27	69,00		
13.2	Banyaknya Peserta baru KB	Orang	7.651	7.280	7.714	7.714*		
13.3	Jumlah keluarga pra sejahtera, sejahtera I	Orang	-	18.254	38.286	38.286*		
14	**Perhubungan**							
14.1	Status Jalan di Kabupaten Paser							
	- Desa	Km	379,75	379,75	379,75	379,75		
	- Kabupaten	Km	625,44	625,44	1.005,2	1.005,2		
	- Propinsi	Km	242,34	242,34	242,434	242,434		242,434
	- Nasional	Km	224,71	224,71	224,71	224,71		224,71
15	**Komunikasi dan Informatika**							
15.1	Jenis Surat Kabar							
	- Nasional	Jenis	3	3	4	4		
	- Lokal	Jenis	6	6	6	6		
16.	**Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menegah**							
16.1	Jumlah Koperasi	Unit	288	301	283	286		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
16.2	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Unit	11.514	13.736	14.398	14.638		
17	**Penanaman Modal**							
17.1	Realisasi proyek PMDN	Juta (Rp)	419.296	318.630	607.326	7.935.089		
17.2	Realisasi proyek PMA	000 (US$)	107.025	607.326	288.696	89.097		
17.3	Jumlah Investor	Orang	19	21	53	62		
17.4	Nilai Investasi		526.348.057.365	528.512.696.470	776.968.138.458	7.935.089.676.690		
18	**Kepemudaan dan Olah raga**							
18.1	Jumlah Karang Taruna	Unit	26	26	36	38		
18.2	Jumlah GOR/ Sarana Olah raga	Unit	1	1	1	1		
19	**Statistik**							
19.1	Buku " Kabupaten/Kota Dalam Angka"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
19.2	Buku "PDRB Kabupaten/Kota"	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
20	**Kebudayaan**							
20.1	Jumlah event budaya	Event	1	2	3	3		
20.2	Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala	Unit	10	10	120	120		
20.3	Jumlah Museum	Unit	1	1	1	1		
20.4	Jumlah tanaman budaya	Unit	1	1	1	1		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
21	**Perpustakaan**							
21.1	Jumlah Perpustakaan	Unit	288	296	296	296		
21.2	Jumlah Pengunjung perpustaakan pertahun	Orang	8.325	13.344	8.497	8.138		
21.3	Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	98.690	49.545	49.545	70.505		
Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	**Pariwisata**							
1.1	Kunjungan wisata	Orang	19.512	20.572	24.562	27.070		
2	**Pertanian**							
2.1	Produksi Padi	Ton	36,291	32.479	41.726	41.726*		
2.2	Produksi padi atau bahan utama lainnya per Ha	Kw	3,87	3,97	4,22	4,22*		
2.3	Kontribusi Sektor peternakan, pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB	%	11,29	12,64	11,20	11,20*		
2.4	Kontribusi Subsektor tanaman pangan terhadap PDRB	%	0,28	0,29	0,29	0,29*		
3	**Kehutanan**							
3.1	Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,78	0,84	0,72	0,72*		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	**Perdagangan**							
	Kontribusi Subsektor perdagangan terhadap PDRB	%	3,34	3,75	3,48	3,48*		
	Net Ekspor ADHB	Miliar Rp	25.793,99	24.401,76	23.378,50	23.378,50*		
	Net Ekspor ADHK	Miliar Rp	23.736,64	23.504,66	22.315,07	22.315,07*		
5	**Perindustrian**							
5.1	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	4,28	4,77	4,92	4,92		
5.2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas terhadap PDRB	%	4,28	4,77	4,92	4,92		
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Rata – rata pengeluaran konsumsi per kapita	Rp/Bulan	907.361	1.034.650	1.000.905	1.208.889		
1.2	Rata – rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita	Rp/Bulan	433.494	536.184	552.687	626.512		
1.3	Rata – rata pengeluaran konsumsi Non makanan per kapita	Rp/Bulan	473.867	498.466	448.218	582.377		

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.4	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta/Rp	146,05	138,99	160,02	160,20*		
1.5	PDRB Per Kapita (ADHK)	Juta/Rp	131	122	121	121*		
1.6	Jumlah Koperasi	Unit	288	301	283	286		
2	**Pertanian**							
2.1	Nilai tukar petani	%	-	-	-	98 *		
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	**Perhubungan**							
1.1	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	M	130	111	115	119		
2	**Penataan Ruang**							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	-	-	53,52	53,62		
2.2	Luas wilayah industri	Ha	-	-	-	-		
2.3	Luas wilayah perkotaan	Ha	-	59.586,761	59.586,761	59.586,761		
3.	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
3.1	Jumlah Kantor Perbankan	Unit	9	9	10	10		
3.2	Jumlah Akomodasi (hotel/penginapan)	Unit	27	30	32	32		
3.3	Jumlah rumah makan/restoran	Unit	41	41	41	113		
4	**Lingkungan Hidup**							

No.	Aspek/Fokus/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
4.1	Persentase rumah tangga dengan sumber air bersih	%	67,83	73,96	71,02	71,02*		
5	**Komunikasi dan Informatika**							
5.1	Daya listrik yang diproduksi	MWh	107,579,674	111,598,372	107.602.448	112.435.994		
5.2	Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	32,847	36.220	39.825	44.296		
Fokus Iklim Berinvestasi								
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Nilai Investasi(PMDN/PMA)	Juta Rp	526.348	528.512	776.968	776.968*		
	Fokus Sumber Daya Manusia							
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		70,30	71,00	71,16	71,16*		
1.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		64,58	-	62,07	62,07*		
1.3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		68,66	-	69,78	69,78*		
1.4	Rasio Ketergantungan	%	47,74	46,77	46,36	46,36*		
1.5	Indeks Ketimpangan Regional							
1.6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik		3,191	3,191	3,191	3,200*		

2.3.1 Pendidikan

Berdasarkan data jumlah murid dan jumlah guru untuk tingkat pendidikan SD dan SMP, dapat dikatakan bahwa rasio murid terhadap guru untuk dua jenjang pendidikan ini di Kabupaten Paser sudah cukup baik. Namun, yang perlu disadari adalah disparitas terkait akses terhadap pendidikan antara masyarakat yang bermukim di kota dengan yang di desa atau di wilayah-wilayah pedalaman. Minimnya fasilitas pendidikan di wilayah pesisir dan pedalaman menjadi salah satu faktor penghambat terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kenyataan ini akan sangat berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah anak-anak di pesisir dan pedalaman. Selain berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah (baik APK maupun APM), kurangnya sarana pendidikan di wilayah pedalaman dan pesisir berpengaruh juga terhadap sebaran tenaga-tenaga guru yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Tidak heran bila rasio murid terhadap guru di Kabuaten Paser terlihat cukup proporsional, tetapi dalam kenyataannya justru sedang tercipta kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat di pesisir dan pedalaman terkait akses terhadap pendidikan ini.

Kesenjangan akses ini dapat terlihat dari semakin berkurangnya jumlah murid pada level pendidikan yang lebih tinggi. Artinya sebaran sarana dan prasarana pendidikan untuk level SMP masih belum merata untuk seluruh wilayah, sehingga jumlah murid pada level pendidikan lanjutan jauh menurun jika dibandingkan dengan jumlah murid SD yang mencapai jumlah di atas 30 ribu (Kabupaten Paser dalam Angka 2020). Kondisi ini bisa terbaca dengan jelas ketika lama waktu sekolah yang digalakkan negara, yaitu pendidikan dasar 9 tahun. Jika dibandingkan dengan daerah lain, kondisi ini masih cukup baik, namun ketika lama waktu sekolah ini didetailkan pada level analisis perkotaan dan pedesaan, maka akan terlihat bahwa lama waktu sekolah anak-anak di daerah perkotaan dan sentra perekonomian lebih lama dibanding anak-anak yang tinggal di pesisir dan pedalaman yang belum memiliki akses dan kualitas pendidikan yang kompetitif. Hal ini berimplikasi pada pola pikir anak-anak usia sekolah yang lebih berorientasi untuk mencari pekerjaan daripada peningkatan kualitas dan kapasitas.

2.3.2 Kesehatan

Jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di Kabupaten Paser dapat dikatakan cukup memadai untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, angka kematian bayi, balita dan ibu hamil masih bersifat fluktuatif. Salah satu persoalan yang patut diperhatikan secara khusus adalah semakin meningkatnya angka kematian balita. Hal ini terkait dengan kualitas pelayanan imunisasi yang cenderung menurun. Padahal, imunisasi menjadi salah satu cara menekan angka kematian balita, sebab banyak penyakit yang dapat dicegah lewat pemberian vaksin saat imunisasi.

Persoalan utamanya kembali pada keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir atau wilayah pedalaman Kabupaten Paser. Realitas lain menunjukkan bahwa penyebab utama kematian balita ialah ispa dan diare. Hal ini berarti tenaga-tenaga kesehatan perlu disebar secara lebih merata untuk memberi pelayanan yang berkualitas terutama dalam mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

Keterbatasan akses masyarakat terhadap sarana-sarana kesehatan perlu dicarikan solusi, salah satunya dengan menyebar tenaga-tenaga kesehatan ke wilayah pesisir dan pedalaman, serta mendorong mereka untuk memberi pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tepat sasaran demi meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kesehatan tidak saja dengan membangun fasilitas kesehatan dan menunggu masyarakat datang ke fasilitas tersebut, tetapi lebih menggunakan strategi "jemput bola", yaitu tenaga-tenaga kesehatan yang diterjunkan hingga ke wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan akses untuk sampai ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

2.3.3 Infrastruktur Perhubungan

Perhubungan berkaitan erat dengan mobilisasi dan konektivitas masyarakat baik dalam wilayah Kabupaten Paser maupun dengan wilayah lain di luar Kabupaten Paser. Kendala yang paling banyak dihadapi dalam bidang perhubungan adalah minimnya moda transportasi serta belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan. Di Kabupaten Paser, panjang jalan dengan kondisi baik tidak mencapai 50% dari keseluruhan panjang jalan, sedangkan sisanya adalah jalan dengan kondisi sedang, rusak dan rusak berat.

2.3.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini permasalahan yang dihadapi Kabupaten Paser adalah masih rendahnya kualitas kawasan permukiman yang dilihat dari masih kurangnya infrastruktur yang mendukung kawasan permukiman seperti air bersih dan sanitasi. Saat ini akses air bersih kabupaten Paser masih tergolong rendah yaitu sebesar 62,91% dengan akses air bersih di wilayah perkotaan mencapai 77,93% dan wilayah pedesaan mencapai 54,06%. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya masih banyaknya daerah yang tidak memiliki sumber air baku yang layak, keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam penyediaan sarana air bersih, pengelolaan yang kurang efektif dan efisien dimana terdapat infrastruktur SPAM yang sudah dibangun tetapi belum dapat dikelola dengan baik karena tidak adanya biaya operasional dan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh lembaga pengelola.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, akses sanitasi Kabupaten Paser masih tergolong rendah yaitu pada Tahun 2019 sebesar 61,9%. Untuk

meningkatkan akses sanitasi perlu dukungan dan peran serta pemerintah melalui penyediaan sarana sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah, yang berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat serta peningkatan kualitas sistem setempat. Selain itu perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kesehatan lingkungan sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan lingkungan dengan menyediakan rumah tinggal yang memiliki sanitasi layak. Capaian akses sanitasi diupayakan mencapai target pemenuhan universal akses sanitasi sebesar 100%.

Permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Kabupaten Paser adalah masih tingginya angka backlog perumahan dan tingginya angka jumlah rumah tidak layak huni. Tahun 2019 angka backlog penghunian sebesar 6.446 dan backlog kepemilikan sebesar 9.562 sedangkan jumlah rumah tidak layak huni mencapai 9.676 unit. Berdasarkan angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Paser yang tidak memiliki rumah yang layak huni.

Selain itu di Kabupaten Paser juga masih terdapat kawasan permukiman kumuh khususnya di wilayah perkotaan. Pada umumnya permasalahan kawasan-kawasan kumuh di perkotaan tersebut tidak tersedia sarana sanitasi yang memadai, kualitas jalan lingkungan dan drainase yang kurang baik dan jarak antar rumah yang sangat rapat sehingga menimbulkan kesan padat dan semrawut. Untuk mengurangi kawasan kumuh tersebut perlu upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat melalui beberapa program pembangunan untuk mewujudkan kota yang layak huni.

2.3.5 Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan hidup menjadi salah isu penting yang perlu diperhatikan, mengingat Kabupaten Paser sebagai salah satu wilayah dengan persentase aktivitas pertambangan yang cukup tinggi. Pencemaran lingkungan hidup oleh sampah B3 (bahan beracun dan berbahaya) akan menjadi persoalan bagi pengembangan potensi daerah selain tambang. Indikator persoalan ini salah satunya direpresentasikan oleh data yang menunjukkan bahwa hanya 9 perusahaan yang memiliki izin pembuangan air limbah.

Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan dan memperketat perizinan bagi pembuangan limbah-limbah perusahaan yang beresiko tinggi mencemari lingkungan hidup, terutama tanah, udara dan air. Untuk itu perlu menata strategi pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong investasi di luar tambang terutama bidang pertanian dan perkebunan yang terkait erat dengan lingkungan hidup. Selain mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tambang, pertanian dan perkebunan tidak saja memberi sumbangsih bagi PDRB tetapi secara tidak langsung membawa pengaruh positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

2.3.6 Kependudukan dan Catatan Sipil

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan secara serius oleh SKPD kependudukan dan catatan sipil adalah manajemen administrasi bagi penduduk lokal dan penduduk yang bermigrasi masuk ke Kabupaten Paser. Tujuannya adalah menghindari duplikasi data dari mereka yang bermigrasi ke Kabupaten Paser. Masyarakat yang bermigrasi ke Kabupaten Paser secara administratif juga harus menjadi penduduk Paser. Dengan demikian, mereka masuk dalam hitungan sebagai wajib pajak Kabupaten Paser, sehingga kehadiran kelompok migran ini memberi sumbangsih bagi pendapatan Paser, bukan hanya meraup keuntungan dari Kabupaten Paser.

2.3.7 Tenaga Kerja

Komposisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten paser masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kecenderungan yang terus menurun. Hal ini menandakan masih belum terbukanya bidang-bidang pekerjaan lain, terutama yang berhubungan dengan kewirausahaan. Mereka yang masuk dalam usia angkatan kerja di Kabupaten Paser masih memiliki kecenderungan untuk terjun ke bidang-bidang pekerjaan yang sudah ada, dan belum beralih ke upaya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Di samping itu, kecenderungan ini dapat dilihat sebagai gambaran kualitas tenaga kerja yang tersedia di Kabupaten Paser. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Kabupaten Paser akan melakukan pendampingan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas angkatan kerja yang ada di Kabupaten Paser. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat sektor-sektor yang menjanjikan penyerapan tenaga kerja, misalnya sektor kelautan dan perikanan, serta kewirausahaan. Tujuannya adalah tersedianya angkatan kerja yang kompeten dan mampu bersaing, serta memiliki daya untuk membuka bidang-bidang pekerjaan baru di luar yang sudah ada.

2.3.8 Koperasi dan UKM

Meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM di Kabupaten Paser dalam kurun waktu antara 2013 hingga 2017 mengindikasikan kecenderungan masyarakat Paser untuk secara mandiri menggerakkan ekonomi pada skala mikro. Namun, kecenderungan ini belum diimbangi oleh penanaman modal (investasi) karena para investor lebih memilih menanamkan modalnya pada sektor pertambangan.

Kenyataan ini perlu disikapi dengan seksama,terutama mengarahkan para investor agar bersedia terlibat dalam penanaman modal di luar sektor pertambangan, misalnya berinvestasi dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain itu, tidak kalah penting adalah keberadaan koperasi dan UMKM sebagai salah satu urusan yang mampu meningkatkan nilai tambah dari potensi-potensi non-tambang yang ada di Kabupaten Paser. Misalnya menjadikan koperasi dan UMKM sebagai unit pengelola hasil-hasil pertanian dan perkebunan sebelum dilepas ke pasar, sehingga hasil pertanian dan

perkebunan tidak lagi berupa bahan mentah, tetapi sebagai bahan olahan yang telah ditingkatkan nilai jualnya lewat aktivitas di koperasi atau UMKM.

2.3.9 Kebudayaan

Persoalan yang perlu diselesaikan pemerintah dalam bidang kebudayaan adalah melakukan inventarisasi budaya-budaya lokal Kabupaten Paser. Hal ini perlu dilakukan demi mengenalkan secara tepat unsur-unsur kebudayaan lokal Kabupaten Paser sebelum ditampilkan dalam festival-festival atau pameran budaya. Identifikasi, inventarisasi dan pengembangan nilai dan pesona budaya ini berkorelasi positif terhadap kemampuan Kabupaten Paser dalam menemukan ruang-ruang kreatif baru baik dari segi sosial, politik, perekonomian dan lain sebagainya.

Pengenalan dan inventarisasi terhadap budaya asli masyarakat lokal Paser ini perlu dilakukan, mengingat Paser sebagai salah satu daerah yang didiami oleh banyak orang dari berbagai wilayah lain. Pengenalan atas budaya asli Paser serta nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya juga dapat dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan semangat dan arah pembangunan Paser di masa yang akan datang.

2.3.10 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengembangan potensi serta pemberdayaan masyarakat desa yang didukung oleh alokasi dana yang lebih dari1 miliar rupiah ditambah pengadaan satu unit mobil dan ragam fasilitas lain untuk masing-masing desa menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan dan mensukseskan penguatan perekonomian dari desa. Namun demikian, kucuran dana yang sedemikian besar untuk setiap desa ini perlu mendapat kontrol yang ketat dari berbagai pemangku kepentingan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan dapat berkelanjutan dalam menggerakkan dan mewujudkan semangat desa membangun.

2.3.11 Komunikasi dan Informasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Paser meliputi jaringan telepon rumah dan telepon genggam, televisi, radio, internet serta surat kabar, baik nasional maupun lokal. Kehadiran jaringan komunikasi ini tentu saja mempermudah akses warga Kabupaten Paser terhadap beragam informasi atau berita yang berasal dari luar serta mempererat jalinan komunikasi antar warga. Ini juga menandakan keterbukaan wilayah Kabupaten Paser terhadap informasi-informasi yang berasal dari luar daerah.

Melihat pentingnya jaringan komunikasi dan informasi ini, maka pemerintah berkewajiban memperluas jangkauan jaringan komunikasi hingga ke wilayah-wilayah pedalaman agar masyarakat di wilayah tersebut juga bisa memperoleh akses bagi komunikasi dan memperoleh informasi dari dunia luar. Perluasan jaringan ini harus pula diimbangi dengan peningkatan kapasitas jaringan tidak saja GSM, tetapi juga 3G dan 4G sebagaimana yang terjadi dalam perkembangan jaringan komunikasi saat ini.

Selain kedua hal di atas, pemerintah harus menggunakan jaringan komunikasi dan informasi ini untuk mengembangkan keterbukaan dan kemudahan akses data informasi publik. Misalnya melalui website resmi milik pemerintah daerah yang datanya konsisten diperbaharui.Website pemerintah daerah diharapkan mampu menyajikan data-data yang dapat diakses bagi kepentingan publik, serta memanfaatkannya sebagai sarana untuk menerima masukan atau aspirasi masyarakat.

2.3.12 Ketahanan Pangan

Secara umum, tanaman padi, baik padi sawah maupun padi ladang masih menjadi komoditi pangan yang dominan di Kabupaten Paser. Hal ini terbukti dari besarnya lahan yang diperuntukkan bagi tanaman ini dibandingkan dengan lahan bagi tanaman pangan yang lain. Namun, persoalannya adalah ketika produksi tanaman padi meningkat, produksi tanaman pangan lain, misalnya jagung justru menurun. Hal ini tidak berimplikasi bagus untuk jangka panjang, sebab akan menimbulkan ketergantungan berlebihan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok.

Untuk mengatasi persoalan ini, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan diversifikasi tanaman pangan dan peningkatan produktivitas hasil panen secara berimbang. Artinya masyarakat disadarkan untuk melihat tanaman pangan lain di luar padi sebagai bahan pangan dan sumber makanan pokok. Keberhasilan meningkatkan produktivitas padi perlu diimbangi dengan peningkatan produktivitas tanaman lain misalnya jagung, singkong, dan ubi rambat. Kesemuanya adalah bahan pangan yang bila diupayakan peningkatan produktivitasnya secara berimbang akan membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Paser.

2.3.13 Energi dan Sumber Daya Mineral

Kekurangan energi listrik telah menjadi salah satu persoalan besar bagi masyarakat Kabupaten Paser yang berpengaruh juga terhadap aspek lain, misalnya aspek komunikasi dan informatika. Selain itu, kekurangan pasokan energi listrik telah menyebabkan masih banyak rumah tangga yang belum menggunakan listrik.

Persoalan ini menjadikan sumber energi listrik alternatif perlu segera dioptimalkan. Dari hal tersebut perlu diupayakan pengembangan sarana pembangkit listrik dengan mengandalkan potensi yang tersedia di Kabupaten Paser, misalnya pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pengembangan pembangkit listrik baru dengan mengandalkan potensi alam ini diarahkan untuk memenuhi pasokan energi listrik ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh pasokan dari pembangkit listrik yang ada.

Selain masalah pasokan energi listrik, hal lain yang perlu dipikirkan terkait sumber daya mineral adalah exit strategy yang bisa diambil untuk mengurangi ketergantungan terhadap pertambangan yang kewenangan perizinannya telah diambil alih oleh

pemerintah provinsi. Salah satu strategi yang memungkinkan adalah menggalakkan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor kelautan dan perikanan. Selain mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan mineral, sektor-sektor ini juga akan memberi dampak positif bagi kelestarian lingkungan hidup.

Rasio elektrifikasi menjadi salah satu kunci penentuan arah kebijakan Provinsi Kalimantan Timur dalam spirit besar green economy. Hal tersebut juga harus bisa memiliki gaung bagi Kabupaten Paser. Hal ini harus disinergikan dengan kegiatan, program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Paser, khususnya dalam pemerataan pembangunan fasilitas dan jaringan kelistrikan.

2.3.14 Pariwisata

Fakta bahwa Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten dengan kekayaan alam terutama bahan tambang yang melimpah tidak serta merta menutup kemungkinan bagi pengembangan sektor pariwisata. Karena itu yang harus segera dilakukan pemerintah adalah mengidentifikasi tempat-tempat yang berpotensi menjadi destinasi wisata dan mulai secara serius mengembangkannya.

Upaya ini tentu perlu diimbangi juga dengan perbaikan fasilitas di tempat-tempat pariwisata yang sudah ada saat ini. Peningkatan fasilitas penunjang pariwisata serta pembentukan kelompok-kelompok sadar wisata akan mempermudah upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Paser sebagaimana terjadi selama ini. Kehadiran kelompok-kelompok sadar wisata dengan dampingan dan fasilitas dari SKPD terkait akan meningkatkan minat masyarakat Paser sendiri terhadap pengembangan potensi wisata yang ada di daerahnya.

Selain itu, pihak swasta juga perlu dilibatkan untuk menjamin ketersediaan sarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan yang memudahkan akomodasi bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Paser.

2.3.15 Perdagangan

Tantangan bagi sektor perdagangan di Kabupaten Paser adalah upaya meningkatkan penjualan komoditas-komoditas andalan dari sektor pertanian ke luar Kabupaten Paser. Hal ini penting dilakukan untuk mengimbangi kecenderungan jasa layanan yang masih menjadi fokus perdagangan masyarakat Kabupaten Paser. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan posisi tawar pedagang-pedagang tradisional berhadapan dengan pedagang-pedagang besar yang hadir dengan modal raksasa.

Pemerintah perlu fokus memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang tradisional di tengah gempuran pedagang-pedagang modern. Artinya, dibutuhkan kebijakan yang menguntungkan para pedagang tradisional dalam memasarkan berbagai

komoditas andalan mereka, bukan hanya dalam wilayah Kabupaten Paser, tetapi sampai ke luar Kabupaten Paser.

2.3.16 Industri

Problem utama terkait dengan sektor industri di Kabupaten Paser adalah belum terlalu kuatnya upaya peningkatan nilai tambah bagi bahan-bahan baku yang dihasilkan daerah ini. Hal tersebut menjadikan potensi lokal sebagai bahan baku industri memiliki nilai jual yang rendah. Realitas ini, tentu berbeda dengan bahan baku yang telah diolah sebelum dijual.

Kedepan, industri yang perlu digalakkan adalah industri pengolahan bahan baku yang tidak saja bermanfaat untuk meningkatkan nilai jual, tetapi membuka kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. Jika hal tersebut tidak dioptimalkan, maka daerah lain yang mengembangkan industri pengolahan bahan bakulah yang akan diuntungkan. Tidak menutup kemungkinan dengan memanfaatkan bahan baku berharga murah yang berasal dari Kabupaten Paser.

2.3.17 Transmigrasi

Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi pada masa lalu. Bahkan ada tiga gelombang transmigrasi yang masuk daerah ini, yaitu gelombang pertama pada era sebelum tahun 70-an, gelombang kedua pada kurun waktu tahun 70-an hingga tahun 80-an, dan terakhir pada kurun waktu setelahnya, yaitu sejak tahun 90-an.

Kehadiran kelompok-kelompok transmigran ini di satu sisi membawa perubahan berupa kemajuan dan perkembangan Kabupaten Paser. Namun isu kesenjangan antara warga transmigran dengan warga pribumi atau suku-suku asli masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Pase. Oleh karena itu diperlukan evaluasi komprehensif terhadap pola-pola kebijakan terkait transmigrasi yang selama ini dilaksanakan dan untuk memberi kesempatan lebih pada upaya mengurangi disparitas kesejahteraan antara kaum trasmigran dengan warga asli.

2.3.18 Pertanian

Tahun 2019, sektor pertanian menyumbang 10,11% bagi PDRB Kabupaten Paser, naik sebesar 0,26% disbanding tahun 2018. Kontribusi ini jauh di bawah sektor pertambangan dan penggalian yang mencapai angka 73,41%. Kecilnya kontribusi sektor pertanian ini berbanding lurus dengan semakin berkurangnya lahan pertanian akibat dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Namun persentase tersebut, tetap menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas andalan sektor perkebunan. Selain berkurangnya lahan pertanian, minimnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Paser juga disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah petani.

Ini menjadi sebuah permasalahan serius yang butuh untuk segera ditangani oleh pemerintah, sebab sektor pertanian lebih dominan bergantung pada produktivitas padi yang juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah dengan menggalakkan program diversifikasi pertanian, yaitu lahan pertanian yang tersedia tidak hanya ditanami padi, sekaligus ditanamitanaman pangan lainnya seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, dan kacang tanah. Dengan demikian petani tidak hanya bergantung pada produktivitas padi, terutama ketika harga padi anjlok setelah panen raya, para petani mengalami kerugian yang cukup besar. Diversifikasi memungkinkan petani untuk tetap bisa bertahan dengan mengandalkan hasil panen lain, selain padi.

Pada sisi lain, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan dalam pembagian lahan pertanian bagi kaum transmigran dengan warga asli Kabupaten Paser, terutama yang berada di pedalaman dan bermatapencaharian sebagai petani. Kebijakan pemerintah memberi lahan seluas 2 hektar kepada para transmigran perlu ditinjau kembali untuk menjamin adanya kesetaraan akses dan kesamaan peluang mengusahakan lahan bagi warga lainnya.

2.3.19 Kehutanan

Meskipun kewenangan pengelolaan hutan telah dialihkan ke pemerintah provinsi, pola-pola perambahan hutan yang selama ini terjadi patut dijadikan perhatian serius oleh pemerintah Kabupaten Paser. Paling tidak ada dua pola perambahan hutan yang terjadi yaitu; pertama, perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan bertani/berkebun, kedua, perambahan hutan untuk dijadikan pemukiman.

2.3.20 Kelautan dan Perikanan

Potensi yang paling mungkin untuk dikembangkan di Kabupaten Paser adalah perikanan air tawar, sebab kewenangan atas sektor kelautan sudah ditarik menjadi tanggung jawab provinsi. Permasalahan yang terjadi dan berhubungan dengan sektor perikanan air tawar ini adalah masih minimnya upaya pengembangan yang dilakukan pemerintah, termasuk dalam mendorong masyarakat untuk terjun menjadi pekerja pada sektor ini.

Kendala yang dihadapi terkait pengembangan sektor ini dan minimnya minat masyarakat adalah belum terbukanya jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil perikanan air tawar. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab yang seharusnya dijalankan pemerintah adalah membuka jalur-jalur distribusi bagi pemasaran hasil usaha ikan air tawar ini. Jika jalur distribusi telah terbuka dan permintaan terhadap ikan air tawar meningkat maka masyarakat akan tertarik untuk terlibat dalam membudidayakan ikan air tawar dan menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor andalan yang bisa mendatangkan keuntungan dan menyerap tenaga kerja.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah adalah dengan memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Dibidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan struktur ekonomi secara seimbang antara sektor-sektor ekonomi yang padat modal (*capital intensive*) dan sektor ekonomi yang padat tenaga kerja (*labour intensive*), dengan memacu sektor-sektor ekonomi yang potensial dan padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, sehingga kesenjangan (gap) dalam struktur ekonomi semakin kecil. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang disesuaikan dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser ke depan masih bertumpu pada sektor pertambangan/penggalian yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunujukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyakarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal.

Sedangkan sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri pengolahan merupakan sektor-sektor yang sangat menjanjikan di masa depan dan layak untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena potensinya demikian besar, dapat dikendalikan

oleh pemerintah daerah dan merupakan sektor yang dapat diperbaharui (renewable) dengan pertumbuhan yang positif dan relatif konstan, walaupun konstribusinya masih relatif kecil.

Melalui upaya pemulihan ekonomi dan reformasi structural diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2–6,0 persen pada tahun 2022. Tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut akan meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita (*Atlas Method*) menjadi US$4.400–4430 per kapita pada tahun 2022 masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income Countries*.

Tabel 3.1

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	2020	2021 *Outlook*	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	-2,1	4,8	5,7-6,0	5,2-6,0
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% yoy): Akhir Periode	1,7	2,4	2,9	2,0-4,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	-0,6	16,3	7,2	3,7-5,5
Cadangan Devisa (USD milar)	135,9	138,5	138,8	148,6-150,2
- dalam bulan impor	10,2	8,0	6,9	8,2 – 8,0
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	-0,4	-1,5	-2,1	(1,7)–(2,0)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3–11,2	8,37–8,42
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,2	-3,6	0,1–0,0	(2,31)–(2,65)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-(6,2)	-(5,7)	(1,6)–(1,7)	(4,51)–(4,85)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,7	41,4	29,1–29,8	43,76-44,29
PMTB/Investasi				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	56	Menuju 40	50
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	6,2	6,3-6,9	5,4-6,9
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	5,9-6,5	4,4-4,9	5,5-6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,2-9,7	7,5-8,0	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,94	72,69	74,01 a)	73,41-73,46

Uraian	2020	2021 *Outlook*	2022	
			RPJMN	Sasaran
(nilai)				
Penurunan Emisi GKR	25,93	23,55	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	103,25	102-104	102-104	102-104
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 b)	102-104	105	102-105

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan : a) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas; b) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

3.1.1 Karakteristik dan Lokasi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, historis pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan daerah. Sejak tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan seiring dengan terjadinya perubahan tahun dasar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Periode waktu sebelum tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan tahun dasar 2000, sedangkan untuk tahun 2016 ke depan dihitung dengan berdasarkan tahun dasar 2010.

Berdasarkan hasil perhitungan angka sangat sementara yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2020 telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dengan nilai pertumbuhan ekonominya sebesar 3,97 persen ditahun 2019 menjadi -2,77 persen ditahun 2020.

Perhitungan PDRB sejak tahun 2016, selain terjadi pergantian pada penggunaan tahun dasar juga terjadi penambahan kategori lapangan usaha. Pada perhitungan PDRB sebelumnya, kategori lapangan usaha hanya dikelompokkan pada 9 sektor lapangan usaha, sedangkan sejak tahun 2016, perhitungan PDRB mengelompokkan sektor lapangan usaha menjadi 17 kategori. Penambahan jumlah kategori ini bertujuan untuk memperoleh perhitungan nilai PDRB yang lebih rinci sesuai dengan perkembangan kebutuhan data yang diharapkan oleh pengguna data serta disesuaikan dengan perkembangan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLU) tahun 2009.

Sesuai dengan kebijakan makro ekonomi daerah yang telah disebutkan pada uraian sebelumnya dan berdasarkan kondisi, potensi serta permasalahan yang dihadapi

dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka pencapaian makro ekonomi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dan kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ketahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala, karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Perkiraan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah 1,55% ±.

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasar hitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dari struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kemajuan ekonomi suatu daerah memang bisa kita lihat secara kasat mata, namun untuk melakukan perencanaan strategi pembangunan kedepan, hasil pencapaian pembangunan perlu dipotret secara kuantitatif. Kemajuan ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa dipotret dengan menggunakan instrumen yang bernama PDRB. Meskipun instrumen ini tidak mutlak memberikan gambaran kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya secara nyata, namun paling tidak dapat dipakai untuk melihat struktur dan pergeseran ekonomi yang terjadi di suatu wilayah.

Tahun 2020, struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori

lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 67,97% dari total PDRB kabupaten Paser.

Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukkan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukkan PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 12,48%, kategori industri pengolahan sebesar 5,84% dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,41%.

Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser
Tahun 2016-2020

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,64	11,20	10,20	10,43	12,48
B	Pertambangan dan Penggalian	71,02	73,26	74,40	72,87	67,97
C	Industri Pengolahan	4,77	4,92	4,49	4,68	5,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	2,36	2,20	2,38	2,79	3,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,75	3,54	3,56	3,86	4,41
H	Transportasi dan Pergudangan	0,48	0,44	0,44	0,47	0,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,27	0,28	0,30	0,33
J	Informasi dan Komunikasi	0,67	0,61	0,61	0,66	0,79
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,36	0,36	0,39	0,44
L	Real Estate	0,34	0,30	0,29	0,30	0,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,27	1,07	1,06	1,13	1,19

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019	2020
P	Jasa Pendidikan	1,25	1,18	1,21	1,34	1,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,44	0,41	0,42	0,46	0,63
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,23	0,22	0,22	0,24	0,26
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021

Tabel 3.3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5163,39	5316,15	5521,28	5886,53	6268,80
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	60,92	60,53	64,83	72,68	79,88
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1401,21	1363,78	1280,00	1450,55	1675,32
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7107,95	7344,86	7983,04	9806,59	9388,43
Perubahan Inventori	363,65	228,92	127,61	94,43	47,12
Net Ekspor Barang dan Jasa	24212,16	22975,44	28977,49	30969,35	30716,15
Produk Domestik Bruto	**38309,28**	**37289,69**	**43954,25**	**48280,13**	**48175,70**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021
*Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*

B. PDRB Harga Konstan

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan tentang capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya. Sejak tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tertuang dalam perhitungan PDRB dihitungan dengan menggunakan tahun dasar 2010, sedangkan perhitungan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya dihitungan dengan menggunakan tahun dasar 2000. Sebelum tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi disajikan dalam 9 (sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, sedangkan perhitungan PDRB setelah periode tahun 2016 disajikan ke dalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha yang secara tidak langsung dampak memberikan gambaran

lebih detail dibandingkan dengan penyajian pada periode tahun sebelum tahun 2016.

Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan ADHK hasil perhitungan angka sangat sementara mencapai angka -2,77%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai pertumbuhan ini mengalami penurunan sebesar 1,11%. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan dihasilkan dari kategori/lapangan usaha jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, yaitu sebesar 20,09%. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,90	-0,22	-0,04	2,19	-1,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,45	0,43	3,78	3,94	-3,52
C	Industri Pengolahan	-0,79	8,98	5,18	4,38	-2,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	-0,23	-0,12	1,82	7,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,79	4,52	2,71	6,85	2,31
F	Konstruksi	-5,76	5,11	8,94	10,52	-3,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,97	6,10	6,16	4,49	1,15
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,57	3,93	5,55	3,99	-0.08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	5,79	5,96	4,19	-2,28
J	Informasi dan Komunikasi	5,61	6,46	3,95	6,43	9,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	1,35	5,75	3,67	1,89
L	Real Estate	-0,83	1,93	3,74	1,04	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	-3,40	1,06	3,77	1,81	-4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,96	-3,2	4,81	4,17	-6,07
P	Jasa Pendidikan	3,66	7,28	7,29	5,54	3,92

LAPANGAN USAHA		2016	2017	2018	2019*	2020**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	7,70	6,91	5,35	20,09
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,72	6,39	6,45	4,79	-1,98
PDRB		**-4,98**	**1,17**	**3,69**	**3,97**	**-2,77**
PDRB Tanpa Pertambangan Dan Penggalian		**2,71**	**3,23**	**3,46**	**4,08**	**-0,72**
Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**-7,45**	**0,43**	**3,78**	**3,94**	**-3,52**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021
*Catatan : *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara*

Tabel 3.5
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2015-2019

Jenis Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*	2019**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3894,77	3806,89	3820,80	3953,71	4095,36
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	46,57	43,73	45,43	49,25	51,86
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	894,34	810,33	752,48	835,61	960,40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5790,43	5620,19	5942,99	7146,94	6510,47
Perubahan Inventori	308,52	195,16	101,73	69,92	36,20
Net Ekspor Barang dan Jasa	23538,24	22279,11	22474,22	22300,99	24035,82
Produk Domestik Bruto	**34472,88**	**32755,52**	**33137,65**	**34356,41**	**35690,12**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021
*Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara*

3.1.1.3 Besaran Nilai PDRB

Besaran nilai PDRB secara tidak langsung dapat menggambarkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan menggali sumber daya ekonominya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha berfluktuatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sejak tahun 2016 Nilai PDRB ADHK 2010 terus mengalami penurunan yang puncaknya pada tahun 2016 dikarenakan pelambatan ekonomi global yang berimbas kepada menurunnya harga Batubara yang menjadi sumber konstribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Paser.

PDRB ADHK 2010 dengan batubara memiliki sumbangan terbesar dalam perekonian Kabupaten Paser, tahun 2020 PDRB Kabupaten Paser sebesar 34,7 triliun rupiah, sementara Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian hanya mencapai 9,5 triliun rupiah, nilai tersebut terus mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, walaupun demikian selama 4 tahun terakhir PDRB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian mengalami peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian, Nominal PDRB Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.6
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.801,17	3.792,4	3 791,29	3 874,42	3.822,16
B	Pertambangan dan Penggalian	24.156,96	24.261,13	25 178,47	26 169,45	25.247,23
C	Industri Pengolahan	1.396,40	1.521,86	1 600,74	1 670,86	1.624,48
D	Pengadaan Listrik dan Gasa	8,46	8,44	8,43	8,58	9,25
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,14	6,42	6,59	7,04	7,21

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
F	Konstruksi	685,84	720,85	785,32	867,90	833,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.117,91	1.186,12	1.259,17	1.315,69	1.330,88
H	Transportasi dan Pergudangan	140,28	145,80	153,89	160,02	159,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,11	86,87	92,05	95,91	93,72
J	Informasi dan Komunikasi	238,34	253,74	263,77	280,72	306,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	111,96	113,47	120,00	124,41	126,76
L	Real Estate	102,53	103,91	108,42	109,55	110,79
M,N	Jasa Perusahaan	14,93	15,09	15,66	15,94	15,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351,28	340,03	356,39	371,27	348,73
P	Jasa Pendidikan	362,38	388,75	417,08	440,18	457,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120,63	129,92	138,89	146,32	175,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	58,20	61,92	65,91	69,07	67,70
PDRB ADHK Kab. Paser		**32.755,52**	**33.137,65**	**34.362,05**	**35.727,32**	**34.736,71**
PDRB ADHK Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**8.598.,56**	**8.876.,53**	**9.183,58**	**9.557,87**	**9.489,48**
PDRB ADHK Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**24.156,96**	**24.261.13**	**25.178,47**	**26.169,45**	**25.247,23**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021

Tiga kategori yang mempunyai nominal terbesar dalam PDRB Kabupaten Paser, antara lain kategori Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Kategori Pertanian masih didominasi oleh perkebunan tahunan yaitu kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit masih menghasilkan tren positif dalam hal nominal PDRB. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian yang mempunyai Nilai PDRB tertinggi hingga tahun 2020. Industri pengolahan di Kabupaten Paser didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit yaitu CPO dan minyak mentah lainnya.

Meningkatnya pembangunan pabrik kelapa sawit selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa hasil perkebunan Kabupaten Paser cukup melimpah dan sangat dimungkinkan untuk dibangun industri hilir di wilayah Kabupaten Paser. Dengan terus bertambahnya pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Tabel 3.7
PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Tahun 2016-2020 (Milyaran Rupiah)

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,703.65	4,962.54	4 899,32	5.007,50	5.407,89
B	Pertambangan dan Penggalian	26,468.85	32,123.23	35 754,03	34.991,50	29.456,65
C	Industri Pengolahan	1,797.03	2,160.65	2 155,34	2 249,15	2.532,23
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.74	9.88	10.11	10.39	11,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.63	8.42	8,86	9,59	9,82
F	Konstruksi	878.20	965.16	1 144,15	1 338,36	1.334,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,397.72	1,554.11	1 710,34	1 852,64	1.911,99
H	Transportasi dan Pergudangan	178.44	192.54	211,11	223,42	227,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110.63	121.17	133,57	144,18	142,41
J	Informasi dan Komunikasi	249.47	274.08	291.81	314,62	343,49
K	Jasa Keuangan	152.35	160.07	175.15	185.19	188,99
L	Real Estate	125.36	131.59	139,65	143,08	145,38
M,N	Jasa Perusahaan	22.44	23.73	24,93	25,49	24,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	473.96	472.15	509,64	544,81	515,87
P	Jasa Pendidikan	466.66	517.30	579,92	644,31	700,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	163.61	180.77	200,79	219,72	272,10
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84.96	96.86	105,41	113,41	111,55
PDRB ADHB Kab. Paser		**37,289.69**	**43,954.25**	**48,054.12**	**48 017,35**	**43,337,24**
PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**10.820,85**	**11.831,02**	**12.300,09**	**13.025.85**	**13.880,58**
PDRB Kategori Pertambangan Dan Penggalian		**26.468,85**	**32.123,23**	**35.754,02**	**34.991,50**	**29.456,65**

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020 sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami kenaikan yang kemudian meningkat lagi sejak tahun 2018 sebesar Rp. 48.280,13 milyar dan Rp. 48.175,70 milyar pada tahun 2019 serta mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. 43.337,24 milyar.

Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat pertambangan non migas (batubara) yang memiliki konstribusi sangat besar dalam

pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa subsektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2020 angka PDRB ADHB tanpa kategori pertambangan dan penggalian sebesar 13.880,58 milyar rupiah, sedangkan untuk PDRB ADHK memiliki nominal sebesar 43.337,24 milyar rupiah.

3.1.1.4 PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser dengan Batu Bara mengalami kenaikan sejak tahun 2016 yaitu 139 juta rupiah, tahun 2017 yaitu 160 juta rupiah, tahun 2018 yaitu 172 juta rupiah dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 168,51 juta rupiah. Sedangkan PDRB Kabupaten Paser tanpa Batu Bara mengalami kenaikan dari 48 juta rupiah pada tahun 2016 menjadi 51 juta rupiah tahun 2017 dan 52 juta tahun 2018 serta 54,34 juta rupiah pada tahun 2019. Dari sisi pertumbuhannya, PDRB per kapita Kabupaten Paser mengalami fluktuatif selama lima tahun terakhir, bahkan mengalami kontraksi sebesar 7 persen pada tahun 2016, namun meningkat dan mengalami pertumbuhan sebesar 1,73 persen pada tahun 2019.

Grafik 3.1
PDRB Perkapita Kabupaten Paser

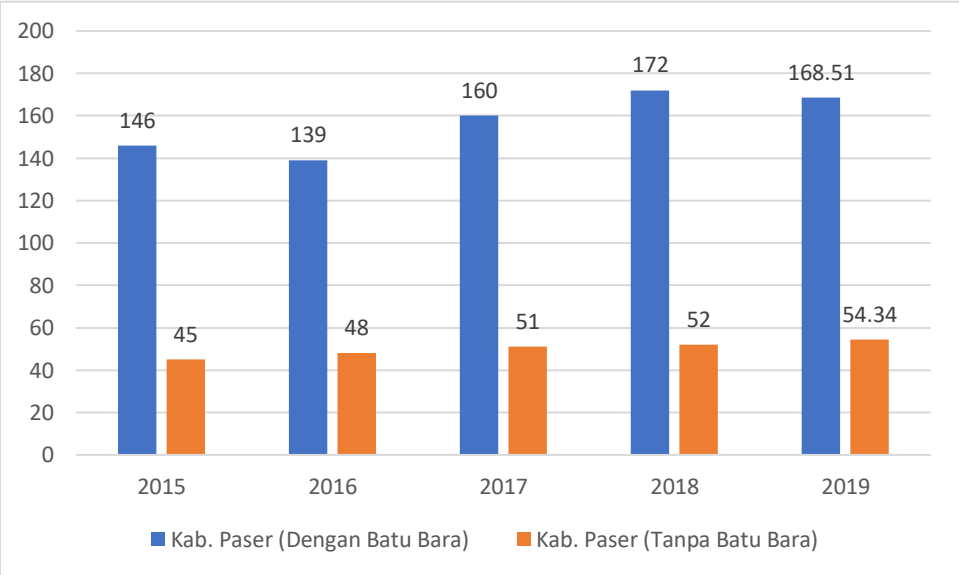

Sumber : BPS Paser 2021.

Perlu diingat bahwa secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan batubara tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan batubara. Pada tahun 2019 angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan komponen sub sektor

pertambangan batubara hanya sebesar 54,34 Juta Rupiah, sedangkan dengan batubara pendapatan perkapita sebesar 168,51 juta Rupiah.

3.1.1.5 Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Tahun 2019, tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 2,45%. Tingkat inflasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,13%.

3.1.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta indikator standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Paser, IPM Kabupaten Paser tahun 2020 sebesar 72,04 poin, menurun sebesar 0,25 point dibandingkan dengan tahun 2019. Peningkatan nilai IPM seiring dengan peningkatan yang terjadi pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Grafik 3.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2016 – 2020

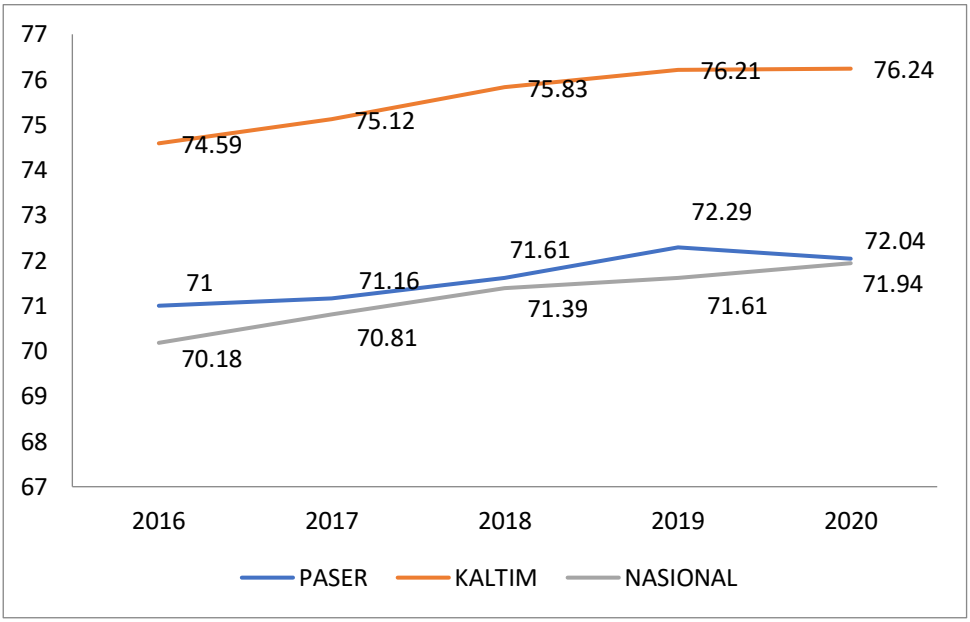

3.1.1.7 Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Paser dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang cukup tinggi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 285.894 jiwa dan pada tahun 2020 bertambah menjadi 275.452 jiwa. Secara gradual jumlah penduduk di Kabupaten Paser mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,91%. Gambaran pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya disajikan pada tabel 3.8 dibawah ini :

Tabel 3.8
Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk	248.037	254.503	258.022	285.894	275.452
2.	Komposisi menurut jenis kelamin:					
	- Laki-laki	129.457	132.538	133.995	151.533	143.647
	- Perempuan	118.580	121.965	124.027	134.894	131.805
3.	Pertumbuhan (%)	0,80	2,61	1,38	2,11	1,75
4.	Tingkat Kepadatan (per km^2)	21,38	21,93	22,24	24,64	23,74

Sumber : Data BPS Kabupaten Paser Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, sedangkan tingkat kepadatan penduduk selalu meningkat.

3.1.1.8 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Penduduk miskin Kabupaten Paser cenderung mengalami penurunan yang melambat sejak tahun 2017. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,08% dibanding tahun 2018 dan tahun 2020 meningkat sebesar 0,28% jika dibanding tahun 2019.

Grafik 3.3
Penduduk Miskin Di Kabupaten Paser (%)

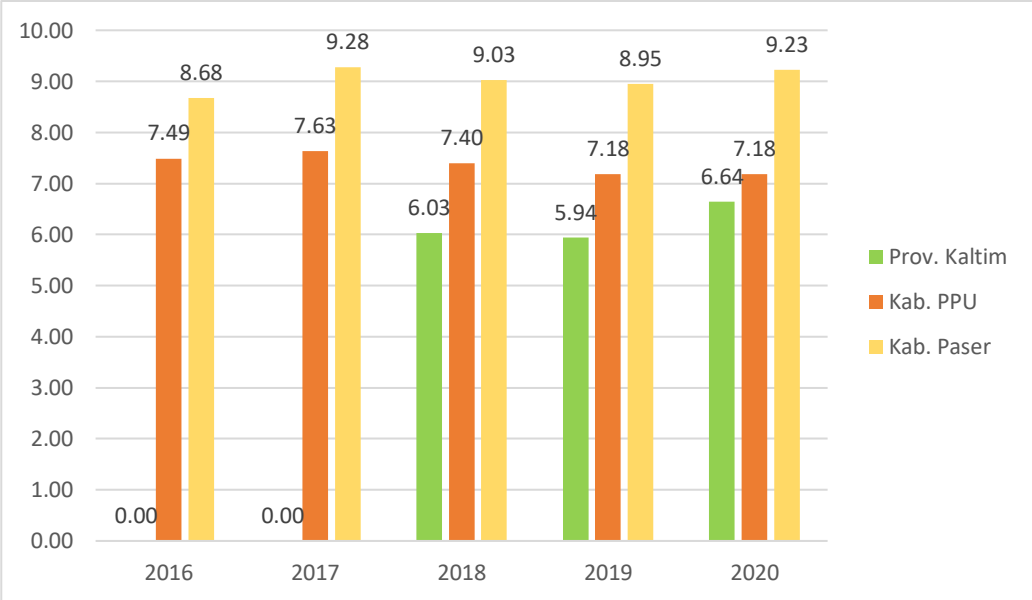

Sumber : BPS Paser 2021, BPS PPU 2021 dan BPS Kaltim 2021

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. BPS mencatat garis kemiskinan penduduk Indonesia September 2020 sebesar Rp. 475.477/kapita/bulan. Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan, dan

pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp 515.414/kapita/bulan. Angka ini berada diatas Kabupaten Penajam Paser Utara dan penduduk Indonesia.

Grafik 3.4
Garis Kemiskinan Kabupaten Paser

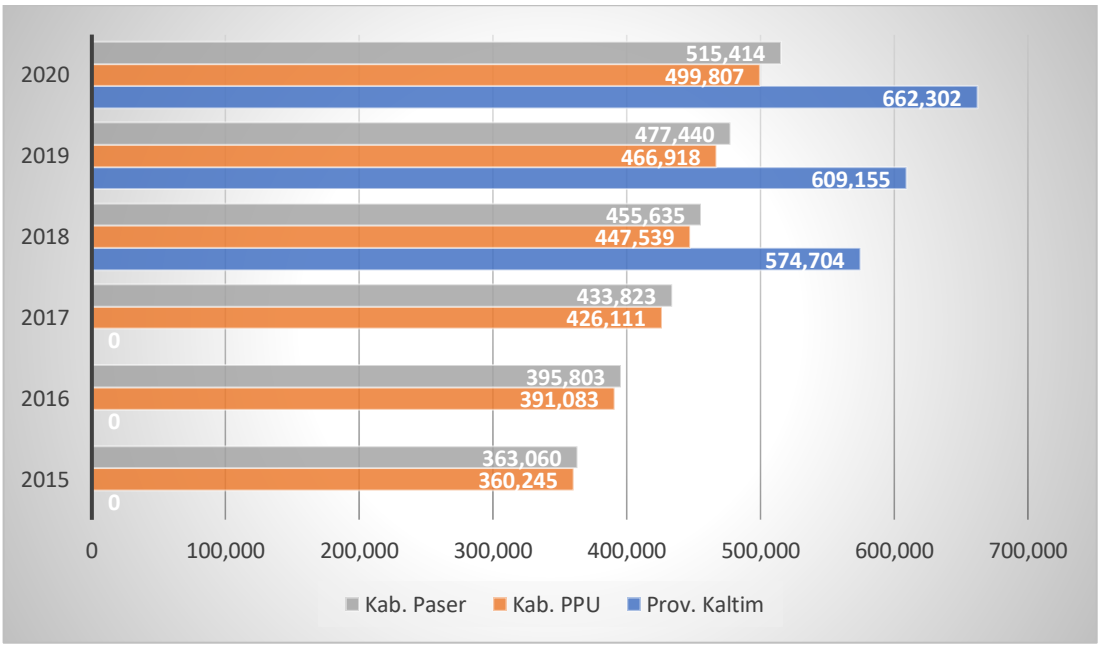

Sumber : BPS Paser 2021, BPS PPU 2021 dan BPS Kaltim 2021

3.1.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2022

Laju pertumbuhan ekonomi dengan potensi sektor ekonomi yang ada sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor :

1. Pengaruh faktor eksternal adalah kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta perkembangan perekonomian daerah sekitar.
2. Pengaruh faktor internal yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian melalui pembinaan UMKM dan Koperasi serta pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar, penyediaan infrastruktur ekonomi dan lain-lain.

Selain itu faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi adalah kondisi sosial dan politik, dimana keadaan sosial dan politik yang stabil akan mendukung perkembangan perekonomian daerah.

Adapun target ekonomi makro Kabupaten Paser tahun 2022 direncanakan sebagai berikut:

3.1.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar maupun yang kecil dapat menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar maupun kecil pula yang dapat dikelola oleh suatu daerah.

Untuk Capaian tahun 2022, diprediksikan PDRB Kabupaten Paser kembali akan mengalami peningkatan. Peningkatan nilai PDRB Kabupaten Paser ini seiring dengan peningkatan yang terjadi dibeberapa kategori lapangan usaha.

Sektor Pertambangan dan Penggalian memberikan konstribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Besaran nilai konstribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap struktur perekonomian Kabupaten Paser adalah sebesar 67,97 persen. Sedangkan sektor lain yang juga memberikan nilai konstribusi cukup besar terhadap pembentukan perekonomian Kabupaten Paser adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (12,48 persen).

Seperti kita ketahui bersama bahwa di Kabupaten Paser terdapat tambang non migas (batubara) yang memiliki konstribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB perkapita jika dihitung tanpa subsektor pertambangan non migas. Pada tahun 2019 angka PDRB perkapita tanpa tambang non migas sebesar 54,34 juta rupiah dan dihitung tanpa subsektor pertambangan batubara, angka PDRB ADHB pada tahun 2020 menjadi 13,88 triliyun rupiah.

3.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser menunjukkan pernurunan dari 3,97 pada tahun 2019 menjadi -2,77 pada tahun 2020. Demikian juga dengan Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami laju pertumbuhan PDRB ADHK yang negative. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 juga menunjukkan penurunan dari 4,74 pada tahun 2019 menjadi -2,85 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2020 masih dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dan diatas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selengkapnya dapat dilihat melalui grafik berikut.

Grafik 3.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

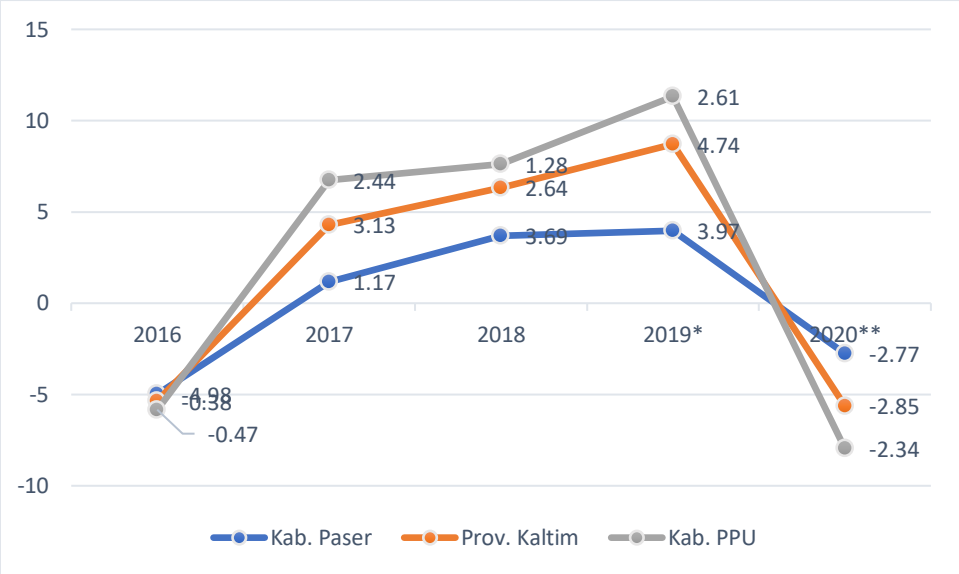

Sumber: BPS Paser 2021, BPS Kaltim 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser dilihat dari masing-masing lapangan usaha sebagaimana Laju PDRB AHK 2010 menurut lapangan usaha sebagaimana tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.9
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Paser (persen) 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,90	-0,22	-0,04	2,19	-1,35
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,45	0,43	3,78	3,94	-3,52
C	Industri Pengolahan	-0,79	8,98	5,18	4,38	-2,78
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	-0,23	-0,12	1,82	7,85
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,79	4,52	2,71	6,85	2,31
F	Konstruksi	-5,76	5,11	8,94	10,52	-3,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,97	6,10	6,16	4,49	1,15
H	Transportasi dan Pergudangan	-1,57	3,93	5,55	3,99	-0,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,58	5,79	5,96	4,19	-2,28
J	Informasi dan Komunikasi	5,61	6,46	3,95	6,43	9,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,64	1,35	5,75	3,67	1,89
L	Real Estate	-0,83	1,93	3,74	1,04	1,13

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
M,N	Jasa Perusahaan	-3,40	1,06	3,77	1,81	-4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-3,96	-3,20	4,81	4,17	-6,07
P	Jasa Pendidikan	3,66	7,28	7,29	5,54	3,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,47	7,70	6,91	5,53	20,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,72	6,39	6,45	4,79	-1,98
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	**-4,98**	**1,17**	**3,69**	**3,97**	**-2,77**
	PDRB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian	**2,71**	**3,23**	**3,46**	**4,08**	**-0,72**
	Kategori Pertambangan Dan Penggalian	**-7,45**	**0,43**	**3,78**	**3,94**	**-3,52**

Sumber : BPS Paser 2021

Perekonomian Kabupaten Paser pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser yang mengalami penurunan mencapai -2,77 persen, lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2019 yang sebesar 3,97 persen, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 3,97 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh situasi eksternal, dimana adanya stabilitas ekonomi global, seiring melemahnya beberapa harga energi seperti harga minyak bumi dan batubara, sehingga berdampak pada menurunnya produktivitas komoditi tersebut. Disamping itu situasi internal juga cenderung kurang membaik seiring dengan menurunnya daya beli masyarakat dan pelemahan ekonomi di beberapa lini usaha. Ditinjau menurut Lapangan Usaha, menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten paser pada tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa sektor diantaranya lapangan usaha Pertambangan dan penggalian , dimana kategori ini menurun menjadi -3,52 persen.

Jika ditelaah lebih lanjut, kinerja ekonomi Kabupaten Paser tahun 2020 dari sisi lapangan usaha kategori Konstruksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif (-3,99%). Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (-6,07%). Namun demikian, untuk Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan positif (20,09%) demikian juga dengan kategori Pengadaan Listrik dan Gas menjadi (7,85).

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2022 secara umum diarahkan untuk:

a. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2022 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

c. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.2.1.1 Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Paser.

Mengacu pada kinerja perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Paser selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel III, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung berfluktuasi, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan dengan realisasi pertumbuhan rata-rata pertahun untuk PAD tertinggi disumbang melalui sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Indikasi ini disamping menggambarkan semakin efektifnya kinerja kebijakan sektor pendapatan, pada saat yang sama juga menunjukkan peningkatan kinerja sektor riil perekonomian Kabupaten Paser yang terus menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020 kinerja pendpatan daerah Kabupaten Paser mengalami penurunan, penurunan ini terjadi pada berada pada sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3.10

Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	***Pendapatan Daerah***	**1.819.347.526.914,68**	**1.652.772.524.949,72**	**1.941.450.920.850,21**	**2.521.309.628.322,00**	**2.360.212.624.732,79**
1	***Pendapatan Asli Daerah***	**102.867.446.621,41**	**109.816.256.591,72**	**147.354.078.710,84**	**167.013.658.185,73**	**173.281.262.390,79**
1.1	Pajak Daerah	19.212.078.014,44	27.170.797.472,00	28.883.100.000,00	42.000.000.000,00	33.268.971.828,26
1.2	Retribusi Daerah	7.139.430.000,00	7.507.680.000,00	7.617.938.000,00	8.674.500.000,00	9.527.589.970,21
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.938.739.936,09	7.057.781.470,67	6.842.166.419,84	6.765.981.700,00	4.164.142.133,44
1.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	71.577.198.670,88	68.079.997.649,05	104.010.874.291,00	109.573.176.485,73	126.320.558.458,88
2	***Dana Perimbangan***	**1.378.673.848.469,00**	**1.104.696.204.842,00**	**1.294.651.469.828,37**	**1.471.162.698.028.00**	**1.513.531.810.485,00**
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	834.783.105.119,00	541.951.852.842,00	751.665.278.828,37	866.346.232.028,00	967.212.094.936,00
2.2	Dana Alokasi Umum	385.289.924.000,00	384.005.124.000,00	386.895.907.000,00	410.681.304.000,00	382.202.549.000,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	158.600.819.350,00	178.739.228.000,00	156.090.284.000,00	195.135.162.000,00	164.117.166.549,00
3	***Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***	**337.806.231.824,27**	**438.260.063.516,00**	**499.445.372.311,00**	**882.133.272.108,27**	**673.399.551.857,00**
3.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.000.000.000,00	22.428.032.516,00	38.106.946.386,00	37.252.000.000,00	4.118.997.100,00
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	159.364.136.000,00	194.235.037.000,00	207.812.538.925,00	288.555.729.108,27	169.578.622.255,00
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	91.098.557.000,00	117.545.744.000,00	134.225.887.000,00	122.624.619.000,00	168.512.263.258,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	83.954.715.000,00	104.051.250.000,00	119.300.000.000,00	433.700.924.000,00	331.188.663.244,00
3.6	Pendapatan Lainnya	388.823.824,27	0,00	0,00	0,00	1.006.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dan kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui:

1. perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasional alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan.
2. Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; dan
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah *door to door*, dan lain-lain.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
   a. Pajak Daerah terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
   b. Retribusi Daerah terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari: Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari : Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaaan Jasa Giro, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa, Pendapatan BLUD, Hasil dari pengelolaan dana bergulir, Pendapatan Dana Kapitasi JKN, Penerimaan dari lokasi promosi dagang dan listrik Plaza Kandilo dan Pasar Senaken, Penerimaan atas Pemanfaatan Tanah Perumahan serta Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
   A. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

a. Bagi Hasil Pajak terdiri dari: bagi hasil dari pajak penghasilan orang pribadi dan Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terdiri dari: Bagi Hasil Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Dana Reboisasi, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, dan Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

B. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Jumlah DAU setiap daerah provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
C. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
   a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri atas Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dan bagi hasil dari pajak rokok.
   b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus terdiri dari tunjangan profesi Guru PNSD, dana tambahan penghasilan Guru PNSD, Dana Insentif Daerah dan Alokasi Dana Desa.
   c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Paser diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 73%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani dunia usaha. Demikian pula halnya

dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2022 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut :

A. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk :

a. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
c. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah.
b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
d. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.

e. Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efesien.
f. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah.
g. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
h. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-sebaiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Paser Tahun 2022

Kode	Uraian	Proyeksi 2022
1	2	4
4	PENDAPATAN	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	180.239.437.775,00
4.1.1	Pajak Daerah	44.142.500.000,00
4.1.2	Retribusi Daerah	13.281.984.425,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	116.314.953.350,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.565.136.013.555,35
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.286.229.341.555,35
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH)	682.662.771.555,35
	Dana Alokasi Umum (DAU)	438.745.286.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-
	Dana Insentif Daerah (DID)	37.102.035.000,00
	Dana Desa (DD)	127.719.249.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	278.906.672.000,00
	- Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	278.906.672.000,00

Kode	Uraian	Proyeksi 2022
1	2	4
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	53.264.532.580,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00
	- Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	4.000.000.000,00
4.3.2	Dana Darurat	-
4.3.3	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	49.264.532.580,00
	- Pendapatan Hibah Dana BOS	49.264.532.580,00
	Jumlah Pendapatan	1.798.639.983.910,35

Keterangan : Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Prov. Kaltim Belum dialokasikan

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1,798,639,983,910,35. Dalam proyeksi pendapatan daerah tahun 2022, sumber penerimaan pendapatan yang diperkirakan mengalami kenaikan adalah dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan bersumber dari Pendapatan Transfer Dan Pendapatan Asli Daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola.

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut :

A. Belanja Operasi , yang terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Besaran

penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. Belanja Barang dan Jasa antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (auailability pagmen), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat .
3. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
4. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
5. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

B. Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

C. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer, dirinci atas jenis :

1. Belanja Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Belanja Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

   Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.

3. Tolak Ukur dan Target Kinerja

Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi Belanja Operasi

   Belanja Operasi diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja Operasi disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja Operasi untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Transparansi dan Akuntabel

   Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Tabel 3.12

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	***Belanja***	**1.835.879.204.847,65**	**1.980.401.008.575,60**	**1.902.473.192.578,65**	**2.504.287.925.778,77**	**2,241,904,518,813.47**
1	***Belanja Tidak Langsung***	**886.233.606.905,92**	**907.714.762.300,89**	**856.705.754.092,96**	**926.153.398.762,00**	**956,067,738,713.00**
1.1	Belanja Pegawai	668.741.394.953,65	656.420.867.452,33	595.334.835.915,74	610.380.921.902,00	580,570,469,832.00
1.2	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Belanja Hibah	12.970.144.410,66	26.006.427.135,00	28.877.948.400,22	41.593.776.058,00	69,079,845,659.00
1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.975.000.000,00	0,00
1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintah	0,00	3.129.547.747,00	2.177.206.500,00	4.139.535.500,00	3,665,020,100.00
1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	204.022.067.541,61	221.157.919.966,56	222.637.630.227,00	261.065.487.302,00	246,883,799,070.00
1.7	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	1.000.000.000,00	7.678.133.050,00	5.998.860.000,00	55,868,604,052.00
2	***Belanja Langsung***	**949.645.597.941,73**	**1.072.686.246.274,71**	**1.045.767.438.485,69**	**1.587.134.527.016,77**	**1,285,836,780,100.47**
2.1	Belanja Pegawai	151.751.446.582,93	137.137.397.832,03	145.871.022.750,00	161.831.124.350,00	158,581,665,433.00
2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.163.428.840,78	457.277.107.559,27	369.881.126.808,83	544.909.705.608,45	580,046,827,140.00
2.3	Belanja Modal	438.730.722.518,02	478.271.740.883,41	530.015.288.926,86	871.939.697.058,32	547,208,287,527.47

Tabel 3.13

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Kode	Uraian	Rencana Tahun 2022
5	**BELANJA**	
5.1.	**Belanja Operasi**	**1.114.937.423.466,05**
5.1.1	Belanja Pegawai	672.546.746.732,23
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	421.528.562.369,82
5.1.3	Belanja Bunga	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-
5.1.5	Belanja Hibah	20.862.114.364,00
	Pengamanan Pemilukades untuk Kodim dan Polres	600.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.545.209.290,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	-
5.2	**Belanja Modal**	**576.803.409.719,80**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**5.000.000.000,00**
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	**Belanja Transfer**	**290.399.150.724,50**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil ke Pemerintahan Desa**	**5.742.448.442,50**
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	4.414.250.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.328.198.442,50
5.4.01	**Belanja Bantuan Keuangan Desa**	**284.656.702.282,00**
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	42.821.510.782,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	241.835.191.500,00
	Bantuan Keuangan Desa Lainnya (Pilkades)	2.439.535.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Desa (APBN)	127.719.249.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kota/Kabupaten Kepada Desa (ADD)	110.676.407.500,00
	Karya Bhakti TNI	1.000.000.000,00
TOTAL JUMLAH BELANJA		**1.987.139.983.910,35**

Berikut kami sampaikan Kapasitas Riil Keuangan daerah dan Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Tabel 3.14

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Paser

NO.	URAIAN	PROYEKSI				
		TAHUN n + 1 (Rp)	TAHUN n + 2 (Rp)	TAHUN n + 3 (Rp)	TAHUN n + 4 (Rp)	TAHUN n + 5 (Rp)
1	Pendapatan	1.798.639.983.910,00	1.458.949.062.845,00	1.487.170.188.823,00	1.517.569.637.580,00	1.551.471.386.222,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	188.500.000.000,00	262.602.474.544,00	275.752.718.007,00	283.791.681.910,00	292.040.929.640,00
	Total Penerimaan	1.987.139.983.910,00	1.721.551.537.389,00	1.762.922.906.830,00	1.801.361.319.490,00	1.843.512.315.862,00
	Dikurangi :					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	1.030.694.086.454,00	974.660.741.854,00	981.498.113.282,00	988.568.054.073,00	995.849.410.372,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	967.945.897.456,00	758.890.795.535,00	793.924.793.548,00	825.793.265.417,00	861.162.905.491,00

Tabel 3.15

Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Paser

No.	URAIAN	ANGGARAN
A	**Belanja Operasi**	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	672.546.746.732,23
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	24.003.997.115
3	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.742.448.443
4	Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	110.676.407.500
5	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	57.424.484.425
6	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
7	Belanja Honorarium PNS Tenaga Khusus untuk Guru dan Tenaga Medis	358.743.754.323
8	Belanja Jasa Kantor (Khusus Tagihan Bulanan Kantor seperti Listrik, Telepon dsb)	17.439.085.663
	Total Belanja	**1.251.576.924.201,23**

Rencana belanja urusan pendidikan sebagaimana mandatory Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)" dapat dilihat alokasi anggaran pendidikan sudah mencapai 20, untuk memenuhi permintaan Undang-undang tersebut maka dialokasikan anggaran untuk urusan pendidikan sebagai berikut :

a. Proyeksi Pendapatan APBD : 1.798.639.983.910,35

b. 20% dari APBD : 359.727996.782,07

c. Sumber 20 % urusan pendidikan pada APBD :

1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Program Pengelolaan Pendidikan : 154,948,423,137
- Program Pengembangan Kurikulum : 54,657,500
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan : 396,485,600
- Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : 239,681,272,787

2) DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- Program Pembinaan Perpustakaan : 359,400,000.00

Berdasarkan Program di atas, untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan total APBD untuk urusan pendidikan sebesar 395.440.239.024,00 atau 22%. Hal ini belum termasuk Program-program yang ada pada Perangkat Daerah lainnya yang terkait urusan pendidikan.

Untuk pengembangan SDM aparatur

1) Program pengembangan SDM 4.952.078.750
2) Program kepegawaian daerah, kegiatan pengembangan kompetensi 2.595.161.400

Sehingga presentase pengembangan SDM sebesar 0,36%

Jumlah untuk mandatori di bidang pengembangan SDM aparatur sebesar 7.187.240.150

Untuk alokasi pengawasan di inspektorat. Total pagu inspektorat 17.059.918.367

1) Program penunjang 14.512.639.500
2) Program penyelenggaraan pengawasan 2.547.278.867

Maka Presentase pengawasan sebesar 0,86%.

3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3.2.4.1 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kondisi penganggaran daerah apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah, atau surplus APBD, maka pembiayaan daerah diarahkan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja jaminan sosial. Sedangkan apabila terjadi pendapatan daerah lebih

rendah dibanding dengan belanja daerah atau terjadi defisit APBD, sedapat mungkin dapat dicukupi dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun Lalu. Alternatif lain adalah dengan melakukan pinjaman daerah, menjual aset daerah atau dengan alternatif kebijakan lain. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut :

Tabel 3.16

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Paser Tahun 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	PROYEKSI 2022
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	**200.000.000.000,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	200.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.500.000.000,00
Bank BPD Kaltimtara	7.500.000.000,00
PDAM Kabupaten Paser	4.000.000.000,00
Perusahaan Daerah (PERUSDA)	-
PEMBIAYAAN NETTO	**188.500.000.000,00**
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**-**

Tabel 3.17

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017-2020

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**335.563.483.625,88**	**164.584.905.149,79**	**318.336.162.777,00**	**442.373.646.400,77**

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	335.563.483.625,88	164.584.905.149,79	318.336.162.777,00	442.373.646.400,77
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**7.935.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**21.674.868.099,00**	**13.164.868.099,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasii Daerah)	7.935.000.000,00	3.000.000.000,00	21.674.868.099,00	13.164.868.099,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**327.628.483.625,88**	**161.584.905.149,79**	**296.661.294.678,00**	**429.208.778.301,77**

3.2.4.2 Kebutuhan Investasi

Kapasitas keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat. Kemampuan pemerintah dapat diukur dan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB ADHK tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser sebesar -2,77% menurun dari tahun sebelumnya yaitu 3,97% menunjukkan bahwa Perekonomian di Kabupaten Paser sudah mengalami penurunan. Untuk itu kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah dan optimalisasi kontribusi

BUMD serta investasi diluar APBD melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

3.2.4.3 Pendanaan Pembangunan Melalui CSR/TSP Tahun 2020 dan Rencana Kegiatan Tahun 2021

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik melalui pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial budaya dengan mengandalkan pendanaan melalui APBD, Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Kalimantan Timur dan investasi sektor swasta yang berusaha di wilayah Kabupaten Paser.

Potensi sumber pendanaan pembangunan juga diperoleh salah satunya melalui kegiatan *Corporate Social Responbility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Peraturan Bupati Paser Nomor 1 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 87 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Paser yang ditujukan baik dari perusahaan kecil, menengah dan besar yang dikelola oleh swasta maupun BUMN dan BUMD.

Data pada Sekretariat Forum CSR/TSP Kabupaten Paser tahun 2021 menunjukkan tercatat 18 perusahaan yang sudah melakukan dan melaporkan kegiatan CSR/TSP baik dalam bidang ekonomi, sosial, Pendidikan, keagamaan, kesehatan, maupun infrastruktur. Diperkirakan masih banyak kegiatan CSR/TSP yang tidak tercatat yang dilakukan oleh pelaku usaha karena pelaksanaannya tidak diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten Paser. Sementara itu terdapat 17 perusahaan yang telah menyampaikan rencana kerja CSR perusahaan tahun 2021.

Selama ini, pelaksanaan *CSR/TSP* yang dilakukan di Kabupaten Paser lebih banyak bersifat *charity*, amal, sesuai kebutuhan sesaat, kurang memberi dampak yang berkelanjutan, dan lokal di sekitar lingkungan perusahaan. *CSR/TSP* yang bersifat *charity* dilakukan berkaitan dengan perayaan hari besar keagamaan dan kenegaraan maupun kegiatan sosial di lingkungan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana. Bentuk kegiatan tersebut antara lain adalah sunatan massal, sumbangan hari besar keagamaan (zakat), parsel lebaran, hewan untuk kurban Idul Adha,

sumbangan kepada RT/RW, donor darah, pengobatan gratis, material untuk infrastruktur dan lain lain.

Meskipun program *CSR/TSP* yang sudah dilakukan memberi manfaat positif kepada masyarakat, namun bantuan yang bersifat sporadis ini, belum bersifat pemberdayaan dan berkelanjutan sehingga belum dapat memberi dampak yang lebih besar dalam peningkatan kesejahteraan. Belum lagi ada masalah tumpang tindih antar program CSR/TSP yang dilakukan antar perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan di awal merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik bersama dengan para pihak (komunitas lokal, pemerintah setempat, akademisi dan perusahaan itu sendiri) yang dilakukan terpadu dengan kegiatan berkelanjutan. Dengan begitu, peran pemerintah sebagai fasilitator, dan bukannya pengelola dana CSR/TSP, menjadi sangat penting karena pemerintah memiliki akses terhadap informasi mengenai kebutuhan apa saja di masyarakat yang bisa menjadi alternatif program CSR/TSP.

Meskipun kegiatan CSR/TSP yang dipraktekkan para pelaku usaha ini masih bersifat *short term* dan tidak berkelanjutan, namun kesadaran dan inisiatif baik pelaku usaha tersebut untuk melaksanakannya perlu diberi apresiasi. Hal ini berarti pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya melakukan CSR/TSP sebagai wujud kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan serta sebagai "alat" untuk memperkuat hubungan dengan komunitas disekitarnya cukup baik. Selain itu harus diakui ada nilai positif yang ditimbulkannya, paling tidak dari *transfer payment* yang mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat dalam jangka pendek.

Tabel 3.18

Rencana Kerja *Corporate Social Responsibility* (CSR/TSP) Kabupaten Paser Tahun 2021

No	Nama Perusahaan	Rencana Alokasi CSR Perusahaan Tahun 2021
1	PT KIDECO JAYA AGUNG	42.075.822.363
2	PT SAMINDO UTAMA KALTIM	267.000.000
3	PT. TRASINDO MURNI PERKASA	190.000.000
4	PT. COTRANS ASIA	300.000.000
5	PT. SEA BRIDGE SHIPPING	100.000.000
6	PT KARUNIA WAHANA NUSA	197.000.000
7	PT MULTI MAKMUR MITRA ALAM	158.035.000
8	PT TRAKINDO UTAMA	88.000.000

9	PT MBSS	89.000.000
10	BANK BRI	248.700.000
11	PT AGRO INTI KENCANAMAS	399.884.900
12	PT PETROSEA	3.029.575.000
13	PT. MULTI JAYANTARA ABADI	122.218.000
14	PT. LANGGAI AGRINDO AGUNG	71.142.000
15	PT. BUMI PASIR AGRINDO	6.000.000
16	PT BIMA NUSA INTERNASIONAL	238.800.000
	TOTAL	**47.581.177.263**

Sumber Data : Sekretariat Forum CSR/TSP (2021)

Tabel 3.19

Realisasi Kinerja *Corporate Social Responsibility* (CSR/TSP)
Kabupaten Paser Tahun 2020

No	Nama Perusahaan	Realisasi Alokasi CSR Perusahaan Tahun 2021
1	PT.KIDECO JAYA AGUNG	42.075.822.363
2	PT. PAMA PERSADA NUSANTARA	1.881.443.135
3	PT SAMINDO UTAMA KALTIM	184.132.698
4	PT. MINTEC ABADI	64.850.000
5	PT. TRASINDO MURNI PERKASA	212.584.918
6	PT SEA BRIDGE SHIPPING	25.050.000
7	PT. COTRANS ASIA	188.550.000
8	PT. KARUNIA WAHANANUSA	135.562.000
9	PT MULTI MAKMUR MITRA ALAM	124.755.572
10	PT TRAKINDO UTAMA	56.100.000
11	BANKALTIMTARA	386.205.912
12	PT MBSS	126.620.000
13	BANK BRI	155.000.000
14	PT AGRO INTI KENCANAMAS	87.689.948
15	PT. MULTI JAYANTARA ABADI	214.341.370
16	PT. LANGGAI AGRINDO AGUNG	74.642.000
17	PT BUMI PASIR AGRINDO	6.750.000
18	PT BIMA NUSA INTERNASIONAL	426.460.000
	TOTAL	**46.426.559.916**

Sumber Data : Sekretariat Forum CSR/TSP (2021)

Dalam upaya menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya untuk melakukan investasi di berbagai bidang, baik fisik maupun non-fisik. Selain investasi di bidang infrastuktur, pemerintah Kabupaten Paser masih mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar seperti pelayanan bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan dasar lainnya. Pemerintah Kabupaten Paser terus dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dari waktu ke waktu, sementara kapasitas pembiayaan pemerintah relatif terbatas.

Menyadari keterbatasan kemampuan Pemerintah Kabupaten Paser dalam membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan di Kabupaten Paser, Pemerintah Kabupaten Paser menyusun beberapa strategi yang diantaranya adalah meningkatkan kerja sama pembangunan dengan melibatkan peran masyarakat, kalangan dunia usaha, organisasi pemerintah, dan pembiayaan swasta. Dalam upaya tersebut, pemerintah terus mendorong kegiatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan tersebut dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang tidak termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendanaan yang berasal dari non-APBD tersebut terutama berasal kegiatan CSR/TSP/TSP perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser.

Saat ini masih ada perusahaan yang mempersepsikan CSR/TSP sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan memang mampu mengangkat status CSR/TSP ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya *brand building* dan peningkatan *corporate image*. Namun upaya-upaya CSR/TSP tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan.

Saat ini penyelenggaraan CSR/TSP umumnya dilaksanakan sendiri oleh korporasi yang dilaksanakan tanpa melalui proses perencanaan yang matang. Namun ada satu perusahaaan tambang yaitu PT. Kideco Jaya Agung, Tbk. yang telah melakukan perencanaan kegiatan CSR/TSP bersama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Paser pada 10 (sepuluh) kecamatan yang ada. Pendampingan ini dilakukan dalam rangka mensinkronkan kegiatan yang akan didanai melalui APBD dan yang akan dibiayai melalui CSR/TSP. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kepentingan dan pengkondisian lingkungan sasaran yang lebih baik,

terencana, terkoordinasi, dan memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan tindak lanjut program CSR/TSP. Diharapkan dengan kegiatan musrenbang CSR/TSP ini pelaksanaan CSR/TSP di lapangan masih tumpang tindih (*overlapping*), kurang tepat sasaran, dan tidak berkelanjutan dengan kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten Paser.

3.2.5 Kebijakan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 di Daerah

Wabah Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang telah menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Dalam merespons situasi tersebut, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten paser untuk mempercepat penanganan Covid-19 yakni:

1. Penetapan Status Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Paser melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 360/KEP-228/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Kabupaten Paser dan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 360/Kep-261/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Kabupaten Paser
2. Dalam rangka mengantisipasi bencana yang lebih luas, perlu dilakukan upaya-upaya kegiatan darurat untuk menghilangkan atau meminimalisir penyebaran Covid-19, yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai dengan standar penanganan pada masa tanggap darurat, maka Pemerintah Kabupaten Paser memberikan bantuan dana operasional tanggap darurat penanganan penyebaran virus Covid-19 secara bertahap sesuai perkembangan kondisi serta kebutuhan di lapangan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 360/Kep- 241 /2020 tentang Pemberian Bantuan Dana Tanggap Darurat Penanganan Penyebaran Virus Covid-19 di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor 360/Kep- 293/2020 tentang Pemberian Tambahan Bantuan Dana Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Paser
3. Dalam rangka membantu masyarakat korban atau yang terkena dampak Covid-19 , telah dibuat kebijakan pemberian Bantuan Sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin dan/atau yang

terdampak Covid-19 melalui Peraturan Bupati Paser Nomor 58 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Paser dan Keputusan Bupati Paser Nomor 360/Kep-311 /2020 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BBPNT) Sembako yang akan diberikan Kepada Masyarakat Yang Terdampak Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Paser.

4. Percepatan *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk mendukung seluruh program-program kegiatan dalam penanganan covid-19 seperti belanja sektor kesehatan, jaring pengaman social dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan penyebaran Covid-19 yang diatur melalui:
   a. Peraturan Bupati Paser Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
   b. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
   c. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020,
   d. Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
5. Dalam rangka menjamin pelaksanaan peribadatan masyarakat tanpa mengabaikan protokol kesehatan penanganan Covid-19 maka pemerintah kabupaten paser mengeluarkan pedoman penyelenggaran kegiatan keagamaan di rumah ibadah melalui Surat Edaran Bupati Paser Nomor 450/1455/Kesra tentang Pedoman Penyelenggaran Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid Saat Pandemi di Kabupaten Paser.
6. Dalam pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, birokrasi ASN memiliki peranan penting dan tetap harus melayani, mengabdi, bekerja demi berputarnya roda

pemerintahan khususnya pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Paser menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) yang diatur melalui :

a. Surat Edaran Bupati Paser Nomor 061/814/ORG tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser,
b. Surat Edaran Bupati Paser Nomor 061.1/840/ORG tentang Tindak Lanjut Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
c. Surat Edaran Bupati Paser Nomor 061.1/933/ORG tentang Perpanjangan Waktu Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

7. Selain sejumlah kebijakan di atas, ajakan Pemerintah Kabupaten Paser atas keterlibatan pihak badan usaha/*corporate* melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam percepatan penanganan covid dengan hasil sebagai berikut:
   a. Pembebasan biaya rekening air PDAM bagi 2.177 pelanggan yang terdiri dari 1989 Sambungan Rumah (SR) atau sambungan pelangggan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 188 kategori sosial khusus seperti rumah ibadah.
   b. Bantuan dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Paser dalam memberikan bantuan berupa Penyiapan Ruang Isolasi di Kecamatan Batu Sopang, Bantuan Alat Pelindung Diri bagi tenaga kesehatan, Bantuan Paket Sembako dan alat rapid test.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tidak lepas dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Sinergi tujuan dan sasaran pembangunan Kabupupaten Paser dengan pembangunan nasional dilakukan melalui telaahan substansi dan target yang akan dicapai pada Tahun 2022.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024): "**PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL**".

Sasaran pembangunan tahun 2022 adalah :

(1) percepatan pemulihan ekonomi dengan indicator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;

(2) peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2022 juga menitikberatkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator Sasaran Pembangunan Tahun 2022

No	Sasaran	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,2 - 6,0
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5 - 9,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5 - 6,3
4	Rasio Gini (nilai)	0,376 - 0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,41 - 73,46
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	26,87
7	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	102 - 104
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	102 - 105

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021

Dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pada tahun 2022 implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam

tujuh Prioritas Nasional (PN), seperti pada Gambar 4.1 Penjelasan tiap PN akan mencakup pendahuluan yang memuat tantangan atau permasalahan pembangunan yang melatarbelakangi penentuan sasaran PN yang hendak dicapai, dilanjutkan dengan penjelasan Program Priorias (PP) dan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project/MP*).

Gambar 4.1
Kerangka Prioritas Nasional RKP 2022



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2020

4.1.1.1 Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah, memantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan Kalimantan sebagai paru-paru dunia, serta mendorong pemerataan pembangunan terutama di Kalimantan bagian utara. Wilayah Kalimantan merupakan penghasil utama batu bara, migas, dan komoditas lainnya seperti bauksit, bijih besi, pasir zirkon, pasir kuarsa, kelapa sawit, dan karet. Pada tahun 2021, strategi percepatan pembangunan Wilayah Kalimantan dilakukan dengan enam langkah. Pertama, melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan baru yang dapat mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah, menambah bangkitan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya, serta memberikan dampak positif ke berbagai sektor. Kedua, meningkatkan investasi dan optimalisasi kawasan-kawasan strategis khususnya kawasan industri pengolah sumber daya alam hasil perkebunan dan pertambangan yaitu KI Ketapang dan KI Surya Borneo. Ketiga, pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan dan aglomerasi wilayah, pendukung sektor industri dan

pariwisata, termasuk WM Banjarmasin, Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pemerintahan, dengan fokus pada peningkatan penyediaan perumahan, akses pada energi, air minum, sanitasi, persampahan yang aman, serta drainase dan transportasi umum perkotaan. Keempat, mempertahankan pelestarian lingkungan dan fungsi ekologis di kawasan hutan tropik Kalimantan sebagai pusat konservasi dan rehabilitasi plasma nutfah dan satwa yang dilindungi, sebagai pusat penelitian obat-obatan, serta untuk menjamin daya dukung lingkungan. Kelima, meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperluas kerja sama antar daerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan. Keenam, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertifikat hak atas tanah. Adapun strategi pemerataan pembangunan di Wilayah Kalimantan akan dilaksanakan dengan lima langkah. Pertama, meningkatkan konektivitas wilayah dengan mengintegrasikan infrastruktur multimoda yang meliputi transportasi darat, sungai, laut, dan udara. Kedua, memperkuat peran kota-kota kecil dan sedang sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan di daerah perdesaan, pedalaman, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan khususnya dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi lokal. Ketiga, meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan di bagian utara untuk menjaga kedaulatan nasional dan mengurangi kesenjangan dengan penduduk di wilayah negara tetangga. Keempat, mempercepat penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air minum yang aman, pengelolaan sampah dan limbah, serta penyediaan perumahan. Kelima, meningkatkan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan desa guna mendorong peningkatan daya saing daerah serta penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administratif yang relatif luas. Dari sisi risiko, Wilayah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa tektonik dan tidak memiliki gunung berapi. Di sisi lain, Wilayah Kalimantan mempunyai risiko tinggi untuk –II.43– kebakaran hutan dan lahan di musim kering, serta risiko banjir di musim hujan. Kombinasi kandungan gambut yang tinggi, praktik pembakaran untuk membuka lahan, kondisi cuaca di musim kering, dan luasnya wilayah kendali membuat ancaman kebakaran lahan di Kalimantan relatif tinggi. Sementara itu, di musim hujan kota-kota besar di Kalimantan menghadapi ancaman banjir yang diakibatkan oleh rusaknya ekosistem gambut dan rawa, beralihnya daerah resapan, sempadan sungai, dataran rendah yang menjadi kawasan permukiman, serta

buruknya sistem drainase perkotaan. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan mitigasi terhadap kebakaran hutan dan lahan akan terus dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kerja sama dengan perusahaan perkebunan. Adapun upaya pencegahan banjir dilakukan melalui peningkatan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis, serta penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2021 adalah (1) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) mempercepat penurunan kemiskinan dan kesenjangan; serta (3) memperluas kesempatan kerja, Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi Covid-19, serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah.

Tabel 4.2
Target Pengembangan Wilayah Kalimantan Per Provinsi Tahun 2022 (Persen)

Indikator	Target Tahun 2022				
	Kalimantan Barat	Kalimatan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur	Kalimantan Utara
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Pertumbuhan Ekonomi [a)]	5,26-6,04	5,64-6,54	4,50-5,44	4,94-5,94	6,07-7,04
Tingkat Kemiskinan	6,24	4,43	3,99	5,32	6,17
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25-4,98	3,54-4,28	3,77-4,41	5,33-6,20	3,98-4,71

Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2021
Keterangan: a) Assessment sementara Kementerian PPN/Bappenas

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana diamanatkan dalam Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 bahwa Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun berdasarkan analisa terhadap permasalahan pembangunan dan tujuan pembangunan pada interpretasi/arahan tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2019-2023. Prioritas Pembangunan pada RKPD merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian menjadi sasaran utama pada tema RKPD 2022. Sesuai dengan Tema RKPD 2022 "**Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN** ", maka kata kunci pada tema tersebut adalah Reformasi Struktural, Daya Saing SDM, dan Ibu Kota Negara, maka Prioritas Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 adalah:

1. Peningkatan ketahanan kesehatan masyarakat serta reformasi sistem pendidikan keterampilan yang mendukung daya saing SDM;
2. Penguatan pelaku dan lembaga ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan kemudahan berinvestasi di sektor pengelolaan sumber daya alam terbarukan dalam rangka penguatan ekspor komoditi unggulan;
4. Penguatan konektivitas antar daerah, kawasan dan IKN;
5. Percepatan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Prioritas pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan mempedomani prioritas nasional pada RKP tahun 2022. Beberapa prioritas nasional dan prioritas pembangunan di Kalimantan Timur pada tahun 2022 memiliki keterkaitan dalam rangka mendukung tercapainya prioritas nasional.

Berkaitan dengan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat pada tahun 2022 adalah merupakan RKP Tahun 2022 yang merupakan pelaksanaan periode Pertama RPJMN 2020-2025, dengan pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, maka RKPD tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun ketiga RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan, maka penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”. Visi pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam misi pembangunan dalam lima tahun mendatang sebagai berikut:

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;

3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Secara grafis, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur tahun 2019-2023 dapat di lihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Pola Hubungan Antara Fokus Utama Pembangunan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023



Adapun tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Tujuan Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

No .	Tujuan	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	77,75
2	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,90
3	Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
4	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
5	Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,308
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,75	75,85	75,95	76,05	76,15
7	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	B (69,50)	B (70,50)	B (71,50)	B (72,50)	B (74,50)

Berdasarkan tujuan pembangunan di atas, disusun sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96
Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,72	73,74	73,76	73,78	73,8
Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	56,7	56,71	56,72	56,73	56,75
Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	56,74	57,23	57,82	58,27	58,86
Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55
Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	4,50	4,60	4,70	4,80	4,90
Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa)	503	478	448	413	368
Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	0,95	0,97	0,99	1,01	1,03
Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	20	20	20	21	21
Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi (Rp. Triliun)	31,5	33,08	34,73	36,47	38,29

Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	0,53	0,54	0,55	0,56	0,57
	Rasio Pemenuhan Beras (%)	75,43	77,62	79,94	82,02	85,16
Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37
Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,1	5,4	5,7	6	6,3
Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1,48	1,5	1,55	1,6	1,65
Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	1	1,05	1,1	1,15	1,2
Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)	3,84	3,84	3,84	3,84	3,84
Meningkatnya aksesibilitas wilayah	Jumlah penumpang yang terlayani (orang)	10.705.000	11.026.0 00	11.536.200	11.700.000	12.050.000
	Jumlah barang (ton)	334.805.000	344.850. 000	355.200. 000	365.900. 000	376.900. 000
Meningkatnya konektivitas antar kawasan	Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan)	2	3	3	3	6
Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air	Cakupan layanan air minum (%)	73,33	75,00	77,00	81,00	85,00
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	13.618	14.008,5	15.558,5	16.258,5	16.925
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	664,2	575	505	435	365
Menurunnya kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	620,06	533,56	459,56	409,56	359,56

Sasaran	Indikator Sasaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	66,68	69,01	75,09	80,09	83,09
Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	Rasio elektrifikasi (%)	85,50	87,50	89,50	92,00	95,00
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)	26,3	26,89	27,75	28,5	29,33
Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Resiko Bencana	145	140	135	130	125
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja	77,50	78,00	78,50	79,00	80,00
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)	81	81,50	82	82,50	83
Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2022 yaitu "**PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT"**

Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Penguatan Ekonomi Daerah.

Untuk bidang lingkungan dan pemerintahan pada hakikatnya telah menjadi bagian dari ketiga program prioritas pembangunan tersebut dimana pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan sumber daya alam dan sumberdaya manusia dengan menserasikan aktivitas manusia dengan sumber daya alam yang tersedia. Pembangunan diharapkan memperoleh hasil yang optimal dan berkesinambungan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana Visi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu "**MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA**". Untuk merealisasi Visi tersebut, maka di dalam RPJMD telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 dan hubungannya dalam merealisasikan ke-empat misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Misi 1 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing						
	Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	**Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	-2.77	1,32		
PN 1	**Sasaran 1: Meningkatnya efek berganda (*multiplier effect*) sektor pertanian**	**Pertumbuhan sektor ekonomi lokal / non tambang**	**%**	0,227083333	05.14		
PN 1	**PROGRAM DAERAH 1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, MUTU HASIL DAN OLAHAN PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN**	**Rata-rata pertumbuhan produksi pertanian**	**%**	**1,23**	**2,44**	DTPHORTIK, Disbunnak Dis.Perikanan dan DKP	
PP 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	50	60	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
PP 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Indeks prasarana Pertanian	%	50	60	Tanaman Pangan dan Hortikultura	
PP 3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman Pangan	%	0,434722222	9,88	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
		Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman hortikultura	%	0,254861111	06.17		
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	NA	100	Sekretariat Daerah	
PP 3	Program Penyuluhan Pertanian	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	60	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	
PP 3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase hewan ternak yang sehat	%	50	60	Dinas Peternakan dan Perkebunan	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase sarana perkebunan dan peternakan yang tersedia	%	0	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PP 3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang tersedia	%	0	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PP 3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Pertumbuhan produktivitas perkebunan non sawit	%	0	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PP 3	Program Perizinan Usaha Pertanian (Perkebunan dan Peternakan)	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	%	0	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan	
PP 4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	10,593.10	10,677.84	Dinas Perikanan	
PP 4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	16,974.40	17,144.14	Dinas Perikanan	
PP 4	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan (%)	%	35	35	Dinas Perikanan	
PP 4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)	Ton	2,650.00	2,673.85	Dinas Perikanan	
PP 3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase tingkat ketersediaan pangan	%	97,59	97,77	Dinas Ketahanan Pangan	
		Persentase tingkat konsumsi pangan	%	84.10.00	85	Dinas Ketahanan Pangan	
PP 3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Desa rawan pangan	Jumlah Desa	30	27	Dinas Ketahanan Pangan	
PP 3	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaultan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	31	Dinas Ketahanan Pangan	
PP 3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	Dinas Ketahanan Pangan	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang diberdayakan	UMKM	0	25	Disperindagkop	
PP 5	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang naik kelas	UMKM	0	5	Disperindagkop	
PP 5	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	%	2,1	02.40	Disperindagkop	
PN 1	**PROGRAM DAERAH 2. PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,52	4,55	Disnakertran dan DPMPTSP	
PP 6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan tenaga kerja	Dokumen	2	1	Disnakertrans	
PP 6	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	50	Disnakertrans	
PP 6	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	30	30	Disnakertrans	
PP 6	Program Hubungan Industrial	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46.00	40	Disnakertrans	
PP 6	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam juta)	dalam juta	657,97	690,869	DPMPTSP	
	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan investasi non tambang dan non sawit	Perusahaan	56	59	DPMPTSP	
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81.02.00	DPMPTSP	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	Investor	56	59	DPMPTSP	
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	60	DPMPTSP	
	Sasaran 2 : Berkembangnya sektor kepariwisataan	**Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)**	**%**	-2,28	00.01		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH 3: PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	**Pertumbuhan industri pengolahan non tambang**	**%**	17,32	17,1	**Disporapar, Disdikbud, dan Disperindagkop**	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang baik	%	16,13	18,75	Disporapar	
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	14,26	Disporapar	
	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Komu nitas	60	70	Disporapar	
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dari HAKI	Produk	0	1	Disporapar	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	Rekomendasi	120	50	Disperindagkop	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Stabilitas harga kebutuhan pokok (angka inflasi)	%	0	4	Disperindagkop	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah dokumen stabilitas harga dan bahan pokok	Dokumen	12	12	Disperindagkop	
	Program Pengembangan Eksport	Jumlah pelaku usaha yang dibina	Pelaku usaha	0	2	Disperindagkop	
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang	UTTP	180	200	Disperindagkop	
	Proram Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	Promosi	0	1	Disperindagkop	
	Program Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	56.33.00	59	Disperindagkop	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rata-rata omset per koperasi	Juta rupiah	219	255	Disperindagkop	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	Lokasi	1	2	Disnakertrans	
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	KK	90	55	Disnakertrans	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	Kawasan	1	2	Disnakertrans	
	MISI 2 : Meningkatkan tata kelola permerintahan yang efektif dan efisien melalui pemerintahan yang profesional, partisipatif dan transparan						
	TUJUAN 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi		68.85	70		
	SASARAN 1.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP		CC	B		
		Opini BPK		WTP	WTP		
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		NA	70	Seluruh Perangkat Daerah	
		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75		
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	Sekretariat Daerah	
		Nilai EKPPD		0,138888889	0,145833333		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	93	Bappedalitbang	
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	93		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	92	Bappedalitbang	
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	60	Bappedalitbang	
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	BKPSDM	
		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	70		
		Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	70		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	70	BKPSDM	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	Sekretariat DPRD	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SKALA MIKRO						
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	%	NA	100	Kecamatan	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah		NA		BKAD	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan aset daerah		NA		BKAD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,5	Bapenda	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	00.15	100	Inspektorat	
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70		
		Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	70	Inspektorat	
	Program Pengelolaan Arsip	Rasio perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	40	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rasio arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	50	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip	%	0	0	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	Diskominfostaper	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks keamanan informasi		NA	Cukup	Diskominfostaper	
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	2	DPMD	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	DPMD	
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	DPMD	
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	%	78.61	80.00.00		
	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	Disdukcapil	
	Program Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	Disdukcapil	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	Disdukcapil	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	Disdukcapil	
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	Diskominfostaper	
	Program Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	30	Diskominfostaper	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	Kecamatan	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	%	NA	70	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
	SASARAN 1.3 : Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas		53.00.00	52.00.00		
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan	%	NA	100	Satpol PP	
		Persentase kasus gangguan trantib yang diselesaikan	%	NA	100		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	30	Dinas Pemadam Kebakaran	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Demo		0	0	Kesbangpol	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	80	Kesbangpol	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	Kesbangpol	
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	%	NA	100	Kesbangpol	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	Kesbangpol	
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	Kecamatan	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	Kecamatan	
	Misi 3 : Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan						
	Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, pemukiman dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini		0,201388889	0,197916667		
PN 5	**Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur**	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		NA	NA		
PN 5	**PROGRAM PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS**	Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	51,05	60		

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 2	3.1.1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	45	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap / Jumlah Panjang Jalan Kabupaten) x 100%
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	75	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Jumlah jembatan Dalam Kondisi Baik / Jumlah Jembatan Kabupaten) x 100%
PP 2	3.1.2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	70	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Jumlah sistem jaringan drainase yang berfungsi baik / jumlah sistem jaringan drainase perkotaan) x 100%
	3.1.3. Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	%	78	80	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Jumlah Bangunan gedung yang terkelola / jumlah bangunan seluruhnya) x 100%
PP 2	3.1.4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	57	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	persentase Jumlah tenaga terampil yang memperoleh sertifikat standar nasional
PP 1	3.1.5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	10	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Luas kawasan yang terkelola / luas wilayah kab. Paser) x 100%
PP 1	3.1.6. Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	08.44	27.92	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah rumah layak huni/Jumlah KK

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 1	3.1.7. Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	10	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani/jumlah luas permukiman kumuh x 100
PP 1	3.1.8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	89.26.00	90.23.00	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni = Jumlah Rumah Layak Huni / Jumlah Keseluruhan rumah x 100
PN 5	3.1.9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39.58.00	44.58.00	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(Jumlah lingkungan yang didukung PSU/Jumlah Lingkungan perumahan) x 100%
PP 1	3.10. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,89	73	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Jumlah kawasan yang terpenuhi akses air minum / jumlah kawasan seluruhnya) x 100%
PP 1	3.1.11. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	63	75	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Jumlah kawasan yang memiliki akses layak / jumlah kawasan seluruh Kabupaten) x 100%
PP 1	3.1.12. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang LLAJ	%	60	85	Dinas Perhubungan	Jumlah sarana dan fasilitas yang tersedia / jumlah sarana dan fasilitas yang dibutuhkan x 100%

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 2	3.1.13. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang Pelayaran	%	50	85	Dinas Perhubungan	Jumlah sarana dan fasilitas yang tersedia / jumlah sarana dan fasilitas yang dibutuhkan x 100%
PP 2	3.1.14. Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	20	Dinas Perhubungan	Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (*Masterplan*)
PN 6	**Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan bencana**	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		62	70		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,23	71,43		
		Indeks Risiko Bencana (IRB)		196	195,5		
PN 6	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP, PENATAAN RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,23	71,43		
PP 1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup serta evaluasi Lingkungan Hidup tersedia		31,25	43,75	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi lingkungan hidup yang tersedia / jumlah dokumen dan evaluasi lingkungan hidup yang dibutuhkan atau dipersyaratkan) x 100%

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		68	70	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah luasan kawasan yang terawasi terhadap kerusakan lingkungan / jumlah kawasan lingkungan (desa)) x 100%
PP 1		Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan		3	6	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah luasan kawasan yang dipulihkan / jumlah luas kawasan yang rusak atau kritis) x 100%
PP 3	3.2.3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3		50	60	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah perusahaan atau pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3 / jumlah perusahaan atau pelaku usaha) x 100%
PP 1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan		55	80	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah perusahaan atau pelaku usaha yang dibina dan diawasi / jumlah perusahaan atau pelaku usaha) x 100%

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 1	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Prosentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.		11,22	40	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah Kelompok masyarakat, Ormas, LSM dan Lembaga yang mendapat kan pendidikan dan pelatihan / jumlah Kelompok masyarakat, Ormas, LSM dan Lembaga yang ada) x 100%
PP 1	Program Pengelolaan Keanekaragman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan RTH dan Taman kehati		85	87	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah RTH dan Taman KEHATI yang dikelola / jumlah RTH dan Taman KEHATI yang ada) x 100%
PP 1	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan		0	100	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah MHA yang difasilitasi / jumlah MHA) x 100%
PP 1	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah predikat penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup		0	1 Piagam adipura	Dinas Lingkungan Hidup	(jenis predikat pengelolaan kualitas lingkungan hidup)
PP 1	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		68,75	100	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah aduan yang ditangani / jumlah aduan teregisterasi) x 100%
PP 1	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA		39,57	45	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah sampah yang terangkut ke TPA / jumlah timbulan sampah) x 100%

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 1		Persentase pengelolaan sampah disumber		11,37	14	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah sampah yang dikelola di sumbernya / jumlah timbulan sampah) x 100%
PP 1	3.2.12. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik	%	40	50	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(Infrastruktur yang dikelola baik/jumlah infrastruktur persampahan) x 100%
PP 1	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan tahura yang dikelola dengan baik.		68	73,33	Dinas Lingkungan Hidup	(jumlah kawasan TAHURA yang dikonservasi / jumlah kawasan TAHURA) x 100%
PN 6		1) Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	%	36.36.00	45.45.00	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(% Jumlah Kawasan yang telah Memiliki Dokumen Perencanaan Tata Ruang)
PN 6	3.2.13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2) Persentase Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	%	58.42.00	60	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(% Nilai Kesuaian Pemanfaatan Indikasi Program yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang)
		3) Persentase Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	%	50	60	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(% Jumlah Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang)

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 2	3.2.14. Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	BPBD	(jumlah layanan kebencanaan/jumlah warga yang berhak mendapatkan layanan kebencanaan) x 100%
	3.2.15. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan (18 kasus)	%	11.11	27.78	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah sengketa tanah yang diselesaikan/jumlah sengketa yang terdaftar dan perlu diselesaikan*100%
	3.2.16.Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (15 lokasi)	%	20	33	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah lokasi tanah yang dibebaskan atau diselesaikan/jumlah lokasi tanah yang akan dibebaskan atau perlu penyelesaian yang terdaftar*100%
	3.2.17. Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	%	NA	50	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah lokasi penetapan tanah ulayat yang diproses/Jumlah tanah ulayat
	3.2.18.Program Penatagunaan Tanah	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	%	NA	10	Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah kecamatan yg dilakukan pemetaan ZNT/Jumlah Kecamatan *100
	MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing						

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	TUJUAN : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	**Indeks pembangunan Manusia**	**%**	**72.04.00**	**73.03.00**		
PN 3	**SASARAN 4.1. Meningkatnya kualitas pendidikan**	**1. Angka Harapan Lama Sekolah**	**Tahun**	**13.10**	**13.25**	Pendidikan	
PN 3		**2. Rata - rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**08.55**	**0,375**	Pendidikan	
PN 3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**	**Rata - rata Lama Sekolah**	**Tahun**	**08.55**	**0,375**	Pendidikan	
PP 4	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD	%	108.62	108.62	Pendidikan	
		2. APK SMP	%	94.56.00	95.00.00	Pendidikan	
		3. APM SD	%	97.87	98.00.00	Pendidikan	
		4. APM SMP	%	81.58.00	95.00.00	Pendidikan	
		5. Angka Melek Huruf	%	98.60	98.65	Pendidikan	
		6. Angka Putus Sekolah SD	%	0,065277778	0,0625	Pendidikan	
		7. Angka Putus Sekolah SMP	%	02.28	2	Pendidikan	
PP 4	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	90	100	Pendidikan	
PP 4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	90	90.05.00	Pendidikan	
PP 4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	93%	94%	Pendidikan	
PP 4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	%	N/A	100	Pendidikan	
PP 4	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka	Orang	8750	8850	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
		Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan		NA	70	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	
PP 4	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	naskah	N/A	5	Dinas Kearsipan & Perpustakaan	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PN 3	**SASARAN 4.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**72.62**	**72.80**	**Kesehatan**	
PN 3	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN**	**Umur Harapan Hidup**	**Tahun**	**72.62**	**72.80**	**Kesehatan**	
PP 3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP		100	100	Kesehatan	
PP 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten		100	100	Kesehatan	
PP 3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman		100	100	Kesehatan	
PP 3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif		NA	60	Kesehatan	
PN 3	**SASARAN 4.3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**	**Angka Kemiskinan**	**%**	**09.23**	**08.00**		
PN 3	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL**	**Angka Kemiskinan**	**%**	**09.23**	**08.00**		
PP 1	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar	%	0,542361111	12	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	%	73.06.00	75	Dinas PPKBP3A	
PP 2	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	Sosial	
PP 2	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial (%)	%	100	100	Sosial	
PP 2	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial (%)	%	100	100	Sosial	
	Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana (%)	%	100	100	Sosial	
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	Sosial	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
PP 5	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif (%)	%	100	100	Dinas PPKBP3A	
PP 5	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan (%)	%	34.39.00	37.50.00	Dinas	
						PPKBP3A	
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	%	36	59.52.00	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan (%)	%	82.35.00	100	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan dan Penguatan	%	40	50	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)	%	1,014583333	47.62	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)		560	600	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	%	100	100	Dinas	
						PPKBP3A	
PP 5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	15.56	15.56	Pemuda & Olah Raga	

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH/PROGRAM OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET KINERJA PROGRAM TAHUN 2022	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Persentase wirausaha muda (%)	%	20	33	Pemuda & Olah Raga	
PP 5	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga (%)	%	11	23	Pemuda & Olah Raga	
		Jumlah atlet berprestasi	orang	3	3	Pemuda & Olah Raga	
PP 5	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Gugus Pramuka Aktif (%)	%	100	100	Pemuda & Olah Raga	
PP 5	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan budaya (%)		100	100	Kebudayaan	
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pembinaan kesenian tradisional (%)	%	12%	18%	Kebudayaan	
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Sejarah lokal yang dibina dengan baik	%	100	100	Kebudayaan	
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	%	100	100	Kebudayaan	
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum dikelola dengan baik	%	100	100	Kebudayaan	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	NA	70	Kecamatan	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	80	Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	
		Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	50		
		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	orang	2	2		

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Paser maka dapat dijabarkan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Paser dalam focus Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 sebagaimana berikut :

FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK RKPD 2022

1. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM (PSDA)

1.1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

A. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

1.2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

A. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap

1.3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

A. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

a. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

A. **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (PSPP)
b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

1.5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

A. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

B. **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**
a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage
d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

1.6 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

A. **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**
a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

B. **Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

C. **Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**
a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

1.7 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

A. **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian**
a. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

A. Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
a. Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum

1.8 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

A. **Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**

a. Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

1.9 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

A. Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

a. Penyediaan sarana distribusi perdagangan

1.10 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPRASIAN

A. **Kegiatan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kab/kota**

a. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi

1.11 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

A. **Kegiatan Pengembangan usaha mikro denngan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil**

a. Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengelolaan pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi

1.12 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. **Kegiatan Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota**

a. Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota sumber daya industri

1.13 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

A. **Kegiatan Pengelolaan Sampah**

a. Kordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Diagram 4.1

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program

RKPD Tahun 2022



2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (PPM)

2.1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

A. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**

a. Penambahan Ruang Kelas Baru
b. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
c. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
d. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
e. Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
f. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
i. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
j. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
k. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
l. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah

B. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**

a. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
b. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
c. Pembangunan Laboratorium
d. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
e. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
h. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
i. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
j. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
k. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
l. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
m. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

C. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

a. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD

b. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

a. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP

2.2 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

A. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

a. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

2.3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

A. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

a. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi

2.4 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

A. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

a. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

2.5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

a. Pembangunan Puskesmas

b. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan

e. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

2.6 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

A. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Diagram 4.2

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program RKPD Tahun 2022

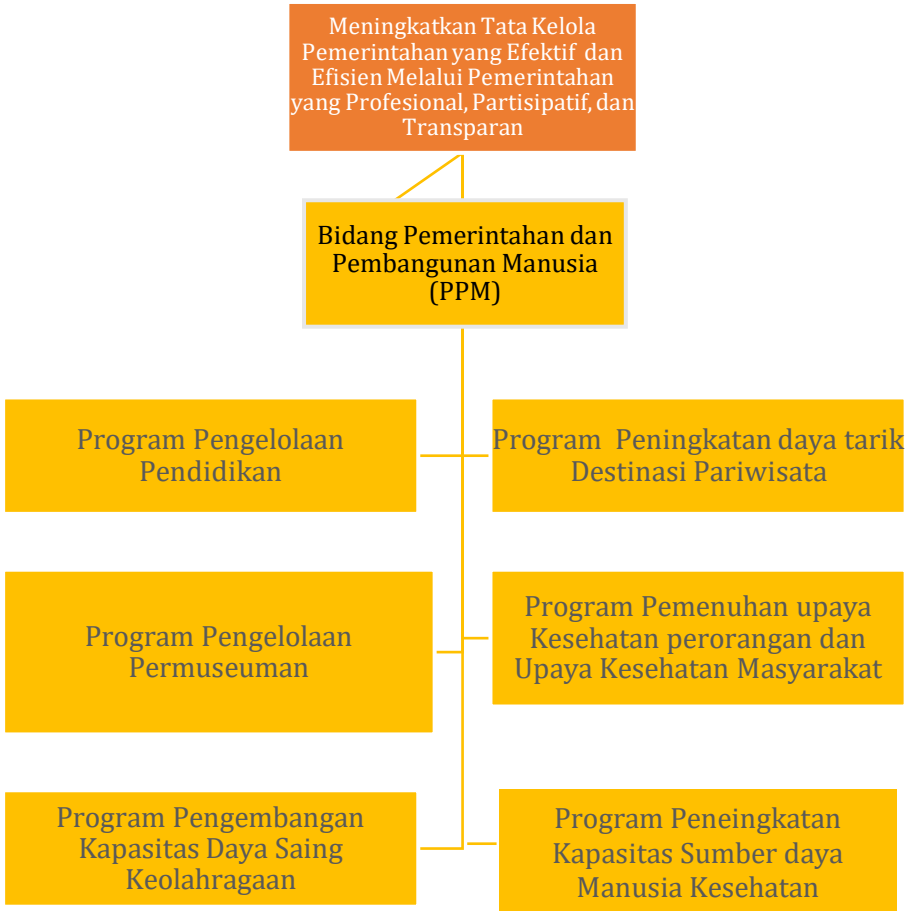

3. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN (INFRASWIL)

3.1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

A. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

b. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

3.2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

A. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

b. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh

3.3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

A. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

a. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

3.4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

A. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

a. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

3.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

A. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
b. Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
c. Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya
d. Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
e. Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir

3.6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

A. KegiatanPengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
d. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
f. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
g. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

3.7 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

A. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

3.8 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

A. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
b. Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
c. Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan

3.9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

A. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

3.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

A. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

a. Rehabilitasi Jalan
b. Pembangunan Jembatan
c. Rehabilitasi Jembatan

3.11 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

A. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah

3.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

A. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

3.13 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

A. Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

a. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Diagram 4.3

Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Fokus Program RKPD 2022

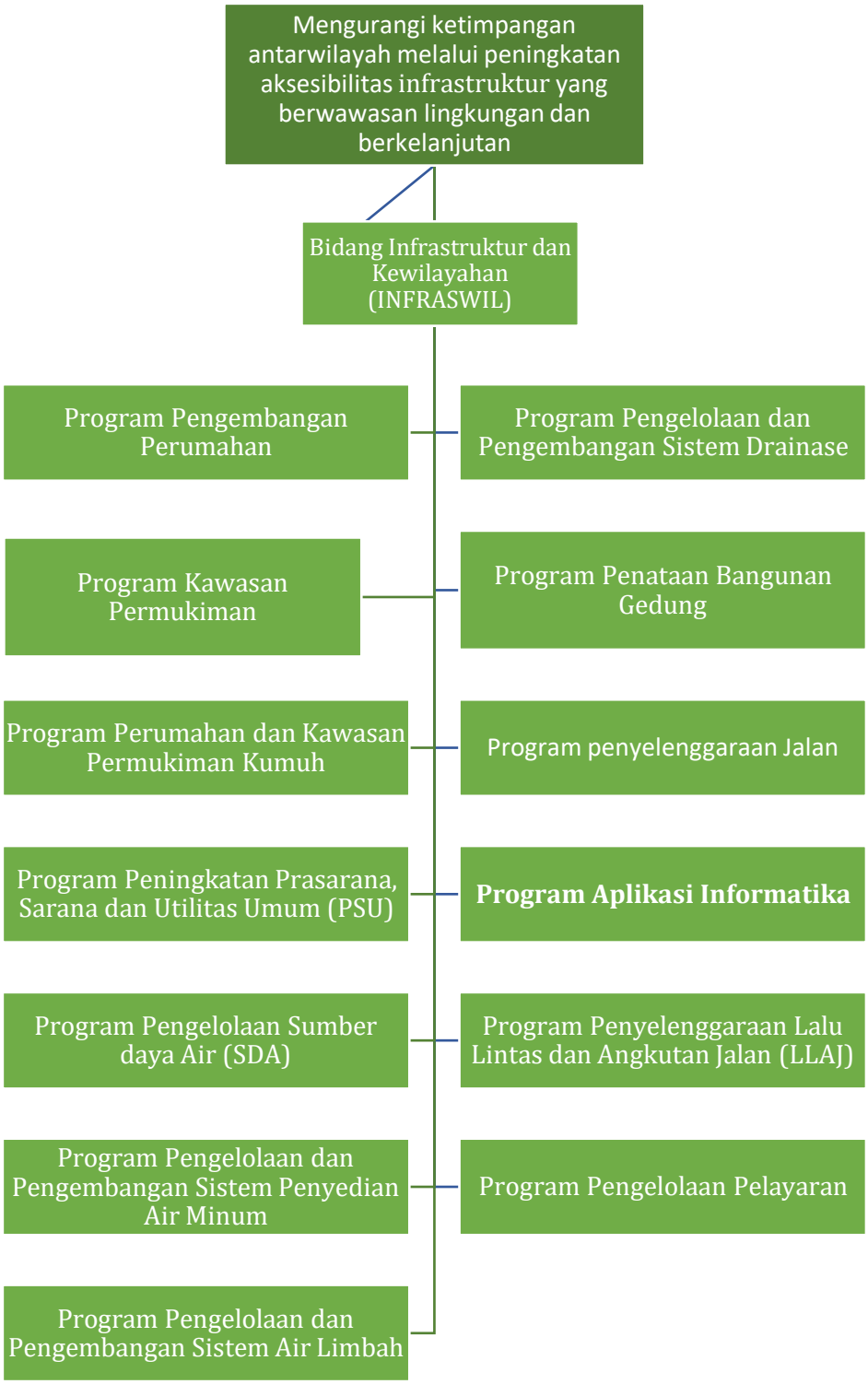

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Kabupaten/Kota perlu melakukan penelaahan atas kebijakan pemerintah Provinsi. Tahapan ini akan menjabarkan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi yang mana sudah tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD (Rancangan Awal) Provinsi Kalimantan Timur dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan pada tahun 2022.

Dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, maka pada tahun 2022 pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dituangkan dalam 7 prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dituangkan dalam 5 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Paser dituangkan dalam 3 prioritas pembangunan Kabupaten Paser pada RKPD Tahun 2022. Pada 7 prioritas nasional dan 6 prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tersebut Pemerintah Kabupaten Paser mengimplementasikannya pada prioritas pembangunan kabupaten Paser yang dijelaskan pada diagram 4.4 dan diagram 4.5 di bawah ini.

Diagram 4.4
Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Nasional Tahun 2022

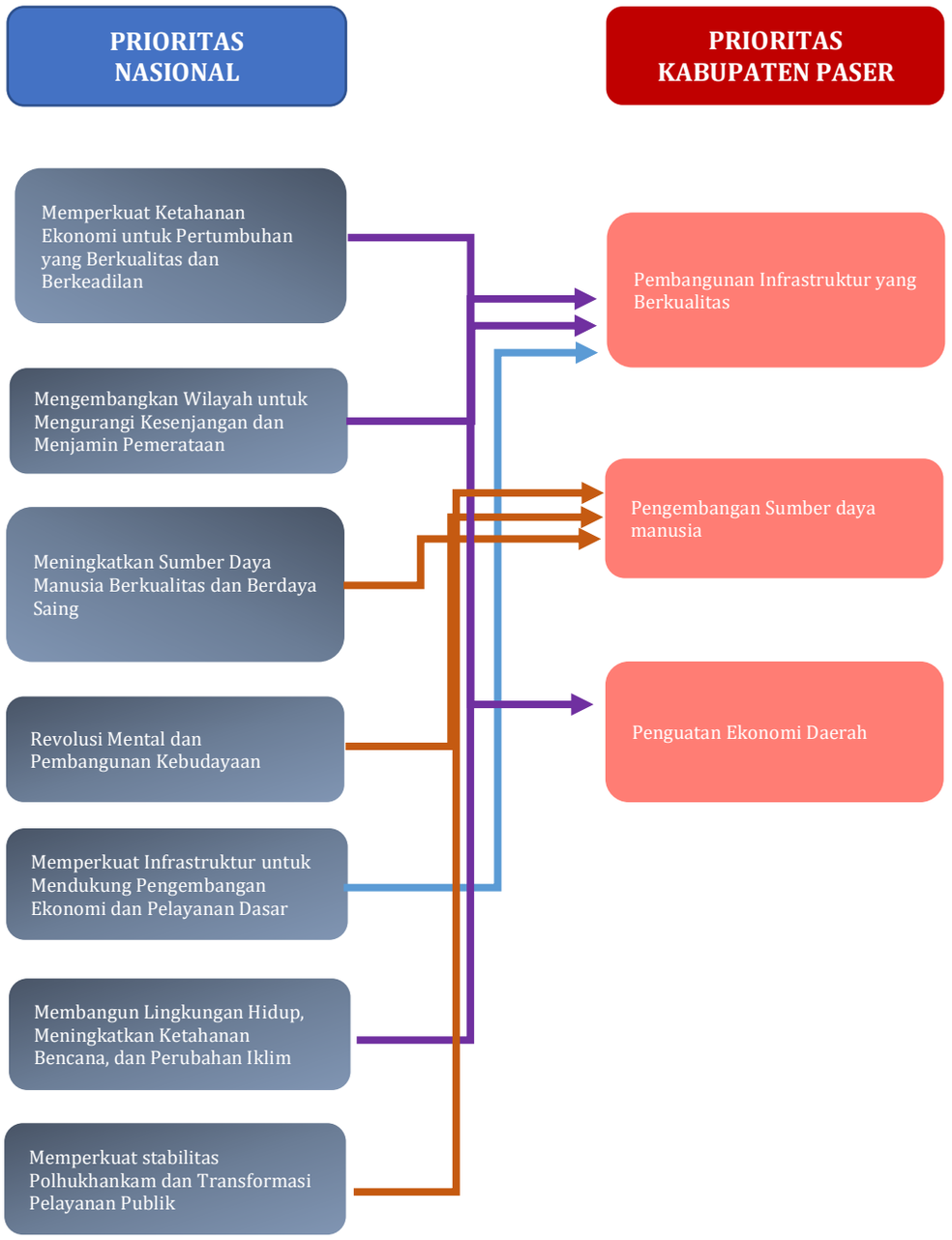

Diagram 4.5
Sinkronisasi Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser dengan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

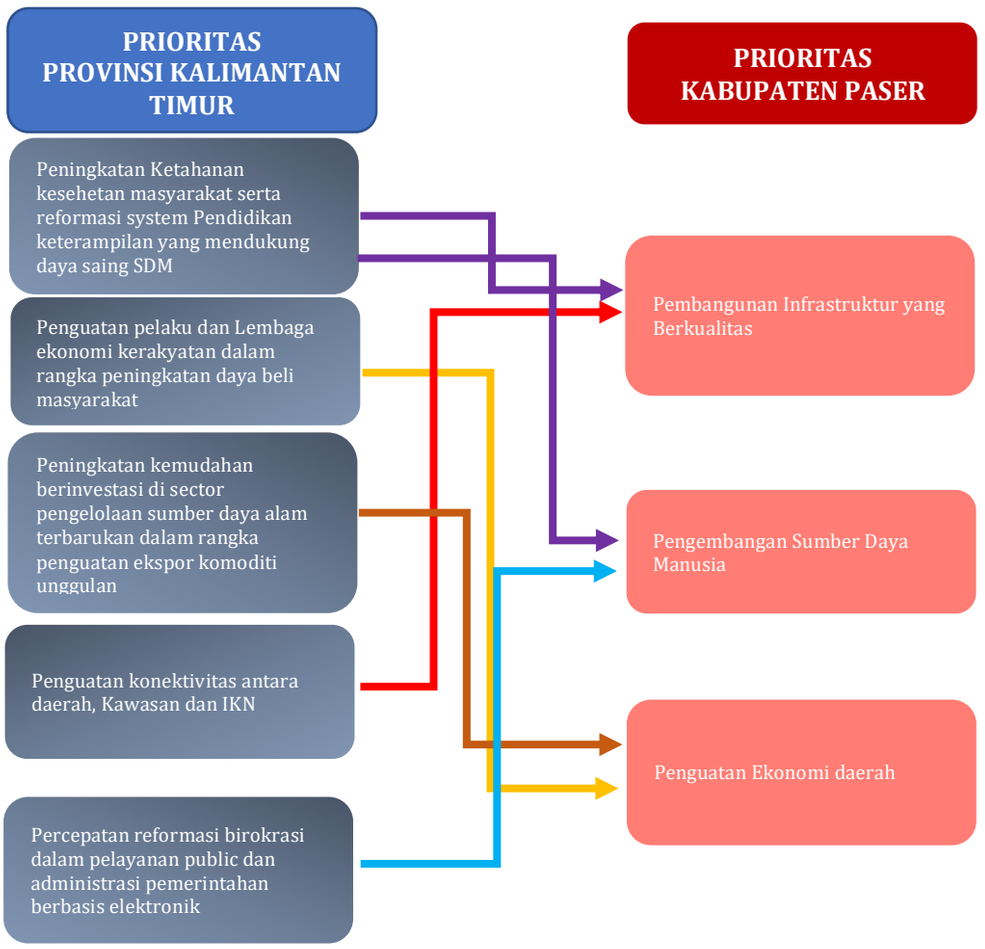

4.2.1 Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD 2022

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 Ayat 2 dikatakan bahwa Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Paser Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Bidang Infastruktur dan Lingkungan Hidup,** Meliputi :
   a. Masih banyaknya akses jalan di lingkungan perumahan dan desa yang rusak.
   b. Tidak lancarnya drainase di lingkungan perumahan warga yang mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa wilayah.
   c. Kurangnya akses air bersih bagi masyarakat
   d. Kurang tersedianya embung di beberapa Desa untuk mengatasi kekeringan di musim kemarau
   e. Masih belum optimalnya akses terhadap sumber daya air pertanian
   f. Masih adanya warga yang menempati rumah tidak layak huni
   g. Kurangnya sarana lampu penerangan jalan umum
   h. Adanya akses penghubung jalan berupa jembatan dan gorong-gorong yang rusak/terputus.
   i. Kurangnya sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi
   j. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan sampah, dll.

2. **Bidang Perekonomian,** Meliputi :
   a. Kurangnya peralatan produksi bagi UKM
   b. Kurangnya sarana dan prasarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
   c. Kurang tersedianya lahan sawah untuk produksi padi dalam rangka penguatan ketahanan pangan
   d. Kurangnya modal usaha bagi koperasi
   e. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan masyarakat untuk melakukan wirausaha guna mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.
   f. Kurangnya kompetensi dan keterampilan petani dan nelayan dalam menjalankan usaha produksi.
   g. Kurangnya sarana dan prasarana pada beberapa objek wisata
   h. Tidak tersedianya prasarana pasar di beberapa Desa, dll.

3. **Bidang Pengembangan SDM,** Meliputi :

a. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pendidikan dan utilitas sekolah
b. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dll.

4. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meliputi :

a. Belum tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai di beberapa Desa
b. Masih adanya kantor pemerintahan baik di Kecamatan maupun di Desa yang perlu dilakukan rehabilitasi
c. Masih kurangnya sarana pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat baik di Kantor Kecamatan maupun di kantor Desa, dll.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan yang terdapat dalam Rekomendasi hasil reses DPRD Kabupaten Paser diperoleh kesepakatan untuk menjadi bahan masukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, selanjutnya dapat dijabarkan sebagaimana terlampir.

4.2.2 Aspirasi Masyarakat Melalui Musrenbang

Dalam menyusun RKPD Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Paser melakukan penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang. Terdapat 3.499 permasalahan yang disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Paser melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari hasil verifikasi dan validasi dari 3.499 permasalahan tersebut diperoleh kesepakatan untuk menjadi bahan masukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebanyak 210 usulan permasalahan. Adapun rekapitulasi hasil kesepakatan tersebut terlampir.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2022 disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2022, disusun mengikuti program pembangunan daerah. Terkait kesesuaian nama program, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	14	86	395.080.839.725,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	21	84	295.899.813.440,00	DINAS KESEHATAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	22	62	130.314.593.170,00	DPUTR
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	2	1.799.224.660,00	UPTD KOMPLEK PERKANTORAN GENTUNG TEMIANG
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	12	25	226.651.117.311,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	9	29	13.567.041.976,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	7	20	7.804.647.034,00	BPBD

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	4	8	7.173.907.420,00	DISDAMKAR
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	15	48	9.577.327.613,00	DINAS SOSIAL
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	17	36	8.654.257.578,00	DISNAKERTRANS
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	16	28	9.393.310.040,00	DPPKBPPPA
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	12	28	7.677.924.288,00	DINAS KETAHANAN PANGAN
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4	4	6	9.068.735.000,00	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
14	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	11	22	63	36.184.726.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	5	8	17	10.050.702.008,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	10	44	13.924.057.313,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	8	12	847.783.150,00	DPPKBPPPA
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	4	17	37	34.642.714.314,00	DINAS PERHUBUNGAN
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	8	38	22.149.031.116,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7	12	32	11.458.782.745,00	DISPERINDAGKOP &UKM
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	11	29	8.053.504.065,00	DPMPTSP
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	10	23	11.402.895.268,00	DISPORAPAR
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	6	592.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						STATISTIK DAN PERSANDIAN
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	2	5	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4	5	6	859.124.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	9	31	7.282.239.242,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	8	13	339.720.774,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	15	34	20.527.899.181,00	DINAS PERIKANAN
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	7	14	2.425.835.988,00	DISPORAPAR
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	19	34	19.130.739.392,00	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	5	10	28	63.937.918.214,00	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	7	39.716.290.781,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6	10	20	9.880.226.334,00	DISPERINDAGKOP &UKM
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2	2	5	1.416.200.000,00	DISPERINDAGKOP &UKM
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	6	584.832.000,00	DISNAKERTRANS
36	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	61	55.022.050.940,00	SEKRETARIAT DAERAH
37	SEKRETARIAT DPRD	2	16	66	54.141.668.012,00	SEKRETARIAT DPRD
38	PERENCANAAN	3	12	48	14.125.160.333,00	BAPPEDALITBANG
39	KEUANGAN	2	7	33	15.939.563.127,00	BAPENDA
40	KEUANGAN	3	10	54	303.068.467.876,00	BKAD
41	KEPEGAWAIAN	2	11	41	11.517.289.281,00	BKPSDM
42	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	5.575.484.750,00	BKPSDM
43	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	4	7	2.400.914.959,00	BAPPEDALITBANG

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
44	PENGAWASAN	3	11	31	17.059.918.367,00	INSPEKTORAT
45	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6	11	32	9.914.815.035,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PASER
46	UNSUR KEWILAYAHAN	6	12	27	8.597.140.764,00	KECAMATAN TANAH GROGOT
47	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	34	5.516.566.270,00	KECAMATAN PASER BELENGKONG
48	UNSUR KEWILAYAHAN	6	12	27	7.271.784.047,00	KECAMATAN KUARO
49	UNSUR KEWILAYAHAN	6	16	37	7.162.399.768,00	KECAMATAN LONG IKIS
50	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	37	7.995.350.024,00	KECAMATAN LONG KALI
51	UNSUR KEWILAYAHAN	6	11	28	3.176.576.419,00	KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
52	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	35	5.649.457.436,00	KECAMATAN MUARA KOMAM
53	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	34	5.450.680.778,00	KECAMATAN BATU SOPANG
54	UNSUR KEWILAYAHAN	6	15	35	4.413.170.572,00	KECAMATAN MUARA SAMU
55	UNSUR KEWILAYAHAN	6	13	30	4.216.656.146,00	KECAMATAN BATU ENGAU
	JUMLAH	**176**	**458**	**1.363**	**1.986.435.396.579,00**	

Tabel 5.2

Konsistensi Target Program Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan RPJMD Tahun Pelaksanaan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	1. APK SD	108,62%	Program Pengelolaan Pendidikan	1. APK SD	108,62%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. APK SMP	95%		2. APK SMP	95%		
		3. APM SD	98%		3. APM SD	98%		
		4. APM SMP	95%		4. APM SMP	95%		
		5. Angka Melek Huruf	98,65%		5. Angka Melek Huruf	98,65%		
		6. Angka Putus Sekolah SD	0,90%		6. Angka Putus Sekolah SD	0,90%		
		7. Angka Putus Sekolah SMP	2%		7. Angka Putus Sekolah SMP	2%		
		Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100%	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	100%		
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	34,32%	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	34,32%		

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	94%	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	94%		
		Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	100%	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	100%		
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	100%		Dinas Kesehatan
		Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	100%		Dinas Kesehatan
		Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100%	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100%		Dinas Kesehatan
		Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	60%	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	60%		Dinas Kesehatan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	45%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	45%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	75%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	75%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	70%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	70%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	80%	Program Penataan Ruang Bangunan Gedung	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	80%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	57%	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	57%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	10%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	10%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase capaian akses air minum layak	73%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase capaian akses air minum layak	73%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	75%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	75%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik	50%	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik	50%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	45,45%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	45,45%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	60%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	60%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Persentase Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	60%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	60%		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	27,92%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	27,92%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	10%	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	10%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	90,23%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	90,23%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	44,58%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	44,58%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	Cakupan layanan penanggulangan bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan layanan penanggulangan bencana	100%		BPBD

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100%		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mematuhi Peraturan Daerah	100%		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
					Meningkatnya Sumber Daya Aparatur			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
					Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
					Menjalin Kerjasama Dengan Aparat TNI, POLRI, Kejaksaan, Kehakiman dan Instansi Terkait Untuk Mendukung Keberhasilan Tugas-Tugas Di Lapangan			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASER
		Cakupan layanan kebakaran & penyelamatan Kebakaran Non Kebakaran Kabupaten	100%	Meningkatnya Lingkungan Daerah yang Kondusif	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	30%	30 % dari target outcome Program RPJMD 2021-2026	DISDAMKAR

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100%	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100%		Dinas Sosial
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100%		Dinas Sosial
		Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100%	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100%		Dinas Sosial
		Cakupan layanan penanganan bencana	100%	Program Penanganan Bencana	Cakupan layanan penanganan bencana	100%		Dinas Sosial
		TMP dalam kondisi baik	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	TMP dalam kondisi baik	100%		Dinas Sosial
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN TENAGA KERJA**			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	2 Dokumen		DISNAKERTRANS

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%		DISNAKERTRANS
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten	50%		DISNAKERTRANS
				Program Hubungan Industrial	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%		DISNAKERTRANS
2	**URUSAN PEMERINTAHAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	Angka Kelahiran Kasar	12%	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Kasar	12%		Dinas P2KBP3A
		Rasio Akseptor KB	75%	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio Akseptor KB	75%		Dinas P2KBP3A
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif (%)	100%	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif (%)	100%		Dinas P2KBP3A
		Persentase partisipasi perempuan (%)	37.50%	Program Pengarusutamaan	Persentase partisipasi perempuan (%)	37.50%		Dinas P2KBP3A

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	59.52%	Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	59.52%		Dinas P2KBP3A
		Tingkat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	100%	Program Perlindungan Perempuan	Tingkat penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan (%)	100%		Dinas P2KBP3A
		Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	100%	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	100%		Dinas P2KBP3A
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)	47.62%	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)	47.62%		Dinas P2KBP3A
		Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	600	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	600		Dinas P2KBP3A
		Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100%	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	100%		Dinas P2KBP3A

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan pemenuhan operasional adminitrasi perkantoran	100%	1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase SKPD yang menyusun LKj tepat waktu dan pemenuhan operasional adminitrasi perkantoran	100%		DINAS KETAHANAN PANGAN
		Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100%	2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100%		DINAS KETAHANAN PANGAN
		'-Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	97,59	3. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	'-Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	97,59		DINAS KETAHANAN PANGAN
		-Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86		-Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86		

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase penurunan desa rawan pangan	10,0%	4. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan desa rawan pangan	10,0%	∑Penurunan des Rawan Pangan tahun n dibagi ∑desa rawan pangan thn 2020 dikali 100%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		'Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	80%	5.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	'Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	80%		DINAS KETAHANAN PANGAN
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	Persentase Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan (18 kasus)	27,78%	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan (18 kasus)	27,78%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (15 lokasi)	33%	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (15 lokasi)	33%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	50%	Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	50%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Persentase pemetaan zona nilai tanah	10%	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemetaan zona nilai tanah	10%		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, kajian lingkungan hidup serta evaluasi lingkungan hidup tersedia	71%	Program Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, kajian lingkungan hidup serta evaluasi lingkungan hidup tersedia	71%		DLH
		Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	70%		DLH
		persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6%		persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	6%		DLH

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase pengelolaan RTH dan taman KEHATI	72%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan RTH dan taman KEHATI	72%		DLH
		Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	60%	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	60%		DLH
		persentase perusahaan / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	80%	Program pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkunngan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	persentase perusahaan / pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	80%		DLH
		Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100%	Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) kearifan lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100%		DLH

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase kelompok masyarakat, Ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	40%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat, Ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan	40%		DLH
		Peningkatan Predikat pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Piagam ADIPURA	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Peningkatan Predikat pengelolaan kualitas lingkungan hidup	Piagam ADIPURA		DLH
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%		DLH
		Persentase sampah yang terangkut ke TPA	45%	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	45%		DLH
		persentase pengelolaan sampah di sumber	14%		persentase pengelolaan sampah di sumber	14%		DLH
		Persentase luasan TAHURA yang dikelola dengan baik	70%	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luasan TAHURA yang dikelola dengan baik	70%		DLH
7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang LLAJ	85%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang LLAJ	85%		Dinas Perhubungan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang Pelayaran	85%	Program PengelolaanPelayaran	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang Pelayaran	85%		Dinas Perhubungan
		Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	20%	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	20%		Dinas Perhubungan
8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100%	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya informasi pembangunan yang disebarluaskan melalui media publik	100%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase aplikasi yang terintegrasi	40%	Program Aplikasi Informatika	Persentase PD yang tersedia pelayanan publik berbasis TIK	70%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
					Persentase desa yang dapat mengakses jaringan komunikasi	100%		

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Data sektoral	90%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	Indeks keamanan informasi	Cukup	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Persentase Pelayanan Pengamanan data dan Informasi Perangkat Daerah	75%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	968,4	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA (dalam ribu)	725.412		DPMPTSP
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor (PMDN/PMA)	62		DPMPTSP
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	82,04		DPMPTSP
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62		DPMPTSP
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70%		DPMPTSP

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**	Jumlah UKM naik kelas	5 ukm	Program Pemberdayaan usaha Menengah, usaha kecil dan Usaha mikro	Peningkatan wirausaha Baru	100 UKM		DISPERINDAKOP
				Program Pengembangan UMKM	jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	10 ukm		DISPERINDAKOP
		Peningkatan Omzet per koperasi	241 jt	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang melaksanakan RAT	47%		DISPERINDAKOP
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Koperasi yang maju	12 kop		DISPERINDAKOP
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah omzet per koperasi	241 juta		DISPERINDAKOP
13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	Cakupan pengembangan budaya (%)	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan budaya (%)	100%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Cakupan pembinaan kesenian tradisional (%)	18%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pembinaan kesenian tradisional (%)	18%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Sejarah lokal yang dibina dengan baik	100%	Program Pembinaan Sejarah	Sejarah lokal yang dibina dengan baik	100%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	100%	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	100%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Museum dikelola dengan baik	100%	Program Pengelolaan Permuseuman	Museum dikelola dengan baik	100%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		indeks pengembangan budaya	100%	program Pengembangan kebudayaan	indeks pengembangan budaya	100%		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	Presentase organisasi pemuda yang aktif	17,78%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase organisasi pemuda yang aktif	17,78%		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Presentase wirausaha muda	33%		Presentase wirausaha muda	33%		
		Gugus Pramuka aktif	100%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Gugus Pramuka aktif	100%		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Cakupan pembinaan olahraga	68%	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	68%		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		jumlah atlet berprestasi	15%		jumlah atlet berprestasi	15%		
15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	Jumlah Kunjungan Pemustaka	8850	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Pemustaka	8850		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	5	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Naskah Kuno yang dilestarikan	5		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	70	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	70		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	Rasio perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	36%	Program Pengelolaan Arsip	Rasio perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	36%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Rasio arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	44%	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Rasio arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	44%		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase angka pemakaian arsip	0	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase angka pemakaian arsip	0		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
17	**URUSAN PEMERINATAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**	Persentase Desayang memilikiPerbup Batas Desa	2%	Program Penataan Desa	Persentase Desayang memilikiPerbup Batas Desa	2%		DPMD
		Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	100%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	100%		DPMD
		Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	100%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	100%		DPMD
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80		DPMD
		Lembaga Adat Desa yang aktif	50		Lembaga Adat Desa yang aktif	50		
		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2		Masyarakat Hukum Adat yang aktif	2		

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	0,98	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Wajib KTP-El	0,6725		DISDUKCAPIL
		Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	0,98	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akte Kelahiran	0,65		DISDUKCAPIL
		Persentase data kependudukan yang valid	0,98	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terupdatenya data Penduduk	100.000 Data		DISDUKCAPIL
		Persentase pemanfaatan data kependudukan	1	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tersusunnya Laporan Provil Kependudukan	1		DISDUKCAPIL
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terlaksananya program penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%		Dinas Perkebunan dan Peternakan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks sarana perkebunan / peternakan	100%		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Prasarana Perkebunan / peternakan	100%		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase hewan ternak yang sehat	100%		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produktivitas perkebunan non sawit	100%		Dinas Perkebunan dan Peternakan
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100%		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pencakupan penyuluhan pertanian	100%		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah berjalan dengan baik	100%		DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70		Dinas Perikanan

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	75%		Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	75%		Dinas Perikanan
		Jumlah produksi perikanan tangkap	10,677.84 Ton	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	10.677,84 Ton		Dinas Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16,974.40 Ton	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	16,974.40 Ton		Dinas Perikanan
		Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan	12%	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan (%)	12%		Dinas Perikanan
		Jumlah produksi olahan hasil perikanan	2,650.00 Ton	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produksi olahan hasil perikanan	2,650.00 Ton		Dinas Perikanan
		Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan (segar	24,917.50 Ton		Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan (segar)	24,917.50 Ton		Dinas Perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	Jumlah Kelompok sadar wisata	3 kelompok	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Kelompok sadar wisata	3 kelompok		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif	5 pelaku ekraf		Jumlah Pelaku ekonomi kreatif	5 pelaku ekraf		
		Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif	10 komunitas ekraf	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah Komunitas Ekonomi kreatif	10 komunitas ekraf		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Jumlah hak Perlindungan ekonomi Kreatif	0%		Jumlah hak Perlindungan ekonomi Kreatif	0%		
		Pertumbuhan Jumlah wisatawan	14,26%	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan Jumlah wisatawan	14,26%		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		Persentasi destinasi wisata yang baik	18,75%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentasi destinasi wisata yang baik	18,75%		DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	12 dok/ 12 bulan	Program Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terbangun	2 unit		DISPERINDAKOP
				Program Stabilitas harga bahan pokok dan barang penting	Jumlah dokumen stabilitas harga bapok	12 dok		DISPERINDAKOP

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
				Program Pengembangan Expor	Jumlah calon pelaku ekspor unggulan yang terbina	2 pengusaha		DISPERINDAKOP
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah rekomendasi perizinan yang diterbitkan	150 rekom		DISPERINDAKOP
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan	1 kali		DISPERINDAKOP
				Program Standarisasi dan perlindungan konsumen	Jumlah alat UTTP yang ditera	250 uttp		DISPERINDAKOP
5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	Pertumbuhan produk olahan CPO	0	0	0			DISPERINDAKOP
		Pertumbuhan produk industri berbasis pertanian non sawit	2,40%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya pertumbuhan Industri baru	2,40%		DISPERINDAKOP
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten /Kota	Persentase pemutahiran data ikm	10%		DISPERINDAKOP

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Lokasi		DISNAKERTRANS
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang terbangun	1 Lokasi		DISNAKERTRANS
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawsan perkotaan baru yang terbentuk	1 Lokasi		DISNAKERTRANS
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Meningkatknya Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			DISNAKERTRANS
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	**PERENCANAAN**	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	0,93	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	0,93		BAPPEDALITBANG

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	0,93		Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	0,93		BAPPEDALITBANG
		Persentase konsistensi Prog RPJMD ke dalam RKPD	0,92	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Prog RPJMD ke dalam RKPD	0,92		BAPPEDALITBANG
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0,6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0,6		BAPPEDALITBANG
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	0,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	0,7		BAPPEDALITBANG
		Persentase PD dengan nilai RB baik	0,75		Persentase PD dengan nilai RB baik	0,75		BAPPEDALITBANG
2	**KEUANGAN**	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7,34%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	PERSENTASE PELAYANAN PERANGKAT DAERAH BERJALAN DENGAN BAIK	100%		BAPENDA

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Indeks pengelolaan keuangan daerah	-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	-		BKAD
		Indeks pengelolaan aset daerah	-	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks pengelolaan aset daerah	-		BKAD
3	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	0	60%	0	0	60%		BAPPEDALITBANG
4	**PENGAWASAN**	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100%		Inspektorat
		Persentase temuan BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase temuan BPK dan APIP yang selesai ditindaklanjuti	100%		Inspektorat
		Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan Peringkat minimal BB Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan Peringkat Minimal B	100%	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan Peringkat minimal BB Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan Peringkat Minimal B	100%		Inspektorat

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
5	**KEPEGAWAIAN**	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	70%		BKPSDM Kab. Paser
		Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	70%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	50%	Lebih rendah dari target RPJMD	BKPSDM Kab. Paser
		Persentase ASN dengan kompetensi dan kualifikasi Syarat Jabatan	70%		Persentase ASN dengan kompetensi dan kualifikasi Syarat Jabatan	60%	Lebih rendah dari target RPJMD	BKPSDM Kab. Paser
		Persentase pegawai berkinerja baik	100%		Persentase pegawai berkinerja baik	100%		BKPSDM Kab. Paser
6	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	70%	Program Pengembangan SDM	Persentase ASN Manajerial dan fungsional memiliki sertifikasi	70%		BKPSDM Kab. Paser
7	**SEKRETARIAT DPRD**	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	100%	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	100%		Sekretariat DPRD
8	**SEKRETARIAT DAERAH**	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70		Sekretariat Daerah

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Nilai EKPPD	2,9		Persentase PD Dengan Nilai IRB Baik	75%		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perumusan Kebijakan Pemerintahan dan Kesra Yang Ditindaklanjuti	100%		
					Nilai EKPPD	2,9		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-		
	UNSUR KEWILAYAHAN							
1	**KECAMATAN**	**Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat**	70%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70%		KECAMATAN
		Persentase PD dengan Nilai IRB Bai	75%		***Persentase PD dengan Nilai IRB Bai***	100%		KECAMATAN
		Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	70%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	70%		KECAMATAN

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70%	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%		KECAMATAN
		Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM KOORDINATOR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang diselesaikan di wilayah kecamatan	100%		KECAMATAN
		Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terseles aikan di wilayah kecamatan	100%	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum	100%		KECAMATAN
		Persentase desa yang Menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	100%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	100%		KECAMATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							
1	**URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Jumlah Demo	0%	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah Demo	0%		Kesbangpol

NO	URUSAN	KINERJA PROGRAM RPJMD	TARGET DAN SATUAN	PROGRAM RKPD	KINERJA PROGRAM RKPD	TARGET DAN SATUAN	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGIUNG JAWAB
		Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%	Program Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80%		Kesbangpol
		presentaseorganisasi masyarakat (Ormas) yang aktif	75%	program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	presentaseorganisasi masyarakat (Ormas) yang aktif	75%		Kesbangpol
		preentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindak lanjuti	100%	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	preentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindak lanjuti	100%		Kesbangpol
		Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%	Program peningkatan peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Presentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100%		Kesbangpol

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2022 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Paser. Penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 pada tahun berkenaan, dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 dan Prioritas Provinsi Kalimantan Timur serta harus mempunyai keberpihakan terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten Paser.

Program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2022 dikelompokkan menurut penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatakan kualitas kehidupan masyarakat diwajibkan melalui prestasi kerja dalam mencapai standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan dan perundangan. Sedangkan urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah (PD) terdiri dari semua program dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran aktivitas pelayanan publik sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing Perangkat Daerah (PD). Tahun 2022, masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Paser akan memiliki program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap Perangkat Daerah(PD).

Perencanaan pembangunan yang telah disusun saat ini tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Paser. Namun demikian, melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022 disusun berdasarkan hasil analisa, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. RKPD tahun 2022 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya, dijabarkan pada 35 urusan, yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non-pelayanan dasar, 7 urusan pilihan dan 5 urusan penunjang.

Matrik rencana program dan kegiatan yang diuraikan berikut ini merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Paser. Rencana program dan kegiatan tersebut dilengkapi dengan rincian rencana kebutuhan indikatif pendanaan program dan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Paser tahun anggaran 2022.

Tabel 5.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**										**395,080,839,725**	**390,633,342,425**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**239,710,073,487**	**239,710,073,487**	
1	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**304,184,200**	**304,184,200**	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										243,516,200	243,516,200	
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										10,668,000	10,668,000	
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										50,000,000	50,000,000	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**238,074,044,457**	**238,074,044,457**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										237,704,340,457	237,704,340,457	
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										369,704,000	369,704,000	
1	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**79,530,000**	**79,530,000**	
1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						Persentase Aset Barang Milik Daerah yang Terinventaris	100 Persen			79,530,000	79,530,000	
1	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**343,340,000**	**343,340,000**	
1	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						Persentase Data Kepegawaian yang Diolah	100 Persen			145,340,000	145,340,000	
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ASN yang memenuhi angka kredit jabatan	100 Persen			48,000,000	48,000,000	
1	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Persentase sekolah yang mengikuti sosialisai peraturan perundanganundangan	100 Persen			150,000,000	150,000,000	
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**519,312,370**	**519,312,370**	

1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										120,000,000	120,000,000	
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										122,739,770	122,739,770	
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										24,572,600	24,572,600	
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan										2,000,000	2,000,000	
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										250,000,000	250,000,000	
1	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**326,682,760**	**326,682,760**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										48,000,000	48,000,000	
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										278,682,760	278,682,760	
1	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**62,979,700**	**62,979,700**	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										0	0	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										45,000,000	45,000,000	
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										17,979,700	17,979,700	
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**										**154,919,623,138**	**150,472,125,838**	
1	**01**	**02**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**										**97,200,460,719**	**95,055,460,719**	
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APK SD	108,62%	Jumlah ruang kelas yang dibangun	3 unit			440,000,000	440,000,000	
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				APM SD	98%	Jumlah Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1 unit			30,000,000	0	

1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Angka Melanjutkan SD	92,3%	Jumlah ruang UKS yang dibangun	1 unit			30,000,000	0	
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Angka Putus Sekolah SD	0,9%	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	4 unit			655,000,000	30,000,000	
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				Angka Kelulusan SD	100%	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah Tersedia	16 unit			3,074,800,000	3,074,800,000	
1	01	02	2.01	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				Persentase SD Terakreditasi	57,01%	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah yang dibangun	9 unit			1,630,000,000	1,630,000,000	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas						Jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	8 unit			1,140,000,000	0	
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU yang direhabilitasi	4 unit			330,000,000	330,000,000	
1	01	02	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah ruang uks yang direhabilitasi	1 unit			30,000,000	0	
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	1 unit			30,000,000	0	
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi	1 unit			30,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah yang direhabilitasi	3 unit			230,000,000	0	
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah media pendidikan sekolah yang Terpenuhi	362 unit			3,625,000,000	3,625,000,000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa yang terpenuhi	5392 siswa			4,480,606,400	4,480,606,400	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						Jumlah siswa penerima beasiswa SD/MI	9000 orang			11,660,000	11,660,000	
1	01	02	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Presentase kelulusan siswa tingkat SD	90%			25,034,000	25,034,000	

1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar						Jumlah Satuan Pendidikan dan PTK Jenjang SD yang dievaluasi dan disupervisi	223 Sekolah			70,369,600	70,369,600	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah peserta Festival lomba seni SD, Jumlah sekolah peserta O2SN SD, Jumlah sekolah peserta lomba sains MIPA SD/MI	274			436,773,500	436,773,500	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										35,798,168,100	35,798,168,100	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										144,605,400	144,605,400	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah										279,435,600	279,435,600	
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar										44,679,008,119	44,679,008,119	
1	**01**	**02**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**										**44,848,737,369**	**42,546,240,069**	
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru										97,000,000	97,000,000	
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				Angka Melanjutkan SMP	88,1%	Jumlah ruang UKS yang dibangun	1			20,000,000	0	
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah				Angka Putus Sekolah SMP	2%	Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun	1			220,000,000	0	
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium				Angka Kelulusan SMP	100%	Jumlah Laboraturium yang dibangun	1			20,000,000	0	
1	01	02	2.02	07	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula										0	0	
1	01	02	2.02	09	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				Persentase SMP Terakreditasi	47,37%	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah yang dibangun	4			820,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya sarana dan Prasarana sekolah	4			1,440,000,000	0	

1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						jumlah ruang kelas yang direhabilitasi	3			380,000,000	0	
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah						Jumlah Ruang Guru Sekolah yang direhabilitasi	1			20,000,000	0	
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						Jumlah ruang uks yang direhabilitasi	1			20,000,000	20,000,000	
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						Jumlah ruang perpustakaan yang direhabilitasi	1 unit			20,000,000	0	
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						Jumlah laboratorium sekolah Terpeliharanya	1 unit			185,000,000	0	
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, dan penjaga sekolah yang direhabilitasi	1 unit			20,000,000	0	
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						Tepeliharanya sarana,prasarana dan utilitas sekolah	1 unit			20,000,000	20,000,000	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						Jumlah media pendidikan sekolah yang Tersedia	122 unit			1,220,000,000	1,220,000,000	
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa						Jumlah Pengadaan Perlengkapan Siswa yang terpenuhi	3589 siswa			2,862,488,000	2,862,488,000	
1	01	02	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik						Persentase kelulusan tingkat SMP	95%			231,841,100	231,841,100	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Satuan Pendidikan dan PTK Jenjang SMP yang dievaluasi dan disuvervisi	76 Sekolah			57,329,600	57,329,600	
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						Jumlah sekolah peserta FLS2N SMP/MTs, Jumlah sekolah peserta O2SN SMP, Jumlah sekolah peserta OSN SMP/MTs, Jumlah sekolah peserta sepak bola pelajar	82 sekolah			354,538,700	477,041,400	
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia	1607 orang			16,406,374,000	16,406,374,000	

1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						Jumlah calon pengawas SMP yang mengikuti seleksi administrasi dan subtansi Jumlah calon pengawas yang SMP yang didiklat Jumlah Kepala sekolah SMP yang melaksanakan diklat peningkatan kompetensi Jumlah KKG dan K3S yang dilakukan pembinaan	100 orang			70,947,000	70,947,000	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						Jumlah Kalender pendidikan yang tersusun SMP, Jumlah sekolah yang terakreditasi, Jumlah sekolah SMP yang dibina	5 dokumen, 82 sekolah, 70 sekolah			183,840,000	183,840,000	
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						Jumlah Sekolah yang mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah	82 sekolah			20,899,378,969	20,899,378,969	
1	**01**	**02**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**										**12,113,092,300**	**12,113,092,300**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah ruang kelas yang dibangun	1 unit			73,311,000	73,311,000	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						Jumlah sarana dan prasaran PAUD yang terpenuhi				0	0	
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD						Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang guru Rehabilitasi Sedang/Berat	1 unit			30,000,000	30,000,000	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD										0	0	
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD										0	0	

1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD										0	0	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD						Jumlah lembaga PAUD yang terpenuhi Pengadaan Perlengkapannya	9 PAUD			220,000,000	220,000,000	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						Jumlah kelompok PAUD yang dibina	9 PAUD			169,960,000	169,960,000	
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD						Jumlah kelompok PAUD yang dibina Persentasi satuan Pendidikan dan PTK jenjang PAUD yang dievaluasi dan di Supervisi	154 lembaga 100 lembaga			48,795,000	48,795,000	
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						Jumlah Guru PTT dan Guru Pengganti Jenjang PAUD yang tersedia	36 orang			1,775,002,300	1,775,002,300	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						PAUD yang dibayarkan Tunjangan Terpencil	36 orang			71,739,000	71,739,000	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						Persentase pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran	75%			44,990,000	44,990,000	
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD						Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar TK Negeri (BOP) Daerah Terselenggaranya Proses Belajar Mengajar TK Negeri (BOP Pusat)	10 Kecamatan 10 Kecamatan			9,679,295,000	9,679,295,000	
1	**01**	**02**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**										**757,332,750**	**757,332,750**	
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pembangunan Gedung Nonformal	1 unit			150,000,000	150,000,000	
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan						Jumlah SKB yang menyelenggarakan program paket A,B,C	10 SKB			159,829,750	159,829,750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Jumlah lembaga PAUD yang dibina	115 PAUD			9,660,000	9,660,000	

1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						Lomba PNF yang dilaksanakan	3 kali			51,843,000	51,843,000	
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan										386,000,000	386,000,000	
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**										**54,657,500**	**54,657,500**	
1	**01**	**03**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**										**54,657,500**	**54,657,500**	
1	01	03	2.02	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				Jumlah sekolah peserta lomba PAUD	9 Sekolah	Jumlah sekolah peserta lomba PAUD	9 sekolah			54,657,500	54,657,500	
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**										**396,485,600**	**396,485,600**	
1	**01**	**05**	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**15,471,000**	**15,471,000**	
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						Jumlah sekolah yang memiliki izin operasional	311 sekolah			15,471,000	15,471,000	
1	**01**	**05**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**										**381,014,600**	**381,014,600**	
1	01	05	2.02	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				Jumlah Bunda PAUD yang dibina	400 Orang	Jumlah sekolah yang memiliki izin operasional	311 sekolah			15,471,000	15,471,000	
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						Persentase Bunda PAUD yang Terbina	100 persen			365,543,600	365,543,600	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**										**859,124,200**	**859,124,200**	
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**										**75,333,800**	**75,333,800**	
2	**22**	**02**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**20,847,000**	**20,847,000**	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemajuan Kebudayaan	2000 Masyarakat			20,847,000	20,847,000	
2	**22**	**02**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**54,486,800**	**54,486,800**	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						terlaksananya informasi tentang pemajuan kebudayaan	10 Kecamatan			54,486,800	54,486,800	
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**										**192,486,500**	**192,486,500**	
2	**22**	**03**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**192,486,500**	**192,486,500**	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						terlaksananya pelestarian dan Pengembangan seni budaya	84 Lembaga			192,486,500	192,486,500	
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**										**64,782,900**	**64,782,900**	
2	**22**	**04**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**64,782,900**	**64,782,900**	
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						terlaksananya pelestarian dan pelindungan pemajuan kebudayaan	30 Objek			64,782,900	64,782,900	
2	**22**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**										**526,521,000**	**526,521,000**	
2	**22**	**06**	2.01		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**										**526,521,000**	**526,521,000**	
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						Terlaksananya Museum Sebagai Wadah Edukasi dan Rekreasi	1000 Masyarakat			79,217,000	79,217,000	
2	22	06	2.01	04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						terlaksananya pengelolaan museum dan Cagar Budaya	800 Objek			447,304,000	447,304,000	
														TOTAL	**395,939,963,925**	**391,492,466,625**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**190,296,992,479**	**196,939,257,266**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**122,705,133,813**	**122,353,648,466**	
1	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**112,000,000**	**130,000,000**	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen renstra dan renja PD yang tersusun	2 dokumen			50,000,000	55,000,000	
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA SKPD	23 dokumen			15,000,000	20,000,000	
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Jumlah Dokumen DPA	23 dokumen			42,000,000	50,000,000	
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen evaluasi yang tersusun	4 dokumen			5,000,000	5,000,000	

1	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**121,094,413,866**	**121,094,413,866**	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang tersedia	12 bulan			121,039,413,866	121,039,413,866	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UPT yang dilakukan pengujian/diverifikasi keuangan	22 unit			25,000,000	25,000,000	
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Laporan Keuangan	1 dokumen			20,000,000	20,000,000	
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Laporan Keuangan	18 dokumen			10,000,000	10,000,000	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**487,307,847**	**150,000,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						SKPD Terlayani	1 skpd			5,614,180	0	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						SKPD Terlayani	1 skpd			148,987,907	150,000,000	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						peralatan rumah tangga yang diadakan	1 jenis			25,000,000	0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						SKPD Terlayani	1 skpd			76,693,460	0	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						SKPD Terlayani	1 skpd			28,715,500	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						SKPD Terlayani	1 skpd			2,296,800	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						SKPD Terlayani	23 unit			200,000,000	0	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**22,727,500**	**0**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						SKPD Terlayani	1 skpd			22,727,500	0	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**732,450,000**	**723,000,000**	

1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						SKPD Terlayani	1 skpd			2,000,000	2,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						SKPD Terlayani	1 skpd			6,000,000	6,000,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			SKPD Terlayani	23 unit			724,450,000	715,000,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**256,234,600**	**256,234,600**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajak	26 unit			85,234,600	85,234,600	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan operasioanal yang dipelihara dan dibayar pajak dan perijinan	60 unit			151,000,000	151,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			peralatan dan Mesin yang di pelihara	5 unit			20,000,000	20,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**54,464,151,666**	**61,371,208,800**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**8,197,650,458**	**16,274,000,000**	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas										0	0	
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						Jumlah Rudin Nakes yang dibangun	3 unit			639,000,000	4,000,000,000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						Jumlah PKM yang direhabilitasi dan dipelihara	1 unit			25,000,000	0	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasyankes yang direhabilitasi dan dipelihara	12 unit			1,524,000,000	1,524,000,000	
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rudin nakes yang direhabilitasi dan dipelihara	5 unit			573,000,000	500,000,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembanguna n Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah prasarana dan pendukung Fasyankes yang diadakan	1 unit			63,000,000	1,000,000,000	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alkes/alat penunjang medik fasyankes yang diadakan	23 unit			3,092,000,000	3,000,000,000	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang diadakan	151 jenis			1,405,735,548	3,600,000,000	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis BMHP yang diadakan	55 jenis			790,914,910	2,500,000,000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah alkes/alat penunjang medik fasyankes lainnya yang dipelihara	1 jenis			85,000,000	150,000,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**45,992,437,408**	**45,097,208,800**	
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83 persen			120,000,000	150,000,000	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89 persen			50,000,000	60,000,000	
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93 persen			55,000,000	65,000,000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Presentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standar	55 persen			88,434,000	100,000,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	60 persen			96,030,208	110,000,000	
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	100%			30,000,000	40,000,000	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%			30,736,000	50,000,000	

1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%			13,843,000	20,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Persentase penduduk pada Kondisi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%			400,000,000	0	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Presentase Balita Stunting	13 persen			150,000,000	200,000,000	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah tempat kerja yang melaksanakan kesehatan kerja	25 unit			51,191,000	60,000,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	30 persen			50,060,000	60,000,000	
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Persentase pemenuhan layanan promosi kesehatan	50 persen			50,000,000	65,000,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						Persentase pemenuhan layanan kestrad, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	25 persen			65,000,000	0	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Persentase pemenuhan layanan surveilans kesehatan	90 persen			52,909,400	0	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						Persentase pemenuhan layanan kesehatan ODMK	89 persen			60,500,000	0	

1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus						Persentase pemenuhan layanan kesehatan khusus	50 persen			89,745,000	0	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Persentase pemenuhan layanan penyakit menular dan penyakit tidak menular	80 persen			392,500,000	0	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Persentase penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat	100 persen			40,900,208,800	40,917,208,800	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah tatanan yang difasilitasi	2 tatanan			20,000,000	0	
1	02	02	2.02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan						Jumlah Dokumen penelitian Kesehatan	1 Dokumen			15,000,000	0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan layanan Puskesmas	100 persen			2,935,000,000	3,200,000,000	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Jumlah Faskes yang terakreditasi	21 unit			200,000,000	0	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						Persentase KIPI yang diinvestigasi	100 persen			37,340,000	0	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						Cakupan layanan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	90 persen			38,940,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**139,684,000**	**0**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan	3 dok			124,684,000	0	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		Sistem informasi yang dikelola	1 jenis			15,000,000	0	
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**134,379,800**	**0**	

1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Laporan Pengendalian dan pengawasan	1 dok			65,846,000	0	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						jumlah dokumen	1 dok			68,533,800	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**12,829,400,000**	**12,854,400,000**	
1	**02**	**03**	2.01		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**										**75,000,000**	**80,000,000**	
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota		persentase rekomendasi izin praktik kesehatan yang ditindaklanjuti	100 persen			75,000,000	80,000,000	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**12,554,400,000**	**12,554,400,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah UPT Mendapatkan distribusi SDM Kesehatan	23 upt			12,554,400,000	12,554,400,000	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**200,000,000**	**220,000,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		jumlah SDM Kesehatan mengikuti kursus /diklat	20 orang			200,000,000	220,000,000	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**										**123,307,000**	**145,000,000**	
1	**02**	**04**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**										**13,200,000**	**15,000,000**	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Jumlah dokumen laporan pengendalian dan pengawasan	1 dokumen			13,200,000	15,000,000	
1	**02**	**04**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**										**30,720,000**	**35,000,000**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						persentase IRTP yang dilakukan pengawasan	20 persen			30,720,000	35,000,000	
1	**02**	**04**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**										**29,880,000**	**35,000,000**	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						persentase sarana TPM dan DAM yang diperiksa	70 persen			29,880,000	35,000,000	
1	**02**	**04**	2.05		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**										**24,582,000**	**30,000,000**	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		persentase makanan jajanan dan sentra jajanan yang dibina	20 persen			24,582,000	30,000,000	
1	**02**	**04**	2.06		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**										**24,925,000**	**30,000,000**	
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						persentase makan dan minuman yang diperiksa	30 persen			24,925,000	30,000,000	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										**175,000,000**	**215,000,000**	
1	**02**	**05**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**50,000,000**	**65,000,000**	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						jumlah desa/ kelurahan mendapatkan promosi kesehatan	144 desa/kel			50,000,000	65,000,000	
1	**02**	**05**	2.02		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**75,000,000**	**85,000,000**	
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						jumlah puskesmas melaksanakan promosi kesehatan	19 unit			75,000,000	85,000,000	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**50,000,000**	**65,000,000**	

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah UKBM yang diberikan bimbingan	4 unit			50,000,000	65,000,000	
														TOTAL	**190,296,992,479**	**196,939,257,266**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD Panglima Sebaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**79,184,864,364**	**73,788,833,408**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**1,303,124,364**	**2,838,833,408**	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,303,124,364**	**2,838,833,408**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang							1,229,265,000	2,757,588,108	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang							73,859,364	81,245,300	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**64,500,000,000**	**70,950,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**64,500,000,000**	**70,950,000,000**	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang							64,500,000,000	70,950,000,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**13,381,740,000**	**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**13,381,740,000**	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang							13,381,740,000	0	
														TOTAL	**79,184,864,364**	**73,788,833,408**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Perbekalan Obat dan Alkes

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**501,611,700**	**539,244,869**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**273,887,900**	**301,276,689**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**129,406,584**	**142,347,242**	

1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										41,417,808	45,559,588	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										32,000,000	35,200,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										19,650,680	21,615,748	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										43,720,000	48,092,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										29,327,000	32,259,700	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**30,000,000**	**33,000,000**	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										30,000,000	33,000,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**84,481,316**	**92,929,447**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										500,000	550,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										83,981,316	92,379,447	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**30,000,000**	**33,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										60,000,000	66,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**88,523,800**	**97,376,180**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**3,033,800**	**3,337,180**	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai										6,067,600	6,674,360	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**85,490,000**	**94,039,000**	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya										85,490,000	94,039,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**139,200,000**	**140,592,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**139,200,000**	**140,592,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar										139,200,000	140,592,000	
														TOTAL	**501,611,700**	**539,244,869**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,312,260,300**	**1,412,646,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**216,960,400**	**238,836,440**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**33,670,400**	**37,037,440**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani	15 Buah			569,600	626,560	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani	1 Tahun			12,815,800	14,097,380	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani SKPD Terlayani	33 Buah 3000 lembar			1,925,000	2,117,500	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani SKPT Terlayani	12 Kali 1 Paket			18,360,000	20,196,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**176,690,000**	**194,539,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani	20 Lembar			400,000	800,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani	12 Bulan			171,000,000	188,100,000	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			SKPD Terlayani	9 Buah			5,490,000	6,039,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**6,600,000**	**7,260,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Kendaraan Operasional yang dipelihara	1 Tahun			6,600,000	7,260,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**785,099,900**	**863,609,560**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**785,099,900**	**863,609,560**	
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Orang Yang Diperiksa	500 Sampel			20,446,000	22,490,600	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Cakupan layanan faskes lainnya	12 Bulan			754,653,900	830,118,960	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Faskes yang terakreditasi	6 Jenis Pemeriksaan			10,000,000	11,000,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**310,200,000**	**310,200,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**310,200,000**	**310,200,000**	

1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ PTT	10 Orang			310,200,000	310,200,000	
														TOTAL	**1,312,260,300**	**1,412,646,000**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPTD Rumah Sakit Pratama Batu Engau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,435,613,716**	**1,579,175,086**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**498,366,216**	**548,202,837**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**230,766,200**	**253,842,820**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase ketersediaan Alat dan Bahan Kelistrikan Bangunan Kantor	12 Bulan			11,668,700	12,835,570	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase ketersediaan anggaran untuk pengadaan perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			101,948,600	112,143,460	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase ketersediaan BBM dan Logistik kantor lainnya	12 Bulan			56,270,400	61,897,440	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan			4,869,500	5,356,450	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase kecukupan untuk biaya konsultasi dan koordinasi SKPD	12 Bulan			56,009,000	61,609,900	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**199,492,416**	**219,441,657**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			persentase cakupan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			199,492,416	219,441,657	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**68,107,600**	**74,918,360**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	12 Bulan			18,107,600	19,918,360	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			persentase pemeliharaan peralatan dan mesin	12 Bulan			50,000,000	55,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**937,247,500**	**1,030,972,249**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**610,567,500**	**671,624,249**	

1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik di Rumah Sakit RS Pratama Batu Engau sesuai Kelas Rumah Sakit	12 Bulan			110,567,500	121,624,250	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Perentase Ketersediaan Obat Generik dan Non Generik di Rumah sakit RS Pratama Batu Engau	12 Bulan			386,696,226	425,365,848	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase Ketersediaan Bahan Habis Pakai Medis di Rumah Sakit RS Pratama Batu Engau	12 Bulan			103,303,774	113,634,151	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Bulan			10,000,000	11,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembanguna n Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**326,680,000**	**359,348,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Persentase Capaian Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan			180,000,000	198,000,000	
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit										146,680,000	161,348,000	
														TOTAL	**1,435,613,716**	**1,579,175,086**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Puskesmas Tanah grogot

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembanguna n Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**2,434,081,016**	**2,677,489,118**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**483,636,355**	**531,999,991**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**256,461,315**	**282,107,447**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %			8,746,530	9,621,183	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	100 %			90,121,595	99,133,755	

1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	100 %			74,920,190	82,412,209	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %			82,673,000	90,940,300	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**174,220,250**	**191,642,275**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100 %			1,440,000	1,584,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %			172,780,250	190,058,275	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**52,954,790**	**58,250,269**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %			39,674,790	43,642,269	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 %			13,280,000	14,608,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**1,611,444,661**	**1,772,589,127**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**16,018,400**	**17,620,240**	
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 %			16,018,400	17,620,240	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1,592,281,861**	**1,751,510,047**	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100 %			46,310,000	50,941,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 %			1,461,227,916	1,607,350,707	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	100 %			57,264,845	62,991,330	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100 %			27,479,100	30,227,010	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**3,144,400**	**3,458,840**	

1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100 %			3,144,400	3,458,840	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**339,000,000**	**372,900,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**339,000,000**	**372,900,000**	
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %			339,000,000	372,900,000	
														TOTAL	**2,434,081,016**	**2,677,489,118**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPTD Puskesmas Senaken

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**852,004,750**	**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**268,325,890**	**0**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**120,174,670**	**0**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							4,212,230	0	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							20,258,040	0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							36,994,000	0	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							4,040,400	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							54,670,000	0	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**23,825,200**	**0**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							23,825,200	0	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**63,249,320**	**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							750,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							62,499,320	0	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**61,076,700**	**0**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							11,796,700	0	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							8,180,000	0	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							35,000,000	0	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							6,100,000	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**577,678,860**	**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**3,200,000**	**0**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							3,200,000	0	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**574,478,860**	**0**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							13,350,000	0	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							12,900,000	0	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							483,803,860	0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							58,300,000	0	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							6,125,000	0	
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**										**6,000,000**	**0**	
1	**02**	**05**	2.03		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**6,000,000**	**0**	

1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken							6,000,000	0	
														TOTAL	**852,004,750**	**0**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**914,100,173**	**914,100,173**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**183,994,080**	**183,994,080**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**110,746,400**	**110,746,400**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			2,480,000	2,480,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	12 Bulan			38,600,000	38,600,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			9,050,000	9,050,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan Rapat-rapat dan Koordinasi	100 %			60,616,400	60,616,400	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**19,568,000**	**19,568,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										2,150,000	2,150,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Kebutuhan listrik dan air	12 Bulan			17,418,000	17,418,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**53,679,680**	**53,679,680**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan operasional dan ambulance	12 Bulan			35,209,680	35,209,680	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	1 Tahun			8,470,000	8,470,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Tersedianya Gedung Kantor yang dipelihara	100 %			10,000,000	10,000,000	

1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**407,306,093**	**407,306,093**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**4,440,000**	**4,440,000**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Kebutuhan Kegiatan Pengambilan Obat/Vaksin	12 Bulan			4,440,000	4,440,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**402,866,093**	**402,866,093**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan			294,992,093	294,992,093	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan			107,874,000	107,874,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**322,800,000**	**322,800,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**322,800,000**	**322,800,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Terpenuhinya kebutuhan Sumber Daya Manusia	1 Tahun			322,800,000	322,800,000	
														TOTAL	**914,100,173**	**914,100,173**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPTD Puskesmas Mendik

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**okasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											**822,225,300**	**986,670,360**	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											**199,111,900**	**238,934,280**	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah											**66,547,900**	**79,857,480**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Komponen Listrik dan Penerangan kantor	12 bulan			4,804,900	5,765,880	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan			34,393,000	41,271,600	

1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya barang cetak dan penggandaan	12 bulan			5,000,000	6,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Perdin Koordinasi dan Konsultasi ke kabupaten	12 bulan			22,350,000	26,820,000	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**71,787,300**	**86,144,760**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Meubelair dan perlengkapan kantor	12 bulan			22,729,800	27,275,760	
1	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Sarana dan Peralatan Gedung kantor	12 bulan			49,057,500	58,869,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**32,575,400**	**39,090,480**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Listrik kantor	12 bulan			32,575,400	39,090,480	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**28,201,300**	**33,841,560**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										15,826,900	18,992,280	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Terspenuhinya pemeliharaan peralatan kantor	12 bulan			2,374,400	2,849,280	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung	12 bulan			10,000,000	12,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**444,813,400**	**533,776,080**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**22,173,400**	**26,608,080**	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Dana Pemeliharaan Gedung	12 bulan			22,173,400	26,608,080	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**422,640,000**	**507,168,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Dana Kapitasi JKN	12 bulan			315,000,000	378,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Perdin Rujukan Pasien dan Pelayanan Pusling	12 bulan			107,640,000	129,168,000	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**178,300,000**	**213,960,000**	

1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**162,300,000**	**194,760,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya gaji honor PTT	12 bulan			162,300,000	194,760,000	
1	**02**	**03**	2.03		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**16,000,000**	**19,200,000**	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Long Kali, Mendik			Tersedianya Perdin Pengembangan Mutu SDM	12 bulan			16,000,000	19,200,000	
														TOTAL	**822,225,300**	**986,670,360**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPTD Puskesmas Suliliran Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,723,525,999**	**1,658,899,999**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**214,226,000**	**149,600,000**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**109,826,000**	**45,200,000**	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Alat kebersihan BBM genset	12 Bulan 12 Bulan			64,626,000	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										45,200,000	45,200,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**50,400,000**	**50,400,000**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										50,400,000	50,400,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**54,000,000**	**54,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraaan puskesmas	12 Bulan			44,000,000	44,000,000	

1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya rehab bangunan puskesmas	12 Bulan			10,000,000	10,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**1,034,399,999**	**1,034,399,999**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1,034,399,999**	**1,034,399,999**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jaminan kesehatan masyarakat	12 Bulan			902,199,999	902,199,999	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terpenuhinya makan minum pasien Terpenuhinya rujukan pasien	12 Bulan 12 Bulan			132,200,000	132,200,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**474,900,000**	**474,900,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**474,900,000**	**474,900,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya kebutuhanTenaga PTT	12 Bulan			474,900,000	474,900,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
										TOTAL	**1,723,525,999**	**1,658,899,999**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Suatang Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,095,595,785**	**1,211,901,963**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**182,375,020**	**200,612,522**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**80,976,530**	**89,074,183**	

1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60 buah			5,509,690	6,060,659	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			tersedianya kebutuhan ATK tersedianya kebutuhan bbm kantor tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	12 bulan 1140 liter 180 buah			38,188,370	42,007,207	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya belanja Cetak, penggandaan,Publikasi	8410 lembar			17,608,470	19,369,317	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terlaksananya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke SKPD dan keluar daerah	12 kali/tahun			19,670,000	21,637,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**53,701,000**	**59,071,100**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya Materay 6000/10.000	71 lembar			460,100	506,110	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya Sumber daya Listrik , Air, telepon selama 12 bln	12 bulan			33,024,000	36,326,400	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk penunjang kerja	5 unit			20,216,900	22,238,590	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**47,697,490**	**52,467,239**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terlaksananya pemeliharaan rutin Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit			30,976,960	34,074,656	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terpeliharanya jaringan komputer dan software	15 unit			6,450,000	7,095,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terpeliharanya dan terawatnya kantor puskesmas	1 tahun			10,270,530	11,297,583	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**617,420,765**	**685,909,441**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**3,840,000**	**4,224,000**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPTD Puskesmas Suatang Baru

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terlaksananya Perj.Dinas Ambil Obat P2p dan Vaksin 12x, dan distribusi obat ke pusban 6x	1 tahun			3,840,000	4,224,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**613,580,765**	**681,685,441**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita di 12 Posyandu dan Lomba Balita 1x/tahun	12 bulan			0	6,746,600	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Tersedianya BHP Kantor, BHP Medis, Bahan material obat, bangunan, Jasa medik, pelatihan medik, pemeliharaan, belanja modal, perjalanan dinas (484 item)	12 bulan			528,035,765	580,839,341	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			terlaksananya Pelayanan Pengobatan umum dan rujukan, 12 kali dan 10 kss rujukan/ bulan	12 bulan			85,545,000	94,099,500	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**295,800,000**	**325,380,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**295,800,000**	**325,380,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura			Terlaksananya kegiatan honorarium sebanyak 12 orang selama 12 bulan	1 tahun			295,800,000	325,380,000	
														TOTAL	**1,095,595,785**	**1,211,901,963**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPTD Puskesmas Kerang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,370,749,613**	**1,439,287,094**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**189,387,091**	**198,856,445**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**62,038,525**	**65,140,451**	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			SKPD Terlayani	100 %			38,072,525	39,976,151	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			SKPD Terlayani	100 %			2,000,000	2,100,000	

1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			SKPD Terlayani	100 %			21,966,000	23,064,300	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**117,348,566**	**123,215,994**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			SKPD Terlayani	100 %			1,487,800	1,562,190	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan			SKPD Terlayani	100 %			59,782,566	62,771,694	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			SKPD Terlayani	100 %			56,078,200	58,882,110	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**10,000,000**	**10,500,000**	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Gedung kantor yang dipelihara	1 Unit			10,000,000	10,500,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**910,762,522**	**956,300,649**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**39,830,000**	**41,821,500**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan			Tersedianya Obat dan Vaksin di puskesmas/pusban/polindes	12 Bulan			39,830,000	41,821,500	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**870,932,522**	**914,479,149**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100 %			16,328,600	17,145,030	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan			Persentase penduduk Paser yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat	100 %			710,182,230	745,691,342	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan			Cakupan layanan Puskesmas	100 %			144,421,692	151,642,777	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**270,600,000**	**284,130,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**270,600,000**	**284,130,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Batu Engau, Kerang			Jumlah UPT Mendapatkan distribusi SDM Kesehatan/Tersedianya gaji PTT	12 Bulan			270,600,000	284,130,000	

TOTAL	**1,370,749,613**	**1,439,287,094**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPTD Puskesmas Long Kali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,184,906,030**	**1,421,600,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**180,824,030**	**213,000,000**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**85,431,450**	**101,000,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			SKPD Terlayani	1 UPTD			4,809,300	6,000,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			SKPD Terlayani	1 UPTD			43,017,150	50,000,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali							3,000,000	5,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			SKPD Terlayani	12 Bulan			34,605,000	40,000,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**68,563,280**	**72,000,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			SKPD Terlayani	1 UPTD			1,000,000	2,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										67,563,280	70,000,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**26,829,300**	**40,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										21,205,000	30,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			peralatan yang di pelihara	6 Unit			5,624,300	10,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**830,682,000**	**980,000,000**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**830,682,000**	**980,000,000**	

1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Persentase penduduk Paser yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat	100 Persen			617,400,000	680,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Cakupan layanan Puskesmas	100 Persen			213,282,000	300,000,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**173,400,000**	**228,600,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**173,400,000**	**228,600,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah UPT Mendapatkan distribusi SDM Kesehatan	1 UPTD			173,400,000	228,600,000	
														TOTAL	**1,184,906,030**	**1,421,600,000**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPTD Puskesmas Pasir Belengkong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,031,658,892**	**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**166,208,892**	**0**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**102,536,300**	**0**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			5,000,000	0	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			1,536,400	0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			36,889,900	0	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			7,960,000	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	12 Bulan			51,150,000	0	

1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**63,672,592**	**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			430,000	0	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			SKPD terlayani	1 UPTD			63,242,592	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**515,050,000**	**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**515,050,000**	**0**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			prosentase penduduk yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan masyarakat	100 %			466,200,000	0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Cakupan layanan Puskesmas	85 %			48,850,000	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**350,400,000**	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**350,400,000**	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah UPT mendapatkan distribusi SDM Kesehatan	1 UPT			350,400,000	0	
														TOTAL	**1,031,658,892**	**0**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPTD Puskesmas Kayungo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**736,273,651**	**736,273,651**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**109,427,626**	**109,427,626**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**67,019,178**	**67,019,178**	

1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Tersedianya alat tulis kantor	1 tahun			16,859,178	16,859,178	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	1 tahun			50,160,000	50,160,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**32,408,448**	**32,408,448**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Terpenuhinya listrik dan internet di puskesmas	1 tahun			32,408,448	32,408,448	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**10,000,000**	**10,000,000**	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Terpenuhinya pemeliharaan gedung puskesmas	100 %			10,000,000	10,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**375,146,025**	**375,146,025**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**375,146,025**	**375,146,025**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Tercapainya derajat kesehatan masyarakat	100 %			346,826,025	346,826,025	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat secara optimal	100 %			28,320,000	28,320,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**251,700,000**	**251,700,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**251,700,000**	**251,700,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Ikis, Long Gelang			Terpenuhinya pelayanan kesehatan pada masyarakat	1 tahun			251,700,000	251,700,000	
														TOTAL	**736,273,651**	**736,273,651**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPTD Puskesmas Sebakung Taka

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**705,659,716**	**740,942,702**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**175,564,716**	**184,342,952**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**121,453,016**	**127,525,667**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			5,312,200	5,577,810	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			16,940,400	17,787,420	

1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			5,237,216	5,499,077	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			8,400,000	8,820,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			11,203,200	11,763,360	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	12 Bulan			74,360,000	78,078,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**29,109,600**	**30,565,080**	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	23 UPTD			17,220,000	18,081,000	
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			SKPD Terlayani	22 UPTD			11,889,600	12,484,080	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**25,002,100**	**26,252,205**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			Kendaraan operasional yang dipelihara	60 Unit			25,002,100	26,252,205	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**411,895,000**	**432,489,750**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**15,655,000**	**16,437,750**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang diadakan	1 Paket			15,655,000	16,437,750	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**396,240,000**	**416,052,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			Persentase penduduk Paser yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	22 Unit			388,080,000	407,484,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			Cakupan layanan Puskesmas	22 Unit			8,160,000	8,568,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**118,200,000**	**124,110,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**118,200,000**	**124,110,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka			Jumlah UPT mendapatkan distribusi SDM Kesehatan	23 UPT			118,200,000	124,110,000	
TOTAL															**705,659,716**	**740,942,702**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPTD Puskesmas Muara Komam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,325,509,909**	**1,325,509,909**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**219,933,902**	**219,933,902**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**133,197,800**	**133,197,800**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							4,566,500	4,566,500	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							53,880,000	53,880,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							38,791,300	38,791,300	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							35,960,000	35,960,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**42,791,702**	**42,791,702**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							894,400	894,400	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							41,897,302	41,897,302	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**43,944,400**	**43,944,400**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							33,944,400	33,944,400	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							10,000,000	10,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**735,076,007**	**735,076,007**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**16,000,000**	**16,000,000**	

1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							16,000,000	16,000,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**719,076,007**	**719,076,007**	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							6,450,000	6,450,000	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							31,060,000	31,060,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							523,516,007	523,516,007	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							158,050,000	158,050,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**370,500,000**	**370,500,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**370,500,000**	**370,500,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam							370,500,000	370,500,000	
														TOTAL	**1,325,509,909**	**1,325,509,909**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPTD Puskesmas Krayan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**690,485,736**	**759,534,310**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**232,185,936**	**255,404,530**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**144,071,686**	**158,478,855**	

1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	12 bulan			8,810,000	9,691,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 persen			25,301,686	27,831,855	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan			109,960,000	120,956,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**58,021,350**	**63,823,485**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Tersedianya jasa surat menyurat	100 persen			2,000,000	2,200,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			tersedianya sumber daya air, listrik dan telepon	12 bulan			36,000,000	39,600,000	
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			TERSEDIANYA JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12 bulan			42,042,700	46,246,970	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**30,092,900**	**33,102,190**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya jasa pemelijaraan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional dan lapangan	100 persen			26,442,900	29,087,190	
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terpenuhinya Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	100 persen			10,950,000	12,045,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**368,299,800**	**405,129,780**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**16,269,800**	**17,896,780**	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100 persen			16,269,800	17,896,780	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**325,360,000**	**357,896,000**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita	80 persen			14,080,000	15,488,000	
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	98 persen			3,820,000	4,202,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	85 persen			3,620,000	3,982,000	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	85 persen			12,550,000	13,805,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya Pemenuhan layanan Promosi Kesehatan	90 persen			18,380,000	20,218,000	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Tercapainya pemenuhan layanan kestrad, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	75 persen			3,750,000	4,125,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	100 persen			3,110,000	3,421,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100 persen			525,000,000	577,500,000	
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Tercapainya pemenuhan investigasi awal kejadian yang tidak diharapkan	100 persen			2,400,000	2,640,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			Terlaksananya layanan kewaspadaan dini dan respon wabah	100 persen			2,300,000	2,530,000	
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**26,670,000**	**29,337,000**	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			terlaksananya penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	100 persen			53,340,000	58,674,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**90,000,000**	**99,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**90,000,000**	**99,000,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa			terlaksananya pengadaan tenaga dengan perjanjian kerja	12 bulan			90,000,000	99,000,000	
														TOTAL	**690,485,736**	**759,534,310**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPTD Puskesmas Lolo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**733,113,614**	**806,424,976**	

1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**205,568,414**	**226,125,256**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**102,760,294**	**113,036,324**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	100 Persen			2,538,656	2,792,522	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Tersedia Bahan Logistik Kantor	12 Bulan			37,341,738	41,075,912	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan			62,879,900	69,167,890	
1	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**14,660,120**	**16,126,132**	
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100 Persen			7,060,000	7,766,000	
1	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100 Persen			7,600,120	8,360,132	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**63,771,040**	**70,148,144**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persetanse Tersedianya Materai	100 Persen			690,000	759,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Tersedianya Sumber Komunikasi,Air dan Listrik	12 Bulan			63,081,040	69,389,144	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**24,376,960**	**26,814,656**	
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	12 Bulan			14,666,960	16,133,656	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Tersedianya Pemeliharaan dan Mesin Kantor	6 Unit			9,710,000	10,681,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**381,745,200**	**419,919,720**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**24,073,200**	**26,480,520**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Tersedianya Obat dan Vaksin Puskesmas	100 Persen			10,949,500	12,044,450	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100 Persen			13,123,700	14,436,070	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**346,020,000**	**380,622,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya							294,000,000	323,400,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Persentase Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	100 Persen			52,020,000	57,222,000	
1	**02**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**11,652,000**	**12,817,200**	
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Puskesmas	100 Persen			11,652,000	12,817,200	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**145,800,000**	**160,380,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**145,800,000**	**160,380,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya			Tersedianya Gajih Tenaga PTT/Honor Daerah	12 Bulan			145,800,000	160,380,000	
														TOTAL	**733,113,614**	**806,424,976**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPTD Puskesmas Long Ikis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**2,252,500,410**	**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**195,462,900**	**0**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**47,757,500**	**0**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya Komponen listrik /penerangan bangunan kantor	32 buah			4,704,000	0	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya bahan pembersih dan Alat pembersih	12 bulan			24,680,500	0	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya Barang cetakan Tersedianya Penggandaan/fotocopi	24 M2 5494 Lembar			3,013,000	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Kecukupan Biaya perjalanan untuk konsultasi	12 bulan			15,360,000	0	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**88,720,000**	**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya Materai	100 lembar			1,000,000	0	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan Listrik	12 bulan			87,720,000	0	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**58,985,400**	**0**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	4 unit			23,655,400	0	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya pemeliharaan kantor dan gedung kantor	3 unit			35,330,000	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**1,569,837,510**	**0**	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1,569,837,510**	**0**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Tersedianya biaya operasional pemanfaatan dana non kapitasi Tersedianya biaya operasional pemanfaatan dan kapitasi BPJS	12 bulan 12 bulan			1,369,773,510	0	

1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			kecukupan pelayanan kesehatan rujukan tersedianya makanan dan minuman pasien	240 pasien 12 bulan			200,064,000	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**487,200,000**	**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**487,200,000**	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Kecukupan tenaga kesehatan di desa	12 bulan			487,200,000	0	
														TOTAL	**2,252,500,410**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPTD Puskesmas Kuaro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,682,017,612**	**1,751,299,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**264,502,910**	**291,299,000**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**135,029,150**	**144,299,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										5,000,000	5,500,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			UPTD terlayani	1 unit			44,469,250	50,000,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			UPTD terlayani	1 unit			7,999,900	8,799,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										77,560,000	80,000,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**76,010,960**	**82,000,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang diadakan	140 lembar			1,820,000	2,000,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			UPTD terlayani	1 unit			74,190,960	80,000,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**53,462,800**	**65,000,000**	

1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas yang dipelihara	3 unit			40,000,000	50,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Peralatan yang dipelihara	14 unit			13,462,800	15,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**1,131,314,702**	**1,160,000,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**18,870,000**	**20,000,000**	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Jumlah laporan ketersediaan Obat yang dibuat	12 laporan			18,870,000	20,000,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**1,112,444,702**	**1,140,000,000**	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										973,844,702	1,000,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Cakupan Pelayanan Puskesmas	75 persen			138,600,000	140,000,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**286,200,000**	**300,000,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**286,200,000**	**300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kesehatan	9 orang			286,200,000	300,000,000	
														TOTAL	**1,682,017,612**	**1,751,299,000**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPTD Puskesmas Padang Pengrapat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**971,554,458**	**1,030,042,800**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**224,381,268**	**248,542,800**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**67,535,370**	**75,500,000**	

1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Tersedianya Komponen penerangan listrik	100 Persen			4,986,960	5,500,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Tersedianya Bahan Logistik Kantor di Puskesmas,Pusban dan Polindes	100 Persen			21,204,410	24,000,000	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Puskesmas	100 Persen			8,079,000	9,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi,rapatrapat,pertemuan	100 Persen			33,265,000	37,000,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**31,814,568**	**35,042,800**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Tersedianya Materai untuk jasa surat menyurat yang lengkap	100 Persen			948,000	1,042,800	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Tersedianya sumber daya air,telepon dan listrik	100 Persen			30,866,568	34,000,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**125,031,330**	**138,000,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya Penggantian Suku Cadang untuk kendaraan operasional	100 Persen			19,338,330	22,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terpenuhinya pemeliharaan peralatan perlengkapan gedung kantor	100 Persen			19,393,000	22,000,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100 Persen			36,300,000	39,000,000	
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Puskesmas	100 Persen			50,000,000	55,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**495,473,190**	**529,800,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**8,160,000**	**9,000,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya pengambilan Obat ke Kabupaten Terlaksananya Perjalanan dinas distribusi obat dari Puskesmas Induk	12 Kali 12 Kali			8,160,000	9,000,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**487,313,190**	**520,800,000**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya Kegiatan DDTK Apras	100 Persen			4,300,000	4,800,000	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya Posyandu Terlaksananya Survey Garam Beryodium	100 Persen 12 Bulan			35,460,000	39,000,000	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya kegiatan imunisasi dan BIAS	100 Persen			15,420,000	17,000,000	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	80 Persen			326,647,690	340,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya Rujukan Kasus Pasien Ke RSU P. Sebaya Terlaksananya Rujukan Pusban/ Polindes Ke Puskesmas Induk	12 Bulan 12 Bulan			114,370,000	132,000,000	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Meningkatnya status kesehatan masyarakat	100 Persen			38,200,000	42,000,000	
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terlaksananya Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB) Dan Abateisasi Terlaksananya Penyemprotan (Fogging Fokus)	100 Persen 100 Persen			10,100,500	12,000,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**251,700,000**	**251,700,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**251,700,000**	**251,700,000**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat			Terpenuhinya sumber daya manusia	12 Bulan			251,700,000	251,700,000	
														TOTAL	**971,554,458**	**1,030,042,800**	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Tanjung Aru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,313,900,217**	**0**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**133,023,217**	**0**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**96,375,995**	**0**	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										47,946,995	0	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			6,000,000	0	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Bulan			42,429,000	0	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**13,077,222**	**0**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan			2,200,000	0	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan			11,977,222	0	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**23,570,000**	**0**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan			20,000,000	0	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			3,570,000	0	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**677,177,000**	**0**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**34,890,000**	**0**	

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pengadaan Obat, Vaksin	12 Bulan			34,890,000	0	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**633,822,000**	**0**	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	12 Bulan			8,965,000	0	

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 UPTD Puskesmas Tanjung Aru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Bulan			472,500,000	0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Bulan			152,357,000	0	
1	**02**	**02**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**										**8,465,000**	**0**	
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12 Bulan			8,465,000	0	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**503,700,000**	**0**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**503,700,000**	**0**	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	12 Bulan			503,700,000	0	
														TOTAL	**1,313,900,217**	**0**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 UPTD Puskesmas Batukajang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**										**1,328,608,000**	**1,500,596,000**	
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**174,098,000**	**193,726,000**	
1	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**98,143,600**	**104,426,000**	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya lampu penerangan Puskesmas dan Pusban	30 buah			1,308,000	1,526,000	
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya alat dan bahan pembersih Puskesmas dan Pusban Terpenuhinya ATK Puskesmas dan Pusban	12 bulan 12 bulan			29,685,600	32,000,000	
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya kegiatan Rakor dan konsultasi kekabupaten	12 bulan			67,150,000	70,900,000	
1	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**39,404,400**	**45,100,000**	
1	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya materai	86 buah			516,000	600,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya internet Terpenuhinya listrik	12 bulan 12 bulan			38,888,400	44,500,000	
1	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**36,550,000**	**44,200,000**	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Terpenuhinya jasa pemeliharaan unit kendaraan operasional dan ambulance Terpenuhinya pajak kendaraan ambulan dan mobil operasional Terpenuhinya suku cadang kendaraan operasional dan ambulance	2 unit 2 unit 2 unit			19,400,000	22,000,000	
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya jasa service AC Puskesmas	10 unit			7,150,000	7,200,000	
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 tahun			10,000,000	15,000,000	
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**										**867,410,000**	**1,019,770,000**	
1	**02**	**02**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**17,920,000**	**20,000,000**	

1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin						Terpenuhinya kebutuhan obat, vaksin dan oksigen Puskesmas dan Pusban	12 bulan			17,920,000	20,000,000	
1	**02**	**02**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**849,490,000**	**999,770,000**	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Terlaksananya kegiatan lomba bayi dan balita sehat tingkat kecamatan	1 kegiatan			12,000,000	14,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Jumlah kasus katarak terdeteksi Terpenuhinya alat kesehatan/kedokteran habis pakai Terpenuhinya bahan obatobatan Terpenuhinya BBM rujukan(non kapitasi) Terpenuhinya cetak rekam medis Terpenuhinya honorarium pengelola anggaran Terpenuhinya jasa pelayanan medik dan sarana kesehatan Terpenuhinya jasa pelayanan medik dan sarana kesehatan NON KAPITASI Terpenuhinya kursus-kursus singkat/pelatihan Terpenuhinya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Terpenuhinya pemusnahan limbah medis Terpenuhinya perlengkapan ruang perawatan Tersedianya jasa kalibtasi Alat Kesehatan Tersedianya jasa service alat elektronik Tersedianya jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan Tersedianya perjalanan dinas luar daerah Tersedianya rakor dan konsultasi ke kabupaten	20 kasus 12 bulan 12 bulan 675 liter 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket 1 kegiatan 12 bulan 1 kegiatan 1 tahun 14 unit 1 kegiatan 3 kali 12 bulan			726,600,000	864,000,000	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan rujukan pasien ke kabupaten Terlaksananya pusling ke daerah terpencil Terpenuhinya BBM rujukan Terpenuhinya makanan dan minuman pasien rawat inap	140 kali 12 kali 2400 liter 12 bulan			110,890,000	121,770,000	
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**										**287,100,000**	**287,100,000**	
1	**02**	**03**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**										**287,100,000**	**287,100,000**	

1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Terpenuhinya gajih PTT Puskesmas	12 bulan			287,100,000	287,100,000	
														TOTAL	**1,328,608,000**	**1,500,596,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										127,615,368,510	74,340,715,000	
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										17,188,691,738	18,476,000,000	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										135,000,000	156,000,000	
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang							70,000,000	70,000,000	
1	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										10,000,000	12,000,000	
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										10,000,000	12,000,000	
1	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										25,000,000	30,000,000	
1	03	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD										10,000,000	12,000,000	
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										20,000,000	25,000,000	
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat										25,000,000	30,000,000	

					Daerah												
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,289,934,141	10,515,000,000	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								19,549,963,962	20,000,000,000	
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang								502,906,600	500,000,000	
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Keuangan SKPD	107 0rang				12,045,560	15,000,000	
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											30,000,000	30,000,000	
1	03	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	2 kali				30,000,000	30,000,000	
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											10,000,000	10,000,000	
1	03	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	3 kali				10,000,000	10,000,000	
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											404,000,000	405,000,000	
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Umum Pada SKPD	4 unit				69,000,000	60,000,000	
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											65,000,000	70,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										20,000,000	25,000,000	
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Adiministrasi Umum Pada SKPD	12 Bulan			250,000,000	250,000,000	
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										6,174,030,600	7,200,000,000	
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										6,174,030,600	7,200,000,000	
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										145,726,997	160,000,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	10 unit			145,726,997	160,000,000	
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										900,000,000	0	
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dukungan terhadap kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	6 gedung			0	0	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										10,965,075,340	4,036,800,000	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										9,215,075,340	2,886,800,000	
1	03	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya										0	0	
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi										800,000,000	800,000,000	

					Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai											
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota								1 Dokumen		1,286,800,000	1,286,800,000	
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				Prosentase kawasan yang terkendali oleh infrastruktur sumber daya air	10%					2,548,275,340	0	
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot							0	800,000,000	
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya										4,580,000,000	0	
1	03	02	2.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir										0	0	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										1,750,000,000	1,150,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,150,000,000	1,150,000,000	
1	03	02	2.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa										600,000,000	0	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										6,047,600,000	3,750,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										6,047,600,000	3,750,000,000	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan						Jumlah dokumen	1 Dokumen			620,000,000	750,000,000	

					Teknis SPAM											
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan						Jumlah Dokumen	2 Dokumen			372,600,000	0
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Jumlah Dokumen	7 Dokumen			3,230,000,000	2,000,000,000
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan										0	0
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan										0	0
1	03	03	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan						Jumlah Dokumen	8 Dokumen			1,825,000,000	1,000,000,000
1	03	03	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan										0	0
1	03	03	2.01	21	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan										0	0
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL										1,000,000,000	1,000,000,000
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota										1,000,000,000	1,000,000,000
1	03	04	2.01	06	Penyediaan Sarana Persampahan										1,000,000,000	1,000,000,000
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										385,000,000	500,000,000
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										385,000,000	500,000,000

1	03	05	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah sarana sanitasi yang dibangun				Jumlah dokumen	1 Dokumen	385,000,000	500,000,000	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										335,000,000	0	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										335,000,000	0	
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan										0	0	
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan				Panjang saluran drainase yang dikelola	10 .000 Meter	Jumlah Dokumen	2 Dokumen			335,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	06	2.01	13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan										0	0	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										31,587,847,827	50,000,000	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										31,587,847,827	50,000,000	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung	2 Dokumen	Jumlah Rekomendasi IMB yang diterbitkan	50 rekomendasi			30,000,000	50,000,000	

1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen	2 Dokumen			31,557,847,827	0	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										57,329,200,000	43,463,040,000	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										57,329,200,000	43,463,040,000	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	400 titik			642,720,000	642,720,000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan										0	0	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	50 Km	Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	20 km			28,306,160,000	24,000,000,000	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	1 km			820,320,000	820,320,000	
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	20 km			2,400,000,000	3,000,000,000	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	10 meter			15,035,000,000	6,000,000,000	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan						Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	5 unit			8,125,000,000	6,000,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

					Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Jalan Kabupaten SKPD	60 meter			2,000,000,000	3,000,000,000	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI										640,400,000	814,875,000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi										357,600,000	414,875,000	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang terlatih dan bersertifikat.	250 Orang	Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50 orang			206,975,000	250,000,000	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	75 orang			150,625,000	164,875,000	
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										113,350,000	200,000,000	
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang	Jumlah Dokumen laporan Kegiatan Penyelenggaraan SIPJAKI	1 Dokumen	Dukungan terhadap kelancaran Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi	3 dokumen			113,350,000	200,000,000	
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi										169,450,000	200,000,000	
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Jumlah Dokumen Pelaporan Pengawasan dan penyelenggaraan jasa konstruksi	2 Dokumen	Jumlah pelaksanaan Pengawasan Kegiatan infrastruktur dan Masyarakat dalam lingkup Bina Jasa Konstruksi	2 Dokumen			169,450,000	200,000,000	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										2,136,553,605	2,250,000,000	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota										1,152,542,800	1,200,000,000	
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok			1,140,108,800	1,200,000,000	

					Penetapan RTRW Kabupaten/Kota											
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi dan Evaluasi Dokumen RDTR dan PZ Kabupaten/Kota	2 Dok			1,164,976,800	1,200,000,000	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										464,337,200	500,000,000	
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Revisi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dok			92,638,200	100,000,000	
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi dan Evaluasi Dokumen RDTR dan PZ Kabupaten/Kota	1 Dok			371,699,000	400,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										331,178,405	350,000,000	
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan dan Dokumen Database Tata Ruang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengawasan Pemanfaatan Ruang	1 Dok			186,301,200	200,000,000	
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen pelaporan kegiatan dan Dokumen Database Tata Ruang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Survey dan Pemetaan	1 Dok			144,877,205	150,000,000	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										188,495,200	200,000,000	

1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen laporan penataan ruang	1 Dokumen	Jumlah Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	25 Rapat			188,495,200	200,000,000	
														TOTAL	128,515,368,510	74,340,715,000	

Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.00.0039 UPTD Perkantoran Gentung Temiang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**										**1,799,224,660**	**2,000,000,000**	
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**1,799,224,660**	**2,000,000,000**	
1	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,799,224,660**	**2,000,000,000**	
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot							1,799,224,660	2,000,000,000	
TOTAL															**1,799,224,660**	**2,000,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**										**226,651,117,312**	**29,397,208,083**	
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8,923,856,032**	**9,351,568,833**	
1	**04**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**156,135,880**	**163,942,674**	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						dokumen perencanaan DPKPP kab paser yang tersusun	1 dokumen			66,997,600	70,347,480	
1	04	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						dokumen pelaporan DPKPP kab paser yang tersusun	1 dokumen			7,172,440	7,531,062	
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah DPKPP kab paser yang tersedia	1 dokumen			163,931,680	172,128,264	
1	**04**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,850,004,741**	**8,226,784,977**	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			7,038,644,452	7,390,576,674	
1	04	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Tersedianya honorarium pengelola keuangan DPKPP kab paser	12 bulan			811,360,289	836,208,303	
1	**04**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**640,020,026**	**669,261,028**	

1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah ruang yang disediakan komponen instalasi listrik	18 ruangan			4,020,500	4,221,525	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah ruangan yang mendapat peralatan dan perlengkapan	18 ruangan			191,423,516	200,994,692	
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						tersedianya ATK peralatan kebersihan dan bahan pembersih	18 ruangan			153,259,710	158,162,696	
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan	20000 lembar			18,256,700	19,169,535	
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						jumlah bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	480 exemplar			4,593,600	4,823,280	
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah yang dilakukan	1 tahun			268,466,000	281,889,300	
1	**04**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**161,780,385**	**169,869,404**	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Persentase pelayanan administrasi perkantoran berjalan baik	100 %			1,450,000	1,522,500	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	5 lokasi			160,330,385	168,346,904	
1	**04**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**115,915,000**	**121,710,750**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						jumlaj kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan	10 unit			104,200,000	109,410,000	
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan kantor yang dipelihara	20 unit			11,715,000	12,300,750	
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**										**1,169,358,800**	**1,227,826,740**	
1	**04**	**02**	2.01		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**										**121,997,000**	**128,096,850**	
1	04	02	2.01	05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				Dokumen pendataan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah yang terbangun	1 Dokumen			121,997,000	128,096,850	
1	**04**	**02**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**										**984,000,000**	**1,033,200,000**	

1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	13 Unit	Jumlah Rumah Korban Bencana yang di Rehabilitasi	16 Unit			421,060,000	442,113,000	
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						Jumlah Rumah Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah yang terbangun	10 Unit			562,940,000	591,087,000	
1	**04**	**02**	2.06		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**										**63,361,800**	**66,529,890**	
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait penyediaan, pembangunan dan pengembangan perumahan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi Yang Dilakukan	1 Dokumen			63,361,800	66,529,890	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**										**4,045,053,900**	**4,247,306,595**	
1	**04**	**03**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**										**287,800,800**	**302,190,840**	
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				Jumlah Dokumen Regulasi Sektor Perumahan dan Kawasan permukiman yang disusun	1 Dokumen	Jumlah Peraturan Bupati Yang Diterbitkan	2 Dokumen			287,800,800	302,190,840	
1	**04**	**03**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**										**3,757,253,100**	**3,945,115,755**	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				Luasan kawasan kumuh yang tertangani	22,45 Ha	Jumlah rumah tidak layak huni di kawasan permukimahan kumuh di bawah 10 Ha yang ditingkatkan kualitasnya	200 Unit			1,176,584,200	1,235,413,410	
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh						Panjang jalan di lingkungan permukiman kumuh yang tertangani	7.260 Meter			2,580,668,900	2,709,702,345	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**										**7,546,721,200**	**7,924,057,260**	
1	**04**	**04**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**										**7,546,721,200**	**7,924,057,260**	
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani di luar kawasan kumuh perkotaan	85,95%	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan permukimahan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha	500 Unit			7,546,721,200	7,924,057,260	
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**										**204,966,127,380**	**6,646,448,655**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

1	**04**	**05**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**										**204,966,127,380**	**6,646,448,655**	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU di perkotaan	85,95%	Jumlah dokumen perencanaan penyediaan PSU yang disusun	1 Dokumen			592,905,800	622,551,090	
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				Cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU di perdesaan	37,52%	Panjang jalan di lingkungan perumahan yang ditangani	60.400 Meter			204,373,221,580	6,023,897,565	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**										**9,068,735,000**	**9,522,171,750**	
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**										**373,066,000**	**391,719,300**	
2	**10**	**04**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**373,066,000**	**391,719,300**	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan	4 Kasus	Jumlah dokumen inventarisasi sengketa, konflik dan perkara yang disusun	1 Dokumen			200,916,000	210,961,800	
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mediasi sengketa pertanahan yang tertangani	4 Kasus			272,608,000	286,238,400	
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**										**8,552,602,000**	**8,980,232,100**	
2	**10**	**05**	2.01		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**8,552,602,000**	**8,980,232,100**	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah	3 Lokasi	Jumlah dokumen penetapan daftar masyarakat penerima santunan	3 Dokumen			46,680,000	49,014,000	
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						jumlah lokasi penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah	3 Lokasi			8,505,922,000	8,931,218,100	
2	**10**	**07**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**										**71,304,000**	**74,869,200**	
2	**10**	**07**	2.01		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**71,304,000**	**74,869,200**	
2	10	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen koordinasi dalam rangka pengukuhan tanah ulayat	1 Dokumen	Jumlah dokumen koordinasi dalam rangka pengukuhan tanah ulayat	1 Dokumen			71,304,000	74,869,200	
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**										**71,763,000**	**75,351,150**	
2	**10**	**10**	2.01		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**										**71,763,000**	**75,351,150**	

2	10	10	2.01	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi yang dilakukan pemetaan zona nilai tanah	1 Kecamatan	Jumlah dokumen koordinasi hasil pemetaan zona nilai tanah yang disusun	1 Dokumen			71,763,000	75,351,150	
														TOTAL	**235,719,852,312**	**38,919,379,833**	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.00.0000 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.00.0000 Satuan Polisi Pamong Praja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**13,567,041,976**	**15,350,071,445,470**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**10,775,108,994**	**15,343,854,677,670**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**28,475,000**	**32,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										11,385,000	14,000,000	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										17,090,000	18,000,000	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**10,394,996,444**	**15,342,624,921,670**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Tunjangan dan Gaji ASN	14 Bulan			10,296,869,040	15,342,525,921,670	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										98,127,404	99,000,000	
1	**05**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**50,643,500**	**461,000,000**	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						jumlah pakaian dinas Satpol PP dan Linmas	149 steell			0	300,000,000	
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Kegiatan Sosialisasi Perundang undangan	1 Kegiatan			25,000,000	71,000,000	
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimteek	50 orang			25,643,500	90,000,000	
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**159,815,250**	**392,906,000**	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						pengadaan perlengkapan dn perlengkapan kantor	2 unit			20,000,000	72,008,400	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Perlengkapan Kebersihan yang terlengkapi	5 jenis			1,000,000	8,500,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										68,719,250	70,000,000	

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			6,500,000	9,650,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan										3,596,000	36,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah rapat Koordinasi Yg dilaksanakan	4 kali			60,000,000	196,747,600	
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**79,178,800**	**96,000,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Materai	180 lbr			1,800,000	18,000,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										77,378,800	78,000,000	
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**62,000,000**	**247,850,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Pemeliharaan kendaraan Dinas JAbatan	1 unit			0	20,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan dinas yang di pelihara	8 Unit			60,000,000	217,850,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan Mesin yang di pelihara	2 unit			2,000,000	10,000,000	
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**2,791,932,982**	**6,216,767,800**	
1	**05**	**02**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**316,289,482**	**1,044,767,800**	
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						Pengawalan Bupati dan Wakil Bupati dan Pejabat daerah lainnya	100 persen			55,000,000	105,500,000	

1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						Jumlah pihak terkait yang tertib perda,jumlah penanganan gangguan keamanan	100 persen			58,113,482	130,122,800	
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						terlaksananya koordinasi kegiatan pengawasan,pengendalian,d an evaluasi kegiatan satpol pp	10 kecamatan			16,512,000	165,993,000	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah Oprasional Linmas dan Kesiapsiagaan Linmas Jumlah PAM Pilkades	10 laporan 24 kegiatan 2 Kecamatan			101,434,000	208,000,000	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia						terlaksananya penanganan tugas yang bernuansa HAM	50 orang			30,230,000	294,452,000	
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Terlaksananya kegiatan dakam mengantisipasi ancaman gangguan keamanan yang berpotensi menimbulkan konflik agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan di masyarakat	100 persen			41,880,000	75,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						Terjaganya Keautentikan,Keutuhan, keamanan dan keselamatan arsif stATIS	100 pERSEN			13,120,000	65,700,000	
1	**05**	**02**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**										**2,455,643,500**	**5,080,000,000**	
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Jumlah Peserta Pengawasan Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang undangan	1 Kegiatan			20,000,000	2,400,000,000	
1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						Tertibnya Perda dan perkada	100 persen			2,303,643,500	2,500,000,000	

1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota						melaksanakan Penegakan tindak pelanggaran perda kabupaten paser	50 tersangka			132,000,000	180,000,000	
1	**05**	**02**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**										**20,000,000**	**92,000,000**	
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						Jumlah PPNS yang Mengikuti Pendidikan	1 orang			20,000,000	92,000,000	
														TOTAL	**13,567,041,976**	**15,350,071,445,470**	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2022

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**7,173,907,420**	**8,786,200,000**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,641,160,720**	**6,831,200,000**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**20,896,600**	**30,000,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			10,041,600	15,000,000	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen Laporan Kinerja (LKJiP, Evaluasi Renja, SPIP)	3 Dokumen			10,855,000	15,000,000	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,043,122,720**	**6,080,000,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						daftar gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan			4,968,080,080	6,000,000,000	
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Laporan Keuangan	15 dokumen			75,042,640	80,000,000	
1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**228,787,000**	**250,000,000**	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1. Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2. Jumlah jenis alat tuliskantor yang disediakan	0 item 38 jenis			30,000,000	35,000,000	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						tersedianya bahan cetak dan penggandaan	12 Bulan			10,000,000	15,000,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	40 kali			188,787,000	200,000,000	
1	**05**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**124,534,400**	**200,000,000**	

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						Jumlah Mebeleur kantor yang tersedia	14 unit			40,013,200	100,000,000	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 unit			84,521,200	100,000,000	
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**50,320,000**	**61,200,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai	100 lembar			1,000,000	1,200,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan	12 bulan			49,320,000	60,000,000	
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**173,500,000**	**210,000,000**	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	11 unit			173,500,000	210,000,000	
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**										**1,532,746,700**	**1,955,000,000**	
1	**05**	**04**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**1,118,276,200**	**1,300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Prosentase Kasus kebakaran, Penyelamatan dan Non kebakaran Yang Ditangani	100%	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi yang ditangani	100 %			995,595,400	1,100,000,000	
1	05	04	2.01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						Jumlah Peralatan Pemadam Kebakaran dan pelindung diri yang sesuai satnadar	4 unit			122,680,800	200,000,000	
1	**05**	**04**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**										**139,157,000**	**180,000,000**	
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						Jumlah MKKG yang di Awasi dan diregestrasi	20 %			113,772,000	150,000,000	
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						Optimalisasi fungsi secara tranparan proteksiu sesuai standart teknis keselamatan gedung	20 %			25,385,000	30,000,000	
1	**05**	**04**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**										**203,517,500**	**400,000,000**	

1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						Peningkatan Pemahaman terhadap penbcegahan dan penyelamatan kebakaran di seluruh wilayah Kabupaten Paser	10 Kecamatan			46,560,000	100,000,000	
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						Terbentuknya Balakar di setiap wilayah Desa dan Kelurahan	56 Orang			51,690,000	100,000,000	
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana						Tersedianya Sarana Prasarana penanggulangan Kebakaran	50 Unit			105,267,500	200,000,000	
1	**05**	**04**	2.05		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**										**71,796,000**	**75,000,000**	
1	05	04	2.05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						Jumlah Petugas Sesuai Standarisasi Permendagri	2 orang			71,796,000	75,000,000	
														TOTAL	**7,173,907,420**	**8,786,200,000**	

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**										**7,804,647,034**	**10,741,368,327**	
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,995,426,540**	**7,151,101,400**	
1	**05**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**60,605,587**	**66,675,000**	
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Renja Bappeda yang tersusun tepat waktu, Dokumen Renstra Bappeda yang tersusun (Dokumen)	16 buku			19,159,910	21,075,000	
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen SPIP, Evaluasi Renja, Laporan LKJiP yang tersusun	17 Buku			41,445,677	45,600,000	
1	**05**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,474,693,766**	**6,576,663,000**	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	14 bulan			5,244,339,126	6,342,380,000	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			pembayaran jasa administrasi keuangan	12 bulan			230,354,640	234,283,000	

1	**05**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**192,594,286**	**213,478,400**	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Komponen instalasi Listrik	1 bangun			2,491,423	2,740,000	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	11 unit			50,749,902	60,222,000	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan) & kebutuhan ATK (bulan)	12 bulan			55,741,180	58,544,400	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan (bulan)	12 bulan			9,638,497	10,602,000	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah bahan bacaan surat kabar/koran	500 expl			3,530,054	3,883,000	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			rapat-rapat koordinasi & konsultasi yg di laksanakan (bulan)	12 bulan			70,443,230	77,487,000	
1	**05**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**87,643,763**	**96,408,000**	
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Materai yang disediakan	60 lembar			567,600	624,300	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	12 bulan			87,076,163	95,783,700	
1	**05**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**179,889,138**	**197,877,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			kendaraan dinas operasional kantor yang terpelihara (unit)	11 unit			143,884,719	158,273,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Kendaraan dinas operasional yg terbayarkan perijinannya (unit)	11 unit			25,300,000	27,830,000	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			peralatan kantor yang terpelihara (unit)	31 unit			10,704,419	11,774,000	
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**										**1,809,220,494**	**3,590,266,927**	

1	**05**	**03**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**										**639,158,208**	**1,193,437,927**	
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah monitoring daerah rawan bencana	15 Lokasi			267,300,000	246,518,987	
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah monitoring daerah pasca bencana	10 Kecamatan			271,858,208	591,838,940	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			jumlah peserta pelatihan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat	70 anggota			100,000,000	355,080,000	
1	**05**	**03**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**										**1,170,062,286**	**2,396,829,000**	
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			presentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 persen			870,272,640	1,461,829,000	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			persentase (%) Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana	100 persen			299,789,646	935,000,000	
														TOTAL	**7,804,647,034**	**10,741,368,327**	

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.00.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.00.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**8,836,977,201**	**9,730,941,502**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,957,863,471**	**7,645,602,999**	
1	**06**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**146,752,090**	**159,418,300**	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang disusun	1 Dokumen			67,481,090	71,823,300	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	2 Dokumen			5,963,000	7,507,700	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	2 Dokumen			2,021,000	2,221,000	

1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi SKPD yang disusun	1 Dokumen			26,077,000	28,135,300	
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen			45,210,000	49,731,000	
1	**06**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,073,326,717**	**6,677,566,069**	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	14 Bulan			5,987,489,617	6,586,238,569	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian Keuangan SKPD yang di Verifikasi	1 Dokumen			45,048,000	49,552,800	
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan Keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen			40,789,100	41,774,700	
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**302,895,000**	**330,992,000**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	12 Bulan			1,497,000	1,646,700	
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	1 Unit			22,143,600	24,357,600	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan			27,962,000	30,758,200	
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	12 Bulan			17,731,400	18,731,400	
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Persentase Rapat Rapat Koordinasi	100 %			233,561,000	255,498,100	
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**386,417,164**	**425,058,880**	

1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Jumlah Materai yang dibutuhkan	150 Lembar			1,500,000	1,650,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan			32,635,180	35,898,698	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan	12 Bulan			352,281,984	387,510,182	
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**48,472,500**	**52,567,750**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan	6 Unit			42,752,500	44,827,750	
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	7 Unit			5,720,000	7,740,000	
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**										**305,318,900**	**335,850,790**	
1	**06**	**02**	2.01		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**										**84,974,900**	**93,472,390**	
1	06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi	10 KK	Jumlah warga KAT yang mendapat Fasilitasi Pemberdayaan Sosial	10 KK			96,455,300	106,100,830	
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah warga KAT yang mendapatkan pembinaan dan sosialisasi	10 KK	Jumlah Warga KAT yang mendapatkan Pendampingan dan Peningkatan Kapasitas Sosial	10 KK			73,494,500	80,843,950	
1	**06**	**02**	2.02		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**57,483,000**	**63,231,300**	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengumpulkan sumbangan	20 Orang	Jumlah Pelaku Usaha, BUMN dan BUMD yang mengikuti Sosialisasi	20 Orang			114,966,000	126,462,600	
1	**06**	**02**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**										**162,861,000**	**179,147,100**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan	10 Orang	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mengikuti Bimbingan	10 Orang			51,264,000	56,390,400	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan	10 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang mengikuti Bimbingan	10 Orang			96,822,000	106,504,200	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan	20 Orang	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat yang mengikuti Bimbingan	20 Orang			132,052,000	145,257,200	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta PSKS yang mengikuti bimbingan atau pelatihan	10 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mengikuti Bimbingan	10 Orang			45,584,000	50,142,400	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**395,146,830**	**437,211,413**	
1	**06**	**04**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**										**182,498,680**	**203,298,448**	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang menerima Permakanan	15 Orang			25,959,000	28,554,900	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah Penyandang Disabilitas yang menerima Alat Bantu	33 Orang			112,236,680	126,010,248	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang	100%	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	15 Orang			30,688,500	33,757,350	

									terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti							
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya di Luar Panti	100%	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usai Terlantar serta Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan Bimbingan Sosial	15 Orang			13,614,500	14,975,950	
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**										**212,648,150**	**233,912,965**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Perbekalan Kesehatan	6 Orang			32,640,150	35,904,165	
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	45 Orang			26,915,000	29,606,500	
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Reunifikasi Keluarga	15 Orang			41,844,000	46,028,400	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Rujukan	18 Orang			103,600,000	113,960,000	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS Lainnya BUkan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan	1 Lembaga			7,649,000	8,413,900	
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**										**641,078,000**	**705,109,300**	

1	**06**	**05**	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**										**50,000,000**	**55,000,000**	
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak Terlantar yang di jangkau	3 Orang			20,000,000	22,000,000	
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak Terlantar yang di rujuk	3 Orang			20,000,000	22,000,000	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anak Terlantar yang di pantau pelaksanaan pemeliharaan	3 Orang			10,000,000	11,000,000	
1	**06**	**05**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**										**591,078,000**	**650,109,300**	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Fakir Miskin yang ter data	1 Dokumen			99,256,000	119,681,100	
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data Fakir Miskin yang di Kelola	1 Dokumen			301,134,000	331,247,400	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen			141,992,000	145,615,200	
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Bantuan Sosial Pengembangan Masyarakat	1 Dokumen			48,696,000	53,565,600	
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**										**408,716,000**	**461,577,600**	
1	**06**	**06**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**										**348,072,000**	**394,869,200**	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan bantuan Pangan	165 KK			302,460,000	356,686,000	

1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapat bantuan sandang	15 Orang			309,362,000	340,298,200	
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok rentan yang yang dilayani/ditangani	20 Orang			84,322,000	92,754,200	
1	**06**	**06**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**										**60,644,000**	**66,708,400**	
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialiasi Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	20 Orang			55,029,000	60,531,900	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Taruna Siaga Bencana yang mengikuti Sosialisasi	40 Orang			33,129,500	36,442,450	
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**										**128,854,000**	**145,589,400**	
1	**06**	**07**	2.01		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**										**128,854,000**	**145,589,400**	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Makam Pahlawan yang di pelihara	1 Lokasi			257,708,000	291,178,800	
														TOTAL	**8,836,977,201**	**9,730,941,502**	

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.00.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.00.0037 UPTD Pelkesos Bulau Sayang

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**										**740,350,412**	**1,281,273,522**	
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**200,778,012**	**695,448,502**	
1	**06**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**22,845,700**	**26,387,130**	
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik yang dibutuhkan	12 Bulan			3,466,600	4,946,600	

1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Bulan			19,379,100	21,440,530	
1	**06**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**158,282,912**	**648,152,032**	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kebutuhan telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan			47,882,912	526,712,032	
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Administrasi Umum Kantor yang di bayar	12 Bulan			110,400,000	121,440,000	
1	**06**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**19,649,400**	**20,909,340**	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang di pelihara	1 Unit			19,649,400	20,909,340	
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**										**539,572,400**	**585,825,020**	
1	**06**	**04**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**										**539,572,400**	**585,825,020**	
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS yang mendapatkan Permakanan	6 Orang			482,917,000	523,504,080	
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMKS yang terlayani	15 Orang			56,655,400	62,320,940	
														TOTAL	**740,350,412**	**1,281,273,522**	

Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sub Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**										**8,654,257,578**	**9,408,113,735**	

2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**7,599,735,517**	**8,275,639,468**	
2	**07**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**117,203,020**	**128,923,322**	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersusunnya dokumen Rentra, Renja, Statistik dan Satu Data	4 dokumen			107,105,020	117,815,522	
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokumen			5,500,000	6,050,000	
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen			4,598,000	5,057,800	
2	**07**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,366,678,020**	**7,003,345,822**	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			6,311,678,020	6,942,845,822	
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Terpenuhinya pembayaran penatausahaan keuangan	12 bulan			55,000,000	60,500,000	
2	**07**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**149,800,287**	**164,780,315**	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya bahan komponen listrik/penerangan	12 bulan			1,919,604	2,111,564	
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			37,516,160	41,267,776	
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan			38,500,000	42,350,000	
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			11,364,523	12,500,975	
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan			60,500,000	66,550,000	
2	**07**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**905,554,190**	**914,790,009**	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersediannya jasa surat menyurat	12 bulan			758,670	834,537	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			87,595,520	96,755,472	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan			817,200,000	817,200,000	
2	**07**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**60,500,000**	**63,800,000**	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Tersedianya jasa pemeliharaan , pajak dan perizinan kendaraan operasional/lapangan	3 Unit			27,500,000	27,500,000	
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Terlaksananya pemeliharaan peralatan mesin lainnya	12 bulan			16,500,000	18,150,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	12 bulan			16,500,000	18,150,000	
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**										**21,002,000**	**23,102,200**	
2	**07**	**02**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**										**21,002,000**	**23,102,200**	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan	1 dokumen			21,002,000	23,102,200	
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**										**544,161,945**	**598,578,139**	
2	**07**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**										**314,526,664**	**345,979,330**	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	16 Orang			314,526,664	345,979,330	
2	**07**	**03**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**										**84,881,000**	**93,369,100**	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta						Jumlah pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8 Lembaga			84,881,000	93,369,100	
2	**07**	**03**	2.03		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**										**59,659,000**	**65,624,900**	
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi						Jumlah tenaga yang menangani LPTKS	1 Orang			59,659,000	65,624,900	
2	**07**	**03**	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**										**51,834,000**	**57,017,400**	
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktivitas	5 Perusahaan			51,834,000	57,017,400	
2	**07**	**03**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**33,261,281**	**36,587,409**	
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						Jumlah pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 Orang			33,261,281	36,587,409	
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**										**271,105,732**	**270,716,305**	
2	**07**	**04**	2.01		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**										**104,915,852**	**87,907,437**	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja						Jumlah Pelayanan Antar Kerja kepada Pencari Kerja	500 Orang			28,082,160	30,890,376	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						Jumlah pencari kerja yang mengikuti Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	5 SMK			24,636,532	27,100,185	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja						Jumlah pencari kerja yang mendapatkan keterampilan	30 Orang			52,197,160	29,916,876	

2	**07**	**04**	2.02		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**27,231,160**	**29,954,276**	
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						Jumlah pengawasan dan pengendalian LPTKS	7 LPTKS			27,231,160	29,954,276	
2	**07**	**04**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**										**106,389,320**	**117,028,252**	
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						Terlaksanaya pemeliharaan dan operasional aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Aplikasi			72,658,320	79,924,152	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						Jumlah pelayanan Informasi Lowongan Kerja	50 Lowongan			33,731,000	37,104,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**07**	**04**	2.05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**32,569,400**	**35,826,340**	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan rekomendasi perpanjangan IMTA	10 Orang			32,569,400	35,826,340	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**										**218,252,384**	**240,077,623**	
2	**07**	**05**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**82,412,160**	**90,653,376**	
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	40 Perusahaan			15,121,000	16,633,100	
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah didaftarkan	40 Perusahaan			15,271,000	16,798,100	
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Perusahaan yang didata dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	40 Perusahaan			52,020,160	57,222,176	
2	**07**	**05**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**										**135,840,224**	**149,424,247**	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah pencegahan kasus perselisihan hubungan industrial di Perusahaan yang terselesaikan	40 kasus			59,955,797	65,951,377	

2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah kasus yang perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan	40 kasus			27,794,000	30,573,400	
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah verifikasi dan rekapitulasi Keanggotaam pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	40 Verifikasi			25,050,000	27,555,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah operasional Lembaga Kerjasama Tripartit daerah Kabupaten/Kota	40 Perusahaan			23,040,427	25,344,470	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**										**584,832,000**	**643,315,200**	
3	**32**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**										**144,832,000**	**159,315,200**	
3	**32**	**02**	2.01		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**										**144,832,000**	**159,315,200**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						Jumlah calon lokasi transmigrasi yang teridentifikasi	1 kawasan			85,000,000	93,500,000	
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						Jumlah penyelesaian permasalahan lahan dan penerbitan sertifikat	1 Lokasi			59,832,000	65,815,200	
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**										**140,000,000**	**154,000,000**	
3	**32**	**03**	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**140,000,000**	**154,000,000**	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi	2 daerah Asal			60,000,000	66,000,000	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	1 Lokasi			80,000,000	88,000,000	

3	**32**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**										**300,000,000**	**330,000,000**	
3	**32**	**04**	2.01		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**										**300,000,000**	**330,000,000**	
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Jumlah SDM yang diberikan pembinaan kemandirian pada satuan pemukiman	55 KK			100,000,000	110,000,000	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Jumlah Lokasi yang masuk dalam perencanaan	2 Lokasi			200,000,000	220,000,000	
														TOTAL	**9,239,089,578**	**10,051,428,935**	

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.00.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.00.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**9,143,310,041**	**10,351,357,427**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8,042,898,041**	**8,827,697,427**	
2	**08**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**179,393,400**	**197,332,740**	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data Sektor DPPKBPPPA Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DAK,Bantkeu Prov) yang tersedia dari Hasil Monitoring, Evaluasi dan Laporan Seluruh Kegiatan DPPKBPPPA Jumlah Dokumen RENJA Perangkat Daerah yang Tersusun	1 Dokumen 4 Dokumen 1 Dokumen			358,786,800	394,665,480	
2	**08**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,301,772,231**	**8,029,484,230**	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersediannya Gaji ASN dan Tunjangan ASN di Dinas PPKBPPPA Kab. Paser	14 bulan			7,086,484,231	7,786,484,230	
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Bulanan jumlah Laporan semesteran Jumlah Laporan Tahunan Jumlah Laporan Triwulan	24 Laporan 2 Laporan 10 Buku 8 Laporan			215,288,000	243,000,000	

2	**08**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**39,716,840**	**27,750,800**	
2	08	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rekon dan Pelaporan Yang Tersedia	1 Dokumen			119,150,520	83,252,400	
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**369,389,370**	**401,928,837**	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangutersnan kantor yang tersedia	12 bulan			3,005,100	3,005,100	
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan yang Tersedia	3 Unit			24,597,600	24,597,600	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang Tersedia	12 bulan			138,898,900	152,788,790	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang Tersedia	12 bulan			19,601,000	20,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah rapat pegawai serta jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			183,286,770	201,537,347	
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**87,900,000**	**98,440,000**	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah honorarium petugas kearsipan yang terbayarkan Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	12 bulan 150 lembar			7,500,000	10,000,000	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan Listrik yang tersedia	12 Bulan			80,400,000	88,440,000	
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**64,726,200**	**72,760,820**	
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah kendaraan dinas / oprasional dan terbayarnya pjak kendaraan Terpelihara	7 unit			51,667,200	56,833,920	

2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	8 unit			5,680,000	7,810,000	
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor yang Terpelihara	1 Unit			5,000,000	5,500,000	
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah perlengkapan gedung kantor Yang terpelihara	12 bulan			2,379,000	2,616,900	
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**										**481,000,000**	**750,000,000**	
2	**08**	**02**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**										**173,000,000**	**300,000,000**	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Anggaran ARG Pada OPD & Perangkat Desa	186 Dokumen/OPD			212,000,000	400,000,000	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta OPD & Perangkat Desa Yang telah Mengikuti Pelatihan PPRG	50 orang			480,000,000	800,000,000	
2	**08**	**02**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**										**28,780,000**	**50,000,000**	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Perempuan yang mendapat pendampingan	50 orang			57,560,000	100,000,000	
2	**08**	**02**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**										**279,220,000**	**400,000,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	08	02	2.03	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Yang dibina/difasilitasi	25 Lembaga			500,000,000	700,000,000	

2	08	02	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Peserta yang mengikuti Peningkatan kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	35 0rang			58,440,000	100,000,000	
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**										**152,600,000**	**167,860,000**	
2	**08**	**03**	2.03		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**152,600,000**	**167,860,000**	
2	08	03	2.03	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan yang difasilitasi	10 lembaga			152,600,000	167,860,000	
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**										**88,012,000**	**150,000,000**	
2	**08**	**04**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**58,012,000**	**100,000,000**	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya Kelompok Usaha Perempuan	10 Kelompok			116,024,000	200,000,000	
2	**08**	**04**	2.02		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**30,000,000**	**50,000,000**	
2	08	04	2.02	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya Puspaga	10 Lembaga			30,000,000	50,000,000	
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**										**100,000,000**	**150,000,000**	
2	**08**	**05**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**100,000,000**	**150,000,000**	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							500,000,000	750,000,000	
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**										**125,000,000**	**137,500,000**	
2	**08**	**06**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**										**125,000,000**	**137,500,000**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah SDM yang terlatih tentang KHA dan terselenggaranya pelatihan KHA	42 0rang			125,000,000	137,500,000	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**										**153,800,000**	**168,300,000**	
2	**08**	**07**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**										**153,800,000**	**168,300,000**	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Peserta yang mengikuti program PATBM	300 orang			153,800,000	168,300,000	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**										**847,783,150**	**1,665,920,465**	
2	**14**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**40,054,800**	**50,044,280**	
2	**14**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**40,054,800**	**50,044,280**	
2	14	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen LKJip DPPKBPPPA Kab. Paser Jumlah laporan tepra setiap bulan dan Evaluasi Renja	1 dokumen 2 Dokumen			40,054,800	50,044,280	
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**										**278,400,000**	**306,240,000**	
2	**14**	**02**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**										**138,775,900**	**152,653,490**	
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi dan Fasilitasi Pendidikan Kependudukan	425 Peserta			138,775,900	152,653,490	
2	**14**	**02**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**										**139,624,100**	**153,586,510**	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan						Jumlah Data Kependudukan yang di olah	1 Dokumen			139,624,100	153,586,510	
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**										**404,328,350**	**1,172,136,185**	
2	**14**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**										**66,354,350**	**72,989,785**	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK						Jumlah Operasional Kegiatan di Balai Penyuluh	2 Kelompok Sasaran			66,354,350	72,989,785	
2	**14**	**03**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**										**25,645,650**	**28,210,215**	
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	4 Unit			25,645,650	28,210,215	

2	**14**	**03**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**148,399,350**	**163,239,285**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Jumlah Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB	45 Unit			111,549,000	122,703,900	
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya						Cakupan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksidi fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	80 %			71,349,000	78,483,900	
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang di Latih	30 orang Peserta			113,900,700	125,290,770	
2	**14**	**03**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**										**163,929,000**	**907,696,900**	
2	14	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	10 organisasi			171,916,000	189,107,600	
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						Jumlah Lintas Sektor yang berperan dalam Integrasi Pembangunan di Kampung KB	15 Perangkat Daerah			443,750,000	4,125,000,000	
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB						Jumlah Peserta yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	249 orang			96,600,000	106,260,000	
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**										**125,000,000**	**137,500,000**	
2	**14**	**04**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**										**125,000,000**	**137,500,000**	
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)						Jumlah Peserta Binaan Sosialisasi stunting di Kelompok BKB Jumlah Peserta Orientasi dan pelatihan Teknis Pengisian KKA	490 orang Peserta 490 0rang Peserta			500,000,000	550,000,000	
														TOTAL	**9,991,093,191**	**12,017,277,892**	

Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.00.0000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.00.0039 UPTD PPA Kabupaten Paser

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**										**250,000,000**	**275,000,000**	
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**38,004,000**	**41,804,400**	
2	**08**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**24,926,300**	**27,418,930**	
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										8,010,300	8,811,330	
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										316,000	347,600	
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										16,600,000	18,260,000	
2	**08**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**600,000**	**660,000**	
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										600,000	660,000	
2	**08**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**12,477,700**	**13,725,470**	
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										12,477,700	13,725,470	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**										**211,996,000**	**233,195,600**	
2	**08**	**07**	2.02		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**211,996,000**	**233,195,600**	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										211,996,000	233,195,600	
														TOTAL	**250,000,000**	**275,000,000**	

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.00.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.00.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												

2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**7,677,924,288**	**8,157,015,000**	
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,138,926,000**	**6,497,305,000**	
2	**09**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**100,000,000**	**107,100,000**	
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlahh dokumen RENSTRA dan RENJA	2 dok				170,000,000	180,000,000	
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen LKjIP	1 dok				1,000,000	1,100,000	
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen data statistik sektoral Jumlah dokumen monev Jumlah dokumen SPIP	1 dok 1 dok 1 dok				14,000,000	16,000,000	
2	**09**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,880,316,700**	**6,218,135,000**	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan PNS	12 Bulan				5,627,467,900	5,940,000,000	
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang akuntabel	1 dok				252,848,800	278,135,000	
2	**09**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**131,615,300**	**143,200,000**	
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan				25,000,000	27,500,000	
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah kebutuhan ATK Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai	12 Bulan 536 kotak				22,206,460	23,000,000	
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan				2,099,280	2,200,000	
2	09	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						Jumlah bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	365 Expl				2,309,560	2,500,000	
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan				80,000,000	88,000,000	
2	**09**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**6,994,000**	**7,870,000**	
2	09	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah kebutuhan surat menyurat, materai dan benda post yang terpenuhi	43 lembar				430,000	470,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah kebutuhan unit jaringan telepon dan internet kantor	12 bulan				3,564,000	3,900,000	
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah perbaikan/pemeliharaan komputer dan printar	5 unit				3,000,000	3,500,000	
2	**09**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**20,000,000**	**21,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara secara rutin dan berkala, dan STNK yang diterbitkan	2 unit			20,000,000	21,000,000	
2	**09**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**										**110,000,000**	**120,000,000**	
2	**09**	**02**	2.01		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**110,000,000**	**120,000,000**	
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur						Jumlah Infrastruktur lantai jemur	1 unit			110,000,000	120,000,000	
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**										**682,588,360**	**721,010,000**	
2	**09**	**03**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**										**167,303,780**	**183,960,000**	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan						Jumlah dokumen NBM	1 dok			17,006,500	18,700,000	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Jumlah dokumen kubutuhan dan potensi pangan lokal	1 dok			21,460,360	23,460,000	
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan						Jumlah dokumeninformasi harga pasar	1 dok			98,906,970	108,900,000	
2	09	03	2.01	06	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia						Pengembangan TTI	3 unit			29,929,950	32,900,000	
2	**09**	**03**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**										**46,288,210**	**50,900,000**	
2	09	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal						Jumlah dokumen pendataan dan pemetaan panga lokal	1 dok			46,288,210	50,900,000	
2	**09**	**03**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**										**468,996,370**	**486,150,000**	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun						Jumlah dokumen PPH Konsumsi	1 dok			14,248,320	16,500,000	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Frekensi Festifal Pangan Lokal B2SA Jumlah kelompok penerima manfaat pekarangan pangan lestari (P2l) Pendampingan P2l Pusat	2 kali 3 Unit KWT 6 Unit KWT			400,500,000	410,000,000	
2	09	03	2.04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun						Jumlah peserta sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan P2KP	40 orang			54,248,050	59,650,000	
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**										**479,609,928**	**535,700,000**	

2	**09**	**04**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**										**40,364,300**	**44,000,000**	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						Penyusunan Peta FSVA	1 dok			40,364,300	44,000,000	
2	**09**	**04**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**										**439,245,628**	**491,700,000**	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota						Dokumen Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	1 dok			83,433,970	91,700,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Penyediaan Beras CPPD	20 ton			355,811,658	400,000,000	
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**										**266,800,000**	**283,000,000**	
2	**09**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**										**266,800,000**	**283,000,000**	
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Identifikasi dan pendampingan pelaku usaha tani PSAT dalam sertifikasi keamanan pangan Sosialisasi/penyuluhan pelaku usaha tani PSAT	3 Pelaku usaha tani 33 lokasi			130,000,000	143,000,000	
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengujian PSAT Pengadaan Sapras pengujian mutu dan keamanan PSAT	60 Sampel 2 Set			136,800,000	140,000,000	
														TOTAL	**7,677,924,288**	**8,157,015,000**	

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.00.0000 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.00.0000 Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**										**36,184,726,336**	**28,359,397,942**	

2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**13,659,955,730**	**3,405,774,003**	
2	**11**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**593,700,000**	**594,363,624**	
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renja Tahunan Tersusun	2 Dokumen			277,000,000	271,700,000	
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA yang tersusun	1 Dokumen			90,000,000	88,000,000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun	1 Dokumen			58,800,000	49,500,000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	1 Dokumen			13,500,000	16,016,673	
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen DPA perubahan yang tersusun	1 Dok			13,500,000	15,861,618	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Renja,LPPD ,SPIP, dan data sektoral tersusun	4 Dokumen			127,400,000	137,500,000	
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen LKJIP tersusun	1 Dokumen			13,500,000	15,785,333	
2	**11**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**11,837,994,645**	**1,453,543,235**	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gaji dan Tunjangan PNS yang terbayar	66 Orang			46,806,401,778	5,200,000,000	
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tunjangan pengelola keuangan terbayar	1 Dokumen			84,394,200	92,833,620	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tersusun	1 Dokumen			25,000,000	29,909,615	
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan keuangan bulanan/semester tersedia	4 Dokumen			13,500,000	15,400,000	
2	11	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran tersedia	1 Dokumen			13,500,000	15,400,000	
2	**11**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**74,000,000**	**55,000,000**	
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian batik dan olah raga tersedia	230 Set			24,000,000	0	
2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti BIMTEK	7 Orang			50,000,000	55,000,000	
2	**11**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**320,543,145**	**463,597,460**	
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Komponen instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan kantor	101 buah			4,500,000	4,950,000	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Item			0	45,000,000	
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis ATK yang tersedia	36 Item			50,000,000	55,000,000	
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bahan cetak ,Penggandaan dan penjilidan yang tersediakan	15 Item			35,054,250	38,559,675	

2	11	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koran dan bahan Peraturan Perundangundangan yang Disediakan Per Hari	360 Eks			5,988,895	6,587,785	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang teselenggara	38 Kali			190,000,000	275,000,000	
2	11	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						Jumlah Aplikasi Pendukung pelayanan kegiatan terselenggara	2 Aplikasi			35,000,000	38,500,000	
2	**11**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**72,745,500**	**13,200,000**	
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Meubelir tersedia	3 Item			12,000,000	13,200,000	
2	11	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	5 Unit			60,745,500	0	
2	**11**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**528,472,440**	**581,319,684**	
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan jasa surat menyurat	300 Lembar			1,892,440	2,081,684	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa telpon,Internet, listrik dan air yang terlayani	12 Bulan			250,000,000	275,000,000	
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan kebersihan yang tersedia Jumlah honorarium PTT terbayar Jumlah Makan minum rapat tersedia	19 Item 10 Orang 630 Kotak			276,580,000	304,238,000	
2	**11**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**232,500,000**	**244,750,000**	

2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Memiliki Perijinan (STNK)	2 Unit			0	38,500,000	
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Perijinan (STNK)	18 Unit			130,000,000	143,000,000	
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara (Unit)	9 Unit			12,500,000	13,750,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	3 Gedung			90,000,000	49,500,000	
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**										**484,491,040**	**370,511,834**	
2	**11**	**02**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**										**285,062,100**	**151,140,000**	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Daya Tampung beban pencemar	1 Dokumen			147,662,100	0	
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen evaluasi RPPLH tersedia Jumlah Dokumen IKPLHD dan IKLH Tersedia	1 Dokumen 2 Dokumen			137,400,000	151,140,000	
2	**11**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**										**199,428,940**	**219,371,834**	
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			Kab. Paser, Kuaro, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen KLHS RDTR	1 Dokumen			129,428,940	142,371,834	
2	11	02	2.02	03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi KLHS dan TPB	3 Dokumen			70,000,000	77,000,000	
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**										**1,397,580,000**	**3,253,118,000**	
2	**11**	**03**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**										**329,180,000**	**2,077,878,000**	

2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeriksaan Penyusunan Dokumen UKL UPL Jumlah Penilaian Penyusunan Dokumen AMDAL Jumlah Tanda Terima SPPL	15 Dokumen 4 Dokumen 30 SPPL			211,780,000	232,958,000	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Taka Kab. Paser, Long Kali, Sebakung Makmur			Jumlah Kampung Iklim Terbina Jumlah Profil Emisi Gas Rumah Kaca	2 Desa 1 Dokumen (Online)			117,400,000	110,000,000	
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan lab. lingkungan tersedia Jumlah SDM Laboratorium tersedia	5 Unit 6 Orang			0	1,734,920,000	
2	**11**	**03**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**										**811,000,000**	**892,100,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				30 Perusahaan 120 Titik			691,000,000	760,100,000	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemantauan terhadap pelaku usaha yang memiliki sumber tidak bergerak	30 Perusahaan			120,000,000	132,000,000	
2	**11**	**03**	2.03		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**										**257,400,000**	**283,140,000**	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah inventarisasi lokasi inventarisasi LAT Jumlah titik Sample Tanah	1 Dokumen 50 Titik			212,400,000	233,640,000	
2	11	03	2.03	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tanaman yang di tanam	8000 Batang			45,000,000	49,500,000	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**										**7,250,000,000**	**7,150,000,000**	
2	**11**	**04**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**										**7,250,000,000**	**7,150,000,000**	

2	11	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan RTH tersusun	1 Dokumen			750,000,000	0	
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Taman KEHATI yang di kelola (Unit)	1 Taman			650,000,000	715,000,000	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ruang terbuka Hijau yang terpelihara Jumlah THL yang terbayar	11 Lokasi 88 Orang			5,750,000,000	6,325,000,000	
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Prasarana KEHATI tersedia	1 Unit			100,000,000	110,000,000	
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**										**250,000,000**	**275,000,000**	
2	**11**	**05**	2.01		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**										**170,000,000**	**187,000,000**	
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan			Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi LB3	100 Orang			110,000,000	121,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi ijin pengelolaan penyimpanan LB3	20 Pelaku Usaha			60,000,000	66,000,000	
2	**11**	**05**	2.02		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**80,000,000**	**88,000,000**	
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koordinasi pengelolaaan limbah B3 terlaksana	4 Kali			80,000,000	88,000,000	
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**										**275,000,000**	**220,000,000**	
2	**11**	**06**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**275,000,000**	**220,000,000**	

2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Fungsional yang mendapatkan peningkatan kapasitas	6 Orang			75,000,000	0	
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	20 Pelaku Usaha			120,000,000	132,000,000	
2	11	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tindak lanjut rekomendasi evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan	8 Kasus			80,000,000	88,000,000	
2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**										**45,000,000**	**0**	
2	**11**	**07**	2.02		**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**										**45,000,000**	**0**	
2	11	07	2.02	01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah MHA yang mendapatkan Pembinaan	1 MHA			45,000,000	0	
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**										**227,000,000**	**187,000,000**	
2	**11**	**08**	2.01		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**227,000,000**	**187,000,000**	
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah dukungan sapras dan pakan penangkaran satwa endemik Jumlah Kader lingkungan yang mendapatkan pembinaan Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang mendapatkan bantuan Jumlah sekolah peduli lingkungan yang dibina	2 Paket 50 Orang 2 Kelompok 20 Sekolah			170,000,000	187,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	11	08	2.01	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan kampanye lingkungan hidup dalam peringatan Hari lingkungan hidup	1 Kali			57,000,000	0	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**										**115,000,000**	**126,500,000**	
2	**11**	**09**	2.01		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**115,000,000**	**126,500,000**	

2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Adipura tersedia Jumlah orang yang dinilai, dibina dan diusulkan menerima penghargaan Lingkungan Hidup	2 Dokumen 3 Orang			115,000,000	126,500,000	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**										**162,400,000**	**178,640,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**										**162,400,000**	**178,640,000**	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	24 Kasus			162,400,000	178,640,000	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**										**12,318,299,566**	**13,192,854,105**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**										**12,288,299,566**	**13,159,854,105**	
2	11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan induk sistem pengelolaan sampah tersedia	1 Dokumen			0	0	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah volume sampah yang tereduksi disumbernya	4506.69 Ton			403,911,685	444,302,854	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Volume Sampah Terangkut dari TPS ke TPA	15000 Ton			3,447,800,000	3,792,580,000	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Kab. Paser, Batu Sopang, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Lomba kepedulian lingkungan hidup	1 Kegiatan			220,428,410	242,471,251	
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen perencanaan dan kerja sama penyediaan sapras pengelolaan persampahan tersedia	4 Dokumen			35,000,000	38,500,000	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						Jumlah Sarana Prasarana persampahan tersedia, beroperasi dan terpelihara	75 Unit			8,181,159,471	8,642,000,000	
2	**11**	**11**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**										**30,000,000**	**33,000,000**	
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan kinerja pengelolaan sampah tersedia	2 Dokumen			30,000,000	33,000,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**										**39,716,290,781**	**11,715,000,000**	
3	**28**	**04**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**										**39,716,290,781**	**11,715,000,000**	
3	**28**	**04**	2.01		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**										**39,716,290,781**	**11,715,000,000**	
3	28	04	2.01	01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang mendapatkan Sosialisasi Karhutla Jumlah panjang Sekat Bakaran terpelihara Jumlah Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	3 Desa 50 KM 8 Kali			2,250,000,000	2,475,000,000	
3	28	04	2.01	02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota										2,200,000,000	2,420,000,000	
3	28	04	2.01	04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar						Jumlah Dana DBH Dr yang tersisa	2 Tahun			29,066,290,781	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan Konservasi dalam rangka Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA Jumlah luasan area Pemulihan Ekosistem Jumlah luas area Pengkayaan tanaman	5 Unit 168 Hektar 50 Hektar			3,200,000,000	3,520,000,000	
3	28	04	2.01	06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota										0	0	
3	28	04	2.01	07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kerjasama yang terlaksana	5 MOU			600,000,000	660,000,000	
3	28	04	2.01	08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Masyarakat Daerah Penyangga yang mendapatkanpembinaan ekonomi Jumlah Luasan pemeliharaan kawasan tahura dengan kemitraan masyarakat terlaksana Jumlah luasan penanaman dengan pola kemitraan Jumlah orang yang mendapatkan Pembinaan	7 Kelompok 50 Hektar 25 Hektar 150 Orang			2,400,000,000	2,640,000,000	
														TOTAL	**75,901,017,117**	**40,074,397,942**	

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**										**10,050,702,008**	**10,619,087,233**	
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8,324,513,370**	**8,515,743,792**	
2	**12**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**86,433,400**	**103,600,080**	

2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	3 Dokumen			63,084,200	75,461,040	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen			109,782,600	131,739,120	
2	**12**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,500,222,050**	**7,580,000,000**	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	28 Dokumen			7,340,222,050	7,400,000,000	
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Keuangan	15 Dokumen			160,000,000	180,000,000	
2	**12**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**479,463,000**	**539,909,300**	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							440,000,000	488,000,000	
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										80,000,000	96,000,000	
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										25,000,000	30,000,000	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perjalanan Dinas, Rapat Koordinasi Konsultasi Jumlah Rapat Koordinasi	60 kali 12 kali			154,463,000	169,909,300	
2	**12**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**258,394,920**	**292,234,412**	
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mobil Operasional yang dipelihara	5 Unit			80,000,000	96,000,000	
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							356,789,840	392,468,824	
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**										**240,108,680**	**359,895,001**	
2	**12**	**02**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**										**240,108,680**	**359,895,001**	

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.00.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan										48,900,000	53,790,000	
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk						Jumlah KTP dan KK	40000 Keping			185,658,680	300,000,000	
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk										0	1	
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan										30,000,000	33,000,000	
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**										**367,000,000**	**448,222,680**	
2	**12**	**03**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**										**367,000,000**	**448,222,680**	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting										367,000,000	448,222,680	
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**										**1,102,079,958**	**1,276,225,760**	
2	**12**	**04**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**										**1,102,079,958**	**1,276,225,760**	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan										1,102,079,958	1,276,225,760	
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**										**17,000,000**	**19,000,000**	
2	**12**	**05**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**										**17,000,000**	**19,000,000**	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain										17,000,000	19,000,000	
														TOTAL	**10,050,702,008**	**10,619,087,233**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**										**13,924,057,314**	**15,194,440,394**	
2	**13**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**7,076,395,514**	**7,776,560,714**	

2	**13**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**87,847,512**	**96,112,940**	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan	6 dokumen			73,472,112	80,300,000	
2	13	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP)	6 dokumen			14,375,400	15,812,940	
2	**13**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,524,817,772**	**7,177,669,548**	
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			6,173,917,916	6,791,309,707	
2	13	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Dokumen keuangan (SPM, SPP)	400 dokumen			329,099,856	362,009,841	
2	13	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan keuangan	15 dokumen			21,800,000	24,350,000	
2	**13**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**35,430,000**	**38,203,000**	
2	13	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang milik daerah yang terinfentarisir	10 Kecamatan			35,430,000	38,203,000	
2	**13**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**2,600,000**	**3,000,000**	
2	13	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek	16 Orang			2,600,000	3,000,000	
2	**13**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**350,510,340**	**381,286,347**	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	24 unit			1,805,770	2,086,347	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7 unit			22,000,000	24,200,000	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis bahan logistik kantor	40 Item			117,056,790	122,200,000	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah priode ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 Bulan			20,297,780	19,600,000	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan	724 exemplar			2,000,000	2,200,000	
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	36 kali			187,350,000	211,000,000	
2	**13**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**75,189,890**	**80,288,879**	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 unit			65,208,890	71,729,779	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan yang dipelihara	10 buah			9,981,000	8,559,100	
2	**13**	**02**			**PROGRAM PENATAAN DESA**										**57,009,800**	**62,345,580**	
2	**13**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Penataan Desa**										**57,009,800**	**62,345,580**	

2	13	02	2.01	01	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dimekarkan	1 Desa			0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2	13	02	2.01	02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah segmen batas desa yang terselesaikan	3 Segmen			57,009,800	62,345,580	
2	13	02	2.01	05	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah kesatuan masyarakat hukum adat yang ditetapkan	1 desa adat			0	0	
2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa										0	0	
2	**13**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**										**41,600,000**	**45,000,000**	
2	**13**	**03**	2.01		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**										**41,600,000**	**45,000,000**	
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						Jumlah desa yang melakukan kerjasama	3 Desa			0	0	
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						Jumlah desa yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	1 Desa			0	0	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kawasan pedesaan yang dibentuk	2 kawasan			41,600,000	45,000,000	
2	**13**	**04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**										**3,987,335,000**	**4,306,213,900**	
2	**13**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**										**3,987,335,000**	**4,306,213,900**	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang memiliki informasi penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	40 Desa			1,545,276,000	1,703,103,600	

2	13	04	2.01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah produk hukum desa yang difasilitasi	3 dokumen			22,220,000	24,442,000	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa tepat waktu	139 Desa			93,800,000	95,480,000	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	115 Desa			341,560,000	353,100,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparatur desa yang dilatih	52 Orang			0	0	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah permasalahan desa yang terselesaikan	10 Permasalahan			8,015,000	10,015,000	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang Perdesnya di evaluasi	25 Desa			79,136,000	87,136,000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BUMDES yang direvitalasi Jumlah dokumen laporan	15 Desa 1 dokumen			176,179,000	184,446,900	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang melaksanakan pilkades	72 Desa			1,400,995,000	1,500,000,000	

2	13	04	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	15 dokumen			25,600,000	28,160,000	
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang menyusun dan menginput profil desa tepat waktu	139 Desa			75,950,000	81,890,000	
2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang menyusun dokumen aset desa tepat waktu	90 Desa			89,114,000	98,025,400	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BPD yang dilatih	140 Orang			0	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	04	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	139 Desa			54,650,000	60,115,000	
2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang mengikuti lomba desa	10 Desa			74,840,000	80,300,000	
2	**13**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**										**2,761,717,000**	**3,004,320,200**	
2	**13**	**05**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**2,761,717,000**	**3,004,320,200**	
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang Teridentifikasi	10 Kecamatan			114,396,000	125,835,600	

2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan yang dibina Jumlah status posyandu yang meningkat	3 Lembaga 0 Posyandu			156,558,000	171,113,800	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengurus kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dilatih	30 Orang			29,828,000	29,510,800	
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pasar Desa yang dibina	3 Desa			7,540,000	10,000,000	
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Inovasi yang mengikuti gelar TTG tingkat provinsi Jumlah Posyantekdes yang dibina	0 Desa 20 Desa			153,100,000	156,860,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan BBGRM	3 Desa			10,295,000	11,000,000	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan Tim penggerak PKK	4 pokja			2,290,000,000	2,500,000,000	
TOTAL															**13,924,057,314**	**15,194,440,394**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									**33,301,649,524**	**36,631,813,485**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									**13,931,901,557**	**15,325,090,722**	
2	**15**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**									**22,917,900**	**25,209,690**	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah	1 Dokumen			9,906,800	10,897,480	
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen RKA SKPD	1 Dokumen			4,058,000	4,463,800	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen			6,876,300	7,563,930	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			2,076,800	2,284,480	
2	**15**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									**9,158,251,655**	**10,074,076,820**	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan			8,446,447,962	9,291,092,758	
2	15	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedinya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan			711,803,693	782,984,062	
2	**15**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**									**411,419,420**	**452,560,372**	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan	4 item			2,375,450	2,612,995	
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	7 item			137,916,780	151,708,458	

2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah item jenis barang	40 item			41,978,190	46,175,019	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	590 lembar			17,062,500	18,768,750	
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksannya kegiatan Koordinasi dan Konsultasi	70 Kali			212,086,500	233,295,150	
2	**15**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**3,242,366,232**	**3,566,602,855**	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya materai	100 lembar			1,000,000	1,100,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			3,229,798,920	3,552,778,812	
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	15 Unit			3,050,000	3,355,000	
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terlaksana	12 Bulan			8,517,312	9,369,043	
2	**15**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,096,946,350**	**1,206,640,985**	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	15 Unit			189,903,150	208,893,465	
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	15 item			5,640,000	6,204,000	

2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor	1 Unit			901,403,200	991,543,520	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**										**17,165,915,137**	**18,882,506,650**	
2	**15**	**02**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**										**46,104,800**	**50,715,280**	
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penetapan Kebijakan dan sosialisasi rencana induk LLAJ	12 Kali			46,104,800	50,715,280	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**15**	**02**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**										**15,420,674,670**	**16,962,742,137**	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Jumlah APILL yg terpasang Peningkatan Jumlah rambu lalu lintas di jalan raya Peningkatan jumlah tiang dan lampu jalan yg terpasang	2 Unit 100 Unit 100 Unit			4,559,854,670	5,015,840,137	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross/Speed trap Peningkatan jumlah Marka Jalan	1162 Unit 1949 M2			10,441,690,000	11,485,859,000	
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Apill dalam kondisi baik Rambu Lalu Lintas yang terpelihara tiang dan lampu jalan yg terpelihara	4 Unit 438 Buah 915 Unit			419,130,000	461,043,000	
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**										**798,856,400**	**878,742,040**	
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan penilain WTN kabupaten Paser yang tersusun	1 Kegiatan			798,856,400	878,742,040	
2	**15**	**02**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**										**46,967,100**	**51,663,810**	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan parkir	1 Dokumen			46,967,100	51,663,810	

2	**15**	**02**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**										**197,806,567**	**217,587,223**	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Dokumen			72,583,900	79,842,290	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan penilain WTN kabupaten Paser yang tersusun	1 Dokumen			47,292,667	52,021,933	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedinya dokumen pelaksanaan koordinasi Forum LLAJ	1 Dokumen			77,930,000	85,723,000	
2	**15**	**02**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**										**72,230,000**	**79,453,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan jumlah pengemudi kendaraan bermotor yang kompeten dan memenuhi persyaratan	35 Orang			72,230,000	79,453,000	
2	**15**	**02**	2.16		**Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**583,275,600**	**641,603,160**	
2	15	02	2.16	03	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya dokumen hasil kegiatan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan umum	1 Dokumen			583,275,600	641,603,160	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**										**2,077,241,230**	**2,284,965,353**	
2	**15**	**03**	2.06		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota**										**291,411,030**	**320,552,133**	
2	15	03	2.06	02	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen			291,411,030	320,552,133	

2	**15**	**03**	2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**										**1,437,299,620**	**1,581,029,582**	
2	15	03	2.12	02	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Jumlah Pelabuhan pengumpan lokal/Sarana Pendukungnya	7 Unit			1,437,299,620	1,581,029,582	
2	**15**	**03**	2.13		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**										**348,530,580**	**383,383,638**	
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya Prasarana Pelabuhan Sungai & Danau	3 Unit			348,530,580	383,383,638	
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**										**126,591,600**	**139,250,760**	
2	**15**	**05**	2.01		**Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian**										**126,591,600**	**139,250,760**	
2	15	05	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya data dan informasi mengenai penyusunan rencana induk perkeretaapian	1 Dokumen			126,591,600	139,250,760	
														TOTAL	**33,301,649,524**	**36,631,813,485**	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Terminal Kuaro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										**94,499,790**	**103,949,769**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**										**94,499,790**	**103,949,769**	
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**										**94,499,790**	**103,949,769**	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Peningkatan penumpang angkutan yang terlayani	65000 Orang			94,499,790	103,949,769	
														TOTAL	**94,499,790**	**103,949,769**	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPT Pelabuhan Tana Paser

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												

2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**287,077,250**	**315,784,975**	
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**											**287,077,250**	**315,784,975**	
2	**15**	**03**	2.12		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**											**287,077,250**	**315,784,975**	
2	15	03	2.12	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Meningkatnya Jumlah barang angkutan yang terlayani Meningkatnya Jumlah kapal angkutan yang terlayani	1500 Ton 500 Unit			287,077,250	315,784,975	
														TOTAL	**287,077,250**	**315,784,975**	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Terminal Kota

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										**239,735,350**	**263,708,885**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**										**239,735,350**	**263,708,885**	
2	**15**	**02**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**										**239,735,350**	**263,708,885**	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Peningkatan penumpang angkutan yang terlayani	12810 Orang			239,735,350	263,708,885	
														TOTAL	**239,735,350**	**263,708,885**	

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PKB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**										**719,752,400**	**791,727,640**	
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**										**719,752,400**	**791,727,640**	
2	**15**	**02**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**										**719,752,400**	**791,727,640**	
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Jumlah kendaraan yg telah diuji kelaikannya	11150 Unit			554,752,400	610,227,640	

2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat uji kelaikan kendaraan bermotor yang terpelihara	9 Unit			165,000,000	181,500,000	
														TOTAL	**719,752,400**	**791,727,640**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**										**22,149,031,116**	**27,386,860,000**	
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**7,309,211,340**	**9,394,360,000**	
2	**16**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**246,400,000**	**465,000,000**	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Dokumen Laporan Dokumen Renja	1 Dokumen 1 Dokumen			70,000,000	100,000,000	
2	16	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Dokumen RKA	1 Dokumen			101,400,000	135,000,000	
2	16	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Dokumen RKA Perubahan	1 Dokumen			15,000,000	60,000,000	
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen			15,000,000	30,000,000	
2	16	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen			15,000,000	30,000,000	
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP)	1 Dokumen			15,000,000	50,000,000	
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen Evaluasi Renja dan TEPRA	2 Dokumen			15,000,000	60,000,000	
2	**16**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,211,567,467**	**7,865,000,000**	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			6,040,167,467	7,700,000,000	
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah PNS dam PTT yang penerima Jasa Administrasi Keuangan	8 Orang			171,400,000	165,000,000	
2	**16**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**565,383,873**	**713,000,000**	

2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Jenis			152,283,873	150,000,000	
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Penyedian Bahan Logistik (Bulan)	12 Bulan			87,600,000	120,000,000	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			25,000,000	70,000,000	
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						Bahan Bacaan yang tersedia	12 Bulan			3,000,000	3,000,000	
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Nasi Kotak dan Snack Pelaksanaan koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	1685 Kotak 12 Bulan			297,500,000	370,000,000	
2	**16**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**211,500,000**	**235,000,000**	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Terselenggaranya Pelayanan dalam menunjang kinerja aparatur	12 Bulan			116,500,000	135,000,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terselenggaranya pembiayaan instalasi listrik dan telepon atau internet	12 Bulan			95,000,000	100,000,000	
2	**16**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**74,360,000**	**116,360,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah mobil jabatan	1 Unit			18,000,000	35,000,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas atau Operasional yang Mendapat Pemeliharaan dan Perizinan	4 Unit			45,000,000	70,000,000	
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						jumlah peralatan yang dirawat	16 Buah			11,360,000	11,360,000	
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**										**3,190,219,776**	**5,430,000,000**	
2	**16**	**02**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**3,190,219,776**	**5,430,000,000**	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						Tersusunnya Dokumen Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen			50,000,000	100,000,000	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik						Jumlah berita yang dipublikasikan melalui Media Center	250 Berita			375,937,350	700,000,000	

2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik						Jumlah Program siaran Pemerintah Kabupaten	27 Program			378,882,426	330,000,000	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik						Jumlah SKPD yang membentuk dan Menjalankan PPID Pembantu	10 PPID			285,200,000	350,000,000	
2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan						Jumlah produksi siaran Jumlah rapat / Pertemuan / FGD	229 Tayang 4 Kali			647,676,000	650,000,000	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas						Jumlah berita/informasi yang disebarluaskan dimedia massa Jumlah Kelompok KIM yang dibentuk dan dibina Jumlah wartawan yang mengikuti uji kompetensi wartawan (UKW)	919 Berita/iklan 1 Kelompok 10 Orang			1,452,524,000	3,300,000,000	
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**										**11,649,600,000**	**12,562,500,000**	
2	**16**	**03**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**3,904,473,000**	**5,400,000,000**	
2	16	03	2.01	01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Aplikasi dan Website baru di Perangkat Daerah/Kelurahan dan desa	3 Aplikasi/Web site			370,473,000	400,000,000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah						Tersedianya layanan internet dilingkup Pemerintah daerah	12 Bulan			3,534,000,000	5,000,000,000	
2	**16**	**03**	2.02		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**7,745,127,000**	**7,162,500,000**	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Peraturan./Tata Kelola SPBE Daerah yang disusun	1 Dokumen			295,920,000	250,000,000	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						Tersedianya Informasi melalui Website Paserkab.go.id	1 Website			60,230,000	200,000,000	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						Jumlah Tempat Penyimpan data ,Informasi dan Dokumentasi	1 Ruang/lokasi			2,073,774,200	300,000,000	

2	16	03	2.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			Kab. Paser, Long Ikis, Belimbing Kab. Paser, Muara Komam, Binangon Kab. Paser, Muara Komam, Muara Payang								8,132,000,000	7,875,000,000	
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi						Jumlah ruang server Perangkat Daerah yang mendapat Perawatan	45 PD				241,600,000	450,000,000	
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi data dan informasi elektronik	1 Dokumen				46,644,090	250,000,000	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Aplikasi	20 Perangkat Daerah				261,472,000	250,000,000	
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						Terkelolanya sistem penghubung Layanan Pemerintah	1 NOC				282,155,910	700,000,000	
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						Masterplan Smart City beserta turunannya	1 Dokumen				245,574,000	400,000,000	
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						Jumlah SDM yang mengikuti Pelatihan dibidang TIK	25 Orang				107,365,800	300,000,000	
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)						Jumlah GCIO yang memiliki Sertifikat	5 Orang				64,391,000	125,000,000	
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**592,320,000**	**800,000,000**	
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**592,320,000**	**800,000,000**	
2	**20**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**592,320,000**	**800,000,000**	
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						Tersusunnya Kabupaten Dalam Angka	50 Buku				204,720,000	200,000,000	
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi						Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek/ Pelatihan	2 Orang				60,000,000	50,000,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral						jumlah dokumen Metadata	1 Dokumen			55,000,000	100,000,000	
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						Sinkronisasi jumlah OPD yang terkait dengan statistik	30 OPD			60,000,000	150,000,000	
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur						Terintegrasinya Pengolahan data (single data system/ sistem satu data)	1 Dokumen Laporan			50,000,000	150,000,000	
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah						Tersusunnya Produk Domestik Regional Bruto	30 Buku			162,600,000	150,000,000	
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**										**150,000,000**	**600,000,000**	
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**										**150,000,000**	**600,000,000**	
2	**21**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**										**125,000,000**	**500,000,000**	
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi	1 Regulasi/peraturan			15,000,000	100,000,000	
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya analisis kebutuhan sumberdaya keamanan informasi	1 Dokumen			10,000,000	100,000,000	
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan keamanan informasi berbasis elektronik dan non elektronik	10 PD			75,000,000	150,000,000	
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Tersedianya layanan keamanan informasi milik Pemerintah Daerah	12 Perangkat Daerah			25,000,000	150,000,000	
2	**21**	**02**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**										**25,000,000**	**100,000,000**	
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Perangkat Daerah yang terhubung Jaring Komunikasi Sandi (JKS)	15 PD			25,000,000	100,000,000	
														TOTAL	**22,891,351,116**	**28,786,860,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**										**8,053,504,065**	**13,161,213,880**	

2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,969,184,065**	**11,968,461,880**	
2	**18**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**132,916,200**	**146,207,820**	
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Renstra / Renja/Program dan Kegiatan/Evaluasi	10 Dokumen			78,679,100	86,547,010	
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 laporan			41,303,000	45,433,300	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya evaluasi kinerja PD	12 Bulan			12,934,100	14,227,510	
2	**18**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,352,287,664**	**11,289,545,838**	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan			11,835,478,480	13,019,026,328	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen			0	10	
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Laporan keuangan	12 Bulan			434,548,424	4,780,032,664	
2	**18**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**85,051,200**	**93,556,320**	
2	18	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya Sosialisasi	12 Bulan			85,051,200	93,556,320	
2	**18**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**232,497,220**	**255,746,942**	
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya penyediaan bahan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			6,731,700	7,404,870	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan			7,189,000	7,907,900	
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan			41,103,100	45,213,410	
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			30,141,800	33,155,980	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya bahan bacaan dan perundang - undangan kantor	12 Bulan			3,694,020	4,063,422	
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan			143,637,600	158,001,360	
2	**18**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**130,323,681**	**143,356,050**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jasa Surat Menyurat	12 Bulan			2,000,000	2,200,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jasa Komunikasi, Sumbedaya Air dan Listrik	12 Bulan			119,291,125	131,220,238	
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan			9,032,556	9,935,812	
2	**18**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**36,108,100**	**40,048,910**	
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan	12 Bulan			3,000,000	3,630,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terlaksananya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan	12 Bulan			25,432,500	27,975,750	
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin	12 Bulan			7,675,600	8,443,160	
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**										**195,920,000**	**215,512,000**	
2	**18**	**02**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**										**195,920,000**	**215,512,000**	
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	2 Dokumen			98,320,000	108,152,000	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Profil Potensi dan Peluang Usaha	2 Dokumen			97,600,000	107,360,000	
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**										**98,800,000**	**108,680,000**	
2	**18**	**03**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**98,800,000**	**108,680,000**	
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Strategi/Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen			98,800,000	108,680,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Penyelenggaraan Pameran Investasi	1 Even			0	0	
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**										**535,600,000**	**589,160,000**	
2	**18**	**04**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**										**535,600,000**	**589,160,000**	

2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Cakupan Layanan	120 Izin			436,800,000	480,480,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumalh Layanan Konsultasi dan Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	15 Pengaduan			98,800,000	108,680,000	
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**										**97,600,000**	**107,360,000**	
2	**18**	**05**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**										**97,600,000**	**107,360,000**	
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			LAporan Kegiatan Pemantauan Perusahaan	50 Perusahaan			97,600,000	107,360,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Kegiatan Pembinaan Yang Dilakukan	9 Kegiatan			0	0	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah KEgiatan PErusahaan ynag dilakukan Pengawasan	50 Perusahaan			0	0	
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**										**156,400,000**	**172,040,000**	
2	**18**	**06**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**156,400,000**	**172,040,000**	
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen/Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	10 Dokumen			156,400,000	172,040,000	
														TOTAL	**8,053,504,065**	**13,161,213,880**	

Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.00.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
Sub Unit Organisasi : 2.19.3.26.0.00.00.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**										**11,402,895,268**	**5,283,925,168**	
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,585,193,468**	**1,400,153,188**	
2	**19**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**112,539,400**	**123,793,340**	
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen			56,574,800	62,232,280	
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						jumlah laporan reliasi kinerja	10 dokumen			35,235,600	38,759,160	
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen evaluasi renja	14 dokumen			20,729,000	22,801,900	
2	**19**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,210,623,320**	**988,126,026**	
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										5,902,585,480	649,284,402	
2	19	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot							308,037,840	338,841,624	
2	**19**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**210,610,748**	**231,671,822**	
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			penyediaan perelatan dan perlengkapan kantor	12 bulan			25,088,160	27,596,976	
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			frekuensi penyediaan kebersihan kantor dan ATK	12 bulan			42,175,100	46,392,610	
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			frekuensi penyedian barang cetak dan penggandaan	12 bulan			5,377,688	5,915,456	
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan			127,841,800	140,625,980	

2	19	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jenis database disporapar yang ada dan terupdate	12 bulan			10,128,000	11,140,800	
2	**19**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**51,420,000**	**56,562,000**	
2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	4 unit			50,000,000	55,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			peralatan yang terpelihara	12 bulan			1,420,000	1,562,000	
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**										**1,480,036,800**	**1,628,040,480**	
2	**19**	**02**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**										**1,480,036,800**	**1,628,040,480**	
2	19	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemuda yang mengikuti jambore pemuda	30 orang			0	0	
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pembinaan di kalangan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di masing kecamatan	100 persen			158,286,500	174,115,150	
2	19	02	2.01	07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah organisasi pemuda yang dilakukan pembinaan	100 persen			196,025,800	215,628,380	
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemuda yang terbentuk melalui paskibraka	36 orang			1,125,724,500	1,238,296,950	
2	**19**	**02**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	

2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pemuda yang dilatih	25 orang			0	0	
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**										**3,187,665,000**	**2,105,731,500**	
2	**19**	**03**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**208,465,000**	**229,311,500**	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							208,465,000	229,311,500	
2	**19**	**03**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**										**1,500,000,000**	**1,500,000,000**	
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot							1,500,000,000	1,500,000,000	
2	**19**	**03**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**										**1,479,200,000**	**376,420,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi										0	0	
2	19	03	2.05	03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,479,200,000	376,420,000	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**										**150,000,000**	**150,000,000**	
2	**19**	**04**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**										**150,000,000**	**150,000,000**	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							150,000,000	150,000,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**										**2,425,835,988**	**2,448,419,586**	
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**										**1,834,888,600**	**1,798,377,460**	
3	**26**	**02**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**										**1,578,973,600**	**1,736,870,960**	
3	26	02	2.01	01	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							19,305,000	21,235,500	

3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							1,559,668,600	1,715,635,460	
3	**26**	**02**	2.02		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**										**19,875,000**	**21,862,500**	
3	26	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
3	26	02	2.02	05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							19,875,000	21,862,500	
3	**26**	**02**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**										**236,040,000**	**39,644,000**	
3	26	02	2.03	01	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Batu Sopang, Sungai Terik							200,000,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							36,040,000	39,644,000	
3	**26**	**02**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							0	0	
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**										**194,449,000**	**213,893,900**	
3	**26**	**03**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**										**194,449,000**	**213,893,900**	

3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						jenis media informasi	5 jenis			25,000,000	27,500,000	
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			frekuensi kegiatan promosi dan target pemasaran pariwisata	2 kali			169,449,000	186,393,900	
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**										**189,392,388**	**208,331,626**	
3	**26**	**04**	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**										**189,392,388**	**208,331,626**	
3	26	04	2.02	01	Pengembangan Riset			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							102,654,388	112,919,826	
3	26	04	2.02	10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							86,738,000	95,411,800	
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**										**207,106,000**	**227,816,600**	
3	**26**	**05**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**										**207,106,000**	**227,816,600**	
3	26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							207,106,000	227,816,600	
														TOTAL	**13,828,731,256**	**7,732,344,754**	

Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.00.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Sub Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.00.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**										**7,282,239,242**	**8,010,463,166**	
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,786,839,242**	**7,465,523,166**	
2	**23**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**65,626,200**	**72,188,820**	
2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						jumlah dokumen	10 dokumen			40,564,000	44,620,400	
2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						jumlah laporan	12 buku			897,600	987,360	
2	23	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						jumlah dokumen	2 dokumen			24,164,600	26,581,060	
2	**23**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,386,167,322**	**7,024,784,054**	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						penyediaan gaji dan tunjangan yang terpenuhi	12 bulan			6,096,322,186	6,705,954,405	
2	23	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						jumlah laporan	1 dokumen			31,951,040	35,146,144	
2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						jumlah laporan	1 dokumen			2,653,640	2,919,004	
2	23	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						jumlah Pegawai Tidak Tetap	16 orang			254,684,516	280,152,967	
2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						jumlah laporan	5 buku			427,900	470,690	
2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						jumlah laporan	3 dokumen			128,040	140,844	
2	**23**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**173,884,320**	**191,272,752**	
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	2 item			1,408,000	1,548,800	

2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						jumlah peralatan pembersih dan bahan pembersih yang tersedia	8 item			2,261,160	2,487,276	
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						jumlah alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis			62,651,160	68,916,276	
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						tersedianya bahan cetakan	10100 lembar			7,568,000	8,324,800	
2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						tersedianya surat kabar	12 bulan			2,640,000	2,904,000	
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 kali			97,356,000	107,091,600	
2	**23**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**36,907,200**	**40,597,920**	
2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						tersedianya peralatan dan mesin kantor	3 unit			36,907,200	40,597,920	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**23**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**92,890,000**	**102,179,000**	
2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						jumlah materai yang tersedia	130 lembar			1,090,000	1,199,000	
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						jumlah item jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang dibayar	12 bulan			91,800,000	100,980,000	
2	**23**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**31,364,200**	**34,500,620**	
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						jumlah mobil jabatan yang terpelihara	1 unit			4,163,500	4,579,850	
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						jumlah mobil operasional yang terpelihara	3 unit			17,330,700	19,063,770	
2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						jumlah unit peralatan yang terpelihara	8 unit			5,720,000	6,292,000	
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						jumlah unit perlengkapan yang terpelihara	20 unit			4,150,000	4,565,000	
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**										**459,400,000**	**505,340,000**	
2	**23**	**02**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**333,700,000**	**367,070,000**	

2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						jumlah laporan	1 dokumen			100,000,000	110,000,000	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						pendirian perpustakaan	5 desa			27,050,000	29,755,000	
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						terbinanya perpustakaan sekolah yang berpedoman pada standar perpustakaan	10 sekolah			30,000,000	33,000,000	
2	23	02	2.01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						pengelola perpustakaan yang profesional dan mandiri	10 orang			102,700,000	112,970,000	
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						terselenggaranya rapat konsultasi perpustakaan umu/ khusus/ sekolah	20 orang			20,000,000	22,000,000	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						jumlah perpustakaan desa yang mengelola dan mengolah bahan pustaka	20 desa			36,000,000	39,600,000	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						data perpustakaan sekolah SD, SMP, Desa	25 data			17,950,000	19,745,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	**23**	**02**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**125,700,000**	**138,270,000**	
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						jumlah frekuensi layanan kunjungan ke perpustakaan desa dan sekolah	40 desa			125,700,000	138,270,000	
2	**23**	**03**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**										**36,000,000**	**39,600,000**	
2	**23**	**03**	2.01		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**										**36,000,000**	**39,600,000**	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						terlaksananya data laporan naskah kuno	2 dokumen			36,000,000	39,600,000	
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**										**339,720,774**	**373,692,000**	
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**										**136,654,240**	**150,319,664**	
2	**24**	**02**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**										**55,113,000**	**60,624,300**	

2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						terlaksananya kegiatan monev dan pembinaan/ pengawasan kearsipan pada OPD	10 OPD			55,113,000	60,624,300	
2	**24**	**02**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**										**7,375,000**	**8,112,500**	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						jumlah dokumen yang dikelola	10 dokumen			7,375,000	8,112,500	
2	**24**	**02**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**										**74,166,240**	**81,582,864**	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN						tersedianya informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat kabupaten/ kota	42 OPD			3,322,240	3,654,464	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						meningkatnya SDM pengelola kearsipan	42 OPD			70,844,000	77,928,400	
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**										**162,245,774**	**178,469,500**	
2	**24**	**03**	2.01		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**										**10,000,000**	**11,000,000**	
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						jumlah arsip yang dimusnahkan	30 arsip			10,000,000	11,000,000	
2	**24**	**03**	2.02		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**										**82,120,000**	**90,332,000**	
2	24	03	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						jumlah arsip statis	100 arsip			82,120,000	90,332,000	
2	**24**	**03**	2.03		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**										**30,125,774**	**33,137,500**	
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah arsip statis	20 arsip			9,375,000	10,312,500	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	24	03	2.03	02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						jumlah arsip statis	5 arsip			14,750,000	16,225,000	
2	24	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan						jumlah arsip statis	10 arsip			6,000,774	6,600,000	

2	**24**	**03**	2.04		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**										**40,000,000**	**44,000,000**	
2	24	03	2.04	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						daftar arsip statis sesuai penjaminan keabsahan arsip	150 berkas			20,000,000	22,000,000	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						tersedianya alih media arsip statis sebagai pemanfaatan layanan arsip	1 OPD			20,000,000	22,000,000	
2	**24**	**04**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**										**40,820,760**	**44,902,836**	
2	**24**	**04**	2.01		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**										**40,820,760**	**44,902,836**	
2	24	04	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						tersedianya juknis kearsipan	1 juknis			34,401,240	37,841,364	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						jumlah OPD yang mengelola arsip sesuai dengan juknis kearsipan	42 OPD			6,419,520	7,061,472	
														TOTAL	**7,621,960,016**	**8,384,155,166**	

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perikanan

Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.25.0000 Dinas Perikanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**										**20,527,899,181**	**565,822,847,256**	
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,313,394,078**	**560,998,441,956**	
3	**25**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**276,623,500**	**188,700,000**	
3	25	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dokumen Renja Dinas Perikanan yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen			138,000,000	108,000,000	
3	25	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen			3,123,500	4,700,000	
3	25	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Laporan evaluasi Renja SKPD	1 Dokumen			135,500,000	76,000,000	
3	**25**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,424,253,063**	**560,086,571,000**	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan			5,333,203,063	559,986,321,000	

3	25	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan			56,280,000	62,000,000	
3	25	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen			34,770,000	38,250,000	
3	**25**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**308,640,000**	**388,000,000**	
3	25	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Unit			73,000,000	83,000,000	
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih Jumlah kebutuhan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan makan minum kantor	12 Bulan 12 Bulan 1000 Kotak			55,000,000	72,000,000	
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			umlah kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan			20,640,000	33,000,000	
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 Bulan			160,000,000	200,000,000	
3	**25**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**244,655,415**	**269,020,956**	
3	25	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Tersedianya jasa surat menyurat SKPD	12 Bulan			1,000,000	1,000,000	
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan			243,655,415	268,020,956	
3	**25**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**59,222,100**	**66,150,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	3 Unit			44,222,100	48,650,000	
3	25	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang			Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin kantor	12 Bulan			15,000,000	17,500,000	
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**										**10,112,197,290**	**1,650,735,000**	
3	**25**	**03**	2.01		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**										**9,917,829,600**	**1,342,232,000**	

3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Data statistik perikanan tangkap wilayah PUD	5 Dokumen			62,229,600	92,232,000	
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dermaga tambat kapal nelayan yang terbangun Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap	1 Unit 50 Kelompok			9,850,493,000	250,000,000	
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok yang memperoleh fasilitasi bantuan usaha	1 Kelompok			5,107,000	1,000,000,000	
3	**25**	**03**	2.02		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**162,330,000**	**224,698,000**	
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Nelayan Calon Penerima Bantuan Pemerintah Asuransi Nelayan (BPAN) Jumlah nelayan yang memperoleh pendampingan dan pelatihan	10 Kelompok 30 Orang			122,770,000	148,000,000	
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang terbina Realisasi Jumlah Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan (e-KUSUKA)	15 KUB 100 Kartu			39,560,000	76,698,000	
3	**25**	**03**	2.04		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**32,037,690**	**83,805,000**	
3	25	03	2.04	02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kapal penangkap kapal ikan yang terdaftar	60 Unit			32,037,690	83,805,000	
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**										**3,149,996,300**	**2,116,432,300**	
3	**25**	**04**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**										**163,200,000**	**254,831,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
3	25	04	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokdakan yang terbentuk dan dikembangkan	10 Kelompok			28,200,000	66,698,000	

3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembudidaya yang memperoleh pendampingan dan pelatihan	60 Orang			135,000,000	188,133,000	
3	**25**	**04**	2.03		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**21,000,000**	**58,815,000**	
3	25	04	2.03	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokdakan yang mendapatkan layanan usaha perijinan	6 Kelompok			21,000,000	58,815,000	
3	**25**	**04**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**										**2,965,796,300**	**1,802,786,300**	
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Data statistik perikanan budidaya	5 Dokumen			106,200,000	83,000,000	
3	25	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokdakan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan	19 Kelompok			1,868,800,000	775,000,000	
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah produksi ketersediaan benih udang (benur)	3000000 Ekor			518,656,300	478,656,300	
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sampel produk perikanan budidaya yang diuji	4 Sampel			25,000,000	96,680,000	
3	25	04	2.04	05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pokdakan yang memperoleh pembinaan dan pemantauan	10 Kelompok			45,000,000	114,450,000	
3	25	04	2.04	07	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Master Plan Budidaya Ikan di Darat Tersedianya Jasa Pemeliharaan Alat Besar	1 Dokumen 1 Tahun			402,140,000	255,000,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

3	**25**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**88,096,000**	**93,800,000**	
3	**25**	**05**	2.01		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**											**88,096,000**	**93,800,000**	
3	25	05	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap terhadap peraturan perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Usaha Perikanan	50 Persen 2 Lokasi			88,096,000	93,800,000	
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**864,215,513**	**963,438,000**	
3	**25**	**06**	2.01		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**											**121,700,000**	**100,870,000**	
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Data statistik usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	5 Dokumen			121,700,000	100,870,000	
3	**25**	**06**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**102,140,000**	**115,000,000**	
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan produk hasil perikanan	7 Kecamatan			102,140,000	115,000,000	
3	**25**	**06**	2.03		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**640,375,513**	**747,568,000**	
3	25	06	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			data ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan Jumlah Pokhlahsar yang memperoleh pendampingan dan pelatihan Jumlah produksi es balok	1 Dokumen 60 Orang 10000 Buah			514,301,360	569,568,000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Poklahsar Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pengolahan Ikan	3 Kelompok			126,074,153	178,000,000	
														TOTAL	**20,527,899,181**	**565,822,847,256**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**63,693,059,924**	**18,556,850,000**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**15,765,695,726**	**16,256,850,000**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**180,655,000**	**197,500,000**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			149,720,000	160,000,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						terlaksananya penyusunan Laporan LKJiP	1 Dokumen			935,000	2,500,000	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen			30,000,000	35,000,000	
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**15,165,347,083**	**15,600,000,000**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun			15,072,747,083	15,500,000,000	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Terlaksananya Penatausahaan Keuangan OPD	1 Tahun			92,600,000	100,000,000	
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**157,872,100**	**175,350,000**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Tersedianya Lampu Penerangan Kantor	5 Buah			418,000	1,000,000	
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Tersedianya Peralatan Kantor	1 Unit			6,000,000	9,000,000	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Tersedianya Logistik Kantor	12 Bulan			49,967,100	50,000,000	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan			13,262,000	13,262,000	
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						Tersedianya Bahan Bacaan Kantor	12 Bulan			2,088,000	2,088,000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Luar	50 Kali			86,137,000	100,000,000	
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**216,241,543**	**232,000,000**	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Tersedianya Materai Dinas	200 Lembar			2,000,000	2,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terbayarnya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	12 Bulan			67,498,391	80,000,000	

3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terlaksananya Pelayanan Kantor	12 Bulan			146,743,152	150,000,000	
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**45,580,000**	**52,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	1 Unit			43,630,000	50,000,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Terpeliharanya Peralatan Kantor	3 Unit			1,950,000	2,000,000	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**1,732,620,000**	**400,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**										**1,732,620,000**	**400,000,000**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						Terlaksananya pengawasan sarana pendukung pertanian Tersedianya Sarana Pendukung Pertanian	30 Kali 71 Unit			1,589,820,000	250,000,000	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	50 kali			142,800,000	150,000,000	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**45,029,539,601**	**650,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**										**486,019,601**	**280,000,000**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Terlaksananya pengelolaan lahan pangan bekelanjutan	6 Ha			456,019,601	80,000,000	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B						Terlaksananya inventarisir lahan pangan berkelanjutan	1 Paket			30,000,000	200,000,000	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**										**44,543,520,000**	**370,000,000**	
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						Terlaksananya Pembinaan Jaringan irigasi Usaha Tani	30 Kali			92,600,000	150,000,000	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						Terlaksananya Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usaha Tani Terlaksananya Pembinaan Jalan Usaha Tani	38 Paket 30 Kali			44,177,120,000	100,000,000	

3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						Terlaksananya Pembangunan DAM Parit Terlaksananya Pembinaan DAM Parit	1 Unit 30 kali			130,000,000	50,000,000	
3	27	03	2.02	06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						Terlaksananya Pembangunan Pintu Air Terlaksananya Pembinaan Pintu Air	2 Unit 30 kali			143,800,000	70,000,000	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANI AN**										**125,200,000**	**150,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**										**125,200,000**	**150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						terlaksananya pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 kali			125,200,000	150,000,000	
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**										**1,040,004,597**	**1,100,000,000**	
3	**27**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**										**1,040,004,597**	**1,100,000,000**	
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						Terlaksananya jumlah penyuluhan di desa	30 Kali			288,400,000	350,000,000	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa						Terlaksananyan jumlah penyuluhan kelembagaan petani di desa	30 Kali			618,400,000	600,000,000	
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian						Terlaksananya pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	12 Bulan			133,204,597	150,000,000	
														TOTAL	**63,693,059,924**	**18,556,850,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.0001 UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**244,858,290**	**300,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**244,858,290**	**300,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**										**244,858,290**	**300,000,000**	

3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian										244,858,290	300,000,000	
TOTAL															**244,858,290**	**300,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**17,382,191,529**	**14,307,481,600**	
3	**27**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**10,696,946,329**	**13,144,000,000**	
3	**27**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**80,600,000**	**88,000,000**	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Dokumen Renstra Disbunak yang tersusun Jumlah Dokumen Renja Disbunak yang tersusun tepat waktu Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan dan Peternakan yang tersusun	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			65,600,000	70,000,000	
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 Dokumen			5,000,000	6,500,000	
3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi Renja Disbunak Jumlah dokumen SPIP	1 Dokumen 1 Dokumen			10,000,000	11,500,000	
3	**27**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**10,102,695,821**	**12,120,000,000**	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan			10,026,895,821	12,000,000,000	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah dokumen laporan keuangan yang akuntabel Terpenuhinya pembayaran jasa administrasi keuangan (bulan)	10 Buku 12 Bulan			75,800,000	120,000,000	
3	**27**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**90,000,000**	**100,000,000**	
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian selama setahun	12 Bulan			90,000,000	100,000,000	
3	**27**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**135,050,508**	**309,000,000**	
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Komponen instalasi Listrik	10 Unit			500,000	2,500,000	

3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 unit			15,000,000	120,000,000	
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah kebutuhan ATK (bulan) Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan)	12 Bulan 12 Bulan			29,550,508	60,000,000	
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah kebutuhan bahan cetakan dan penggadaan (bulan)	12 Bulan			6,000,000	6,500,000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Terlaksananya koordinasi dan konsultasi baik ke provinsi maupun kepusat	20 kali			84,000,000	120,000,000	
3	**27**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**96,600,000**	**137,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah materai yg tersedia Terpenuhinya kebutuhan pengarsipan surat menyurat	25 lembar 12 Bulan			600,000	2,000,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah kebutuhan komunikasi telfon, air dan listrik kantor (bulan)	12 Bulan			58,000,000	70,000,000	
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Tersedianya jasa pelayanan umum dikantor	12 Bulan			38,000,000	65,000,000	
3	**27**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**192,000,000**	**390,000,000**	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)	3 Unit			36,000,000	175,000,000	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara (unit)	10 Unit			5,000,000	15,000,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Pembayaran PBB Gedung Kantor Rehap UPT Puskeswan 150.000.000	1 Tahun 1 Paket			151,000,000	200,000,000	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**5,089,385,200**	**445,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**										**130,940,000**	**155,000,000**	
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						Jumlah pengawasan yang dilaksanakan	27 kali			48,686,000	55,000,000	

3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						Terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	12 Bulan			82,254,000	100,000,000	
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**187,600,000**	**90,000,000**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak Terlaksananya pengawasan mutu bibit	5 kali 12 Bulan			187,600,000	90,000,000	
3	**27**	**02**	2.04		**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**										**20,000,000**	**50,000,000**	
3	27	02	2.04	01	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan Ketersediaan Alkes penunjang pengobatan ternak Terjaminnya ketersediaan obat hewan di tingkat peternak	12 Unit 1 Paket 1 Paket			20,000,000	50,000,000	
3	**27**	**02**	2.05		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**78,800,000**	**85,000,000**	
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan						Pelaksanaan pengawasan produksi benih / bibit ternak di kelompok peternak	12 Bulan			78,800,000	85,000,000	
3	**27**	**02**	2.06		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**										**4,672,045,200**	**65,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						Jumlah bibit ternak kambing yang diadakan Jumlah bibit ternak sapi yang diadakan Jumlah kandang ayam yang diadakan Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	16 ekor 319 ekor 3 Unit 19 kelompok			4,672,045,200	65,000,000	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**877,686,000**	**232,266,400**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**										**118,886,000**	**146,000,000**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Jumlah bibit aren yang diadakan Jumlah bibit kelapa yang diadakan Jumlah bibit lada yang diadakan Terlaksananya intensifikasi sawit	2000 Bibit 4000 Bibit 15000 Bibit 1 Paket			73,486,000	81,000,000	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya						Pelaksanaan pendampingan kegiatan APBD Tk. I / APBN,Penerbitan STDB	1 Tahun			45,400,000	65,000,000	

3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**											**0**	**0**	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani											0	0	
3	**27**	**03**	2.04		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**											**758,800,000**	**86,266,400**	
3	27	03	2.04	01	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum						Jumlah kawasan kelompok tani ternak yang teridentifikasi dan penetapan lahan pengembalaan umum	3 Kelompok				758,800,000	86,266,400	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**536,800,000**	**286,215,200**	
3	**27**	**04**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**398,000,000**	**108,715,200**	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis						KIE Penyakit hewan dan zoonosis Terlaksananya vaksinasi Tersedianya alkes penunjang vaksinasi	10 kecamatan 10 Kecamatan 1 Paket				398,000,000	108,715,200	
3	**27**	**04**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**											**50,000,000**	**75,000,000**	
3	27	04	2.02	01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan						Jumlah analisis sampel ternak yang diperiksa Ketersediaan Alat Kesehatan Hewan penunjang surveilans	200 Sample 1 Paket				50,000,000	75,000,000	
3	**27**	**04**	2.04		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**88,800,000**	**102,500,000**	
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan						Jumlah unit usaha hewan dan produk hewan	30 unit				20,000,000	32,500,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						Jumlah Produk Hewan dan Produk Asal Hewan KIE dan Pengawasan Kelompok Penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban	50 Sample 10 Kecamatan				68,800,000	70,000,000	
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**90,394,000**	**100,000,000**	
3	**27**	**05**	2.01		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**90,394,000**	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	27	05	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						Jumlah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan	20 Kali			90,394,000	100,000,000	
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**										**90,980,000**	**100,000,000**	

3	**27**	**06**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**									**90,980,000**	**100,000,000**	
3	27	06	2.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						Jumlah kegiatan penilaian kelayakan dan pertimbangan teknis yang dilaksanakan	10 Kali			90,980,000	100,000,000	
														TOTAL	**17,382,191,529**	**14,307,481,600**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0010 UPTD Balai Pembibitan dan Tanaman Perkebunan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**486,438,449**	**500,000,000**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**486,438,449**	**500,000,000**	
3	**27**	**03**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**										**486,438,449**	**500,000,000**	
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Jumlah Bibit Sawit yang diadakan	1000 Bibit			486,438,449	500,000,000	
														TOTAL	**486,438,449**	**500,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0011 UPT Pembibitan dan Perawatan Ternak Petangis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**485,686,600**	**600,000,000**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**485,686,600**	**600,000,000**	
3	**27**	**02**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**										**485,686,600**	**600,000,000**	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Kab. Paser, Batu Engau, Petangis			Terlaksananya pengawasan mutu benih di UPTD Pembibitan Petangis	12 Bulan			485,686,600	600,000,000	
														TOTAL	**485,686,600**	**600,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0012 UPT PKH Kuaro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
														Prioritas

									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**150,999,883**	**165,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**150,999,883**	**165,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**150,999,883**	**165,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										150,999,883	165,000,000	
														TOTAL	**150,999,883**	**165,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0013 UPT PKH Long Ikis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**44,525,532**	**65,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**44,525,532**	**65,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**44,525,532**	**65,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										44,525,532	65,000,000	
														TOTAL	**44,525,532**	**65,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0014 UPT PKH Batu Engau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**95,334,725**	**120,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**95,334,725**	**120,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**95,334,725**	**120,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										95,334,725	120,000,000	
														TOTAL	**95,334,725**	**120,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0015 UPT PKH Muara Komam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									**40,364,000**	**55,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**									**40,364,000**	**55,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**									**40,364,000**	**55,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner									40,364,000	55,000,000	
													TOTAL	**40,364,000**	**55,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0016 UPT PKH Tana Paser

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**107,254,550**	**120,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**107,254,550**	**120,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**107,254,550**	**120,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										107,254,550	120,000,000	
														TOTAL	**107,254,550**	**120,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0017 UPT PKH Pasir Belengkong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**77,776,250**	**85,000,000**	
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**										**77,776,250**	**85,000,000**	
3	**27**	**04**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**77,776,250**	**85,000,000**	
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner										77,776,250	85,000,000	
														TOTAL	**77,776,250**	**85,000,000**	

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Peternakan
Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0018 UPT RPH Jone

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**260,167,874**	**275,000,000**	
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**										**260,167,874**	**275,000,000**	
3	**27**	**03**	2.02		**Pembangunan Prasarana Pertanian**										**260,167,874**	**275,000,000**	
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan						Pemeliharaan dan pelaksanaan potong hewan di RPH	12 Bulan			260,167,874	275,000,000	
														TOTAL	**260,167,874**	**275,000,000**	

Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.31.2.17.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**11,458,782,745**	**12,622,300,000**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**11,187,182,745**	**12,240,300,000**	
2	**17**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**52,394,800**	**62,600,000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen renstra	10 buku			25,368,000	30,000,000	
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen RKA Perubahan	10 dokumen			10,287,800	15,200,000	
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen DPA	10 dokumen			0	0	

2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen DPA Perubahan	10 buku			0	0	
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen LKjIP	10 buku			9,244,000	8,100,000	
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Evaluasi	10 buku			20,179,000	24,300,000	
2	**17**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**10,725,728,735**	**11,700,000,000**	
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya gaji dan tunjangan asn	12 bulan			10,095,164,591	11,000,000,000	
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya belanja administrasi keuangan	12 bulan			630,564,144	700,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Keuangan	4 triwulan			0	0	
2	**17**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**351,743,960**	**382,600,000**	
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya komponen listrik/penerangan	12 bulan			0	0	

2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya perlengkapan dan peralatan ktr	10 unit			66,000,000	38,000,000	
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya kebutuhan logistik kantor	12 bulan			53,389,960	60,300,000	
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan			31,884,000	37,500,000	
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	12 bulan			4,060,000	6,800,000	
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya kebutuhan koordinasi	12 bulan			196,410,000	240,000,000	
2	**17**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**0**	
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peralatan dan mesin kantor	10 unit			0	0	
2	**17**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**18,385,250**	**49,000,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat	12 bulan			2,500,000	4,000,000	

2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya kebutuhan jasa komunikasi/ air dan listrik	12 bulan			15,885,250	45,000,000	
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makan minum kantor	12 bulan			0	0	
2	**17**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**38,930,000**	**46,100,000**	
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan jabatan	12 bulan			0	0	
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya pemeliharaan kendaraan operasional	2 unit			35,400,000	42,100,000	
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										3,530,000	4,000,000	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										**55,400,000**	**87,000,000**	
2	**17**	**03**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**										**55,400,000**	**87,000,000**	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen data best koperasi	10 buku			27,800,000	42,000,000	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah koperasi yang RAT	70 koperasi			27,600,000	45,000,000	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										**0**	**0**	
2	**17**	**04**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP yang dinilai	5 Kop			0	0	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			KSP/USP yang diberi penghargaan	2 Kop			0	0	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**0**	**0**	
2	**17**	**05**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pengurus yang dilatih	30 orang			0	0	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**										**55,400,000**	**70,000,000**	
2	**17**	**06**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**55,400,000**	**70,000,000**	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah koperasi yang diberdayakan	6 Kop			55,400,000	70,000,000	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										**55,400,000**	**75,000,000**	
2	**17**	**07**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**										**55,400,000**	**75,000,000**	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen data best	10 buku			0	0	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ukm mandiri	10 ukm			0	0	
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			sinkronisasi data ukm	10 kecamatan			55,400,000	75,000,000	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**105,400,000**	**150,000,000**	

2	**17**	**08**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**105,400,000**	**150,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ukm yang dilatih	10 orang			105,400,000	150,000,000	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**												
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**										**0**	**0**	
3	**27**	**02**	2.03		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**0**	**0**	
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil										0	0	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**										**9,880,226,334**	**6,805,000,000**	
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**										**55,400,000**	**45,000,000**	
3	**30**	**02**	2.01		**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**										**55,400,000**	**45,000,000**	
3	30	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	10 dokumen			55,400,000	45,000,000	
3	**30**	**02**	2.06		**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**										**0**	**0**	
3	30	02	2.06	03	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terawasinya distribusi bahan berbahaya	5 kecamatan			0	0	
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**										**9,419,532,400**	**6,085,000,000**	
3	**30**	**03**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**										**2,809,018,800**	**45,000,000**	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun	16 pasar			2,809,018,800	45,000,000	

3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			tersedianya fasilitas sarana distribusi perdagangan	12 bulan			0	0	
3	**30**	**03**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**										**6,610,513,600**	**6,040,000,000**	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						jumlah pengelola pasar yang dibina	7 pasar			36,881,200	40,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			penyediaan sarana distribusi perdagangan	12 bulan			6,573,632,400	6,000,000,000	
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**										**68,464,200**	**130,000,000**	
3	**30**	**04**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**										**0**	**0**	
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Ketersediaan Bapokting	10 kecamatan			0	0	
3	30	04	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			laporan daftar harga	60 bapokting			0	0	
3	**30**	**04**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**										**55,396,000**	**85,000,000**	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			laporan bulanan bapokting	8 pasar			35,461,000	50,000,000	
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			laporan harga bapokting terintegrasi	8 pasar			19,935,000	35,000,000	

3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			operasi pasar	30 kegiatan			0	0	
3	**30**	**04**	2.03		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**										**13,068,200**	**45,000,000**	
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen perizinan	50 dokumen			13,068,200	45,000,000	
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kios pupuk yang diawasi	32 kios			0	0	
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**										**42,308,600**	**95,000,000**	
3	**30**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**42,308,600**	**95,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			terseianya data produk ekspor unggulan	5 ukm			30,175,900	45,000,000	
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan pameran dagang nasional	2 kali			0	0	
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan pameran dagang lokal	2 kali			0	0	
3	30	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			pelaku usaha ekspor	10 pelaku usaha			12,132,700	50,000,000	
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**										**239,121,134**	**400,000,000**	

3	**30**	**06**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**										**239,121,134**	**400,000,000**	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah UTTP yang ditera	200 uttp			183,721,134	400,000,000	
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah uttp yang diawasi	200 uttp			55,400,000	0	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**										**55,400,000**	**50,000,000**	
3	**30**	**07**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**										**55,400,000**	**50,000,000**	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah produk yang dipamerkan	20 Produk			55,400,000	50,000,000	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**										**1,416,200,000**	**2,290,000,000**	
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**										**1,360,800,000**	**2,245,000,000**	
3	**31**	**02**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**										**1,360,800,000**	**2,245,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ikm yang dilatih	10 orang			750,000,000	150,000,000	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						Jumlah IKM yang mendapat bantuan	13 ikm			55,400,000	45,000,000	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kriya yang dibina	10 Kriya			500,000,000	50,000,000	

3	31	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			meningkatnya monitoring IKHA	10 kec			55,400,000	2,000,000,000	
3	**31**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**										**55,400,000**	**45,000,000**	
3	**31**	**03**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**										**55,400,000**	**45,000,000**	
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah produk ikm yang terstandarisasi	5 ikm			55,400,000	45,000,000	
														TOTAL	**22,755,209,079**	**21,717,300,000**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0001 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**515,354,000**	**0**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**515,354,000**	**0**	
4	**01**	**03**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**										**515,354,000**	**0**	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi Pokja pemilihan untuk melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan (KAK/spesifikasi teknis,gambar,HPS dan rancangan kontrak) dari PPK Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pengadaan barang/jasa Melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Menyusun evaluasi dan laporan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa	380 Paket 12 Bulan 12 Kali 1 Dokumen			121,310,000	0	
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Melakukan koordinasi dengan OPD Kab.Paser dan LKPP Pemeliharaan sistem server LPSE Pemenuhan standart pelayanan LPSE Pengelolaan Layanan LPSE	12 Bulan 2 Unit 17 Dokumen 12 Bulan			288,944,000	0	

4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fasilitasi pelaporan Korsupgah dan Stranas PK Fasilitasi proses penyesuaian/inpassing Jabatan Fungsional PPBJ Penanganan konsultasi,aduan/sanggah dan pendampingan Penyusunan kode etik,SOP Manajemen risiko dan dokumen mitigasi risiko	1 Kali 6 Orang 12 Bulan 4 Dokumen			105,100,000	0	
															TOTAL	**515,354,000**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0002 Bagian Tata Pemerintahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**849,722,191**	**0**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**849,722,191**	**0**	
4	**01**	**02**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**										**849,722,191**	**0**	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah camat dan kecamatan yang dinilai Jumlah lurah dan kelurahan yang dinilai Jumlah pelaksanaan upacara peringatan hari hari besar nasional Jumlah pelayanan administrasi terpadu di monitoring Rancangan kebijakan	10 Kecamatan 5 Kelurahan 13 Kali 10 Dokumen 5 Dokumen			274,313,391	0	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Koordinasi proses penataan daerah survey identifikasi dan rapat koordinasi segmen batas antar daerah survey identifikasi dan rapat koordinasi segmen batas antar desa antar kecamatan Survey identifikasi , verifikasi, pembakuan nama rupa rupa bumi	1 Kali 3 Kali 3 Kali 10 Dokumen			300,580,600	0	

4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Tahunan (LKPJ Tahunan) Tahun 2020 Jumlah Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah PD yang menyusun laporan standar Pelayanan minimal umlah Laporan LPPD Perangkat Daerah	15 Dokumen 10 Dokumen 6 PD 41 Dokumen			274,828,200	0	
														TOTAL	**849,722,191**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0003 Bagian Hukum

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**479,958,400**	**0**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**479,958,400**	**0**	
4	**01**	**02**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**										**479,958,400**	**0**	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perda, Perbup, Instruksi, SK Bupati	750 dokumen			165,141,500	0	
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kasus Hukum Yang Ditangani Kelurahan/Desa sadar hukum Laporan aksi HAM dan Kabupaten Peduli HAM	2 Kasus 11 Kelurahan/Desa 4 Triwulan			196,397,000	0	
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Himpunan Produk Hukum yang disampaikan ke Perangkat Daerah	100 Dokumen			118,419,900	0	
														TOTAL	**479,958,400**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0004 Bagian Organisasi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**793,708,719**	**0**	

4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**793,708,719**	**0**	
4	**01**	**01**	2.13		**Penataan Organisasi**										**793,708,719**	**0**	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah anjab strutural pelaksana dan fungsional PD yang disusun jumlah dokumen penetapan kebutuhan pegawai jumlah inforjab struktural PD yang dievaluasi jumlah PD yang dievaluasi Jumlah retusi PD yang disusun dan direvisi	41 PD 2 Dokumen 41 PD 41 PD 41 PD			255,769,600	0	
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PD yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat Jumlah PD yang menerapkan pelayanan publik inovatif Jumlah PD yang menyusun dan menerapkan SOP sesuai ketentuan Persentase PD yang menerapkan tata naskah dinas sesuai perundangan	15 PD 10 PD 42 PD 75 Persen			247,951,700	0	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PD dengan nilai RB>70 Jumlah PD yang mengikuti sosialisasi pedoman pelaksanaan budaya kerja	15 PD 42 PD			133,915,100	0	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Perangkat Daerah yang dimonitoribng dan dievaluasi kualitas pelayanan publik	42 PD			36,180,819	0	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen LKjIP Kabupaten yang tersusun Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	1 Dokumen 4 Kali			119,891,500	0	
														TOTAL	**793,708,719**	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**13,219,498,232**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**13,219,498,232**	**0**	
4	**01**	**01**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**										**44,128,000**	**0**	

4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Barang Milik Daerah Yang diasuransikan	3 Unit			44,128,000	0	
4	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**202,720,000**	**0**	
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Tata Usaha,Staf Ahli dan Kepegawaian	100 Berkas			140,440,000	0	
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN Yang Mengikuti Sosialisasi	180 Orang			62,280,000	0	
4	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**5,907,162,100**	**0**	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Komponen Listrik dan Penerangan	16 Jenis			87,510,000	0	
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis barang Perlengkapan Kantor	17 Jenis			305,196,400	0	
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga	25 Item			510,724,800	0	
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	40 Jenis 30 Jenis			1,245,550,300	0	
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Fotocopy Jenis Cetakan Penjilidan	60000 Lembar 9 Jenis 30 Buku			47,008,200	0	
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tamu Yang Terlayani dan jumlah kunjungan kerja	150 Kali			1,006,487,400	0	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	6000 Porsi 7500 Kotak 150 Kali			2,596,685,000	0	
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penatausahaan Arsip Dinamis Yang Terlaksana	12 Bulan			108,000,000	0	
4	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**100,218,700**	**0**	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mebel yang disediakan	12 Unit			100,218,700	0	
4	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**3,321,176,000**	**0**	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kantor	1000 Lembar			10,000,000	0	
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbayarnya Rek Air,Listrik dan Internet	12 Bulan			1,943,956,000	0	
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	5 Unit			1,367,220,000	0	
4	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**2,214,682,032**	**0**	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	3 Unit			358,230,000	0	
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	20 Unit			984,130,000	0	
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Gedung Kantor Yang Direhab	3 Unit			872,322,032	0	
4	**01**	**01**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**										**1,429,411,400**	**0**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 Bulan			778,380,200	0	
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 Bulan			651,031,200	0	
														TOTAL	**13,219,498,232**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0006 Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**8,643,703,152**	**12,053,272,132**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**8,643,703,152**	**12,053,272,132**	
4	**01**	**02**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**										**8,643,703,152**	**12,053,272,132**	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	100 Persen			10,661,808,400	11,727,989,240	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,& Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	100 Persen			6,155,860,800	7,211,446,880	
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pelaksanakan Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	100 Persen			234,868,552	2,583,554,072	
														TOTAL	**8,643,703,152**	**12,053,272,132**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0007 Bagian Kerjasama

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**260,860,300**	**0**	
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**										**260,860,300**	**0**	

4	**01**	**02**	2.04		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**										**260,860,300**	**0**	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah MoU Kerja sama Dalam Negeri yang terlaksanakan	65 MoU			116,629,000	0	
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah MoU yang telah dievaluasi pada Pelaksanaan Kerja sama	65 MoU			144,231,300	0	
														TOTAL	**260,860,300**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0008 Bagian Perekonomian

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**229,334,000**	**0**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**229,334,000**	**0**	
4	**01**	**03**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**										**229,334,000**	**0**	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah BUMD dan BLUD Dengan Kinerja Baik	5 Unit			77,220,000	0	
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen			55,534,000	0	
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi, koordinasi dan pemantauan kegiatan dan pelaku usaha mikro kecil	10 Dokumen			45,000,000	0	
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah berdirinya Puskesmas BLUD	5 Puskesmas			51,580,000	0	
														TOTAL	**229,334,000**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0009 Bagian Administrasi Pembangunan

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												

4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**268,766,759**	**0**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**268,766,759**	**0**	
4	**01**	**03**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**268,766,759**	**0**	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen penyusunan program pembangunan	10 Dokumen			100,702,159	0	
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	10 Dokumen			71,900,000	0	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	10 Dokumen			96,164,600	0	
														TOTAL	**268,766,759**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0010 Bagian Sumber Daya Alam

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**168,632,874**	**0**	
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**										**168,632,874**	**0**	
4	**01**	**03**	2.04		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**										**168,632,874**	**0**	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	30 kali			75,591,874	0	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	25 Kali			46,342,000	0	
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	30 Kali			46,699,000	0	
														TOTAL	**168,632,874**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0011 Bagian Protokol dan Pimpinan

Kode						**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju**	**Keterangan**

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**1,643,235,958**	**0**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**1,643,235,958**	**0**	
4	**01**	**01**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**1,643,235,958**	**0**	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan/acara yang terlaksana	150 Kegiatan				688,711,909	0	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								481,060,000	0	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumentasi tugas pimpinan	150 Dokumen				473,464,049	0	
															TOTAL	**1,643,235,958**	**0**	

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.00.0012 Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**										**27,949,276,355**	**24,378,104,200**	
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**27,949,276,355**	**24,378,104,200**	
4	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**97,468,480**	**0**	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Perencanaan	8 Dokumen			60,236,480	0	
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SETDA (LKJIP,TEPRA,Lap Keu,Evaluasi Renja dan SPIP)	6 Dokumen			37,232,000	0	
4	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**26,796,326,425**	**23,452,000,000**	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot				12 Bulan			26,335,940,154	23,452,000,000	
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan PNS dan Non PNS	12 Bulan			443,761,271	0	

4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK:, Prognosis:)	12 Dokumen			16,625,000	0	
4	**01**	**01**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**										**1,055,481,450**	**926,104,200**	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot				12 Bulan			291,380,250	233,104,200	
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kepala dan Wakil Kepala Daerah Yang Tersedia	14 Stel			64,101,200	0	
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terseidanya Medical Check UP Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan			200,000,000	200,000,000	
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan			500,000,000	493,000,000	
														TOTAL	**27,949,276,355**	**24,378,104,200**	

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.00.0000 Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**												
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**										**54,141,668,012**	**56,551,751,382**	
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**34,644,006,482**	**36,376,206,810**	
4	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**111,474,570**	**117,048,299**	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja)	2 dokumen			61,551,120	64,628,676	
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 dokumen			2,923,450	3,069,623	
4	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP)	3 dokumen			47,000,000	49,350,000	
4	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**6,371,204,461**	**6,689,764,684**	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan			6,316,204,461	6,632,014,684	
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Dokumen Keuangan (SPM, SPP)	1000 dokumen			25,000,000	26,250,000	
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Laporan Keuangan	15 dokumen			30,000,000	31,500,000	

4	**02**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**245,378,000**	**257,646,900**	
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Terpenuhinya pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105 stel				0	0	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat	20 orang				245,378,000	257,646,900	
4	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,075,627,329**	**1,129,408,697**	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Komponen Yang Disediakan	7 jenis				31,008,810	32,559,251	
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	11 unit				368,175,459	386,584,232	
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Terpenuhinya Keperluan Bahan Logistik Kantor	40 jenis				105,756,730	111,044,567	
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Terpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis				36,008,100	37,808,505	
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						Jumlah bahan bacaan bacaan yang disediakan	7636 Eksemplar				57,403,800	60,273,990	
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Jumlah Tamu Yang Dilayani	2000 orang				32,501,400	34,126,470	
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Yang Dilaksanakan	96 kali				338,329,000	355,245,450	
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Tersusunnya Arsip Dinamis Sekretariat DPRD	8 dokumen				106,444,030	111,766,232	
4	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**501,984,440**	**527,083,662**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	3 unit			0	0	
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan	34 jenis			501,984,440	527,083,662	
4	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,510,990,272**	**1,586,539,786**	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19 rekening			590,163,200	619,671,360	
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan			920,827,072	966,868,426	

4	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,234,149,690**	**1,295,857,175**	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara	4 unit			376,647,350	395,479,718	
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Yang Dipelihara	3 unit			187,639,820	197,021,811	
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel						Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Mebel	50 buah			15,000,000	15,750,000	
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	83 unit			167,483,720	175,857,906	
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor Yang DIpelihara	5 unit			370,076,800	388,580,640	
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Yang Dipelihara	27 unit			117,302,000	123,167,100	
4	**02**	**01**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**										**22,287,085,900**	**23,401,440,195**	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan			21,594,645,000	22,674,377,250	
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						Jumlah Pakaian Dinas Yang Disediakan	150 stel			330,159,200	346,667,160	
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						Terfasilitasinya Layanan Pemeliharaan Kesehatan Anggota DPRD	30 orang			362,281,700	380,395,785	
4	**02**	**01**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**										**1,306,111,820**	**1,371,417,412**	
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD						Jumlah Fraksi Yang Di Fasilitasi	6 fraksi			53,405,110	56,075,366	
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						Jumlah Rapat Paripurna DPRD	20 kali			679,359,500	713,327,475	
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	36 jenis			573,347,210	602,014,571	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**										**19,497,661,530**	**20,175,544,572**	
4	**02**	**02**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**										**2,863,084,410**	**3,006,238,632**	

4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Program Pembentukan Perda yang ditetapkan	1 Dokumen			9,259,780	9,722,769	
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						Rancangan Perda yang disetujui	10 Raperda			2,048,564,840	2,150,993,082	
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						Kajian Perundang-undangan yang dihasilkan	5 Dokumen			335,399,950	352,169,948	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik						Penjelasan/Keterangan/atau Naskah Akademik inisiasi DPRD yang dihasilkan	3 Dok naskah akademik			460,599,950	483,629,948	
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD						Tata Tertib DPRD Yang Ditetapkan	1 dokumen			18,519,780	19,445,770	
4	**02**	**02**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**										**673,788,740**	**707,478,178**	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS						Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan dokumen KUA-PPAS	1 Dok rekomendasi			84,602,610	88,832,741	
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan dokumen KUPA-PPASP	1 Dok rekomendasi			31,142,520	32,699,646	
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD						Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan dokumen APBD	1 Dok rekomendasi			147,242,610	154,604,741	
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan						Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan dokumen APBD perubahan	1 Dok rekomendasi			30,461,400	31,984,470	
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						Tersusunnya rekomendasi hasil pembahasan dokumen pertanggungj jawaban APBD	1 Dok rekomendasi			380,339,600	399,356,580	
4	**02**	**02**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**										**8,194,157,060**	**8,603,864,915**	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum						Rekomendasi Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 dok rekomendasi			1,627,644,870	1,709,027,114	
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						Rekomendasi Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infrastruktur	10 dok rekomendasi			1,489,344,860	1,563,812,103	
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						Rekomendasi Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 dok rekomendasi			1,280,224,770	1,344,236,009	
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						rekomendasi Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian	10 dok rekomendasi			1,058,289,870	1,111,204,364	
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						Rekomendasi Pengawasan Urusan Pemerintah BIdang Sumber Daya Alam	10 dok rekomendasi			1,058,277,600	1,111,191,480	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						Terkoondisikannya Pengawasan Tidak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	10 dok rekomendasi			30,862,680	32,405,814	
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran						Rekomendasi Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 dok rekomendasi			1,237,409,850	1,299,280,343	
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah						Rekomendasi Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dok rekomendasi			412,102,560	432,707,688	
4	**02**	**02**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**										**3,535,458,300**	**3,415,231,216**	
4	02	02	2.04	01	Orientasi DPRD						Jumlah Anggota DPRD Yang Melaksanakan Orientasi	30 orang			0	0	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD						Jumlah Anggota DPRD Yang Mengikuti Bimtek	30 orang			1,380,336,500	1,449,353,325	
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan						Terlaksananya Penyampaian Informasi Kegiatan DPRD	24 dokumen			489,923,910	514,420,106	
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						Tersusunnya Draft Hasil Analisa Tim Ahli/Kelompok Pakar Sebagai Bahan Pembahasan Rapat AKD	12 dokumen			314,242,000	32,954,100	
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						Tersusunnya Draft Laporan Bulanan Masing-Masing Fraksi	72 dokumen			274,810,000	288,550,500	
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						Tersusunnya Laporan Aduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	12 dokumen			1,067,025,480	1,120,376,754	
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD						Tersusunnya Program Kerja Tahunan DPRD	1 dokumen			9,120,410	9,576,431	
4	**02**	**02**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**										**1,762,258,020**	**1,850,370,921**	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah						Tersusunnya Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah	4 dok laporan			69,370,560	72,839,088	
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						Tersusunnya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1 dokumen			114,989,860	120,739,353	
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses						Tersusunnya Program Kerja Tahunan DPRD	1 dokumen			1,577,897,600	1,656,792,480	
4	**02**	**02**	2.06		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**										**50,000,000**	**52,500,000**	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD						Tersusunnya dokumen kode etik DPRD	1 Dokumen			0	0	

4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD						Tersusunnya laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan kode etik DPRD	1 Dokumen			50,000,000	52,500,000	
4	**02**	**02**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**										**2,418,915,000**	**2,539,860,710**	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						Tersusunnya laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen			553,608,400	581,288,820	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						Tersusunnya laporan kinerja DPRD	1 Dokumen			25,000,000	26,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						Tersusunnya jadwal kegiatan DPRD	12 Dokumen			1,009,040,800	1,059,492,800	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						Terlaksananya fasilitasi tugas pimpinan	12 Dokumen			831,265,800	872,829,090	
														TOTAL	**54,141,668,012**	**56,551,751,382**	

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**01**				**PERENCANAAN**										**14,125,160,333**	**15,781,426,648**	
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**9,444,195,747**	**10,426,499,661**	
5	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**516,064,811**	**568,000,000**	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian muatan Renja dengan Renstra tahun berkenaan Persentase ketepatan tahapan penyusunan Renstra dan Renja Persentase rata-rata capaian area perubahan RB	100 Persen 100 Persen 30 Persen			200,807,000	210,000,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen RKA-SKPD yang tersusun dengan smart Pendampingan penyusunan ASB Sub Kegiatan di Bappedalitbang	2 Dokumen 5 ASB			157,402,900	170,000,000	

5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah DPA yang tersusun tepat waktu	2 Dokumen			17,308,911	38,000,000	
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase capaian kinerja program PD ≥ 90% Persentase capaian sasaran strategis perangkat daerah Persentase ketepatan waktu pengukuran evaluasi kinerja per triwulan	85 Persen 87 Persen 100 Persen			140,546,000	150,000,000	
5	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**7,439,408,411**	**8,202,809,450**	
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Daftar Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			7,084,288,500	7,792,717,350	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SPP dan SPM yang dibuat sesuai dengan SOP	500 SPP/SPM			88,665,500	97,532,050	
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1 Dokumen			266,454,411	312,560,050	
5	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**411,506,800**	**450,529,430**	
5	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi	160 Orang			111,025,500	120,000,000	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan tekhnis	30 Orang			300,481,300	330,529,430	
5	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**902,367,025**	**1,012,445,791**	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang diadakan	12 Bulan			2,513,100	2,764,410	

5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	31 Unit			13,198,304	15,000,000	
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ATK yang tersedia Jumlah peralatan kebersiah yang tersedia	12 Bulan 12 Bulan			124,004,210	136,304,631	
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan			24,496,000	26,945,600	
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang diadakan	837 Eksemplar			4,854,600	5,340,060	
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Kebutuhan makan dan minum rapat pegawai	105 Kali 3000 Kotak			395,953,500	435,548,850	
5	01	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang didukung	1 Sistem			337,347,311	390,542,240	
5	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**45,107,800**	**50,000,000**	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	31 Unit			45,107,800	50,000,000	
5	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**129,740,900**	**142,714,990**	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan dinas operasional yang terbayarkan	6 Unit			84,819,000	93,300,900	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan kantor yang terpelihara	12 Bulan			44,921,900	49,414,090	

5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**										**1,573,354,778**	**1,688,248,015**	
5	**01**	**02**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**										**913,665,856**	**963,622,883**	
5	01	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase keselarasan antara dokumen RKPD dengan dokumen Kebijakan lainnya	100 Persen			284,000,000	300,000,000	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang sesuai Tema RKPD	10 Persen			176,020,803	193,622,883	
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase proses penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai dengan tahapan dan tepat waktu	100 Persen			453,645,053	470,000,000	
5	**01**	**02**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										**344,352,711**	**358,295,102**	
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketersediaan data kinerja perangkat daerah	60 persen			127,720,800	120,000,000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase data perencanaan yang dipublikasikan	100 persen			216,631,911	238,295,102	
5	**01**	**02**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**										**315,336,211**	**366,330,030**	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase indikator kinerja sasaran RKPD yang mencapai target	100 Persen			158,302,911	193,593,400	
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen evaluasi Persentase program dengan capaian kinerja yang telah >=100%	100 Persen 100 Persen			157,033,300	172,736,630	
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**										**3,107,609,808**	**3,666,678,972**	
5	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**										**1,144,027,453**	**1,316,810,792**	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan	100 Persen			288,718,911	337,051,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**			**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program	**Keluaran Sub Kegiatan**	**Hasil Kegiatan**			**Prioritas**

										Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			**Pembangunan Nasional**
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang Pemerintahan Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang Pemerintahan	80 Persen 80 Persen			38,550,000	42,405,000	
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Kesehatan Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen 100 Persen			465,949,422	551,464,760	
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase konsistensi tolok ukur (Indikator kinerja, target dan alokasi anggaran) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	80 Persen			37,625,000	41,387,500	
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang Pembangunan Manusia Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia	80 Persen 80 Persen			108,548,120	119,402,932	
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Kesehatan Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	78 Persen 78 Persen			204,636,000	225,099,600	
5	**01**	**03**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**										**1,096,926,733**	**1,265,000,000**	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Pertanian dan Perikanan	100 Persen 100 Persen			264,617,822	330,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase konsistensi tolok ukur (Indikator kinerja, target dan alokasi anggaran) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian	80 Persen			30,000,000	33,000,000	
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang Perekonomian Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang Perekonomian	80 Persen 80 Persen			60,000,000	66,000,000	
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	78 Persen 78 Persen			200,000,000	220,000,000	
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Bidang SDA	78 Persen			242,308,911	286,000,000	
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase konsistensi tolok ukur (Indikator kinerja, target dan alokasi anggaran) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang SDA	80 Persen			30,000,000	33,000,000	
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang SDA Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang SDA	80 Persen 80 Persen			70,000,000	77,000,000	
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Bidang SDA	78 Persen			200,000,000	220,000,000	
5	**01**	**03**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**										**866,655,622**	**1,084,868,180**	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Pekerjaan Umum Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan sub bidang Perhubungan dan kominfostaper	100 Persen 100 Persen			152,728,811	187,461,890	
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase konsistensi tolok ukur (Indikator kinerja, target dan alokasi anggaran) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	80 Persen			64,769,900	71,246,890	
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang Infrastruktur Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang Infrastruktur	78 Persen 80 Persen			109,032,900	119,936,190	
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Pekerjaan Umum Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Sub Bidang Perhubungan dan Kominfostaper	78 Persen 78 Persen			86,213,900	187,461,890	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase ketepatan tahapan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan Bidang Kewilayahan	100 Persen			154,823,411	189,765,950	
5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase konsistensi tolok ukur (Indikator kinerja, target dan alokasi anggaran) dalam dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur	80 Persen			64,769,900	71,246,890	
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			capaian program renja perangkat daerah >=80% Bidang Kewilayahan Keselarasan muatan renja dengan renstra perangkat daerah Bidang Kewilayahan	80 Persen 80 Persen			149,877,900	164,865,690	

5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat Lingkup Bidang Kewilayahan	78 Persen			84,438,900	92,882,790	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**										**2,400,914,959**	**2,354,663,300**	
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**										**2,400,914,959**	**2,354,663,300**	
5	**05**	**02**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**										**249,913,000**	**274,904,300**	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Rencana Induk Pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	1 Dokumen			249,913,000	274,904,300	
5	**05**	**02**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**										**287,198,911**	**335,379,000**	
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Kajian Karya Budaya Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	1 Dokumen			287,198,911	335,379,000	
5	**05**	**02**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**										**1,034,240,937**	**812,401,480**	
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Tata Kerja Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Dokumen Tentang Pemanfaatan Lahan Eks Tambang	1 Dokumen 1 Dokumen			639,502,537	378,189,240	
5	05	02	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Kajian Potensi Ekonomi Jalan Tol di Kabupaten Paser	1 Dokumen			394,738,400	434,212,240	
5	**05**	**02**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**										**829,562,111**	**931,978,520**	
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Uji Coba Inovasi yang Memenuhi Standar	65 Persen			213,783,000	235,161,300	
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase inovasi yang memenuhi standar	50 Persen			423,551,111	485,366,420	

5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didesiminasikan ditindaklanjuti dengan inovasi tahun berikutnya	50 Persen			192,228,000	211,450,800	
														TOTAL	**16,526,075,292**	**18,136,089,948**	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.00.0000 Badan Keuangan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.00.0000 Badan Keuangan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**303,068,467,876**	**328,118,372,844**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**38,417,017,241**	**36,230,084,881**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**213,110,400**	**234,421,440**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen			91,332,800	100,466,080	
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RKA, RKA-P, DPA, DPA-P dan RKT	5 dokumen			120,633,000	132,696,300	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja	3 dokumen			1,144,600	1,259,060	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**37,346,134,531**	**35,052,113,900**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Belanja Jaminan Sosial ASN	14 bulan 12 bulan			37,028,208,331	34,702,395,080	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayaran Jasa Adminitrasi Keuangan PNS dan Non PNS	1 Tahun			228,456,000	251,301,600	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2 dokumen			22,892,000	25,181,200	

5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jumlah Dokumen Penyiapan Bahan Pemeriksaan	15 dokumen			16,142,000	17,756,200	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersedianya Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Semesteran	18 dokumen			50,436,200	55,479,820	
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**603,812,310**	**664,193,541**	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	6 Buah			138,325,680	152,158,248	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan	66 Item			210,979,140	232,077,054	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan	315 Buah			6,050,000	6,655,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan bahan bacaan (surat kabar)	720 Examplar			2,314,080	2,545,488	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	35 Kali			194,680,000	214,148,000	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah arsip yang tertata dengan baik	800 Berkas			120,626,250	132,688,875	
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**225,000,000**	**247,500,000**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah materai	150 Lembar			1,500,000	1,650,000	

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pembayaran telepon, air dan listrik	12 Bulan			223,500,000	245,850,000	
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**28,960,000**	**31,856,000**	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	2 Unit			16,000,000	17,600,000	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin kantor yang dipelihara	7 Unit			5,040,000	5,544,000	
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit			7,920,000	8,712,000	
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**										**263,021,192,662**	**290,095,004,193**	
5	**02**	**02**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**										**5,032,272,910**	**5,535,500,201**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen			482,050,120	530,255,132	
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen			364,932,760	401,426,036	
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD yang ditindaklanjuti	42 Dokumen			473,998,000	521,397,800	
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD yang ditindaklanjuti	42 Dokumen			362,278,000	398,505,800	
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	42 Dokumen			92,858,000	102,143,800	
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD yang ditindaklanjuti	42 Dokumen			92,858,000	102,143,800	

5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Buku APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022	2 Dokumen			1,444,436,000	1,588,879,600	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Buku PAPBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022	2 Dokumen			891,625,600	980,788,160	
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Buku Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD	50 Buku			261,800,430	287,980,473	
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Perencanaan Anggaran Pendapatan yang dikoordinasikan	25 SKPD			281,931,000	310,124,100	
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Perencanaan Anggaran Belanja yang dikoordinasikan	42 SKPD			109,698,000	120,667,800	
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Peraturan Daerah Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Peraturan Daerah			173,807,000	191,187,700	
5	**02**	**02**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**										**1,057,552,487**	**1,935,000,000**	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Kas Harian	4 Laporan			239,811,987	388,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Koordinasi dan konfirmasi Laporan dana Perimbangan	7 Laporan			167,000,000	350,000,000	
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Pelaksanaan Sidang TP TGR	3 Sidang TP TGR			157,115,000	267,000,000	

5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Keuangan dengan OPD terkait	504 dokumen			145,790,000	290,000,000	
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen petunjuk Administrasi pelaksanaan penatausahaan Keuangan Daerah	1 Dokumen			167,360,000	310,000,000	
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah OPD yang dilakukan Pembinaan	42 SKPD			180,475,500	330,000,000	
5	**02**	**02**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**										**1,066,206,000**	**1,172,826,600**	
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen			80,012,400	88,013,640	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen			119,770,000	131,747,000	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dokumen			487,050,000	535,755,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Realisasi semesteran	1 dokumen			343,573,600	377,930,960	
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten/Kota	11 OPD			35,800,000	39,380,000	

5	**02**	**02**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**255,865,161,265**	**281,451,677,392**	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Tahun			245,122,712,800	269,634,984,080	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Dokumen			5,000,000,000	5,500,000,000	
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyaluran Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	139 desa			5,742,448,465	6,316,693,312	
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**										**1,630,257,973**	**1,793,283,770**	
5	**02**	**03**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**										**1,630,257,973**	**1,793,283,770**	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Buku Standarisasi Satuan Harga	1 dokumen			251,332,500	276,465,750	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Kebutuhan Standar sewa dan penetapan dan Pemanfaatan rumah dinas	2 dokumen			116,162,700	127,778,970	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Buku Induk Inventaris Barang	2 dokumen			128,672,000	141,539,200	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kab. Paser	20 dokumen			332,910,000	366,201,000	
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aset daerah yang dilelang	10 aset			189,170,000	208,087,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	10 aset			324,021,700	356,423,870	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen SK penghapusan dan lampiran penghapusan	2 dokumen			96,257,073	105,882,780	
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen hasil Berita acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah semua OPD	42 Dokumen			171,945,000	189,139,500	
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen laporan Barang Milik Daerah	2 Dokumen			19,787,000	21,765,700	
														TOTAL	**303,068,467,876**	**328,118,372,844**	

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 Badan Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**02**				**KEUANGAN**										**15,939,563,127**	**0**	
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**13,021,457,027**	**0**	
5	**02**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**430,426,197**	**0**	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Dokumen RENSTRA dan RENJA	2 Dokumen			13,000,000	0	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan	2 Dokumen			195,240,497	0	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Evaluasi Perangakat Daerah	1 Dokumen			84,125,300	0	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Evaluasi Kinerja	2 Dokumen			138,060,400	0	
5	**02**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**11,386,611,180**	**0**	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										11,106,436,364	0	

5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Pelaksanaan Akutansi	1 Dokumen			280,174,816	0	
5	**02**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**1,006,648,650**	**0**	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya komponen Instalasi Listrik	1 Tahun			0	0	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit			190,302,250	0	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun			0	0	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebersihan Gedung Kantor, Alat Tulis Kantor, Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 Jenis			165,932,800	0	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Barang Cetakan dan Penggandaan	20 Jenis			165,047,000	0	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Koran dan Peraturan Perundangundangan	365 Exemplar			1,821,200	0	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	30 Kali			233,542,400	0	
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Arsip Dinamis Yang dikelola SKPD	1604 Berkas			250,003,000	0	
5	**02**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**0**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun			0	0	
5	**02**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**155,358,400**	**0**	
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Benda Pos	60 Lembar			358,400	0	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet	12 Bulan			155,000,000	0	
5	**02**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**42,412,600**	**0**	

5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Surat Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4 unit			26,402,600	0	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	1 Paket			16,010,000	0	
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**										**2,918,106,100**	**0**	
5	**02**	**04**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**										**2,918,106,100**	**0**	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1 Dokumen			200,755,300	0	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Intensifikasi Pajak Daerah	1 Dokumen			182,047,000	0	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah										180,067,800	0	
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Sarana dan Prasarana Pajak Daerah	4 Aplikasi			0	0	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Obyek Pajak yang di data	1 Dokumen			170,644,400	0	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Penerimaan Pajak Daerah	1 Dokumen			204,389,900	0	
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi Jumlah PBB dan BPHTB yang diverifikasi	1302 WP BPHTB 86222 WP PBB			335,124,100	0	
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah										253,886,000	0	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Pelayanan dan Konsultasi Pajak yang diterima	1 Dokumen			352,029,200	0	

5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlh data hasil pemeriksaan pajak daerah	1 Dokumen			212,404,900	0	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah tunggakan pajak daerah yang diselesaikan	4700000000 Rupiah			330,299,800	0	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Keberatan Pajak Daerah yang diselesaikan	49 Kasus			255,317,800	0	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen			241,139,900	0	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Laporan Retribusi Daerah	1 Dokumen			0	0	
														TOTAL	**15,939,563,127**	**0**	

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.00.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.00.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**												
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**										**11,517,289,281**	**12,666,517,670**	
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,143,107,641**	**6,754,917,866**	
5	**03**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**209,136,581**	**227,549,700**	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah (Renstra, Renja, Ranwal)	6 Dokumen			75,010,400	80,010,900	
5	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Rencana Aksi, IKU dan IKI, Tepra, SIRUP,LPPD, Ev. Renstra dan Evaluasi RPJMD) Jumlah dokumen Data Statistik Sektoral SKPD yang tersusun Laporan Keuangan (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	10 Dokumen 1 Dokumen 15 Dokumen			134,126,181	147,538,800	
5	**03**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,399,674,360**	**5,939,641,796**	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Daftar gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan			5,190,957,130	5,710,052,843	

5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang tersusun (Laporan Rekonsiliasi Keuangan, Prognosis, CALK) Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang tersusun (SPP-SPM)	15 Dokumen 250 Dokumen			208,717,230	229,588,953	
5	**03**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**50,000,700**	**55,000,770**	
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	47 Orang Perwakilan OPD			50,000,700	55,000,770	
5	**03**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**295,540,210**	**325,094,231**	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan			1,447,800	1,592,580	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan	2 Unit			16,984,000	18,682,400	
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor	12 Bulan			40,004,910	44,005,401	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	12 Bulan			9,967,100	10,963,810	
5	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia	720 Eksemplar			4,593,600	5,052,960	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan			155,030,800	170,533,880	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah jenis arsip dinamis yang terkelola secara efektif dan efisien	11 Jenis Arsip			67,512,000	74,263,200	
5	**03**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**60,033,300**	**66,036,630**	
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Mebeleur yang diadakan	3 Unit			8,838,500	9,722,350	
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya peralatan dan peralatan mesin kantor lainnya sesuai kebutuhan	3 Unit			51,194,800	56,314,280	
5	**03**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**1,545,500**	**1,700,050**	

5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah jasa surat menyurat yang dikirim	10 Dokumen			456,500	502,150	
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah jasa komunikasi, jaringan informasi dan website BKPSDM yang terbayarkan	12 Bulan			1,089,000	1,197,900	
5	**03**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**127,176,990**	**139,894,689**	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional dan terbayarnya pajak kendaraan	2 Unit			46,471,000	51,118,100	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			17,572,000	19,329,200	
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan			58,863,990	64,750,389	
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	12 Bulan			4,270,000	4,697,000	
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**										**5,374,181,640**	**5,911,599,804**	
5	**03**	**02**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**										**1,481,375,790**	**1,629,513,369**	
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah administrasi pengangkatan CPNS dan PPPK yang terselesaikan Jumlah CPNS yang mengikuti pengambilan Sumpah Janji ASN Jumlah Peserta yang lulus Seleksi CPNS Jumlah Peserta yang lulus Seleksi PPPK	304 Orang 154 Orang 154 Orang 150 Orang			617,579,530	679,337,483	
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Tepat Waktu	160 SK			69,020,000	75,922,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	2.01	07	Evaluasi Pemberhentian ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah ASN yang mengikuti Pembekalan	53 Orang			84,292,730	92,722,003	
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Fasilitasi kegiatan KORPRI yang dapat terlaksana	4 Kegiatan			161,343,670	177,478,037	

5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Aplikasi kepegawaian yang ditingkatkan, dikelola dan dipelihara	1 Aplikasi			221,936,000	244,129,600	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah KARPEG/KARIS/KARSU/TASPEN yang telah diterbitkan di Lingkungan Pemkab. Paser Jumlah Kartu Tanda Pengenal ASN di Lingkungan Pemkab. Paser Persentase data Kepegawaian di perbaharui	100 Kartu 1 Tanda Pengenal 100 Persen			252,163,660	277,380,026	
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Persentase Rekonsiliasi Data Kepegawaian di lingkungan Pemkab. Paser	100 Persen			75,040,200	82,544,220	
5	**03**	**02**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**										**1,124,931,550**	**1,237,424,705**	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rekomendasi dan SK dari BKPSDM Paser, BKD Provinsi, BKN dan Mendagri	400 SK/Dokumen			130,754,750	143,830,225	
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah SK kenaikan pangkat yang dievaluasi Jumlah surat keputusan Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu	1 Dokumen 800 SK			163,574,000	179,931,400	
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terseleksinya jumlah ASN yang dapat mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi (Assessment) Terseleksinya jumlah ASN yang mengikuti seleksi calon Pimpinan Tinggi (Lelang Jabatan) Terselenggaranya Rapat Baperjakat	24 Orang 24 Orang 6 Rapat			830,602,800	913,663,080	
5	**03**	**02**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**										**1,969,801,800**	**2,166,781,980**	
5	03	02	2.03	02	Pengelolaan Assessment Center			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Meningkatnya mutu SDM Tim Teknis IT Assessment Center Terkelolanya sarana dan pra sarana Assessment Center	5 Orang 12 Bulan			300,804,800	330,885,280	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah pegawai dapat difasilitasi untuk mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Dinas (UDI) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Ujian Penyesuaian Ijazah (UPI) Jumlah pegawai yang dapat difasilitasi untuk mendapatkan Workshop/Sosialisasi/Pelatihan	40 Orang 33 Orang 171 Orang 100 Orang 0 Orang			975,339,800	1,072,873,780	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah ASN yang mendapatkan Tugas belajar atau ijin belajar	10 Orang			515,812,200	567,393,420	
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah SK Jabatan Fungsional yang diterbitkan tepat waktu	120 SK			114,424,000	125,866,400	
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rekomendasi peninjauan masa kerja	10 SK			63,421,000	69,763,100	
5	**03**	**02**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**										**798,072,500**	**877,879,750**	
5	03	02	2.04	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN	2 Dokumen			144,112,000	158,523,200	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN Jumlah SKP yang terkumpul dan di evaluasi Jumlah WL LHKPN yang terverifikasi lengkap dan tepat waktu	2 dokumen 4.634 SKP 224 Wajib Lapor			535,987,000	589,585,700	
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Peraturan Bupati (PERBUP) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Sistem Manajemen Kinerja ASN yang dievaluasi	2 Dokumen			86,308,500	94,939,350	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Kenaikan Gaji Berkala PNS yang terselesaikan tepat waktu Jumlah Peraturan Kepala Daerah ttg Penyusunan Standarisasi Tambahan Penghasilan Pegawai / Tunjangan Kinerja yang ditetapkan	1.800 Orang 1 Dokumen			100,286,000	110,314,600	
5	03	02	2.04	05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai										115,732,000	127,305,200	
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah kasus-kasus pelanggaran yang diselesaikan	7 kasus			155,696,500	171,266,150	
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**										**5,575,484,750**	**6,133,033,225**	
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**										**5,575,484,750**	**6,133,033,225**	
5	**04**	**02**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**										**5,575,484,750**	**6,133,033,225**	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mendapatkan pendidikan LATSAR Jumlah Pejabat yang mendapatkan pendidikan PKP, PKA dan PKN	154 Orang 56 Orang			5,575,484,750	6,133,033,225	
														TOTAL	**17,092,774,031**	**18,799,550,895**	

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.00.0000 Inspektorat Kabupaten
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.00.0000 Inspektorat Kabupaten

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**												
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**										**17,059,918,367**	**23,298,303,450**	
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**14,512,639,500**	**17,058,303,450**	
6	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**186,639,500**	**205,303,450**	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (PKPT, Renstra, Renja, DPA)	100 %			11,944,500	13,138,950	

6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (LKjIP, Evaluasi Renstra, Evaluasi Renja, Evaluasi Berkala LHP APIP)	13 Dokumen			174,695,000	192,164,500	
6	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**12,280,000,000**	**14,295,000,000**	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan			12,000,000,000	14,000,000,000	
6	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen keuangan (SPP, SPM)	200 Dokumen			250,000,000	260,000,000	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen laporan keuangan	15 Dokumen			30,000,000	35,000,000	
6	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**650,000,000**	**900,000,000**	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	20 orang			300,000,000	400,000,000	
6	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek dan pelaksanaan PKS	40 orang			350,000,000	500,000,000	
6	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**961,000,000**	**1,133,000,000**	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah komponen yang disediakan	42 Buah			6,000,000	7,000,000	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	50 Unit			500,000,000	600,000,000	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersediannya sarana dan prasarana kebersihan gedung kantor, alat tulis kantor	60 Jenis			150,000,000	160,000,000	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya bahan cetak dan pengandaan	12 Bulan			50,000,000	60,000,000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya bahan bacaan	400 Exsemplar			5,000,000	6,000,000	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	150 Kali			250,000,000	300,000,000	
6	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**50,000,000**	**60,000,000**	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah mebel yang disediakan	1 Set			50,000,000	60,000,000	
6	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**340,000,000**	**400,000,000**	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpenuhinya jasa surat menyurat	12 Bulan			200,000,000	250,000,000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			140,000,000	150,000,000	
6	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**45,000,000**	**65,000,000**	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	8 Unit			25,000,000	30,000,000	
6	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlag sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	25 Unit			10,000,000	20,000,000	
6	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	10 Unit			10,000,000	15,000,000	
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**										**2,547,278,867**	**4,540,000,000**	
6	**01**	**02**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**										**2,497,278,867**	**2,890,000,000**	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen audit kinerja (8 OPD dilingkungan pemda)	8 Dokumen			200,000,000	250,000,000	
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen audit keuangan (8 OPD dilingkungan pemda)	8 Dokumen			130,000,000	140,000,000	
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen reviu atas laporan kinerja pemerintah kabupaten (LKjIP OPD, LKjIP Pemda, LPPD, PPRG, BMD, Renja, RKPD, RKPD Perubahan, SAKIP OPD, SAKIP Pemda, SSH, ASB, HSPK)	13 Dokumen			500,000,000	600,000,000	

6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen reviu atas laporan keuangan pemerintah kabupaten (DAK, KUAPPAS OPD, KUAPPAS Pemda, LKPD OPD, LKPD Pemda, PA, PBJ, RKA Penetapan OPD, RKA Perubahan OPD, RKA Penetapan Pemda, RKA Perubahan Pemda)	12 Dokumen			450,000,000	500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pembinaan terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa (8 OPD dan 8 Desa)	2 Dokumen			117,278,867	200,000,000	
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah kerjasama pengawasan internal yang dilakukan (SPIP/MRI OPD dan evaluasi/penilaian SPIP/MRI OPD)	2 Dokumen			150,000,000	200,000,000	
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti (45 OPD dan 139 Desa)	80 %			950,000,000	1,000,000,000	
6	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**										**50,000,000**	**1,650,000,000**	
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase kerugian negara/daerah yang selesai dibayar (45 OPD, 139 desa, TP-TGR dan TPKD)	80 %			0	650,000,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Laporan pengawasan dengan tujuan tertentu dan Pengawasan penanganan pengaduan masyarakat	16 Dokumen			50,000,000	1,000,000,000	
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**										**0**	**1,700,000,000**	
6	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**										**0**	**200,000,000**	
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (Dupak/Penilaian angka kredit auditor dan PPUPD)	2 Dokumen			0	200,000,000	
6	**01**	**03**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**										**0**	**1,500,000,000**	

6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen penilaian reformasi birokrasi, pendampingan BPK, pendampingan ombush dan MRI	4 Dokumen			0	500,000,000	
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Persentase penyelesaian serta turunnya KKN (Stranas, MCP KPK, SPI KPK, monitoring center for prevention dan saberpungli	100 %			0	1,000,000,000	
														TOTAL	**17,059,918,367**	**23,298,303,450**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.0000 Kantor Camat Tanah Grogot
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.0000 Kantor Camat Tanah Grogot

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**6,926,092,651**	**7,628,645,814**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,916,279,403**	**6,507,852,343**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**33,048,000**	**36,352,800**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	12 Dokumen			18,733,000	20,606,300	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	4 Dokumen			14,315,000	15,746,500	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,549,410,675**	**6,104,351,742**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan			5,264,428,427	5,790,871,269	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	12 Bulan			252,230,248	277,453,273	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Laporan Keuangan	10 Dokumen			32,752,000	36,027,200	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**139,613,528**	**153,519,881**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah komponen yang disediakan	20 Buah			2,055,000	2,205,500	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	12 Bulan 12 Bulan			35,104,278	38,614,706	

7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan			11,919,950	13,111,945	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat (Nasi Kotak) Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat (Snack)	12 Bulan 250 Kotak 250 Kotak			90,534,300	99,587,730	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**73,155,880**	**80,471,468**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah materai yang disediakan	250 Lembar			2,500,000	2,750,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah bulan penyediaan listrik air dan internet	12 Bulan			70,655,880	77,721,468	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**121,051,320**	**133,156,452**	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	3 Unit			119,531,320	131,484,452	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	2 Unit			1,520,000	1,672,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**280,310,400**	**308,341,440**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**180,146,400**	**198,161,040**	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	1000 Orang			180,146,400	198,161,040	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**100,164,000**	**110,180,400**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	12 Sekolah			100,164,000	110,180,400	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**194,653,376**	**214,118,713**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**194,653,376**	**214,118,713**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Usulan Desa Yang Terakomodir	16 Desa			19,844,400	21,828,840	

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (LPTQ, PKK, Posyandu, Posyantek)	4 Kegiatan			174,808,976	192,289,873	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**268,215,001**	**295,036,500**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**12,660,000**	**13,926,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										12,660,000	13,926,000	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**244,170,001**	**268,587,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										244,170,001	268,587,000	
7	**01**	**04**	2.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**										**11,385,000**	**12,523,500**	
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			kegiatan Safari Ramadan	1 Kegiatan			11,385,000	12,523,500	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**69,388,000**	**76,326,700**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**69,388,000**	**76,326,700**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										26,463,000	29,109,200	

7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										22,585,000	24,843,500	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan	1 Kegiatan			20,340,000	22,374,000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**197,246,471**	**226,970,118**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**197,246,471**	**226,970,118**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difaliatasi	16 Desa			6,881,200	7,569,320	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Desa yang mengikuti lomba	16 Desa			19,650,771	21,615,848	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	16 Desa			147,691,500	162,459,650	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Rupa-rupa Bumi Jumlah Tapal Batas	1 Kegiatan 1 Kegiatan			23,023,000	35,325,300	
														TOTAL	**6,926,092,651**	**7,628,645,814**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.0000 Kantor Camat Tanah Grogot
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.00.0002 Kelurahan Tanah Grogot

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**1,671,048,113**	**1,834,823,243**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**250,677,488**	**272,415,583**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**84,926,848**	**93,419,532**	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	12 Bulan			84,926,848	93,419,532	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**72,003,540**	**75,874,241**	

7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah komponen yang disediakan	3 Item			3,460,900	3,806,990	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	10 Item 11 Item			36,996,140	37,366,101	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis			8,710,500	9,581,550	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	10 Kali			22,836,000	25,119,600	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**20,680,000**	**22,748,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit			20,680,000	22,748,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**64,727,100**	**71,199,810**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			64,727,100	71,199,810	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**8,340,000**	**9,174,000**	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 Unit			8,340,000	9,174,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**110,400,000**	**121,440,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**110,400,000**	**121,440,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan	12000 Dokumen			110,400,000	121,440,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**1,309,970,625**	**1,440,967,660**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**1,309,970,625**	**1,440,967,660**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir	2 Usulan			89,970,000	98,967,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	2 Lokasi			313,780,000	345,158,000	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (PKK, Posyandu) Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan	2 Kali 1 Lembaga			895,220,600	984,742,660	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah Dokumen Profil	5 Buku			11,000,025	12,100,000	
														TOTAL	**1,671,048,113**	**1,834,823,243**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Camat Pasir Belengkong
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kantor Camat Pasir Belengkong

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**5,516,566,270**	**6,049,056,583**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**4,627,261,320**	**5,046,646,553**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**15,740,600**	**17,391,140**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja)	4 Dokumen			7,379,000	8,000,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	4 Dokumen			8,361,600	9,391,140	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,174,945,620**	**4,584,088,933**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			3,960,906,303	4,356,996,933	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	130 Dokumen			180,319,317	190,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Laporan Keuangan (15 Dokumen (laporan rekonsiliasi keuangan: 12 dok, CALK: 1 dok, Prognosis: 2 dok)	15 Dokumen			33,720,000	37,092,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**60,180,000**	**60,456,000**	

7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Pegawai Yang Diperbaharui Datanya	12 Orang			60,180,000	60,456,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**90,194,100**	**94,210,480**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Jenis Alat Listrik	2 Jenis			1,342,000	1,476,200	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jenis Peralatan Rumah Tangga	11 Jenis			7,627,000	8,389,700	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	11 Jenis 12 Jenis			27,579,300	29,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Pengandaan	7 Jenis			5,767,800	6,344,580	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	60 Kali			47,878,000	49,000,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**66,500,000**	**67,500,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Jenis Peralatan	3 Unit			38,000,000	40,000,000	
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1 Unit			47,500,000	47,500,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**199,397,000**	**200,800,000**	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah materai yang disediakan	100 Lembar			6,640,000	8,000,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Jaringan Listrik dan Jaringan Air Yang Dibayarkan	12 Bulan			109,957,000	110,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jasa Pelayanan Umum Yang Dilaksanakan	12 Bulan			82,800,000	82,800,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**20,304,000**	**22,200,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit			16,742,000	18,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Peralatan Gedung Kantor	2 Unit			1,549,000	2,000,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Unit			2,013,000	2,200,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**362,951,600**	**403,318,960**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**180,437,600**	**202,969,360**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (SPMHT, Rekom IMB, Rekom Ijin Usaha, Surat Pengantar KK, Surat Pindah, Surat Ahli Waris, SKTM, Surat Keterangan Belum Menikah, Surat Keterangan Domisili)	665 Dokumen			174,902,600	196,880,860	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	60 Orang			5,535,000	6,088,500	

7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**											**167,214,000**	**183,519,600**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						Jumlah Sarana Persampahan Obyek Taman/Media Jalan Pasar Desa Yang Dikelola	2 Unit 1 Obyek 1 Pasar			167,214,000	183,519,600	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**15,300,000**	**16,830,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	15 Dokumen			15,300,000	16,830,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**82,493,500**	**104,267,850**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**82,493,500**	**104,267,850**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Usulan Desa yang terakomodir di dalam musrenbang	15 Usulan			31,333,500	44,267,850	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (PKK, Posyandu, Posyantek)	2 Kali			51,160,000	60,000,000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**274,862,500**	**302,348,750**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**14,222,500**	**15,644,750**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (FKDM)	15 Kali			14,222,500	15,644,750	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**260,640,000**	**286,704,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12 Kali			260,640,000	286,704,000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**83,296,350**	**86,755,370**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**83,296,350**	**86,755,370**	

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kali			20,686,700	22,755,370	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan (LPTQ dan Safari) Safari Ramadan	1 Kali 1 Kali			62,609,650	64,000,000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**85,701,000**	**105,719,100**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**85,701,000**	**105,719,100**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa Yang Difasilitasi	15 desa			27,558,000	35,953,500	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Yang Mengikuti Lomba	15 desa			13,563,000	14,919,300	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong			Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	60 Dokumen			12,453,000	14,787,300	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemilihan	3 Desa			27,737,000	27,750,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Paser Belengkong, Semua Kelurahan			Jumlah Tapal Batas Objek Rupa Bumi	3 segmen 2 objek			4,390,000	12,309,000	

TOTAL	**5,516,566,270**	**6,049,056,583**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Camat Kuaro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Camat Kuaro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**6,419,229,837**	**7,045,475,624**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,081,284,317**	**5,598,210,688**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**15,595,600**	**17,155,160**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Tersusunya Dokumen Perencanaan Daerah	5 Dokumen			5,125,000	5,637,500	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Murni	5 Dokumen			5,125,000	5,637,500	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan	5 Dokumen			2,000,600	2,200,660	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Dokumen LKjIP yang tersusun	5 Dokumen			3,345,000	3,679,500	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,773,974,942**	**5,259,119,876**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			4,544,745,342	4,999,219,876	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Dokumen Keuangan (SPMdan SPP)	125 Dokumen			220,229,600	250,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Laporan Keuangan	15 Dokumen			9,000,000	9,900,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**160,261,903**	**177,338,593**	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah ATK Jumlah Peralatan Rmah Tangga yang Disediakan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat Pegawai	26 Jenis 12 Jenis 750 Kotak			77,477,960	85,775,756	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			10,399,950	11,439,945	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	110 Kali			72,383,993	80,122,892	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**131,451,872**	**144,597,059**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Materai Tersedia	325 Lembar			1,940,000	2,134,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			129,511,872	142,463,059	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**703,926,460**	**754,550,810**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**197,692,200**	**217,461,420**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Dokumen Pelayanan yang Diberikan	250 Dokumen			197,692,200	217,461,420	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**499,789,360**	**530,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Sarana Persampahan Obyek Taman/Median Jalan Pasar Desa/Kelurahan yang Dikelola	3 Jenis 4 Obyek 1 Pasar			499,789,360	530,000,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**6,444,900**	**7,089,390**	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Pelayanan Sertidikat IMB	15 Dokumen			6,444,900	7,089,390	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**189,000,300**	**207,900,330**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**189,000,300**	**207,900,330**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Usulan Desa yang Terakomodir	280 Usulan			29,970,300	32,967,330	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Peserta TC LPTQ Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang aktif Jumlah Posyandu dibina Jumlah Posyantek dibina	13 Desa/Kelurahan 13 Desa/Kelurahan 13 Desa/Kelurahan 13 Desa/Kelurahan			159,030,000	174,933,000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**278,131,700**	**301,238,030**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**272,436,400**	**294,973,200**	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang Dilaksanakan	12 Kali			258,824,400	280,000,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Pelaksanaan Kegiatan Safari	13 Desa/Kelurahan			13,612,000	14,973,200	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**5,695,300**	**6,264,830**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang Dilaksanakan	6 Kali			5,695,300	6,264,830	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**76,180,500**	**83,798,550**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**76,180,500**	**83,798,550**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	1 Kali			62,625,000	68,887,500	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Kegiatan Pembinaan Dilaksanakan	6 Kali			6,175,200	6,792,720	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Rumah Tangga Penerima Bantuan	13 Desa/Kelurahan			7,380,300	8,118,330	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**90,706,560**	**99,777,216**	

7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**90,706,560**	**99,777,216**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Desa yang mengikuti Lomba Desa	12 Desa			10,580,500	11,638,550	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa yang Diterbitkan	50 Dokumen			41,471,200	45,618,320	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan	3 Desa			25,500,000	28,050,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Tapal Batas Obyek Rupa Bumi	4 Segmen 2 Objek			13,154,860	14,470,346	
														TOTAL	**6,419,229,837**	**7,045,475,624**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kantor Camat Kuaro
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Kuaro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**852,554,210**	**753,700,000**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**277,328,922**	**312,200,000**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**167,477,280**	**190,000,000**	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	50 dokumen			167,477,280	190,000,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**74,316,400**	**76,800,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Komponen instalasi Listrik	4 jenis			2,065,400	2,300,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor	45 item			26,108,100	27,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 jenis			7,870,500	9,000,000	
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	398 exemplar			2,308,400	2,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro							35,964,000	36,000,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**31,795,242**	**40,800,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah materai yang disediakan	146 lembar			769,200	800,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 bulan			31,026,042	40,000,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**3,740,000**	**4,600,000**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	1 unit			1,100,000	1,500,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	2 unit			1,420,000	1,600,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										1,220,000	1,500,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**12,745,700**	**15,000,000**	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**12,745,700**	**15,000,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	12 bulan			12,745,700	15,000,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**562,479,588**	**426,500,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**562,479,588**	**426,500,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir	108 buah			2,688,888	3,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (rumah) Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun (semenisasi)	8 unit 2 unit			384,263,800	400,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan	12 bulan			170,574,900	18,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan			Kab. Paser, Kuaro, Kuaro			Tersedianya Profil Kelurahan	12 bulan			4,952,000	5,500,000	
														TOTAL	**852,554,210**	**753,700,000**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Long Ikis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Long Ikis

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**6,348,530,379**	**6,954,618,717**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,481,852,979**	**6,009,891,077**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**20,348,340**	**22,383,174**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										11,885,600	13,074,160	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, Laporan TEPRA)	7 Dokumen			8,462,740	9,309,014	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,109,960,259**	**5,609,104,885**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			4,922,742,754	5,415,017,029	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Dokumen keuangan (SPM, SPP)	565 Dokumen			185,026,000	191,677,200	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										2,191,505	2,410,656	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**5,090,000**	**5,599,000**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										5,090,000	5,599,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**115,238,270**	**120,341,297**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										1,184,000	1,302,400	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										17,749,520	19,524,472	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										19,711,850	21,683,035	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										2,784,900	3,063,390	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										73,808,000	74,768,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**37,500,000**	**39,375,000**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel						Jumlah mebel yang disediakan	50 buah			37,500,000	39,375,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**110,001,110**	**121,001,221**	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										50,001,110	55,001,221	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										60,000,000	66,000,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**83,715,000**	**92,086,500**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										11,275,000	12,402,500	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										2,440,000	2,684,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										70,000,000	77,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**243,900,400**	**268,290,440**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**99,382,600**	**109,320,860**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										99,382,600	109,320,860	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**144,517,800**	**158,969,580**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										144,517,800	158,969,580	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**194,548,000**	**205,433,300**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**194,548,000**	**205,433,300**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										23,058,000	25,368,800	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										171,490,000	180,064,500	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**258,745,000**	**284,619,500**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**252,665,000**	**277,931,500**	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										252,665,000	277,931,500	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**6,080,000**	**6,688,000**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia										6,080,000	6,688,000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**47,310,000**	**52,041,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**47,310,000**	**52,041,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kali			34,460,000	37,906,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										12,850,000	14,135,000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**122,174,000**	**134,343,400**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**122,174,000**	**134,343,400**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										7,680,000	8,300,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										66,448,700	73,093,570	

7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan	6 desa			40,000,000	44,100,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										8,045,300	8,849,830	
														TOTAL	**6,348,530,379**	**6,954,618,717**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kantor Camat Long Ikis
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Longikis

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**813,869,390**	**1,037,386,309**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**274,869,390**	**382,386,309**	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**154,896,640**	**170,386,304**	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										154,896,640	170,386,304	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**69,200,000**	**85,500,005**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										3,500,000	4,000,005	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							20,000,000	25,000,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis			5,700,000	6,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							40,000,000	50,000,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**5,500,000**	**55,000,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							5,500,000	55,000,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**25,000,000**	**30,000,000**	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							25,000,000	30,000,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**20,272,750**	**41,500,000**	

7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							15,000,000	16,500,000	
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							5,272,750	25,000,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**539,000,000**	**655,000,000**	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**539,000,000**	**655,000,000**	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							12,000,000	14,000,000	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							300,000,000	400,000,000	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							215,000,000	225,000,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan			Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis							12,000,000	16,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
TOTAL											**813,869,390**	**1,037,386,309**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Long Kali
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Long Kali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**6,802,612,563**	**53,784,908,017**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**5,276,887,593**	**52,070,405,017**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**16,094,000**	**33,400,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	4 Dokumen			13,907,600	28,700,000	

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										2,186,400	4,700,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**4,854,699,923**	**51,375,671,647**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										9,447,961,846	102,469,801,094	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										123,683,000	130,900,700	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										7,036,000	9,870,400	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**116,280,000**	**107,400,000**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										23,220,000	8,700,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										93,060,000	98,700,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**164,703,300**	**287,291,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										1,602,000	4,700,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										0	37,001,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah bahan dan alat kebersihan	29 jenis 2 jenis			22,790,600	48,700,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										3,747,500	9,890,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										136,563,200	187,000,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**0**	**76,100,700**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel										0	32,900,000	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										0	43,200,700	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**96,357,380**	**130,619,770**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										395,040	459,700	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										83,962,340	98,760,070	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										12,000,000	31,400,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**28,752,990**	**59,921,900**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										26,312,990	43,600,900	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										2,440,000	4,530,000	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										0	11,791,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**605,275,070**	**657,749,700**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**207,629,900**	**235,940,700**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										89,760,000	108,040,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										117,869,900	127,900,700	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**68,310,000**	**79,800,000**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										68,310,000	79,800,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**329,335,170**	**342,009,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan										329,335,170	342,009,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**224,691,500**	**229,600,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**224,691,500**	**229,600,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										41,740,000	41,800,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan										182,951,500	187,800,000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**355,010,000**	**410,900,000**	

7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**355,010,000**	**410,900,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan										346,050,000	398,900,000	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat										8,960,000	12,000,000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**26,416,500**	**36,401,800**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**26,416,500**	**36,401,800**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										26,416,500	28,700,900	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional										0	7,700,900	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**314,331,900**	**379,851,500**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**314,331,900**	**379,851,500**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa										137,837,900	154,900,800	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa										19,105,000	22,450,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										48,280,000	65,400,700	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										27,000,000	27,000,000	

7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										82,109,000	110,100,000	
TOTAL															**6,802,612,563**	**53,784,908,017**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Long Kali
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Longkali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**1,192,737,461**	**1,342,885,250**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**646,017,827**	**741,493,655**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**4,279,350**	**5,466,285**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	3 dokumen			4,279,350	5,466,285	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**339,524,400**	**358,956,840**	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	106 Dokumen			339,524,400	358,956,840	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**142,442,540**	**156,594,218**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah komponen yang disediakan	25 buah			2,322,000	2,461,624	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	23 jenis 10 jenis			38,458,950	42,304,845	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	7 jenis			18,619,590	20,481,549	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										83,042,000	91,346,200	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**38,551,806**	**42,406,986**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel										32,644,146	35,908,560	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										5,907,660	6,498,426	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**75,040,000**	**82,544,000**	

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah materai yang disediakan	250 buah			2,500,000	2,750,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			62,400,000	68,640,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Bulan			10,140,000	11,154,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**46,179,731**	**95,525,326**	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	8 unit			5,323,636	5,855,999	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 unit			40,856,095	89,669,327	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**235,133,396**	**258,646,735**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecama tan**										**14,612,755**	**16,074,030**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kantor Camat Long Kali
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Longkali

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan										14,612,755	16,074,030	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**220,520,641**	**242,572,705**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum										220,520,641	242,572,705	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**293,106,238**	**322,416,860**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**49,266,412**	**54,193,053**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir	200 usulan			4,263,050	4,689,355	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (LPTQ, PKK, Posyandu, Posyantek)	2 kali			45,003,362	49,503,698	
7	**01**	**03**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**										**243,839,826**	**268,223,807**	

7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan										108,947,009	119,841,709	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kab. Paser, Long Kali, Long Kali			Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan	1 lembaga			106,014,546	116,616,000	
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan										28,878,271	31,766,098	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**18,480,000**	**20,328,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**18,480,000**	**20,328,000**	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa										18,480,000	20,328,000	
														TOTAL	**1,192,737,461**	**1,342,885,250**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Batu Sopang
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kantor Camat Batu Sopang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**5,450,680,778**	**6,014,344,048**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**4,304,902,378**	**4,753,987,808**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**14,000,300**	**15,400,330**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5 Dokumen			4,643,400	5,107,740	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	4 Dokumen			9,356,900	10,292,590	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**3,890,971,437**	**4,280,068,581**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			3,740,871,397	4,114,958,537	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	80 Dokumen			147,389,040	162,127,944	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Laporan Keuangan	19 Dokumen			5,422,000	5,964,200	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**13,962,200**	**15,358,420**	

7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	15 Orang			13,962,200	15,358,420	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**107,341,200**	**118,075,320**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah komponen yang disediakan	63 Buah			1,962,000	2,158,200	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah kebutuhan ATK Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	19 Item 10 Item			28,214,400	31,035,840	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan Kebutuhan Makanan dan Minuman Rapat	12 Bulan 538 Kotak			77,164,800	84,881,280	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**25,950,000**	**47,140,192**	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah mebel yang disediakan	1 Unit			0	18,595,192	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit			25,950,000	28,545,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**210,991,393**	**232,090,532**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah materai yang disediakan	108 Lembar			1,080,000	1,188,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			71,911,393	79,102,532	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Bulan			138,000,000	151,800,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**41,685,848**	**45,854,433**	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	6 Unit			21,900,000	24,090,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit			7,844,400	8,628,840	

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	12 Bulan			11,941,448	13,135,593	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**533,329,900**	**586,662,890**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**80,780,700**	**88,858,770**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (IMB) Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (KK/KTP)	25 Dokumen 270 Dokumen			80,780,700	88,858,770	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**224,085,200**	**246,493,720**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah mobil DAMKAR yang terpelihara Jumlah Sarana Persampahan Obyek Taman/Median Jalan Pasar Desa yang Dikelola	2 Unit 3 Jenis 1 Obyek 1 Pasar			224,085,200	246,493,720	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**228,464,000**	**251,310,400**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Desa Layak Anak Jumlah Laporan Bencana Kebakaran Jumlah Sekolah yang Dibina (UKS) Kegiatan LPTQ yang diikuti	9 Desa 4 Dokumen 42 Sekolah 1 Kegiatan			228,464,000	251,310,400	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**99,789,200**	**109,768,120**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**99,789,200**	**109,768,120**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Usulan Desa Yang Terakomodir	9 Desa			42,650,000	46,915,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (PKK) Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Posyandu) Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Posyantek/TTG)	9 Desa 4 Posyandu 7 Desa			57,139,200	62,853,120	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**324,361,100**	**356,797,210**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**304,083,100**	**334,491,410**	

7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah tenaga PTT SATPOL PP	10 Orang			301,314,100	331,445,510	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Pelaksanaan Kegiatan Safari Ramadhan	9 Desa			2,769,000	3,045,900	
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**										**20,278,000**	**22,305,800**	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	12 Kali			20,278,000	22,305,800	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**66,670,200**	**73,337,220**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**66,670,200**	**73,337,220**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			7,344,200	8,078,620	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Kegiatan FKDM yang dilaksanakan	9 Desa			3,441,000	3,785,100	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Desa yang menerima bantuan	9 Desa			55,885,000	61,473,500	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**121,628,000**	**133,790,800**	

7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**121,628,000**	**133,790,800**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difaliatasi	9 Desa			9,385,000	10,323,500	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Desa yang mengikuti lomba	1 Desa			4,489,000	4,937,900	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	9 Desa			59,542,000	65,496,200	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Desa yang melaksanakan pemilihan	4 Desa			33,013,000	36,314,300	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Kegiatan Desiminasi yang terlaksana	1 Kali			8,670,000	9,537,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Obyek Rupa Bumi	2 Obyek			3,345,000	3,679,500	
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang			Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Desa	10 Dokumen			3,184,000	3,502,400	
														TOTAL	**5,450,680,778**	**6,014,344,048**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Camat Muara Komam
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kantor Camat Muara Komam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**4,886,392,266**	**5,573,650,340**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**3,503,882,266**	**3,821,116,220**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**19,520,000**	**22,496,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			9,760,000	10,736,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP,Evaluasi Renja, SPIP,Tepra)	4 Dokumen			9,760,000	11,760,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**3,325,366,146**	**3,525,220,217**	

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			3,187,646,146	3,367,500,217	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Dokumen Keuangan (SPP,SPM,E-Billing)	67 Dokumen			137,720,000	157,720,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**116,496,120**	**212,400,000**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Komponen Listrik yang disediakan	10 Buah			5,396,120	5,000,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Peralatan Kebersihan yang disediakan	10 Jenis			0	5,500,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman	24 jenis 150 Kotak			50,000,000	59,400,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			10,500,000	21,500,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	125 Kali 150 Kali			50,600,000	121,000,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**42,500,000**	**61,000,003**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Materai yang disediakan	50 Lembar			2,500,000	5,000,003	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang dibayarkan	12 Bulan			40,000,000	56,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**736,090,600**	**843,720,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**170,780,600**	**181,500,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pelayanan yang diberikan	78 Dokumen			170,780,600	181,500,000	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**140,000,000**	**149,870,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah ObyekTaman/Median Jalan Jumlah sarana persampahan	1 obyek 1 Unit			140,000,000	149,870,000	

7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**425,310,000**	**512,350,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah cabang MTQ yang diikuti Jumlah Laporan Musibah yang tertangani Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan (PATEN) Jumlah UKS yang di Bina	9 Cabang 3 Dokumen 1 Dokumen 7 Sekolah			425,310,000	512,350,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**208,165,000**	**275,648,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**208,165,000**	**275,648,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Usulan Desa yang terakomodir	50 Usulan			40,430,000	49,973,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan (PKK, Posyantek, Posyandu, TTG)	4 Kali			167,735,000	225,675,000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**295,968,200**	**419,733,200**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**10,775,000**	**21,540,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan FKDM yang dilaksanakan	12 Kali			10,775,000	21,540,000	
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**										**285,193,200**	**398,193,200**	
7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang dilaksanakan	12 kali			285,193,200	398,193,200	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**62,827,200**	**77,909,920**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**62,827,200**	**77,909,920**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam			Jumlah Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kali			50,327,200	64,159,920	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan (safari Ramadhan)	12 Kali			12,500,000	13,750,000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**79,459,000**	**135,523,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**79,459,000**	**135,523,000**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			JUmlah Desa yang mengikuti Lomba	12 Desa			5,920,000	6,523,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan	48 Dokumen			20,939,000	49,090,000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	10 Desa			33,250,000	45,670,000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Desiminasi yang terlaksana	1 Kali			7,850,000	12,650,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Muara Komam, Semua Kelurahan			Jumlah Tapal Batas Desa	2 Segmen			11,500,000	21,590,000	
														TOTAL	**4,886,392,266**	**5,573,650,340**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Camat Batu Engau
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kantor Camat Batu Engau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**											**4,216,656,147**	**4,630,847,612**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,443,077,147**	**3,779,993,612**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**79,914,151**	**87,020,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja)	4 Dokumen			6,738,600	12,020,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	4 dokumen			73,175,551	75,000,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,009,749,794**	**3,278,263,112**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan			2,914,843,594	3,171,263,112	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Dokumen keuangan (SPM, SPP)	150 Dokumen			87,216,000	95,000,000	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Laporan Keuangan	15 Dokumen			7,690,200	12,000,000	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**131,280,000**	**131,280,000**	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	6 Orang			131,280,000	131,280,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**124,828,902**	**150,630,500**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah komponen yang disediakan	30 Buah			3,654,000	3,654,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10 Jenis			2,620,000	6,000,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah ATK yang disediakan Jumlah Makanan dan Minuman Rapat Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	12 Jenis 1400 Kotak 10 Jenis			52,257,902	59,976,500	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis			4,545,000	6,000,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	234 Kali			61,752,000	75,000,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**78,270,000**	**88,100,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Materai yang tersedia	50 lembar			500,000	500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Jaringan Listrik dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			52,570,000	60,000,000	

7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Bulan			25,200,000	27,600,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**19,034,300**	**44,700,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	2 Unit			8,194,300	30,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 Unit			10,840,000	14,700,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**163,840,000**	**177,840,000**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**104,670,000**	**108,670,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan (1.Dokumen KTP,KIA,KK, Akte,Pelepasan Hak atas Tanah,IUMKM, IMB)	7 Dokumen			104,670,000	108,670,000	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**59,170,000**	**69,170,000**	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan (Jumlah Data Penerimaan Bansos)	13 Dokumen			59,170,000	69,170,000	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**11,950,000**	**24,000,000**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**11,950,000**	**24,000,000**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						Usulan Desa Yang Terakomodir	13 Dokumen			3,460,000	12,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (Posyandu, Posyantek dan TTG)	1 Kali			8,490,000	12,000,000	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**286,659,000**	**300,309,000**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**21,350,000**	**25,000,000**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan (FKDM)	2 Kali			21,350,000	25,000,000	
7	**01**	**04**	2.04		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah**										**265,309,000**	**275,309,000**	

7	01	04	2.04	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang	12 Kali			265,309,000	275,309,000	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**45,205,000**	**75,205,000**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**45,205,000**	**75,205,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan (LPTQ) Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan (Safari Ramadhan)	1 Kali 1 Kali			45,205,000	75,205,000	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**265,925,000**	**273,500,000**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**265,925,000**	**273,500,000**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi	13 Desa			4,020,000	8,220,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Batu Engau, Semua Kelurahan			Desa yang mengikuti lomba	13 Desa			8,350,000	12,000,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	78 Dokumen			121,430,000	131,430,000	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						Jumlah Desa yang Melaksanakan PILKADES	7 Desa			29,270,000	0	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah organisasi RT, RW, dan LPM,PKK aktif	13 Desa			76,755,000	80,000,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa						Jumlah Tapa Batas	8 Segmen			13,590,000	15,590,000	
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						Jumlah Dokumen RPJMDES,RKPD,APBDES	39 Dokumen			12,510,000	26,260,000	
														TOTAL	**4,216,656,147**	**4,630,847,612**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Tanjung Harapan
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kantor Camat Tanjung Harapan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**3,176,576,419**	**3,751,275,310**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**2,480,466,419**	**2,728,128,060**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**11,820,000**	**13,002,000**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (review renstra, renja, ranwal renja, renja)	5 dokumen			5,490,000	6,039,000	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Dokumen laporan Kinerja (LKJIP), Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA	5 dokumen			6,330,000	6,963,000	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,279,781,020**	**2,507,759,122**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan			2,082,882,140	2,291,170,354	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										188,498,880	207,348,768	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Laporan Keuangan dan BMD	38 dokumen			8,400,000	9,240,000	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**123,845,399**	**135,844,938**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Komponen yang disediakan	45 Buah			3,750,000	4,125,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah ATK dan alat kebersihan yang disediakan	24 Item			22,460,399	24,706,438	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Jenis Barang Cetak dan dan Penggandaan	10 Jenis			8,850,000	9,350,000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan	86 Kali			88,785,000	97,663,500	

7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**27,520,000**	**30,272,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Materai yang disediakan	100 Lembar			1,000,000	1,100,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Tagihan Listrik, Air dan Internet yang dibayarkan	12 bulan			26,520,000	29,172,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**37,500,000**	**41,250,000**	

Kode					**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
									Capaian Program		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
									Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	2 Unit			34,000,000	37,400,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit			3,500,000	3,850,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**77,400,000**	**351,501,000**	
7	**01**	**02**	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**										**23,610,000**	**25,971,000**	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah UKS yang dibina	7 Desa			20,930,000	23,023,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Pelayanan yang diberikan	7 Desa			2,680,000	2,948,000	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**53,790,000**	**325,530,000**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Dokumen Pelayanan yang diberikan	100 dokumen			26,895,000	29,684,500	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Monitoring Bantuan Bansos	7 Desa			26,895,000	295,845,500	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**132,447,500**	**135,447,500**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**132,447,500**	**135,447,500**	

7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan			132,447,500	135,447,500	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**312,427,500**	**343,670,250**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**6,560,000**	**7,216,000**	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Kegiatan Safari Keagamaan yang Dilaksanakan	7 Desa			6,560,000	7,216,000	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**305,867,500**	**336,454,250**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Penegakan Peraturan yang Dilaksanakan	12 bulan			305,867,500	336,454,250	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**60,042,500**	**66,046,750**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**60,042,500**	**66,046,750**	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kali			36,475,000	40,122,500	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Kegiatan FKDM/FKMKT yang Dilaksanakan	7 Desa			23,567,500	25,924,250	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**113,792,500**	**126,481,750**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**113,792,500**	**126,481,750**	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba	7 Desa			4,482,500	4,930,750	

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Rekomendasi Pengelolaan Keuangan Desa Yang Diterbitkan	14 dokumen			22,412,500	24,653,750	
7	01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Pemenuhan Kewajiban PBB	7 Desa			13,447,500	14,792,250	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa	7 Desa			23,250,000	26,500,000	
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Usulan Desa yang Terakomodir	7 Desa			37,845,000	41,629,500	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru			Jumlah Penyelesaian Tapal Batas Desa	1 Segmen			12,355,000	13,975,500	
														TOTAL	**3,176,576,419**	**3,751,275,310**	

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Muara Samu
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kantor Camat Muara Samu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Progran		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**												
7	**01**				**KECAMATAN**										**4,413,170,572**	**3,729,564,602**	
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**2,636,377,742**	**2,887,780,572**	
7	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**25,085,000**	**27,593,500**	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Dokumen Renja yang tersusun tepat waktu Dokumen Review dan Revisi RENSTRA SKPD	10 Dokumen			15,174,000	16,691,400	
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP, Evaluasi Renja, SPIP, Laporan TEPRA)	7 Dokumen			9,911,000	10,902,100	
7	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**2,170,002,942**	**2,386,291,792**	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (Reviu renstra, ranwal renja, ranc. renja, renja, profil kecamatan)	5 Dokumen			2,057,114,442	2,262,114,442	
7	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	100 Dokumen			70,996,500	78,096,150	

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Laporan Keuangan	30 Dokumen			41,892,000	46,081,200	
7	**01**	**01**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**81,656,500**	**90,462,150**	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah pakaian dinas yang disediakan	34 Stel			13,600,000	15,600,000	
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang diperbarui datanya	34 Orang			68,056,500	74,862,150	
7	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**123,344,500**	**134,945,450**	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah komponen yang disediakan	30 Buah			2,000,000	2,200,000	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Unit			2,000,000	2,200,000	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah ATK yang disediakan Jumlah peralatan kebersihan yang disediakan	15 Jenis 13 Jenis			22,335,000	23,835,000	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	10 Jenis			4,809,500	5,290,450	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah konsumsi rapat yang disediakan Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	400 Kotak 100 Kali			92,200,000	101,420,000	
7	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**23,500,000**	**25,500,000**	
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	6 Buah			23,500,000	25,500,000	
7	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**143,800,000**	**148,900,000**	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah materai yang disediakan	100 Lembar			1,000,000	2,500,000	

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Jumlah Jaringan Listrik, Internet dan Air yang Dibayarkan	12 Bulan			32,400,000	36,000,000	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jasa pelayanan umum yang dilaksanakan	12 Bulan			110,400,000	110,400,000	
7	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**68,988,800**	**74,087,680**	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	5 Unit			38,000,000	40,000,000	
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 Unit			10,988,800	12,087,680	
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	4 Unit			20,000,000	22,000,000	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**										**1,277,542,100**	**299,627,760**	
7	**01**	**02**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**										**125,093,500**	**137,602,850**	
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelayanan yang diberikan	380 Dokumen			101,593,500	111,752,850	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	500 Orang			23,500,000	25,850,000	
7	**01**	**02**	2.03		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**										**95,763,100**	**105,339,410**	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Sarana Persampahan	1 Jenis			95,763,100	105,339,410	
7	**01**	**02**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**										**1,056,685,500**	**56,685,500**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Cabang MTQ yang diikuti Jumlah kegiatan Posyandu yang dilaksanakan Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kegiatan MTQ Tk. Kecamatan yang dilaksanakan	9 Cabang 1 Kegiatan 3 Dokumen 1 Kegiatan			1,056,685,500	56,685,500	
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**										**112,894,330**	**117,489,230**	
7	**01**	**03**	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**										**112,894,330**	**117,489,230**	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Usulan Desa Yang Terakomodir	15 Usulan			25,949,000	28,543,900	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan (PKK, TTG, Posyantek)	3 Kegiatan			86,945,330	88,945,330	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**										**198,042,500**	**217,846,750**	
7	**01**	**04**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**										**188,688,000**	**207,556,800**	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	12 Kali			173,175,000	190,492,500	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Pelaksanaan Kegiatan Safari	7 Desa			15,513,000	17,064,300	
7	**01**	**04**	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**										**9,354,500**	**10,289,950**	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan koordinasi bidang penegakkan peraturan yang dilaksanakan	9 Kali			9,354,500	10,289,950	
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**										**39,609,000**	**43,569,900**	
7	**01**	**05**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**										**39,609,000**	**43,569,900**	

Kode	**Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan**	**Prioritas Daerah**	**Sasaran Daerah**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**						**Pagu Indikatif (Rp.)**	**Prakiraan Maju (Rp.)**	**Keterangan**
					Capaian Progran		**Keluaran Sub Kegiatan**		**Hasil Kegiatan**				**Prioritas Pembangunan Nasional**
					Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**			

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan HUT RI Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan			34,420,000	37,862,000	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan pembinaan dilaksanakan	1 Kegiatan			5,189,000	5,707,900	
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**										**148,704,900**	**163,250,390**	
7	**01**	**06**	2.01		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**										**148,704,900**	**163,250,390**	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Peraturan Desa dan Kepala Desa yang difasilitasi	9 Desa			14,280,000	15,708,000	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Desa yang mengikuti lomba	3 Desa			7,660,000	8,426,000	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan	27 Dokumen			80,393,900	88,433,290	
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Luan Kab. Paser, Muara Samu, Muser			Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa	2 Desa			23,250,000	25,250,000	
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			Kab. Paser, Muara Samu, Semua Kelurahan			Jumlah Tapal Batas Laporan obyek Rupa Bumi	2 Segmen 2 Dokumen			23,121,000	25,433,100	
														TOTAL	**4,413,170,572**	**3,729,564,602**	

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.00.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.00.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Progran	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**												
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										**9,914,815,035**	**11,402,037,467**	
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**6,336,861,320**	**7,287,390,616**	
8	**01**	**01**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**72,502,210**	**83,377,541**	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (renstra, renja, RKA, RKA perubahan, DPA, DPA Perubahan, Laporan capaian kinerja)	11 dokumen			14,299,890	16,444,873	
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen laporan kinerja (LKjIP, Evaluasi renja, SPIP)	3 dokumen			58,202,320	66,932,668	
8	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5,662,901,890**	**6,512,337,163**	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Daftar gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan			5,097,048,690	5,861,605,983	
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Dokumen keuangan (SPM, SPP)	30 dokumen			565,853,200	650,731,180	
8	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**479,995,920**	**551,995,417**	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah komponen peralatan listrik yang tersedia	10 unit			353,700	406,755	
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	5 jenis			76,939,600	88,480,540	
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	15 jenis 37 jenis			41,404,900	47,615,635	
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 jenis			35,060,815	40,319,937	
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia	1 jenis			5,226,305	6,010,250	
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah keikutsertaan pada rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah keikutsertaan pada rapat koordinasi dan konsultasi	120 kali 1600 kotak			321,010,600	369,162,300	
8	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**11,668,800**	**13,419,120**	
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah pengadaan mebeleur yang tersedia	1 jenis			11,668,800	13,419,120	

8	**01**	**01**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**71,121,400**	**81,789,610**	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah surat menyurat yang tersedia	1 orang			6,434,000	7,399,100	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah jasa komunukasi, jaringan sumber daya air dan listrik yang terbayarkan	5 unit			64,687,400	74,390,510	
8	**01**	**01**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**38,671,100**	**44,471,765**	
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah jasa perizinan kendaraan dinas/operasional yang terbayarkan	3 unit			6,500,000	7,475,000	
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			jumlah peralatan dan mesin lainnya terpelihara	37 unit			32,171,100	36,996,765	
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**										**150,227,000**	**172,761,050**	
8	**01**	**02**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**										**150,227,000**	**172,761,050**	
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah peserta pelatihan bela negara dan pembentukan gugus tugas kecamatan	100 orang			50,227,000	57,761,050	
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota FPK yang mengikuti pembinaan dan pembentukan FPK Kecamatan Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi kegiatan ke provinsi dan kecamatan	50 Orang 5 Dokumen			100,000,000	115,000,000	
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**										**840,146,862**	**966,168,906**	
8	**01**	**03**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**										**840,146,862**	**966,168,906**	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot			Jumlah masyarakat yang ikut dalam pendidikan politik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan jumlah pengurus parpol, tokoh agama, tokoh masyarakat dan ormas yang ikut dalam etika dan budaya politik	100 orang 100 orang			47,960,976	55,155,122	

Kode		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju	Keterangan

					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan			(Rp.)	Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Parpol yang disalurkan bantuan keuangan yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Paser Jumlah pengurus parpol yang difasilitasi dalam pengelolaan pertanggung jawaban bantuan keuangan parpol Jumlah Verifikasi dokumen pengajuan permohonan administrasi bantuan keuangan parpol	11 Parpol 35 orang 11 Dokumen			782,803,074	900,223,550	
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data dan informasi situasi perkiembangan politik didaerah dan IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Jumlah Inventaris Data Parpol di Kabupaten Paser	4 Dokumen 1 Dokumen			33,363,300	38,367,795	
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**86,287,300**	**99,230,395**	
8	**01**	**04**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**86,287,300**	**99,230,395**	
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan fasilitasi kebijakan peraturan perundangan ormas Jumlah Verifikasi dokumen pendaftaran ormas	100 Orang 30 Dokumen			33,363,300	38,367,795	
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbinanya ormas dan pengurusnya dalam hal kapasitas kelembagaan	50 Peserta			21,000,000	24,150,000	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah hasil invertarisir data ormas di Kabupaten Paser Terlaksananya pengawasan ormas diwilayah Kabupaten Paser	4 Dokumen 4 Dokumen			31,924,000	36,712,600	
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**870,000,000**	**1,000,500,000**	
8	**01**	**05**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**870,000,000**	**1,000,500,000**	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Prioritas

								Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Pembangunan Nasional
8	01	05	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumklah Dokumen laporan invertarisir data rumah ibadah kabupaten paser Jumlah Peserta sosialisasi kebijakan peraturan menteri bersama no 9 dan 8 tahun 2006	10 Dokumen 50 orang			300,000,000	345,000,000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi pembekalan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan jumlah pelajar/masyarakat yang memperoleh tes urine	2000 Orang			555,000,000	638,250,000	
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lokasi Pemantauan dan pengawasan dampak kenaikan harga dan perkembangan harga pasar	10 kecamatan			15,000,000	17,250,000	
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**										**1,631,292,553**	**1,875,986,500**	
8	**01**	**06**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**										**1,631,292,553**	**1,875,986,500**	
8	01	06	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan pr4ogram kerja	5 Dokumen			15,000,000	17,250,000	
8	01	06	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan Perumusan Bahan Kebijakan	4 Dokumen			15,000,000	17,250,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
					Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			Prioritas Pembangunan Nasional

8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya kegiatan peningkatan peningkatan koordinasi dalam rangka penanganan konflikk sosial, deteksi dini pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing serta penerbitan rekomendasi penelitian	10 Kecamatan			250,000,000	287,500,000	
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kegiatan FKDM di Kecamatan	10 Kecamatan			200,000,000	230,000,000	
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaporan Hasil pengawasan ATHG di Wilayah Kabupaten Paser	10 Kecamatan			51,292,553	58,986,500	
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah keikutsertaan rapatrapat dan konsultasi Jumlah laporan hasil rapat koorsinasi dan konsultasi FORKOPIMDA	12 Dokumen 12 Dokumen			2,200,000,000	2,530,000,000	
														TOTAL	**9,914,815,035**	**11,402,037,467**	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator makro pembangunan. Indikator makro pembangunan terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dan Indeks Gini. Adapun target indikator kinerja makro Kabupaten Paser Tahun 2021 disajikan pada tabel 6.1 dibawah.

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Paser

No.	Sasaran	Indikator (*Impact*)	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022
1	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia	IPM	72,04	73,15	73,03

No.	Sasaran	Indikator (*Impact*)	Kondisi Awal 2020	Target 2021	Target 2022
2	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	9,23	7,50	8,00
3	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran (%)	4,52	3,60	3,45
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-2,77	4,72	1,32
5	Menurunnya kesenjangan wilayah	Indeks Gini	0,32	0,290	0,285

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Paser merupakan capaian pembangunan, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Kabupaten Paser disajikan pada tabel 6.2 sebagai berikut :

Tabel 6.2

Target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
	PENDIDIKAN								
1	APK SD	%	108.62	108.62	109.00	109.50	110	120	120
2	APK SMP	%	94.56	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
3	APM SD	%	97.87	98.00	98.50	99.00	99.50	100	100
4	APM SMP	%	81.58	95.00	95.50	96.00	98.00	100	100
5	Angka Melek Huruf	%	98.60	98.65	98.70	99.80	99.90	100	100
6	Angka Putus Sekolah SD	%	0.94	0.90	0.70	0.50	0.25	0	0
7	Angka Putus Sekolah SMP	%	2.28	2	1.5	1	0.5	0	0
8	Persentase sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	90	100	100	100	100	100	100
9	Tingkat ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	%	90	90.5	91	91.5	92	92.5	92.5
10	Persentase Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	%	93	94	95	96	98	100	100
11	Persentase jenis bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	KESEHATAN								

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Cakupan pelayanan UKM dan UKP	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase SDM Kesehatan yang kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan pengendalian dan pengawasan Obat, alkes dan makanan minuman	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase UKBM Aktif	%	NA	60	70	80	90	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Indeks Gini		0,290	0,285	0.280	0.270	0.260	0.250	0.250
2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)		NA	NA	4	5	6	7	7
3	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang		62	70	73	76	78	80	80
4	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	34,62	45	52	58	64	70	70
5	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik	%	67,48	75	80	85	90	95	95
6	Persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi baik	%	67	70	73	76	80	85	85
7	Persentase Bangunan gedung pemerintah untuk pelayanan publik yang dikelola dengan baik	%	78	80	82	84	87	90	90
8	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	%	49	57	66	74	82	91	91
9	Persentase Kawasan Sumber Daya air yang dikelola dengan baik.	%	1	10	20	30	40	50	50
10	Persentase capaian akses air minum layak	%	66,89	73	81	87	93	100	100
11	Persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	%	63	75	78	82	86	90	90
12	Persentase Bangunan dan Infrastruktur Persampahan yang dikelola dengan baik	%	40	50	55	60	65	70	70
13	Persentase Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang	%	36.36	45.45	54.55	63.64	72.73	81.82	81.82
14	Persentase Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	%	58.42	60	62	65	68	70	70
15	Persentase Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Sesuai Rencana Tata Ruang	%	50	60	65	70	75	80	80
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN								
1	Persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	%	8.44	27.92	47.40	66.88	86.36	100	100
2	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani	%	0	10	30	50	70	90	90
3	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	%	89.26	90.23	91.20	92.17	93.13	94.10	94.10

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
4	Cakupan Lingkungan Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	39.58	44.58	51.58	58.58	65.58	72.58	72.58
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)		196	195,5	195	194,5	194	193,5	193,5
2	Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan	%	NA	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kasus gangguan trantib yang diselesaikan	%	NA	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	%	NA	30	40	50	60	70	70
5	Cakupan layanan penanggulangan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
	SOSIAL								
1	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan layanan rehabilitasi sosial (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan layanan penanganan bencana (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
5	TMP dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
	TENAGA KERJA								
1	Pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja	%	40	50	60	70	85	100	100
2	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	%	38.46	40	40	40	40	40	40
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase partisipasi perempuan (%)	%	34.39	37.50	40.00	43.50	46.50	49.50	52.00
3	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (%)	%	36	59.52	71.43	83.33	100	100	100
4	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan (%)	%	82.35	100	100	100	100	100	100
5	Rasio KDRT (%)	%	40	50	60	70	80	90	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak (%)	%	23.81	47.62	59.52	71.43	83.33	95.24	100
7	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)		560	600	650	700	750	800	800

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
8	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
	PANGAN								
1	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	%	30	31	32	33	34	35	35
2	Tingkat ketersediaan pangan	%	97.59	97.77	97.90	98.05	98.17	98.31	98.31
3	Tingkat konsumsi pangan	%	84.10	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	89.00
4	Desa rawan pangan	Desa	30	27	24	21	18	15	15
5	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	%	71,67	80	80	80	80	80	80
	PERTANAHAN								
1	Persentase Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan (18 kasus)	%	11.11	27.78	44.44	61.11	83.33	100	100
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah (15 lokasi)	%	20	33	47	60	80	100	100
3	Persentase proses penetapan tanah ulayat (2 lokasi)	%	NA	50	-	50	-	-	100
4	Persentase pemetaan zona nilai tanah	%	NA	20	40	60	80	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, kajian lingkungan hidup serta evaluasi Lingkungan Hidup tersedia	%	50	71	82	93	94	95	95
2	Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	68	70	73	75	78	80	80
3	Persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	3	6	9	12	15	18	18
4	Persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	%	50	60	80	100	100	100	100
5	Persentase Perusahaan / pelaku usaha yang mendapat kan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	%	55	80	100	100	100	100	100
6	Prosentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan.	%	11,22	40	55	65	75	85	85
7	Persentase pengelolaan RTH dan Taman kehati	%	70	72	75	77	80	82	82

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
8	Persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	%	0	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Penghargaan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup		1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Piagam adipura	1 Tropi adipura	1 Tropi adipura
10	Persentase Pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	68,75	100	100	100	100	100	100
11	Persentase luasan tahura yang dikelola dengan baik.	%	68	70	73	75	78	80	80
12	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	39	45	53	61	70	70	70
13	Persentase pengelolaan sampah disumber	%	11,37	14	19	24	30	30	30
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	%	95	95	96	97	98	98	98
2	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	%	95	95	96	97	98	98	98
3	Persentase data kependudukan yang valid	%	95	95	96	97	98	98	98
4	Persentase pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	78.65	80	85	90	95	100	100
2	Lembaga Adat Desa yang aktif	%	40	50	60	70	80	90	90
3	Masyarakat Hukum Adat yang aktif	orang	2	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Desa yang memiliki Perbup Batas Desa	%	NA	2	5	8	10	12	12
5	Persentase kerjasama desa yang telah ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100
6	Persentase LHP desa yang selesai ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Angka Kelahiran Kasar	%	12.61	12	10	10	10	10	10
2	Rasio Akseptor KB	%	73.6	75	76	76.5	77	77.5	77.5
	PERHUBUNGAN								
1	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang LLAJ	%	60	85	90	90	95	100	100
2	Persentase meningkatnya sarana dan fasilitas yang menunjang Pelayaran	%	50	85	90	90	95	100	100
3	Persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian.	%	0	20	40	60	80	100	100

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Persentase aplikasi yang terintegrasi	%	NA	30	40	50	60	70	70
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Jumlah UMKM yang naik kelas	Unit usaha	0	5	5	5	5	5	5
2	Omset per koperasi	Rp	219 jt	241jt	265jt	291jt	321jt	353jt	353jt
	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	%	50	60	70	80	90	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	81.02	82.04	82.06	82.08	82.10	82.15
3	Pertumbuhan investasi non tambang dan non sawit	%	56	59	62	65	71	78	335
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	%	15.56	15.56	15.56	17.78	17.78	17.78	17.78
2	Persentase wirausaha muda (%)	%	20	33	47	60	73	100	100
3	Cakupan pembinaan olahraga (%)	%	11	23	34	45	57	68	68
4	Jumlah atlet berprestasi	orang	3	3	3	3	3	3	15
5	Gugus Pramuka Aktif (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
	STATISTIK								
1	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100
	PERSANDIAN								
1	Indeks keamanan informasi		NA	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
	KEBUDAYAAN								
1	Cakupan pengembangan budaya (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan pembinaan kesenian tradisional (%)	%	12	18	24	30	36	42	42
3	Persentase Sejarah lokal yang dibina dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Museum dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah budaya lokal yang dikembangkan	Jenis	15	16	17	18	19	20	20
	PERPUSTAKAAN								
1	Jumlah Kunjungan Pemustaka	orang	8750	8850	8950	9050	9150	9250	45250

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
2	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	naskah	N/A	5	5	5	5	5	30
3	Indeks Kepuasan masyarakat pelayanan perpustakaan	%	NA	70	72	74	76	80	80
	KEARSIPAN								
1	Rasio perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	%	36	40	50	60	70	80	80
2	Rasio arsip/dokumen daerah yang dilestarikan	%	44	50	55	60	65	70	70
3	Persentase angka pemakaian arsip	%	0	0	0	0	0	0	0
	URUSAN PILIHAN								
	PERIKANAN								
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton	10,593.	10,677.84	10,763.27	10,849.37	10,936.17	11,023.66	11,023.66
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	16,974.	17,144.14	17,315.59	17,488.74	17,663.63	17,840.26	17,840.26
3	Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan (%)	%	12.00	30.00	50.00	60.00	65.00	70.00	70.00
4	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)	Ton	2,650.00	2,673.85	2,697.91	2,722.20	2,746.70	2,771.42	2,771.42
5	Jumlah hasil perikanan yang dipasarkan (segar) (Ton)	Ton	24,917.	25,141.76	25,368.03	25,596.35	25,826.71	26,059.15	26,059.15
	PARIWISATA								
1	Persentasi destinasi wisata yang baik	%	16,13	18,75	21,21	23,53	25,71	28,77	28,77
2	Pertumbuhan jumlah wisatawan	%	-56,13	14,26	20,00	25,00	33,33	35,00	35,00
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	komunitas	60	70	80	90	100	110	110
	PERTANIAN								
1	Indeks sarana dan prasarana	%	50	60	70	80	90	100	100
2	Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman Pangan	ton/ha	91,71	93,46	95,80	98,13	100,4	102,79	490,63
3	Pertumbuhan produktivitas (ton/ha) tanaman hortikltura	ton/ha	56,67	61,67	66,67	71,67	76,67	80	356,67
4	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	%	50	60	70	80	90	100	400
5	Persentase hewan ternak yang sehat	%	50	60	70	80	90	100	100
6	Pertumbuhan produksi ternak yang asuh	%	50	60	70	80	90	100	100
7	Indeks sarana dan prasarana perkebunan	%	80	81	82	83	84	85	86
8	Pertumbuhan produktivitas perkebunan non sawit	%	80	81	82	83	84	85	86
	KEHUTANAN								

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Persentase luasan tahura yang dikelola dengan baik.	%	68	70	73	75	78	80	80
	PERDAGANGAN								
1	Stabilitas harga kebutuhan pokok (angka inflasi)	dokumen	12	12	12	12	12	12	12
	PERINDUSTRIAN								
1	Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian non sawit	%	2861	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	3204
2	pertumbuhan produk olahan CPO	%	0	0	0	1	1	1	1
	TRANSMIGRASI								
1	Kesejahteraan transmigran yang ditempatkan	KK	90	55	60	65	65	65	310
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
	PERENCANAAN								
1	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	92.64	93	94	95	96	97	97
2	Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	%	NA	93	94	95	96	97	97
3	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	91.64	92	93	94	95	96	96
	KEUANGAN								
1	Indeks pengelolaan keuangan daerah	Predikat	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Indeks pengelolaan aset daerah	Predikat	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Rasio PAD terhadap APBD	%	7,34	7,5	7,7	8	8,3	8,5	8,5
	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase pegawai berkinerja baik	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	%	NA	70	75	80	85	90	90
3	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	%	NA	70	75	80	85	90	90
	PENGAWASAN								
1	Persentase temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	0.15	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	%	70	70	75	80	85	90	90
3	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B	%	25	70	75	80	85	90	90
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	%	NA	70	75	80	85	90	90
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	50	60	65	70	75	80	80
	SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100
	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100
2	Nilai EKPPD		2.80	2.90	2.95	3.00	3.10	3.20	3.20
3	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	NA	100	100	100	100	100	100
	KECAMATAN								
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	NA	70	75	80	85	90	90
2	Persentase desa yang Menyampaikan laporan kepala desa tepat waktu	%	NA	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	%	NA	70	72	74	76	80	80
4	Persentase pelanggaran perda dan perkada yang terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	%	NA	100	100	100	100	100	100
	FUNGSI PENUNJANG LAINNYA								
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	%	NA	70	72	74	76	80	80
2	Persentase PD dengan Nilai IRB Baik	%	75	75	80	85	90	90	90
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Jumlah Demo	kali	0	0	0	0	0	0	0
2	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	%	70	80	80	80	80	80	80
3	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	%	NA	75	75	75	75	75	75
4	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial	%	NA	100	100	100	100	100	100

No.	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN, IMPACT, OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TH. 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD
				TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
	dan budaya yang ditindaklanjuti								
5	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	%	NA	100	100	100	100	100	100

BAB VII
PENUTUP

7.1 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2022 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah guna mencapai target capaian kinerja Perangkat Daerah dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Kabupaten Paser menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masing masing. Renja Perangkat Daerah (PD) tersebut sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan untuk tahun 2022.

RKPD Tahun 2022 berfungsi sangat penting karena menjadi dasar Pelaksanaan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJMD 2022-2026. RKPD memuat gambaran umum daerah, evaluasi hasil kinerja daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Paser berupaya mengoptimalkan peran publik dalam proses perencanaan

pembangunan daerah melalui masukan pokok-pokok pikiran DPRD, forum konsultasi publik dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Forum tersebut merupakan wahana bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam menghasilkan rumusan rencana kerja yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan Kabupaten Paser. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser sangat bergantung pada strategi berbagi peran aktif antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian melalui tema "**PERCEPATAN TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**".

Di tetapkan di : Tana Paser
Pada tanggal : Juli 2021

BUPATI PASER,

dr. FAHMI FADLI

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel

Rekapitulasi Hasil Reses DPRD Kabupaten Paser

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
1	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Gedung PAUD	Tidak Tersedianya Sarana & Prasarana tempat Mengaji atau Baca Tulis Al-Quran, Sehingga Perlunya di bangun Gedung TPA Al-Muhajirin	RT 015 Tanjung Raya Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	SDN 033 Tanah Grogot belum memiliki ruang perpustakaan sebagai sarana koleksi literasi sekaligus ruang baca bagi para siswa. Untuk itu layak untuk dibangunkan ruang perpustakaan	SDN 033 Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	Sebaghai upaya untuk peningkatan pendidikan maka sangatlah di butuhkan Pembangunan Gedung Perpustakaan SD.034 Desa Kayungo Sari RT,08	Jl. Kayungo Sari, Kab. Paser, Long Ikis, Kayungo Sari
				Pembangunan Sarana, Prasarana	Pembangunan Pagar (SD)	Tidak Tersedianya Pagar Pengawasan Bagi Siswa	Desa Uko, Kab. Paser, Muara

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
				dan Utilitas Sekolah		Sehingga Perlunya Pembangunan Pagar Sekolah Bagi SDN 017 Desa Uko	Komam, Uko
					Pembangunan Pagar (SD)	Tidak Ada Pagar Sehingga Perlu di lakukan Pembuatan Pagar SDN 035 Desa Senaken	Desa Senaken, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Pembangunan Pagar (SD)	Tidak Tersedianya Pagar Pengawas Bagi Siswa. Sehingga Perlu Pembangunan Pagar Sekolah SDN 011 , Panjang 55 m Lebar 66 m di RT.02 Long Ikis	RT 02, SDN 011 Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis
					Pembangunan Pagar (SD)	Kondisi SekolahSDN 009 Tanah Grogot tidak kondusif dikerenakan tidak ada pagar pembatas sehingga diperlukan Pagar sekolah Pada SDN 009 Tanah Grogot RT 7 Desa Jone (Pagar Beton)	Jl Untung Suropati RT 07 Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Siring (SD)	Saat ini sekolah SD 023 Belum ada siring sehingga kondisi gedung di hawatirkan terjadi perubahan akibat kondisi alam, sehingga di usulkan untuk pembangunan Siring SD 023 Desa Kerayan Sentosa Kecamatan Long Ikis.	Jl. Krayan Sentosa, Kab. Paser, Long Ikis, Krayan Sentosa
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Pagar (SMP)	Tidak ada Pembatas sekolah sehingga perlu adanya Pembangunan pagar SMP 4 Desa Songka	Desa Songka, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka
					Pembangunan Paving Block (SMP)	Halaman Sekolah Yang Tidak Memungkinkan Bagi Siswa. Sehingga Perlu Pembangunan Pavingnisasi (Paving Block) ,Panjang 64 m, Lebar 35 m di Halaman Mts. Istiqamah Long Ikis	Mts. Istiqamah Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis
2	**Dinas Kesehatan**	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	tenaga kesehatan sangat membutuhkan rehabilitasi rumah dinasdi rt 4 karna tidak layak lagi di tempatin	Desa Tanjung Aru Rt 4, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
		KESEHATAN	dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			maka dari itu meminta di bangunkan rumah dinas tenaga kesehatan	
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor	belum tercukupinya sumber air bersih untuk masyarakat di Desa maruat	RT 01-RT 05, Kab. Paser, Long Kali, Maruat
					Pembangunan Sumur Bor	Apabila kemarau tidak dapat air sumur kering Desa Batu Kajang	Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pembangunan Sumur Bor	Apabila kemarau tidak dapat air maka dari itu perlunya bantuan Pembangunan Sumur Bor RT 03 dan RT 04 Desa Songka Kec. Batu Kajang	RT 03 dan RT 04 Desa Songka Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Tidak ada nya penampung air bersih sehingga diperlukan pembuatan bak penampungan air bersih (tandon) selengot	Desa Selengot, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Selengot
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon, sebanyak 120 Unit di Desa Jemparing Kec. Long Ikis	Desa Jemparing, Kab. Paser, Long Ikis, Jemparing
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurang Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon ,sebanyak 120 unit di Desa Kayungo Kec. Long Ikis	Desa Kayungo, Kab. Paser, Long Ikis, Kayungo
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon , sebanyak 120 Unit di Desa Mendik Kec. Long Kali	Desa Mendik, Kab. Paser, Long Kali, Mendik

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon, sebanyak 130 unit di Desa Tajur	Desa Tajur, Kab. Paser, Long Ikis, Tajur
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon, sebanyak 40 unit di Kedemen RT.03 Kec. Longkali	Kedemen RT 03 Kec. Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya Ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon, sebanyak 120 Unit di Desa Sekurou Jaya Kec. Long Ikis	Desa Sekurou Jaya, Kab. Paser, Long Ikis, Sekurou Jaya
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon 600 Liter, sebanyak 160 Unit di Desa Batu Kajang	Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon 600 Liter, sebanyak 160 Unit di Kec. Batu Sopang	Kecamatan Batu Sopang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Sopang, Seluruh Kelurahan/Desa
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon 600 Liter, sebanyak 160 Unit di Kec. Muara Komam	Kecamatan Muara Komam, Kab. Paser, Muara Komam, Muara Komam, Seluruh Kelurahan/Desa
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	Kurangnya ketersediaan Penampungan Air Bersih. Sehingga Perlu Pengadaan Tandon 600 Liter, sebanyak 160 Unit di Kec. Muara Samu	Kecamatan Muara Samu, Kab. Paser, Muara Samu, Muara Samu, Seluruh Kelurahan/Desa
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	warga desa Selegot Sangat membutuhkan tempat penampung air untuk persedian musim kemarau maka sehingga meminta usulan tandon 300 liter	Desa Selengot, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Selengot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	warga desa Labuangkallo Sangat membutuhkan tempat penampung air untuk persedian musim kemarau maka sehingga meminta usulan tandon 300 liter	Desa Labuangkallo, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Labuangkallo
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	warga desa Lori Sangat membutuhkan tempat penampung air untuk persedian musim kemarau maka sehingga meminta usulan tandon 300 liter	Desa Lori, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	warga desa Laburan Lama Sangat membutuhkan tempat penampung air untuk persedian musim kemarau maka sehingga meminta usulan tandon 300 liter	Desa Laburan Lama, Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan
					Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaaan (Kawasan Perdesan)	warga desa Laburan Baru Sangat membutuhkan tempat penampung air untuk persedian musim kemarau maka sehingga meminta usulan tandon	Desa Laburan Baru, Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan Baru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						300 liter	
				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pipanisasi Air Bersih (Kawasan Perdesaan)	Akses Ketersedian Air Bersih Di Rt 19 Desa Kresik Bura Saat ini selalu menjadi permasalahan yang harus segera di atasi maka di usulkan pipanisasi air bersih (kawasan Perdesaan)	Rt 19 Keresik bura, Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura
					Pipanisasi Air Bersih (Kawasan Perdesaan)	Akses Ketersedian Air Bersih Di Rt 20 Desa Kresik Bura Saat ini selalu menjadi permasalahan yang harus segera di atasi maka di usulkan pipanisasi air bersih (kawasan Perdesaan)	RT 20 Desa keresik bura, Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura
					Pipanisasi Air Bersih (Kawasan Perdesaan)	Akses Ketersedian Air Bersih Di Rt 18 Desa Kresik Bura Saat ini selalu menjadi permasalahan yang harus segera di atasi maka di	Rt 18 Desa Kresik Bura, Kab. Paser, Paser Belengkong, Keresik Bura

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						usulkan pipanisasi air bersih (kawasan Perdesaan)	
					Pipanisasi Air Bersih (Kawasan Perdesaan)	Akses Terhadap Ketersedian Air Bersih Di Desa Rantau Bintungan Saat ini Selalu Menjadi Permasalahan yang harus segera di atasi maka di usulaka pipanisasiair besih (kawasan perdesaan)	Desa Rantau Bintungan, Kab. Paser, Muara Samu, Libur Dinding
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Pembangunan Embung Desa	belum tersedia nya embung untuk menampung suplai aliran air hujan untuk pengairan pertanian/perkebunan di Desa Mendik Makmur	RT 02, Kab. Paser, Long Kali, Mendik Makmur

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Embung Desa	Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani maka salah satu cara adalah Pembangunan Embung Desa Munggu Kec. Long Kali RT.01 karena dengan adanya embung desa dapat di manfaatkan untuk pengairan dan lainnya	Jl. Munggu, Kab. Paser, Long Kali, Munggu
					Pembangunan Embung Desa	Dibutuhkan embung desa sebagai sarana tempat penampungan air untuk keperluan masyarakat khususnya petani, di usulkan Pembangunan Embung Desa mendik Karya RT.04	jl. Mendik Karya RT.4, Kab. Paser, Long Kali, Mendik Karya
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan	Masyarakat Desa Pulau Rantau belum memiliki gedung representatif untuk kegiatan multifungsi, untuk itu perlu dibangunkan gedung serbaguna supaya kehidupan masyarakat Pulau Rantau	Desa Pulau Rantau Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Pulau Rantau

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						lebih dinamis (p=20 m l=10 m t = 8 m)	
					Rehabilitasi Gedung Serbaguna Kecamatan	Pembangunan Gedung Serbaguna saat ini di desa Keluang Paser Jaya sangat membutuhkan lanjutan pembangunan TAHAP II, Mengingat gedung serba guna sangat di butuhkan untuk keperluan desa maupun masyarakat	Jl. Keluang Paser Jaya, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan Jalan Antar Desa	Akses Transportasi dan Aktivitas Warga Terhambat Apabila Musim Hujan Jalan Sudah Tergenang Dengan Air Dan Jalanya menjadi sangat becek Sehingga Perlu Peningkatan Jalan Antar Desa	Desa Keladen Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Keladen
				Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan	Sulitnya akses jalan menuju Kuburan bagi warga yang berziarah karena harus	Desa Petiku, Kab. Paser, Long Kali, Petiku

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						menyebrangi sungai, maka perlunya bantuan Pembangunan jembatan titian kuburan muslimin desa petiku P= 200 M, L= 2 M	
					Pembangunan Box Culvert	Masayarakat Desa Tepian Batang RT 11 memerlukan pembangunan box culvert mengingat jembatan darurat yang ada kondisinya sudah membahayakan jika dilintasi kendaraan beban berat(4X6meter)	RT 11 Desa Tepian Batang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang
					Pembangunan Jembatan	Tidak adanya Akses Penghubung Jalan, Sehingga Perlu Pembangunan Jembatan, Panjang 26 m Lebar 4 m dari RT. 06 ke RT. 09, Desa Pait	RT.06 Ke RT.09 Desa Pait, Kab. Paser, Long Ikis, Pait
					Pembangunan Box Culvert	Seringnya terjadi banjir akibat tidak adanya gorong gorong dijalan utama	Jalan Poros Desa Rantau Panjang RT 1, Kab. Paser, Tanah Grogot, Rantau Panjang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Box Culvert	Jalan lingkungan di wilayah RT 5 Desa Suliliran memerlukan pembangunan box culvert mengingat jembatan kayu yang afa sudah rusak dan berbahaya jika dilewati	RT 5 Desa Suliliran Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran
					Pembangunan Box Culvert	Tidak tersedianya sarana penghubung antar jalan sehingga harus di bangun Box Culvert, Diharapkan dengan adanya box cuvert tersebut bisa mengatasi rusaknya jalan akibat arus air hujan, di jalan Kebun RT 7 Desa Jone.	Jalan Kebun, RT 7 Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Pembangunan Box Culvert	Minimnya saluran air, sehingga dibutuhkan Pembangunan Box Culvert Gg. Ali RT. 01 (5x8 m2)Desa Tanah Periuk	Gg. Ali RT. 01 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Periuk

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Box Culvert	Air sering menggenang ke jalan kaerna minimnya saluran air, maka diperlukan Pembangunan Box Culvert Jalan UPSA RT. 07 1 Unit Desa Janju 8x2	Jalan UPSA RT. 07 1 Unit Desa Janju Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Janju
					Pembangunan Box Culvert	Karena Air tersumbat takut akan terjadi banjir maka perlu bantuan Pembanguan Box Culvet sungai Sulung RT 04 Desa lempesu	RT 04 Desa lempesu, Kab. Paser, Paser Belengkong, Lempesu
					Pembangunan Jembatan	rusaknya akses yang membahayakan masyarakat untuk melintasi jembatan tersebut sehingga membutuhkan pembangunan jembatan, rumah warga Masudin Sutarmin dan masnun desa Pepara Kec Paser Belengkong	rumah warga Masudin Sutarmin Dan Masnun, Kab. Paser, Tanah Grogot, Pepara
					Pembangunan Box Culvert	Jembatan yang ada selalu mengalami kerusakan di karenakan beban berat saat mobil pengangkut	Kayungo sari, Kab. Paser, Long Ikis, Kayungo Sari

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						sawit melintas sehingga jembatan rusak, maka di usulkan Boxcalvert RT.04 Desa Kayungo Sari	
					Pembangunan Box Culvert	Jembatan yang ada selalu mengalami kerusakan di karenakan beban berat saat mobil pengangkut sawit melintas sehingga jembatan rusak, maka di usulkan Boxcalvert RT.07 Desa Kayungo Sari	Kayungo Sari, Kab. Paser, Long Ikis, Kayungo Sari
4	**Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan RT 03 Kelurahan Long Kali perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 03, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan samping lapangan sepak bola di RT 20 Desa Mendik perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 20, Kab. Paser, Long Kali, Mendik
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan di RT 07 Desa	RT 07, Kab. Paser, Long Ikis,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Krayan Sentosa perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	Krayan Sentosa
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan di RT 01 Desa Sekurau Jaya perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 01, Kab. Paser, Long Ikis, Sekurou Jaya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan di RT 02 Desa Putang perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 02, Kab. Paser, Long Kali, Putang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan di RT 09 Desa sebakung perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 09, Kab. Paser, Long Kali, Sebakung
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan gang darmani di RT 12 Desa Pait perlu dilakukannya peningkatan jalan tersebut	RT 12, Kab. Paser, Long Ikis, Pait

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu Semenisasi menuju taman ilalang RT 07 Desa Jone	RT 07 Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses Jalan Sehingga Perlu Peningkatan Jalan Gang (Semenisasi) Di Rt 05 Desa Legai	Desa Legai, Kab. Paser, Batu Sopang, Legai
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lumpur apabila hujan tidak bisa dilewati sehingga perlunya peningkatan jalan pada Gang Mupakat RT.029 Desa Batu kajang. P=200 L=3	Gang Mupakat RT.029 Desa Batu kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalannya lumpur apabila hujan tidak bisa dilewati sehingga perlu peningkatan jalan pada Gang Malur RT.025 Desa Batu Kajang. P=44 L=3	Gang Malur RT 025 Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalannya tanah lumpur jika hujan sehingga perlu peningkatan jalan pada Gang Suka Cita RT.027 Desa Songka Kec. Batu	Gang Suka Cita RT.027 Desa Songka Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Sopang. P=187 L=4	Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Apabila Hujan Jalannya Lumpur dan Tidak Bisa Dilewati pakai Motor sehingga perlunya peningkatan jalan pada Gang Rawa RT.018 Desa Batu Kajang. P=250 L=3	Gang Rawa RT.018 Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Disaat hujan jalan ini tidak bisa dilewati sehingga perlunya peningkatan jalan pada Gang Rita RT.031 Desa Batu kajang. P=150 L=3	Gang Rita RT.031 Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan bebatuan dan susah dilewati jika hujan sehingga perlunya peningkatan jalan Gang Sejahtera RT.031 Desa Batu Kajang. P=200 L=2,5	Gang Sejahtera RT.031 Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Sopang, Seluruh Kelurahan/Desa
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Karena jalan sudah rusak dan berlubang susah di lewati masyarakat sehingga perlu bantuan Semenisasi Gang Hikmah	Gang Hikmah RT.04 Desa Songka Kec. Batu Sopang, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						RT.04 Desa Songka Kec. Batu Sopang	Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Karena jalan sudah rusak dan berlubang susah di lewati masyarakat sehingga perlu bantuan Semenisasi RT.06 Desa Selerong Kec. Muara Komam	RT.06 Desa Selerong Kec. Muara Komam, Kab. Paser, Muara Komam, Selerong
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Karena jalan sudah rusak dan berlubang susah di lewati masyarakat sehingga perlu bantuan Semenisasi Gang Sorong 2 Batu Sopang	Gang Sorong 2 RT.25 Desa Batu Sopang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Gg Panyiban jl. KH A.Dahlan sudah dalam kondisi rusak perlu ditingkatkan dengan konstruksi latasir	Jl. KH. A.Dahlan Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi GG Nusantara Jl. RM Notosunardi sudah dalam kondisi rusak perlu ditingkatkan dengan konstruksi latasir (310x3x0,02 m)	GG Nusantara Jl. RM Notosunardi, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi GG Nugraha RT 13 RW 04 JL. RA Kartini sudah dalam kondisi rusak perlu ditingkatkan dengan konstruksi latasir (310x3x0,02 m)	GG Nugraha RT 13 RW 04 JL. RA Kartini Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi GG Dea Loandry RT4 Desa Tepian Batang sudah rusak berat dan menyebabkan aktifitas masyarakat terhambat. Untuk itu perlu diperbaiki kondisinya dengan semenisasi (250x2 Meter)	RT 4 Desa Tepian Batang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi GG Banjar Jaya RT 15 Desa Senaken sudah rusak berat dan menyebabkan aktifitas masyarakat terhambat. Untuk itu perlu diperbaiki kondisinya dengan semenisasi (164x3x0,2m)	RT 15 Desa Senaken, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Jalan Rahmatul Ummah Blok E-5 RT 5 Desa Tapis sudah rusak	Blok E-5 RT 5 Desa Tapis, Kab. Paser, Tanah

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						dan membahayakan aktifitas masyarakat yang lewat jalan tersebut. Untuk itu perlu diperbaiki kondisinya dengan konstruksi semenisasi 164 x 3x0,02 m)	Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi jalan lingkungan menuju makam Desa Padangpengrapat licin rusak dan membahayakan peziarah yang lewat jalan tersebut. Untuk itu perlu diperbaiki kondisinya dengan semenisasi (164 x 3x0,02 m)	Makam Desa Padangpengrapat, Kab. Paser, Padang Pengrapat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Jalan Lingkungan RT, 3 dan 4 Saat ini Mengalami kerusakan, sehingga sangat perlu untuk di tingkatkan, maka di usulkan agar di lakukan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 3 Ke RT. 4 Desa Kelempang Sari Kecamatan Kuaro.	Jl. Kelempang Sari, Kab. Paser, Kuaro, Klempang Sari

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yang di pergunakan saat ini sudah rusak/Lebur, Sehingga harus di tingkatkan lagi, maka di usulkan Peningkatan jalan Gang Pantai Keke RT.01 Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro ukuran 2 x 200 Meter.	Jl. Kelurahan Kuaro, Kab. Paser, Kuaro, Kuaro
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yang sudah ada masih sempit sehingga pengguna jalan dalam upaya meningkatkan prekonomian kurang lancar, sehingga di usulkan Peningkatan jalan Gang Al-Mukarromah RT.11 Kelurahan Kuaro Kec. Kuaro Ukuran 2 x 100 Meter	Jl. Kelurahan Kuaro, Kab. Paser, Kuaro, Kuaro
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yang di pergunakan saat ini sudah ada yang rusak sehingga saat musim hujan berlumpur, Sehingga perlu di adakan peningkatan jalan, maka	Jl. Keluang Paser Jaya, Kab. Paser, Keluang Paser Jaya

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						di usulkan Peningkatan jalan Lingkungan Blok D, E Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro. (4 X 350) M (LATASIR) Panjuang 300 Meter	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan sudah ada yang rusak sehingga saat musim hujan juga berlumpur, Sehingga perlu di adakan peningkatan jalan, maka di usulkan Peningkatan jalan Lingkungan Blok A Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro. (LATASIR) Panjang 300	Jl. Keluang Paser Jaya, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya
					Peningkatan Jalan dilingkungan Pemakaman	Saat ini masih tersisa jalan kuburan desa Keluang Paser Jaya yang belum di semenisasi sehingga harus di lakukan lanjutan semenisasi Jalan Kuburan RT.07 desa Keluang Paser Jaya 150 Meter	Keluang Paser Jaya, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan desa.	gang bambu RT.23, Kab.

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						sehingga perlu dilakukan semenisasi	Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan desa. sehingga perlu dilakukan semenisasi	gang Bugis RT.23, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Jalan Desa, sehingga perlunya Semenisasi ulang jalan Gang	Sebelah Warung Tanjung Rasa RT 024, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Terputusnya jalan semenisasi Gang, perlu semenisasi lanjutan jalan (bagian belakang)	Gang Berdikari RT 030 Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Kajang
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Terputusnya Semenisasi Jalan Desa, perlu lanjutan semenisasi jalan Gang (Bagian Depan)	Gang Berdikari RT 030, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	rusaknya Jalan Desa, perlu dilakukan semenisasi gang Desa	Jalan Sorong 1 Padang Malut, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
							Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses Jalan yang rusak sehingga perlu di lakukan peningkatan jalan lingkungan masjid al Ihsan (LATASIR) Desa Senaken	Desa Senaken, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses Jalan yang rusak sehingga perlu di lakukan Peningkatan Jalan (SEMENISASI) Gg. Keluarga RT 5 Desa Sempulang	Desa Sempulang Gg Keluarga RT 5, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses Jalan yang rusak sehingga perlu di lakukan Peningkatan Jalan (SEMENISASI) Gg. Soponyo RT 10 Desa Sempulang	Desa Sempulang RT 10, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang
					Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang	Sering terjadi banjir sehingga perlu adanya pembangunan Drainase Tanah Grogot Jlan sultan Ibrahim Khaliluddin Gg.onom	Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin Gg. Onom, Kab. Paser, Tanah Grogot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan jalan RT 001 Desa Songka dengan produk (SEMENISASI)	Desa Songka RT 001, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan jalan RT 003 Desa Songka dengan (SEMENISASI)	Desa Songka RT 003, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan jalan RT 004 desa songka dengan produk (SEMENISASI)	Desa Songka RT 004, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya peningkatan jalan pesantren Desa songka RT 04, (semenisasi)	Desa Songka RT 04, Kab. Paser, Batu Sopang, Songka
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya peningkatan jalan gg RT 09 desa muara langon (semenisasi)	Desa Muara Langon RT 09, Kab. Paser, Muara Komam, Muara Langon

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	akses jalan yang rusak dan kerusakan jalan terkadang menyebabkan kubangan-kubangan, Kondisi tersebut tentunya juga akan mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, sehingga perlu adanya Peningkatan jalan lingkungan desa kerang	Desa Kerang Kec. Batu Engau, Kab. Paser, Batu Engau, Kerang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	akses jalan yang rusak dan kerusakan jalan terkadang menyebabkan kubangan-kubangan, Kondisi tersebut tentunya juga akan mengganggu kenyamanan dan membahayakan pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, sehingga perlu adanya Peningkatan jalan lingkungan Desa Damit	Desa Damit Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Damit

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya Peningkatan jalan lingkungan (semenisasi) desa sangkuriman	Desa Sangkuriman, Kab. Paser, Paser Belengkong, Sangkuriman
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses jalan lingkungan membuat mobilitas masyarakat terbatas, Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di Gg Rawa Sari Tembus Rawa Makmur Kelurahan Tanah Grogot	GG Rawasari Tembus Rawa Makmur Kelurahan Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/Gang	Kanal tersumbat yang mengakibatkan banjir sehingga perlu dilakukan perbaikan drainase sepanjang 3 kilometer di Desa Rantau Panjang RT. 07 Panjang 3 KM, Lebar 2 M	Desa Rantau Panjang RT. 07, Kab. Paser, Tanah Grogot, Rantau Panjang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses Jalan Lingkungan di Gg Akifa Naila RT 7 Desa Tepian batang sehingga diperlukan Peningkatan	Gg. Akifa Naila RT.7, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						kualitas jalan / perbaikan jalan (Semenisasi). Panjang 200 M, Lebar 5 M	
					Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang	Belum adanya Parit / Drainase di Jln. Agus Salim Gg. Kelakai RT. 14 Rw. 5 Kecamatan Tanah Grogot, Panjang 500 M, Lebar 1 M	Jln. Agus Salim Gg. Kelakai RT. 14 Rw. 5, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses Jalan Lingkungan di jln. ST. Khaliluddin Gang Siswa Rt. 01 Rw. 04 sehingga diperlukan Peningkatan kualitas jalan / perbaikan jalan (Semenisasi). Panjang 100 M, Lebar 3 M	Jln. ST. Khaliluddin Gg. Siswa RT. 01 Rw. 04, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kerusakan akses jalan lingkungan di jln D. I. Panjaitan Gang Nanggala RT 17 Kecamatan Tanah Grogot sehingga diperlukan Peningkatan kualitas jalan (Pengerasan). Panjang 200 M, Lebar 4 M	JLN. D. I. Panjaitan, Gg. Nanggala RT.17, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses Jalan Lingkungan Desa. Sehingga Perlu dilakukan Peningkatan Jalan Lingkungan (Semenisasi) Blok E RT. 04 ,Panjang 300 m Lebar 3 m Tinggi 0,2 m di Desa Tajur	Blok E RT 04 Desa Tajur, Kab. Paser, Long Ikis, Tajur
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Jalan Lingkungan Desa Sehingga perlu dilakukan pengerasan jalan Desa Tajur Blok H kec. Long Ikis(rigid beton)	Desa Tajur Blok H Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Tajur
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan lingkungan sehingga perlu Peningkatkan Jalan lingkungan Jl. Sepakat Depan SMP 1 Long Ikis Kec.Long Ikis agar layak dipergunakan (semenisasi)	Jl. Sepakat depan SMP 1 Long Ikis Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi jalan lingkungan belum pengerasan Maksimal sehingga perlu Peningkatan Jalan RT. 010 Desa Swit Jaya Kec. Long Ikis (Rigit Beton)	RT. 010 Desa Sawit Jaya Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Sawit Jaya

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Belum pengerasannya jalan lingkungan sehingga dianggap perlu peningkatan jalan RT. 04 Desa Samuntai Kec. Long Ikis (Semenisasi)	RT. 04 Desa Samuntai Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Samuntai
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan rusak sehingga perlu adanya peningkatan jalan lingkungan gg. Bahrani RT. 11 Kelurahan Long Kali (Semenisasi)	RT. 011 Kelurahan Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses jalan warga, maka diperlukan Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 07 Kelurahan Long Kali (Semenisasi)	RT. 07 Kelurahan Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
					Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan/Gang	banjir dipemukiman warga gang Citra apabila turun hujan akibat drainase yg tidak berfungsi, sehingga diperlukan rehabilitasi berat Drainase	Gang Citra RT 2 RW 4 Jl. RA Kartini, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yang becek dan masih timbunan tanah apabila turun hujan kondisi jalan sangat memprihatinkan, untuk itu diperlukan peningkatan Jalan berupa Semenisasi	Gang Reformasi II Jl. Kandilo Bahari RT 1 RW 3, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yg masih tanah sehingga masyarakat tidak dapat melaluinya apabila hujan, sehingga masyarakat mengharapkan semenisasi di Gang PUTRA RT 1 tersebut	RT 1, Kab. Paser, Tanah Grogot, Pepara
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Beceknya Jalan Andi Ali Gg. Aswaja Desa Jone akibat belum adanya peningkatan jalan, sehingga masyarakat setempat kesulitan melalui akses jalan. Utk itu masyarakat setempat mengusulkan peningkatan Gang tersebut dengan Semenisasi	Jl. Andi Ali Gang. Aswaja RT 11 Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang	Belum adanya saluran Pembuang air (Drainase) di Gang Bersama RT 8 Desa Tanah Priuk sehingga menyebabkan banjir apabila hujan dan terlihat kurang bersih krn masyarakat membuang air kotor langsung dari dalam rumah, utk itu sangat dibutuhkan sekali saluran pembuang atau Drainase demi terciptanya kawasan yg bersih	Gang Bersama RT 8 Desa Tanah Priuk, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Periuk
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan yang becek dan berlubang di pemukiman desa sungai langir mengakibatkan masyarakat sangat kesusahan untuk melaluinya mengingat jalan masih tanah	RT, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Langir
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	semenisasi atau pengerasan(LPB) jalan untuk desa tempakan untuk mempermudah	Desa Tempakan (LPB). kec batu engau, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						akses jalan di desa tempakan yang sangat membutuh kan perbaiakan ,Desa Tempakan (LPB) kec batu engau	Engau, Tampakan
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	emenisasi atau perbaikan jalan TSM Desa suatang (Rigit),TSM Desa Suatang . Kec Pasir Belengkong	TSM Desa Suatang . Kec Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Suatang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	rusak nya akses jalan yang ada rt 03 (pabencengan) desa paser belengkong kec paser belengkong yang sangat memerlukan perbaikan atau peningkatan ,akibat jalan yang sdh sangat paarah kerusakan nya sekitar 123 x 4 x 2 meter	rt 03 (pabencengan) desa paser belengkong kec paser belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi fisik jalan sudah rusak, berlubang-lubang dan terjadi genangan air setelah hujan, diharapkan dengan peningkatan jalan/gang Kuburan RT 22 Di Desa Padang Pengrapat, Bermanfaat untuk warga masyarakat digunakan untuk transportasi pemakaman, hubungan antar lingkungan desa serta sarana lalu lintas masyarakat, terutama petani.	Jln. Raya Tanah Grogot Pondong, RT 22 Desa Padang Pengrapat, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang	Tidak adanya saluran air pembuangan menyebabkan bau dan becek satelah hujan, Karena tidak ada saluran air. Dengan Adanya saluran drainase Lingkungan Gang Perumahan Union RT 1 Desa diharapankan setelah hujan air tidak menggenangi jalan dan	Jalan Union Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						menyebabkan air melebar ke pekarangan perumahan warga .	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses Jalan Masyarakat kurang baik, tergenang, becek setelah hujan dan mengakibatkan jalan berlubang, diharapkan dengan Peningkatan Jalan/Gang semenisasi akses warga masyarakat di Gang Setia Warga 1 RT 9 Desa Sungai Tuak lebih mudah dan cepat untuk menuju jalan utama dan ke rumah warga tinggal, dan memudahkan aktivitas petani.	Jl. Padat Karya RT 9 Desa Sungai Tuak, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Tuak
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses Jalan masyarakat kurang memadai, jalan di tumbuhi ilalang, tergenang saat hujan dan mengakibatkan berlubang jalan, diharapkan dengan semenisasi akses warga masyarakat RT 11 Cinta	Jalan TMD perijak, RT 11 Cinta Kasih Desa Tepian Batang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tepian Batang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Kasih Desa Tepian Batang lebih mudah dan cepat untuk menuju jalan utama dan ke rumah warga tinggal.	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan rusak, sehingga diperlukan Peningkatan Jalan Gg. Muslimin RT. 03 Desa Tanah Periuk (Semenisasi)	Gg. Muslimin RT. 03 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
					Pembangunan Jalan Lingkungan/Gang	Minimnya aksses jalan warga, sehingga diperlukan Pembangunan Badan Jalan Sampolota RT. 03 Desa Tanah Periuk (Galian setempat)	Jalan Sampolota RT. 03 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Periuk
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan warga, maka perlu PeningkatanJalan Blok E3 (200 m2) Desa Tapis (Semenisasi)	Blok E3 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan warga, maka perlu Peningkatan Jalan Gg. Asoka Desa Jone (Semenisasi)	Gg. Asoka Desa Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan warga, maka perlu Peningkatan Jalan Lingkungan Blok E1 Desa Tapis (Semenisasi)	Blok E1 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	"Rusaknya jalan warga, maka perlu Peningkatan Jalan Union Gg. Akasia RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot (Semenisasi)	Jl. Union Gg. Akasia RT. 007 Desa Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Akses jalan yang rusak sehinnga perlu adanya peningkatan jalan Desa Tapis RT 002Jln. D.I. Panjaitan Perum. Pesona Nirmala Blok. B No. 30	Desa Tapis RT 002 BLOK D, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Lingkungan Jantung Desa	Desa Lempesu Kec.Paser Belengkong, Kab. Paser,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Lempesu Sempanjanga 200 Meter (Perkerasan Beton Semen (Rigid))	Paser Belengkong, Lempesu
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu PeningkatanJalan Lingkungan RT 04 Desa Lempesu(Lanjutan)Sempanjanga 200 Meter (Perkerasan Beton Semen (Rigid))	RT 04 Desa Lempesu, Kab. Paser, Paser Belengkong, Lempesu
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu Peningkatan Jalan Abdeling 2 Dundang (Lanjutan) Desa bekoso 200 M (Perkerasan Beton Semen (Rigid))	Jalan Abdeling 2 Dundang Desa Bekoso, Kab. Paser, Paser Belengkong, Bekoso
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu Peningkatan Jalan (Lanjutan) Desa Bekoso (Perkerasan Beton Semen (Rigid)) 200 M	Desa Bekoso Kec. Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Bekoso
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya jalan yang dilalui maka perlu	RT 01 dan RT 02 Desa Bekoso

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 dan RT 02 Desa Bekoso (Rijid)	Kec. Belengkong, Kab. Paser, Bekoso
					Pembangunan Drainase Lingkungan/Gang	Jalan yang ada saat ini selalu mengalami kerusakan akibat genangan air saat musim penghujan dikarenakan tidak adanya drenase gang. Sehingga di usulkan untuk Derainase Gg. H. Ali RT.10 dan RT.4 Jl. Kapten Pier. Tendean Tanah Grogot Panjang 200 M Lebar 2.5 M	Jl. Kapt. Pier Tendean RT.10 dan RT.4, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Karena rendahnya badan jalan Gang Sakinah Maka setiap musim hujan selalu tenggal maka di usulkan Peningkatan jalan (Semenisas)jalan Gang Sakinah Jl Hos.Khihajar Dewantara Rt.3/5 Tanah Grogot Panjang 150 M, Lebar 3 Meter	Jl. Gang SAKINAH Jalan Hos. Khihajar Dewantara RT.3/5 Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Saat ini Jalan Gang TIRTA tapis sangat di butuhkan peningkatan jalan karena jalan tersebut sebagian rusak	Jl. Tapis, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan Lingkungan perumahan yang rusak perlu Perbaikan jalan lingkungan (Jalan Durian / Perumahan Jone Indah) RT.4 Tanah Grogot	Jalan Lingkungan perumahan yang rusak perlu Perbaikan jalan lingkungan (Jalan Durian / Perumahan Jone Indah) RT.4 Tanah Grogot, Kab. Paser, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Ada Beberapa bagian jalan gang yang rusak diperlukan Semenisasi Gang SAKA AJI (Jl. Yunion/Jone) RT.7 Panjang 110 M Lebar 4 Meter	Jl. Yunion RT.7 Desa Jone Indah, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Kondisi Gang saat ini masih ada yang rusak sehingga perlu di lakukan Semenisasi Gg. Amas Blok F Desa Jone	Jl. Jone Gg. Amas Blok F, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jlan gang masih rusak perlu di lakukan Semenisasi Gg. Amas Blok G Desa Jone	Jl. Jone Gg. Amas Blok G, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Saat ini ada beberapa sebaghian jalan yang belum di semenisasi sehingga jalan tersebut berlumpur/rusak, di usulkan Lanjutan Semenisasi Blok C Desa Padang Pengarapat	Jl. Padang Pengapat Blok C, Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan Gang masih rusak di usulkan Semenisasi Gang Jemain RT.9 Sungai Tuak Kec. Tanah Grogot	Jl. Sungai Tuak RT.9, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Tuak
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan Gang masih rusak di usulkan Semenisasi Gang Bersama RT.15 Jln Cindrawasih Desa Senaken Panjang 100 M Lebar 4 M	Jl. Cendrawasih Desa Senaken RT.15, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses jalan lingkungan Desa. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di RT 01,03,08,12 dan RT 14 Desa Olung	RT 01,03,08,012 dan RT 14 Desa Olung, Kab. Paser, Long Ikis, Olung
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses jalan lingkungan Desa. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di RT 006 Desa Atang Pait	RT 006 Desa Atang Pait, Kab. Paser, Long Ikis, Atang Pait
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya Akses jalan lingkungan Desa. Sehingga perlu dilakukan Perkerasan Beton Semen (Rigid) di Gunung Tingkeng Desa Sekurou Jaya	RT 005 Desa Sekurou Jaya, Kab. Paser, Long Ikis, Sekurou Jaya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Rusaknya akses jalan lingkungan kepasar kuaro, sehingga perlu dilakukan perbaikan jalan (semenisasi) dijalan menuju pasar baru kuaro	Desa Kuaro RT 04 Kecamatan kuaro kabupaten Paser, Kab. Paser, Kuaro, Kuaro

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	rusaknya akses jalan gang famili RT 17 Batu Kajang sehingga perlu adanya perbaikan jalan (semenisasi)	Desa Batu Kajang RT 17 Kec Batu sopang, Kab Paser, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	rusaknya akses jalan desa padang jaya RT 04 Tembus RT 02 Sehingga perlu perlu dilakukan perbaikan jalan(semenisasi)	Desa Padang Jaya RT 04 Tembur RT 02 Kec Kuaro Kab Paser, Kab. Paser, Kuaro, Padang Jaya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di gg Indra 3 Rt 10 Desa Senaken sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak (Semenisasi) 3 x 250	gg Indra 3 Rt 10 Desa Senaken kec tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di gg SMP 2 Desa Tapis sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak (Semenisasi)	gg SMP 2 Desa Tapis kec tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						2,5 x 130	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di Jalan Ki Hajar Dewantara Gg.Sakinah Desa Tapis sehingga memerlukan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak (Semenisasi) 2,5 x 100	Jalan Ki Hajar Dewantara Gg.Sakinah Desa Tapis kec tanah grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di gg Bersatu Rt 17 Desa Tapis sehingga memerlikan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak(Semenisasi) 2,5 x 130	gg Bersatu Rt 17 Desa Tapis kec tanah grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di Gg Mendetang Desa Janju Rt 05 sehingga memerlikan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak (Semenisasi) 3 x 200	Gg Mendetang Desa Janju Rt 05 kec tanah grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Janju
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	kerusakan yang cukup para di n gg LAMALEGGA Rt 06 Desa Rantau Panjang sehingga	gg LAMALEGGA Rt 06 desa senakaen kec tanah grogot,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						memerlikan perbaikan atau peningkatan jalan yang layak (Semenisasi) 3 x 150	Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya sudah rusak di wilayah RT 2 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120 m x 4 meter)	RT 2 Desa Tajer Mulya Kec. Long Ikis'', Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan RT 3 Desa Putang kondsinya sangat rusak dan memerlukan peningkatan (semenisasi) untuk membuat aktifitas masyarakat berjalan lancar dan menghindari kecelakaan (120x4 m)	RT 03 Desa Putang Kec. Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Putang
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya berupa sirtu di wilayah RT 4 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi	RT 4 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						(120 x 4 meter)	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya berupa sirtu di wilayah RT 6 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120 x 4 meter)	RT 6 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya berupa sirtu di wilayah RT 10 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120 x 4 meter)	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya berupa sirtu di wilayah RT 10 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120 x 4 meter), Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan di wilayah RT 13 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120x4 meter)	RT 13 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan yang kondisi eksistingnya berupa sirtu di wilayah RT 18 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (120x4 meter)	RT 18 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan lingkungan di wilayah RT 15 Desa Tajer Mulya sudah rusak berat memerlukan peningkatan dalam bentuk semensasi (110x4 meter)	RT 15 Desa Tajer Mulya, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Agar jalan yang digunakan saat ini bisa lebih nyaman di pergunakan serta agar tidak cepat rusak maka perlu Semenisasi Jalan NURI RT.07 Desa Kayungo Sari (200 M)	Jl. Nuri RT.7, Kab. Paser, Long Ikis, Kayungo Sari

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Jalan Gang yang dipergunakan saat ini sangat di butuhkan perbaikan karena rusak di usulkan Semenisasi Jalan RT.07 Jalan Durian Desa Olung 200 m	Jl. Olung, Kab. Paser, Long Ikis, Olung
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan TPS Sementara	Bahwa TPS (Tempat Pembuangan sampah) di Desa Jone RT. 02 Kecamatan Tanah Grogot sudah tidak representatif lokasinya sehingga warga berinisiatif untuk membongkarnya dan Pemungutan Sampah melalui rumah ke rumah menggunakan kendaraan VIAR roda 3, dan warga memerlukan tempat sampah / Bak Sampah di tiap rumah agar dapat memudahkan pengambilan sampah (Total rumah 150)	Desa Jone RT. 02, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pengadaan TPS Sementara	Perlu adanya Pengadaan bak sampah Permanen sementara di RT 05,RT 09 dan RT 12 Desa Sempulang di karenakan tidak adanya penampungan sampah mengakibatkan banyak warga yang membuang sampah di sungai yang berimbas kepada penyumbatan kanal yang mengakibatkan banjir	Desa sempulang RT. 05, RT. 09, & RT. 12, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang
					Pengadaan TPS Sementara	Tidak Tersedianya Tempat Penampungan Sampah. Sehingga Perlu Pengadaan TPS Besi, sebanyak 4 Unit di Kelurahan Long Ikis	Kelurahan Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis
					Pengadaan TPS Sementara	Tidak Tersedianya Tempat Penampungan Sampah. Sehingga Perlu Pengadaan Terminal Sampah Sebanyak 2 Unit RT. 05 Desa Lombok	RT.05 Desa Lombok, Kab. Paser, Long Ikis, Lombok
5	**Dinas Perhubungan**	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Pembanguna n, Penerbitan Izin	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Rehabilitasi Jembatan Dermaga	Akses Dermaga yang rusak sehingga perlu di lakukan Rehabilitasi	Desa Senaken RT 5, Kab. Paser, Tanah Grogot,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
			Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			Dermaga RT 5 Desa Senaken	Senaken
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Jalan	Tidak Adanya Penerangan Lampu Jalan Maka perlu Pengadaan Penerangan Lampu Jalan Desa Sempulang	Desa Sempulang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang
					Pengadaan dan Pemasangan Tiang dan Lampu Jalan	Kawasan Jalanan Lingkungan di Desa Padang Pengrapat Kecamatan Tanah Grogot belum mempunyai Lampu Penerangan Jalanan Umum agar Kawasan tidak gelap dan rawan pada malam hari.	Desa Padang Pengrapat, Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat
6	**Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata**	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	belum tersedianya sarana dan prasarana lapangan basket untuk menunjang kegiatan masyarakat terutama anak muda yang ada di	RT 05, Kab. Paser, Long Ikis, Pait

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Desa Pait	
					Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tidak adanya Lapangan Basket Sehingga Perlu adanya Pembangunan Lapangan Basket di Desa Senaken RT 13	Desa Senaken RT 13, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Tidak Adanya Tempat Olah Raga Skateboard Sehingga Perlu adanya Pembangunan Tempat Olah Raga Skateboard (Skatepark) Jl.D.I Panjaitan Desa Tapis	Desa Tapis, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis
					Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Kurang Maksimalnya Lapangan Sepak Bola. Sehingga Perlu Peningkatan dan Perluasan Lapangan Sepak Bola, seluas 7500 m2 di RT.06 Desa Lombok	RT.06 Desa Lombok, Kab. Paser, Long Ikis, Lombok
					Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Rehabilitasi Lapangan Olahraga Perum Tapis RT. 005 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot	Perum Tapis RT. 005 Desa Tapis Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tapis

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
7	**Dinas Perikanan**	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Paket Budidaya Ikan Lele	Turunnya Kemapuan daya beli Masyarakat Desa Suatang Kecamatan Pasir Belengkong di karenakan potensi ekonomi belum terfasilitas maka di usulkan bantuan paket budidaya ikan lele kepada kelompok ngudi mulyo	Desa Suatang, Kab. Paser, Paser Belengkong, Suatang
					Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Kurangnya modal masyarakat untuk melakukan budidaya Perikanan Kelompok Tani Sei Sero Desa Busui	Kelompok Tani Sei Sero Desa Busui, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Sopang, Seluruh Kelurahan/Desa
					Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Dalam kondisi pandemi Covid-19 masyarakat Padangpengrapat khususnya Blok E sangat mengharapkan stimulus pemerintah berupa program yang mampu meningkatkan pendapatan salah satunya paket bantuan	Padangpengrapat Blok E, Kab. Paser, Padang Pengrapat

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						budidaya ikan Nila	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Ketinting	warga nelayan desa tanjung aru rt 5 Kelompok "Cahaya Harapan" tidak bisa lagi mencari ekonomi di akibatkan mesin yang ada sudah tidak bisa di perbaiki maka dari itu kelompok cahaya harapan mengusuulkan mesin ketinting di adakan	Desa Tanjung Aru Rt 5, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Pengadaan Mesin Ketinting	warga nelayan desa tanjung aru rt 4 Kelompok "mcollililoloe" tidak bisa lagi mencari ekonomi di akibatkan mesin yang ada sudah	Desa Tanjung Aru Rt 4 Kampung Hulu, Kab. Paser, Tanjung Harapan,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						tidak bisa di perbaiki maka dari itu kelompok cahaya harapan mengusuulkan mesin ketinting di adakan	Tanjung Aru
					Pengadaan Mesin Ketinting	warga nelayan desa tanjung aru rt 6 Kelompok “muara harapan” tidak bisa lagi mencari ekonomi di akibatkan mesin yang ada sudah tidak bisa di perbaiki maka dari itu kelompok cahaya harapan mengusuulkan mesin ketinting di adakan	Desa Tanjung Aru Rt 6, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Pengadaan Mesin Ketinting	warga nelayan desa tanjung aru rt 3 Kelompok “malogae” tidak bisa lagi mencari ekonomi di akibatkan mesin yang ada sudah tidak bisa di perbaiki maka dari itu kelompok cahaya harapan mengusuulkan mesin ketinting di adakan	desa Tanjung Aru Rt 3, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Trammel Net	warga desa tanjung aru sangat membutuhkan alat tangkap ikan karna sudah tidak bisa lagi di pakai maka dari itu meminta di adakan alat tangkap ikan tersebut	Desa Tanjung Aru Rt 2 (Bading), Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Pengadaan Armada Penangkapan Ikan (Perahu Ketinting) berbahan Fiberglass dengan Alat Penangkap Ikan Jala lempar	Sebagian masyarakat Desa Sungai Tuak yang tergabung dalam Kelompok Nelayan Sijampa 1 kekurangan arnada perahu beserta alat tangkapnya	Kelompok Nelayan Sijampa 1 Desa Sungai Tuak, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Tuak
					Pengadaan Mesin Ketinting	minimnya Penunjang sarana transportasi nelayan sehingga memerlukan pengadaan mesin ketinting di Desa Laburan	Laburan, Kab. Paser, Paser Belengkong, Laburan
					Pengadaan Mesin Ketinting	pengadaan mesin ketinting,alat pancing untuk kelompok nelayan Sejahtera desa riwang kec batu engau	Kelompok Nelayan “Sejahtera” desa Riwang. Kec Batu Engau, Kab. Paser, Batu Engau, Riwang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pengadaan Mesin Ketinting	pengadaan mesin ketinting,alat pancing untuk kelompok nelayan Kakan Maju desa riwang ke batu engau	Kelompok Nelayan “Kakan Maju” desa Riwang. Kec Batu Engau, Kab. Paser, Batu Engau, Riwang
					Pengadaan Mesin Ketinting	engadaan mesin ketinting ,alat pancing untuk kelompok nelayan Harapan Taka, desa riwang kec batu engau	Kelompok Nelayan “Harapan Taka” desa Riwang. Kec Batu Engau, Kab. Paser, Batu Engau, Riwang
					Pengadaan Mesin Ketinting	pengadaan mesin ketinting ,alat pancing untuk kelompok nelayan "Beringin Berjaya" desa riwang kec batu engau	Kelompok Nelayan “Beringin Berjaya” desa Riwang kec batu engau, Kab. Paser, Batu Engau, Riwang
					Pengadaan Mesin Ketinting	Bantuan Pengadaan Mesin Ketinting untuk Kelompok Nelayan “Beringin Bersatu” desa Riwang desa riwang kec batu engau	Kelompok Nelayan “Beringin Bersatu” desa Riwang, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
							Engau, Riwang
					Pengadaan Mesin Ketinting	bantuan pengadaan mesin ketinting untuk klompok nelayan "Semangat Baru" desa Langgai kec batu engau	desa langgai kec batu engau, Kab. Paser, Batu Engau, Langgai
					Pengadaan Mesin Ketinting	Untuk mendukung kinerja para Nelayan setempat dalam mencari ikan, maka di perlukan Bantuan Pengadaan Mesin Ketinting Penangkap Ikan 8 PK Kelompok Nelayan Usaha Taka Desa Rantau Panjang	Kelompok Nelayan Usaha Taka Desa Rantau Panjang Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Rantau Panjang
					Pengadaan Mesin Ketinting	Warga desa rantau panjang hingga saat ini masih ada beberapa orang/kelompok yang bekerja sebagai nelayan (Air Sungai) akan tetapi karena sarana yangdigunakan sudah tidak memadai maka mengusulkan pengadaan	Rantau Panjang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Rantau Panjang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						mesin ktinting 8 PK untuk kelompok SUMBER KANDILO	
					Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP	Tidak Adanya Mesin Kapal Sehingga Membutuhkan Pengadaan Mesin Domping (petani desa lori)	Desa Lori, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori
					Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan > 23 HP	Tidak Adanya Mesin Kapal Sehingga MembutuhkanPengadaan Mesin Domping Tambak Desa Selengot	Desa Selengot, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Selengot
					Pengadaan Badan Perahu / Kapal berukuran <5 GT berbahan Kayu/Fiber	Warga Mengusulkan Pengadaan Kapal Perahu tambak Utuk Desa Lori	Desa Lori, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori
					Trammel Net	warga sangat kesusahan mencari ikan dan udang di laut akibat renge dan jaring udang sudah tidak layak maka dari itu meminta dusulkan renge ikan di desa Lori Rt 1-4	Desa Lori Rt 1,2,3 Dan 4, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Trammel Net	warga sangat kesusahan mencari ikan dan udang di laut akibat renge dan jaring udang sudah tidak layak maka dari itu meminta dusulkan renge ikan di desa Selengot Rt 1-4	Desa Selengot Rt 1-4, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Selengot
8	**Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura**	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Jalan Usaha Tani	untuk peningkatan kebutuhan pembangunan infasatruktur, sehingga perlu Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Sebakung Kec. Long Kali	Desa Sebakung Kec. Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Sebakung
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	untuk peningkatan kebutuhan pembangunan infasatruktur maka perlu bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 01, 02 dan RT 03 Desa Muara Adang II	RT 01, RT 02, RT 03 Desa Muara Adang II Kec. Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Muara Adang II
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tidak Adanya Akses Jalan Usaha Tani Sehingga Perlu Pembangunan / Pembukaan Jalan Usaha Tani Blok A2 Desa Libur Dinding	Desa Libur Dinding, Kab. Paser, Muara Samu, Libur Dinding

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Akses jalan yang rusak sehingga perlu adanya peningkatan jalan dengan Pengerasan jalan kebun/pertanian rakyat RT 05 desa sungai terik dengan (LPB)	Desa Sungai Terik RT 05, Kab. Paser, Batu Sopang, Sungai Terik
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Belum ada akses jalan menuju jalan usaha tani sehingga perlu pembangunan jalan usaha tani Desa Muara Kuaro RT 3	Desa Muara Kuaro RT 3, Kab. Paser, Muara Komam, Muara Kuaro
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Kelancaran Distribusi Pertanian Terhambat Karena Akses Jalan Yang Rusak Sehingga Perlu Peningkatan Jalan Usaha Tani Desa Kerang	Desa Kerang Kec. Batu Engau, Kab. Paser, Batu Engau, Kerang
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Di wilayah RT 2 Desa Suliliran diperlukan pembangunan jalan usaha tani (galian setempat) untuk mendukung aktifitas pertanian masyarakat mengingat saat ini akses petani ke lahan sangat	RT 2 Desa Suliliran, Kab. Paser, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						sulit	
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rusaknya akses jalan petani, sehingga dianggap perlu dilakukan peningkatan jalan kebun Tani Ngoi RT. 02 Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kab. Paser (LPB)	Desa Jemparing RT. 02 Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Jemparing
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Beceknya jalan menuju kelahan pertanian yang ada di RT 5 Desa Tanah Priuk Mengakibatkan petani sangat kesusahan untuk melakukan aktifitas disawah. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan jalan usaha tani tersebut	RT 5, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Periuk
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	sering nya terjadi banjir atau genangan yang membuat akses jalan yang menjadi jalan sangat rusak danbutuh perbaikan aga bisa digunakan dengan aman(Rigit),untuk Kelompok Sinar Baru,Rt	Kelompok Sinar Baru,Rt 003 Desa Suatang Keteban, Kec Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						003 Desa Suatang Keteban, Kec Pasir Belengkong (250 x 3)	Suatang Keteban
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	pengerasan dan perbaikan jalan udaha tani un6tuk mempermudah masyarakat atau kelompok tani dalam melakukan kegiatan pertanian (LPB)/Telford	desa lomu rt 04 kec batu engau, Kab. Paser, Batu Engau, Lomu
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Akses Jalan Kebun Masyarakat masih berupa tanah, jika hujan akan menyebabkan bajir, jalan licin, berlumpur dan badan jalan tergenang air, diharapkan dengan adanya peningkatan jalan usaha tani yaitu Jalan Lumut, di RT 08, Desa Jone, berupa peningkatan jalan batu agar mempermudah akses masyarakat menuju kebun, mengangkut hasil	Jalan Lumut, RT 08 Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						panen dan memaksimalkan potensi pertanian masyarakat.	
					Peningkatan Jalan Lingkungan/Gang	Tidak adanya akses jalan warga sehingga perlu bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani RT04 Situs Puteri Petong100 M(Semenisasi) LPB	RT04 Situs Puteri Petong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Meningkatkan Infrastruktur Jalan yang berkondisi baik Untuk pengembangan infrastuktur sosial dan ekonomi masyarakat dari dan menuju pusat - pusat produksi di Desa Atang pait	RT 006 Desa Atang Pait, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis, Seluruh Kelurahan/Desa
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	belum adanya akses jalan usaha tani kandilo dayo bersama desa Sekuan Makmur Kecamatan Muara Komam,masyarakat meminta pembangunan	Desa Sekuan Makmur RT Kec Muara Komam kab Paser, Kab. Paser, Muara Komam, Sekuan Makmur

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						jalan usaha tani supaya masyarakat bisa untuk berkitifitas kebun dan lahannya.	
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	Rusaknya akses jalan usaha tani sama taka Desa beras Jiring RT 14 Kec Muara Komam, masyarakat kesulitan untuk melewati jalan usaha tani tersebut maka perlu pembangunan jalan yang layak. (semenisasi)	Desa Beras Jiring RT 14 Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Belum adanya akses jalan usaha tani RT 021 Pinggir sungai kandilo Desa Batu kajang Kec Batu Spang maka perlu pembangunan jalan usaha tani	Desa Batu kajang RT 012, Kec Batu Sopang, Kab Paser, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Belum adanya akses jalan usaha tani menuju embung desa rantau bintungan sebrang RT 01 Kec Muara samu maka	Desa Rantau Bintungan RT 01, Kec Muara Samu, Kab. Paser, Muara

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						perlu pembangunan jalan usaha tani (Pengerasan)	Samu, Rantau Bintungan
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	rusaknya akses jalan usaha tani Desa mampo Kec Muara komam sehingga sulit untuk akses jalan maka masyarakat meminta untuk peningkatan jalan usaha tani (Semenisasi)	Desa Mampo muara komam RT 08 Kec Muara Komam Kab Paser, Kab. Paser, Muara Komam, Muarakomam
					Peningkatan Jalan Usaha Tani	peningkatan jalan usaha tani desa rantau panjang rt 03 (rigid), karna sudah banyak nya kerusakan dijalan tersebut sehingga harus di adakan peningkatan jalan 3x 130	Desa Rantau Panjang,kec Tanah Grogot RT 03, Kab. Paser, Tanah Grogot, Rantau Panjang
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tidak Tersedianya Akses jalan Usaha Tani. Sehingga Perlu Pembangunan Jalan Baru Usaha tani (Pembukaan Jalan Baru), sepanjang 10000 m, di RT.04 Desa Sungai Terik	RT.04 Desa Sungai Terik, Kab. Paser, Batu Sopang, Sungai Terik

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Tidak Tersedianya Akses jalan Usaha Tani. Sehingga Perlu Pembangunan Jalan Usaha tani (Pembukaan Jalan Baru), Panjang 10000 m, Lebar 6 m, di RT.01 Desa Sungai Terik	RT.01 Desa Sungai Terik, Kab. Paser, Batu Sopang, Sungai Terik
					Pembangunan Jalan Usaha Tani	Belum Ada akses Jalan. Sehingga Perlu Pembangunan/Pembukaan Jalan Baru Usaha Tani, Sepanjang 2000 m di RT.031 Desa Batu Kajang	RT.031 Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Power Threaser	Minimnya alat perontok padi yg dimiliki para petani did l esa sungai tuak Yang tergabung dalam Kelompok Tani PADA IDI sehingga mengakibatkan padi terlalu lama didiamkan krn menunggu antrian para petani dalam menggunakan mesin perontok tersebut, hal ini sangat merugikan petani karena mengakibatkan	RT 12 Desa Sungai Tuak, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sungai Tuak

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						padi membusuk	
					Pengadaan Power Threaser	Minimnya alat perontok padi yg dimiliki petani yg tergabung dalam Kelompok Tani TANJUNG BARU Desa Pulau Rantau sehingga utk mendapatkan hasil panen yg maksimal sangat jauh dari yang diharapkan. Untuk itu pengadaan mesin perontok padi ini sangat diharapkan petani	RT 4 Desa Pulau Rantau, Kab. Paser, Tanah Grogot, Pulau Rantau
					Pengadaan Power Threaser	Sangat terbatasnya mesin perontok padi kelompok tani BERSATU TANGAN sehingga apabila musim panen harus bergantian menggunakan mesin perontok tersebut akibatnya para petani harus mengalami kerugian krn padi membusuk	Kelompok Tani BERSATU TANGAN Desa Pepara, Kab. Paser, Pepara

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Bantuan Hand Traktor untuk kelompok tani agar mempermudah saat penenman atau pun saat panen tiba,untuk Kelompok Tani Beringin Jaya Desa Suatang. Kec. Pasir Belengkong	Kelompok Tani Beringin Jaya Desa Suatang. Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Suatang
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	pengadaan Hand traktor untuk kelompok tani Pada Idi.karna kurang nya alat atau peralatan pertanian ,untuk kelompok tani “Pada idi” Desa Pasir Belengkong, kec Pasir Belengkong	untuk kelompok tani “Pada idi” Desa Pasir Belengkong, kec Pasir Belengkong, Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	pengadaan Hand traktor untuk kelompok tani Tumbuh Subur.karna kurang nya alat atau peralatan pertanian ,desa paser belengkong kec paser belengkong	kelompok tani “Tumbuh Subur” Desa pasir Belengkong . Kec Pasir belengkong, Kab. Paser,

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
							Paser Belengkong, Pasir Belengkong
					Pengadaan Power Threaser	Kurangnya peralatan mekanisasi pertanian di wilayah Desa Tajer Mulya sehingga diperlukan bantuan Power treasher bagi GAPOKTAN Desa Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis	GAPOKTAN Desa Tajer Mulya Kecamatan Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Tajer Mulya
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Diperlukan untuk penambahan hasil panen yang berkualitas di butuhkan Pengadaan Hand Tractor merk Guec G300 untuk kelompok Margo Mulyo	Jl. Lung Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Diperlukan untuk penambahan hasil panen yang berkualitas di butuhkan Pengadaan Hand Tractor merk Guec G300 untuk kelompok Sari Wangi Desa Muara Pias Kec. Long Kali	Jl. Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pengadaan Hand Traktor Roda 2	Petani saat ini sangat membutuhkan bantuan Hand Tractor karena selama ini para petani sebagian besar masih menggunakan alat manual, maka agar pendapatan petani meningkat, di usulkan pengadaan Hand Tractor Roda 2 Untuk Kelompok tani BERINGIN URIP Kelurahan Long Kali RT.03 Kecamatan Long Kali.	Jl. Kelurahan Long Kali, Kab. Paser, Long Kali, Long Kali
9	**Dinas Perkebunan dan Peternakan**	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Pengadaan Kandang Ayam	Kandang yang ada tidak memadai, sehingga Perlu Pengadaan Kandang Ayam bagi, panjang 100 m, Lebar 100 m untuk kelompok tani Rakat Bersama Desa Batu Kajang	kelompok tani Rakat Bersama Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pengadaan Kandang Ayam	Kandang yang ada tidak memadai, sehingga Perlu Pengadaan Kandang Ayam bagi, panjang 100 m, Lebar 100 m untuk	kelompok tani Mangku Awat Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						kelompok tani Mangku Awat Desa Batu Kajang	Sopang, Batu Kajang
					Pengadaan Kandang Ayam	Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat ternak ayam	Desa Lori, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Lori
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan lainnya (Lada, Kelapa Dalam, Aren, dll)	Demi meningkatkan kualitas buah pada Kelompok Tani TRUBUS KENCANA Desa Padang Pengrapat maka perlu diadakan Bibit Salak Pondoh berkualitas yang akan meningkatkan kualitas buah pada petani serta meningkatkan pendapatan perekonomian mereka.	Desa Padang Pengrapat, Kab. Paser, Tanah Grogot, Padang Pengrapat
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pelatihan Kewirausahaan	Agar Peternak dapat memahami tentang tata cara pemeliharaan ternak sapi yang baik agar ternak bisa sehat, gemuk dan cepat menhasilkan keturunan maka diharapkan adanya pendampingan/pelatihan	Jl. Kelurahan Kuaro, Kab. Paser, Kuaro, Kuaro

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
			Daerah Kabupaten/ Kota			peningkatan SDM khususnya bagi peternak sekecamatan Kuaro	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Bibit Ternak Sapi	warga masyarakat rt 19 desa sulilran baru mengininkan usaha ternak sapi maka dari itu meminta Pengadaan Bibit Ternak Sapi Untuk Kelompok Ternak Karya Muda Desa Suliliran Baru	Desa Suliliran Baru Rt 19 Kelompok Ternak Karya Muda, Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru
					Pengadaan Bibit Ternak Kambing	warga masyarakat desa Rantau Bintunga mengininkan usaha ternak sapi maka dari itu meminta Pengadaan Bibit Ternak Kambing Untuk Kelompok Kemonsi Raya Desa Rantau Bintungan	Desa Rantau Bintungan, Kab. Paser, Muara Samu, Rantau Bintungan
					Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Belum adanya bibit ternak sapi Setia Jaya Desa Sungai Terik	Setia Jaya Desa Sungai Terik, Kab. Paser, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
							Sopang, Sungai Terik
					Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Upaya peningkatan usaha petani maka di usulkan pengadaan ternak sapi KELOMPOK LEMBU IRENG JAYA RT.Desa Keluang Paser Jaya Kecamatan Kuaro	Jl. Keluang Paser, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya
					Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Upaya peningkatan usaha petani maka di usulkan pengadaan ternak sapi KELOMPOK LEMBU MAKMUR RT.10 desa Keluang Paser Kecamatan Kuaro	Jl. Keluang Paser, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya
					Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Upaya peningkatan usaha petani maka di usulkan pengadaan ternak sapi KELOMPOK BANTENG MAKMUR Desa Keluang Paser Jaya RT.7 Kecamatan Kuaro	Jl. Keluang Paser, Kab. Paser, Kuaro, Keluang Paser Jaya

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Kelompok Tani Hidup Baru Kekurangan Bibit Kambing yang baik untuk mendapatkan kambing anakan yang tidak berpenyakit dan sehat. Diharapkan dengan adanya Pengadaaan Bibit Kambing Ternak tersebut kelompok Tani Hidup Baru Desa Jone bisa mendapatan bibit kambing anakan yang sehat dan tidak berpenyakit.	Kelompok Tani Hidup Baru, Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Pengadaan Bibit Ternak Unggas	Kurangnya bibit ayam petekor, sehingga perlu pengadaan bibit ternak unggas (Ayam Petelor) untuk kelompok tani Rakat Bersama di Desa Batu Kajang	Kelompok Tani Rakat Bersama di Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu Kajang
					Pengadaan Bibit Ternak Unggas	Kurangnya bibit ayam petekor, sehingga perlu pengadaan bibit ternak unggas (Ayam Petelor) untuk kelompok tani Mangku Awat di Desa	kelompok tani Mangku Awat di Desa Batu Kajang, Kab. Paser, Batu Sopang, Batu

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						Batu Kajang	Kajang
					Pengadaan Bibit Ternak Sapi	Sebagai upaya peningkatan pendapatan petani perlu Pengadaan Ternak Sapi untuk kelompok tani PLOSENDA RT.10 Jalan Wili Kerta Bakti	Jl. Kerta Bhakti, Kab. Paser, Long Ikis, Kerta Bhakti
10	**Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			
					Rehabilitasi Pasar Rakyat	Akses Jalan yang rusak pada halaman parkir pasar sehingga perlu di lakukan Peningkatan halaman parkir pasar penyembolum(SEMENISASI) di Desa Senaken	Desa Senaken Pasar Penyembolum, Kab. Paser, Tanah Grogot, Senaken
					Rehabilitasi Pasar Rakyat	Halaman Pasar masih batu lepas dan sudah di tumbuhi rumput diharapkan dengan Rehabilitasi Pasar Rakyat Lati Olai dapat	Jalan Untung Suropati, RT 8 Desa Jone, Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Seluruh

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						meningkatkan halaman pasar menjadi semenisasi harapannya setelah Rehabilitasi Pasar Rakyat tersebut warga desa jone dan pembeli bisa nyaman beraktivitas di pasar lebih nyaman dan lebih rapi.	Kelurahan/Desa
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok anggrek putih rt 5 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 5, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok as-syifa rt 1 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 1, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok familiy rt 3 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 3, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok putri tanjung rt 2 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 2, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok merpati putih rt 2 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 2 Kampung Tengah, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok panda rt 2 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 2 Kelompok Panda, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok bunga rt 1 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 1 Kelompok Bunga, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok melati rt 1 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Kelompok Melati, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok muara harapan rt 5 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 5 kelompok muara harapan, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok putri nelayan rt 5 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 5 kelompok putri nelayan, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok sejahtra rt 5 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 5 Kelompok sejahtra, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok setia mulia rt 1 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 1 kelompok setia mulia, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru
					Bantuan Peralatan UKM	warga desa tanjung aru kelompok mawar rt 1 sangat keterbatasan dalam usaha kecil menengah sehingga meminta 1 paket mengelolah kerupuk ikan dan udang untuk Desa Tanjung Aru	Desa Tanjung Aru Rt 1 kelompok mawar, Kab. Paser, Tanjung Harapan, Tanjung Aru

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
11	**Dinas Lingkungan Hidup**	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengadaan TPS Sementara	Bahwa TPS (Tempat Pembuangan sampah) di Desa Jone RT. 02 Kecamatan Tanah Grogot sudah tidak representatif lokasinya sehingga warga berinisiatif untuk membongkarnya dan Pemungutan Sampah melalui rumah ke rumah menggunakan kendaraan VIAR roda 3, dan warga memerlukan tempat sampah / Bak Sampah di tiap rumah agar dapat memudahkan pengambilan sampah (Total rumah 150)	Desa Jone RT. 02, Kab. Paser, Tanah Grogot, Jone
					Pengadaan TPS Sementara	Perlu adanya Pengadaan bak sampah Permanen sementara di RT 05,RT 09 dan RT 12 Desa Sempulang di karenakan tidak adanya penampungan sampah mengakibatkan banyak warga yang membuang sampah di sungai yang	Desa sempulang RT. 05, RT. 09, & RT. 12, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang

No.	Perangkat Daerah	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Rincian	Permasalahan	Alamat
						berimbas kepada penyumbatan kanal yang mengakibatkan banjir	
					Pengadaan TPS Sementara	Tidak Tersedianya Tempat Penampungan Sampah. Sehingga Perlu Pengadaan TPS Besi, sebanyak 4 Unit di Kelurahan Long Ikis	Kelurahan Long Ikis, Kab. Paser, Long Ikis, Long Ikis
					Pengadaan TPS Sementara	Tidak Tersedianya Tempat Penampungan Sampah. Sehingga Perlu Pengadaan Terminal Sampah Sebanyak 2 Unit RT. 05 Desa Lombok	RT.05 Desa Lombok, Kab. Paser, Long Ikis, Lombok

Lampiran 2

Tabel

Rekapitulasi Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**Rp 7.039.800.000,00**
1.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**					**Rp 7.039.800.000,00**
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Paving Block SD	SDN 010 Janju Tanah Grogot	Rp 150.000.000,00
				Pembangunan Paving Block SD	SDN 013, Sungai Langir	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Paving Block SD	SDN 012, Keluang Paser Jaya	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Paving Block SD	SDN 009, RT 003, Damit, TANAH GROGOT	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Paving Block SD	SDN 004, Samu Rangau, BATU SOPANG	Rp 137.000.000,00
				Pembangunan Siring SD	SDN 008, Rangan	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan (Toilet) Jamban SD	SDN 014, MUARA PIAS, LONGKALI	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan (Toilet) Jamban SD	SDN 017, UKO, MUARA KOMAM	Rp 103.000.000,00
				Pembangunan Mushola SD	SDN 032, Rantau Panjang	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Mushola SD	SDN 013, KUARO	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Mushola SD	SDN KERTA BAKTI, LONGIKIS	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Mushola SD	SDN 023, Makmur Jaya,	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
					LONGKALI	
				Pembangunan Mushola SD (lanjutan)	SDN 016, Putang, LONGKALI	Rp 84.800.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD	SDN 013, Langgai	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SD	SDN 013, Pinang Jatus, LONGKALI	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 005, Lusan, MUARA KOMAM	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 007 , Swan Selutung, MUARA KOMAM	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 003, Libur Dinding, MUARA SAMU	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 005, Luan, MUARA SAMU	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 004, Suweto, MUARA SAMU	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 014, LONG SAYO, MUARA KOMAM	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SD	SDN 007, Random, TANJUNG HARAPAN	Rp 125.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Guru SD	SDN 008, Kerang Dayo	Rp 100.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Guru SD	SDN 026, Mendik Bhakti, LONGKALI	Rp 100.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 017, Suliliran Baru, PasIr Belengkong	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN Kunjung 009, Prayon	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 007, Rantau Layung, BATU SOPANG	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 037, ADANG JAYA, LONGIKIS	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 040, TAJER MULYA, LONGIKIS	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD	SDN 025, Mendik Karya, LONGKALI	Rp 200.000.000,00
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SD	SDN 007, Random, TANJUNG HARAPAN	Rp 75.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru SD	SDN 021, KRAYAN BAHAGIA, LONGIKIS	Rp 100.000.000,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP	SMPN 4, Tanah Periuk	Rp 165.000.000,00
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pembangunan Mushola SMP	SMPN 003, Pengguren Jaya	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan (Toilet) Jamban	SMPN 06, JEMPARING,	Rp 100.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				SMP	LONGIKIS	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	SMPN 2, Muara Payang, MUARA KOMAM	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	SMPN 4, Muara Lambakan, LONGKALI	Rp 200.000.000,00
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP	SMPN 4, Songka, BATU SOPANG	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SMP	SMPN 07 , Munggu, LONGKALI	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP	SMPN 6 , RT 002, Kladen, TANJUNG HARAPAN	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP	SMPN 3 , Sekuan Makmur, MUARA KOMAM	Rp 200.000.000,00
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SMP	SMPN 2, Rantau Atas, MUARA SAMU	Rp 200.000.000,00
DINAS KESEHATAN						**Rp 2.536.000.000,00**
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN**					**Rp 2.536.000.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
	MASYARAKAT					
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Long Sayo, Kec. Muara Komam	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Muara Kuaro, Kec. Muara komam	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Selengot, Kec. Tanjung Harapan	Rp 100.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Pondong, Kec. Kuaro	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Riwang, Kec. Batu Engau	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Tempakan, Kec. Batu Engau	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Bekoso, Kec. Paser Belengkong	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Perkuwen, Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Petiku, Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Labuang Kallo, Kec. Tanjung Harapan	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Krayan Bahagia, Kec. Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Krayan Jaya, Kec. Long Ikis	Rp 66.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Rp 90.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Teluk Waru, Kec. Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Puskesmas Pembantu	Samuntai, Kec. Long Ikis	Rp 110.000.000,00
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Kerang Dayo, Kec. Batu Engau	Rp 100.000.000,00
				Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Lomu, Kec. Batu Engau	Rp 50.000.000,00
				Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sebakung, Kec. Long Kali	Rp 110.000.000,00
				Rehab Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Olung, Kec. Long Ikis	Rp 110.000.000,00
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**Rp 200.000.000,00**
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**					Rp 200.000.000,00
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek Wisata Air Terjun Gunung Rambutan	RT 007 Desa Sungai Terik, Kec. Batu Sopang	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**Rp 4.387.500.000,00**
1	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**					**Rp 1.350.000.000,00**
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah tidak Layak Huni (8 unit)	RT 001 dan 002 Desa Perepat, Kec. Tanah Grogot	Rp 200.000.000,00
				Perbaikan rumah tidak layak huni	RT. 02 Desa Tebru Paser Damai, Kec. Batu Engau	Rp 100.000.000,00
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (4 Unit)	RT 01 s/d RT 13 Desa Muara Langon, Kec. Muara Komam	Rp 100.000.000,00
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (2 Unit)	RT.01,02,03 Desa Muara Payang, Kec. Muara Komam	Rp 50.000.000,00
				Perbaikan RTLH (8 Unit)	Desa Rantau Atas, Muara Samu	Rp 200.000.000,00
				Perbaikan RTLH (4 Unit)	Desa Lori, Kec. Tanjung Harapan	Rp 100.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Perbaikan RTLH	Rantau Layung	Rp 100.000.000,00
				Perbaikan RTLH 4 UNIT	Desa Jemparing, Kec. Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Perbaikan RTLH 8 Unit	Desa Muara Adang, Kec. Long Ikis	Rp 200.000.000,00
				Perbaikan RTLH (RT 01- 05)	Desa Tiwei RT 01- RT 05, Kab. Paser, Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Perbaikan rumah tidak layak huni (4 unit)	Sempulang, Kab. Paser, Tanah Grogot, Sempulang	Rp 100.000.000,00
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**					**Rp 440.000.000,00**
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Perbaikan RTLH (4 Unit)	Kelurahan Long Kali	Rp 100.000.000,00
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Drainase	RT. 11 Desa Senaken, Kec. Tanah Grogot	Rp 140.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan	Desa Muser, Kec. Muara Samu	Rp 200.000.000,00
3	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN**					**Rp 2.597.500.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
	UTILITAS UMUM (PSU)					
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jalan Lingkungan (Jln padat karya)	RT. 09, Gg. Setia Warga 1, Desa Sungai Tuak, Kec. Tanah Grogot	Rp 200.000.000,00
				Jalan Lingkungan desa lolo RT 05	RT.005 Desa Lolo, Kec. Kuaro	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan RT 01	RT 01 Desa Bai Jaya, Kec.Batu Engau	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan	Desa mengkudu, Desa Batu Engau	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkugan (RT 01s/d11)	Rt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, &11 Desa Suatang Kec. Paser Belengkong	Rp 182.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan (RT 03,04, dan 06)	RT. 003, RT. 004 dan RT. 006 Desa Batu Butok,Kec. Muara Komam	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan (RT 01,02,03 Dan 05)	RT 01,02,03 dan 05 Desa Selerong, Kec. Muara Komam	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan	RT 001- 004 (ulu) dan RT 004 - 007 (ilir), Desa Muara Telake Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Drainase Lingkungan RT 005	RT. 05 Desa Sebakung Makmur, Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan	Desa Sebakung Taka, kec. Long Ikis	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan (RT, 01,02 dan 03)	RT 1, 2 dan 3 Desa Muara Adang II, Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan jalan lingkungan (RT 01,02,03, dan 04)	RT. 01, 02, 03, dan 04 Desa Belimbing Kec. Long Ikis	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Krayan Makmur, Kec. Long Ikis	Rp 110.000.000,00
				Pembangunan Drainase Lingkungan	Desa Sawit Jaya, Kab. Paser, Long Ikis	Rp 105.500.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						**Rp 4.280.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**					**Rp 1.880.000.000,00**
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Pembangunan Jembatan**	Pembangunan Box Culvert	RT. 01 Desa Tapis	Rp 155.000.000,00
				Pembangunan Jembatan Titian	Desa Harapan Baru, Kec. Kuaro, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan jembatan gantung objek wisata Doyam Turu	Desa Lempesu, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Box Culvert	RT. 02 Desa Sangkiriman, Kec. Paser Belengkong	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Pembangunan Box Culvert	Desa Seniung Jaya, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Box Culvert	Desa Rantau Buta, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Box Culvert	RT. 019 Desa Mendik, Kec. Long Kali	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Box Culvert	Desa Tajur, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
			Rehabilitasi Jembatan	Rehab Jembatan Titian	Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser	Rp 125.000.000,00
				Rehabilitasi Jembatan	Desa Kerta Bumi, Kec. Kuaro, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**					**Rp 2.300.000.000,00**
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) didaerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sarana Air Bersih Perdesaan	Desa Padang Jaya, Kec. Kuaro, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan Jaringan Perpipaan (Kawasan Perdesaan)	Desa Segendang, Kec. Batu Engau, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Pembangunan Sarana Air bersih Perdesaan	RT. 003 Desa Senipah, Kec. Tanjung Harapan	Rp 200.000.000,00
				Peningkatan Jaringan Perpipaan	Desa Brewe, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pipanisasi Air Bersih	Desa Krayan Sentosa, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Perdesaan	Desa Long Gelang, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 150.000.000,00
				Pipanisasi Air Bersih (Kawasan Pedesaan)	Desa Sekurou Jaya, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 200.000.000,00
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	RT 23 Desa Padang Pangrapat, Kec. Tanah Grogot	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor	Desa Kersik Bura, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	RT. 002 Desa Muara Andeh, Kec. Muara Samu	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	Desa Muara Andeh, Kec. Muara Samu, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	Desa Rantau Bintungan, Kec. Muara Samu, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor	Desa Kayungo, Kec. Long	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
					Ikis, Kab. Paser	
				Pembangunan Sumur Bor	Desa Long Gelang, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 50.000.000,00
				Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)	Desa Teluk Waru, Kec. Long Ikis, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
3	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**					**Rp 100.000.000,00**
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Rehab Embung Desa	Desa Tampakan, Kec. Batu Engau, Kab. Paser	Rp 100.000.000,00
DINAS PERHUBUNGAN						**Rp 2.209.000.000,00**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**					**Rp 1.859.000.000,00**
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Pait, kec. Long Ikis	Rp 200.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Tajer Mulya, Kec. Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.01 s/d RT.08 Desa Lombok, Kec. Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Atang Pait	Rp 110.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Kayungo Sari	Rp 200.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Maruat	Rp 200.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Mendik Makmur	Rp 100.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.01 s/d RT.5 Desa Gunung Putar, Kec. Long Kali	Rp 137.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.01 s/d RT. 03 Desa Kasungai, Kec. Batu Sopang	Rp 200.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	Desa Legai, Kec. Batu Sopang	Rp 137.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.01 s/d RT.09 Desa Laburan Baru, Kec. Paser Belengkong	Rp 200.000.000,00
				Pengadaan dan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum	RT.01 s/d RT.07 Desa Pulau Rantau, Kec. Tanah Grogot	Rp 175.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN**					**Rp 350.000.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
	PELAYARAN					
		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Pembangunan Dermaga sungai	RT.002 Desa Lomu, Kec. Batu Engau	Rp 150.000.000,00
				Pembangunan Jembatan Dermaga Tambatan Perahu	RT.001 Desa Pepara, Kec. Tanah Grogot	Rp 200.000.000,00
DiNAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**Rp 200.000.000,00**
1	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**					**Rp 200.000.000,00**
		Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Pembangunan Menara Reapeater 50 M	Desa Binangon, Kec. Muara Komam	Rp 200.000.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**Rp 1.070.000.000,00**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**					**Rp 1.070.000.000,00**
		Pengelolaan Sampah	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA	Pengadaan TPS Sementara (1 unit)	Desa Jone, RT 6 Kec. Tanah Grogot	Rp 15.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
			Kabupaten/Kota			
1				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (1 unit)	Desa Senaken, RT 13 Kec. Tanah Grogot	Rp 45.000.000,00
2				Pengadaan TPS Sementara (1 unit)	Desa Senaken, RT 5 Kec. Tanah Grogot	Rp 15.000.000,00
3				Pengadaan TPS Sementara (3 unit)	Desa Tapis, RT 1 RT 02 dan RT 09 Kec. Tanah Grogot	Rp 45.000.000,00
5				Pengadaan TPS Sementara (1 unit)	Desa Pasir Belengkong, RT 09 Kec. Pasir Belengkong	Rp 15.000.000,00
6				Pengadaan TPS Sementara (3 unit)	Desa Modang Kec. Kuaro	Rp 45.000.000,00
7				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (1 unit)	Desa Modang Kec. Kuaro	Rp 45.000.000,00
8				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (2 unit)	Desa Sebakung Kec. Long Kali	Rp 90.000.000,00
9				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (2 unit)	Desa Bente Tualan Kec. Long Kali	Rp 90.000.000,00
10				Pengadaan TPS Sementara (7 unit)	Desa Muara Langon, RT 01- RT 13 Kec. Muara Komam	Rp 105.000.000,00
11				Arm roll (1 unit)	Desa Muara Payang Kec. Muara Komam	Rp 50.000.000,00
12				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (1 unit)	Desa Muara Payang Kec. Muara Komam	Rp 45.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
13				Pengadaan TPS Sementara (8 unit)	Desa Kerang, RT 01 - RT 09 Kec. Batu Engau	Rp 120.000.000,00
14				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (1 unit)	Desa Riwang, RT 01 Kec. Batu Engau	Rp 45.000.000,00
15				Pengadaan TPS Sementara (2 unit)	Desa Riwang, RT 01 Kec. Batu Engau	Rp 30.000.000,00
16				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (2 unit)	Desa Atang Pait, RT 07 Kec. Long Ikis	Rp 90.000.000,00
17				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (2 unit)	Desa Samuntai Kec. Long Ikis	Rp 90.000.000,00
18				Pengadaan Sarana Angkut Persampahan Roda 3 (2 unit)	Desa Olung Kec. Long Ikis	Rp 90.000.000,00
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA						**Rp 670.200.000,00**
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**Rp 205.000.000,00**
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Power Thresher 1 Unit	Desa Pulau Rantau	Rp 25.000.000,00
				Pengadaan Power Thresher 1 Unit	Desa Pasir Belengkong	Rp 25.000.000,00
				Pengadaan Power Thresher 1 Unit	Desa Mendik Bhakti	Rp 25.000.000,00
				Pengadaan Hand Traktor Roda	Desa Tanah Periuk	Rp 35.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				2 (1 Unit)		
				Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (1 Unit)	Desa Tepian Batang	Rp 35.000.000,00
				Pengadaan Hand Traktor Roda 2 (1 Unit)	Desa Suliliran	Rp 35.000.000,00
				Pengadaan Cultivator 1 Unit	Desa Kerta Bumi	Rp 25.000.000,00
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**					**Rp 465.200.000,00**
		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Pengembangan Jeruk 2 Ha	Desa Kepala Telake	Rp 170.000.000,00
				Pengembangan Durian 1 Paket	Desa Putang	Rp 115.200.000,00
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan DAM Parit 1 Paket	Desa Sempulang	Rp 100.000.000,00
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan Pintu Air 2 Unit	Desa Suatang Keteban	Rp 80.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN						**Rp 1.472.045.200,00**
1	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**					**Rp 1.472.045.200,00**
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Bibit Ternak sapi	Desa Laburan Kec. Pasir Belengkong	Rp 230.000.000,00
				Pengadaan Bibit Ternak sapi	Desa Sandeley Kec. Kuaro	Rp 226.531.400,00
				Pengadaan Bibit Ternak sapi	Desa Kendarom Kec. Kuaro	Rp 226.531.400,00
				Pengadaan Bibit Ternak sapi	Desa Muara Toyu Kec. Long Kali	Rp 230.000.000,00
				Pengadaan Bibit Ternak sapi	Desa Tanjung Pinang Kec. Muara Samu	Rp 230.000.000,00
				Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Jone Tanah Grogot	Rp 135.000.000,00
				Pengadaan Bibit Ternak Kambing	Desa Krayan Jaya Kec. Long Ikis	Rp 133.982.400,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak	Desa Jone Kec. Tanah Grogot	Rp 30.000.000,00
					Desa Suatang Kec. Pasir Belengkong	Rp 30.000.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN						**Rp 220.000.000,00**
1	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**					**Rp 120.000.000,00**
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Desa Modang Kec.Kuaro	Rp 60.000.000,00
				Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	Jl.Sejahtera RT.04, Desa Damit Kec. Pasir Belengkong	Rp 60.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**					**Rp 100.000.000,00**
		Penyediaan Insfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai dengan Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Penyediaan Insfrastruktur Lantai Jemur	Pembangunan Lantai Jemur	Desa Lombok Kec.Long Ikis	Rp 100.000.000,00
DINAS PERIKANAN						**Rp 1.480.000.000,00**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**					**Rp 847.000.000,00**
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Pengadaan Badan Perahu	Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot	Rp 75.000.000,00
				Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Pasir Belengkong, Kec. Pasir Belengkong	Rp 63.000.000,00
				Paket Budidaya Nila Kolam Tanah	Desa Sunge Batu, Kec. Pasir Belengkong	Rp 63.000.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Sunge Batu, Kec. Pasir Belengkong	Rp 97.000.000,00
				Pengadaaan Armada Penangkapan Ikan	Desa Sunge Batu, Kec. Pasir Belengkong	Rp 40.000.000,00
				Paket Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Suatang Keteban, Kec. Pasir Belengkong	Rp 63.000.000,00
				Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Modang, Kec. Kuaro	Rp 65.000.000,00
				Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Bukit Saloka, Kec. Long Ikis	Rp 64.500.000,00
				Paket Budidaya Ikan Lele	Desa Sawit Jaya, Kec. Long Ikis	Rp 64.500.000,00
				Budidaya Ikan Nila Jaring Apung	Desa Gunung Putar, Kec. Long Kali	Rp 63.000.000,00
				Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Uko, Kec. Muara Komam	Rp 63.000.000,00
				Paket Budidaya Ikan Nila Keramba Jaring Apung	Desa Samurangau, Kec. Batu Sopang	Rp 63.000.000,00
				Budidaya Ikan Nila Kolam Tanah	Desa Legai, Kec. Batu Sopang	Rp 63.000.000,00
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**					**Rp 633.000.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Pengadaan Mesin Penggerak Kapal 723 HP	Desa Tanjung Aru, Kec. Tanjung Harapan	Rp 130.000.000,00
				Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Tanjung Aru, Kec. Tanjung Harapan	Rp 120.000.000,00
				Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Pasir Mayang, Kec. Kuaro	Rp 84.000.000,00
				Pengadaan Mesin Penggerak Kapal Penangkap Ikan 23 HP	Desa Pasir Mayang, Kec. Kuaro	Rp 91.000.000,00
				Pengadaan Mesin Ketinting	Desa Petangis, Kec. Batu Engau	Rp 108.000.000,00
				Pengadaan armada penangkap ikan berbahan fiberglas dengan alat perangkapnya	Desa Tebru Paser Damai, Kec. Batu Engau	Rp 100.000.000,00
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM						**Rp 1.855.500.000,00**
1	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**					**Rp 1.705.500.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rehabilitasi Pasar	RT.008 Desa Janju, Kab. Paser, Tanah Grogot	Rp 50.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Rt 02 Blok A Desa Padang Pengrapat, Kab. Paser, Tanah Grogot	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Pasar Kapiten Wasel Desa Tepian Batang RT 006, Kab. Paser, Tanah Grogot	Rp 165.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	pasar Benuo, Kab. Paser, Paser Belengkong, Pasir Belengkong	Rp 97.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	RT 22 Desa Suliliran Baru, Kab. Paser, Paser Belengkong	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Keresik bura, Kab. Paser, Paser Belengkong	Rp 75.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	RT 004 Olong Pinang, Kab. Paser, Paser Belengkong, Olong Pinang	Rp 200.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Desa Lori RT. 002, Kab. Paser, Tanjung Harapan	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Desa Tiwei RT 02, Kab. Paser, Long Ikis	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	RT 10, Kab. Paser, Long Ikis, Bukit Saloka	Rp 136.500.000,00

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
				Rehabilitasi Pasar	Desa Bente Tualan RT 05, Kab. Paser, Long Kali	Rp 110.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Jl. Samosir rt.04 Desa Mendik Makmur, Kab. Paser, Long Kali	Rp 100.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	RT 003, Kab. Paser, Batu Engau, Kerang	Rp 80.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Desa Petangis RT 05, Kab. Paser, Batu Engau	Rp 92.000.000,00
				Rehabilitasi Pasar	Desa Batu Kajang, RT 013, Kab. Paser, Batu Sopang	Rp 200.000.000,00
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**					**Rp 80.000.000,00**
		Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan Pemasaran SDM serta Desain Teknologi	Pelatihan Kewirausahaan	Seluruh RT di Suatang, Kab. Paser, Paser Belengkong	Rp 50.000.000,00
				Pengadaan Peralatan UKM (pengolahan Bubuk instan jahe manual)	Blok G RT 09 Desa Sawit Jaya, Kab. Paser, Long Ikis	Rp 30.000.000,00
3	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN**					**Rp 70.000.000,00**

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	RINCIAN	ALAMAT	ANGGARAN
	INDUSTRI					
		Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pelatihan Industri dan Peralatan (Pelatihan Keripik dan peralatannya)	RT.01 Rantau Bintungan, Kab. Paser, Muara Samu, Rantau Bintungan	Rp 70.000.000,00
JUMLAH						**Rp 27.620.045.200,00**